

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

(Studi Model Arah Kebijakan Berdasarkan Persepsi Sivitas Akademika, Masyarakat,
dan Pemerintah Daerah)

Ditulis Oleh :

Dr. Samsudin, M.Pd

Meddyan Heriadi, M.Pd

Agusri Fauzan, M.A.

Asti Haryati, M.Pd

**DIPA UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu**

2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, merupakan hasil transformasi kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu berdasarkan Perpres RI No. 45 Tahun 2021.¹ Perubahan atau transformasi kelembagaan ini pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan penting berdasarkan tujuan pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia. Tujuan tersebut diantaranya untuk pengembangan keilmuan dan mengatasi kekurangan

¹ Perpres 45/2021 terbit pada tanggal 21 Mei 2021 tentang perubahan bentuk kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. IAIN Bengkulu merupakan alih bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2012. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang pertama didirikan oleh pemerintah (Kementerian Agama) adalah IAIN Sunan Kalijogo di Yogyakarta pada tahun 1968 dan diikuti oleh provinsi lainnya yang memenuhi syarat sosial keagamaan Islam. Dari IAIN ini telah menghasilkan lulusan sarjana ahli dalam bidang keilmuan keagamaan Ke-Islaman yang dan keberadaannya telah dapat dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. Berdasarkan sejarah, gagasan pendirian pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Bengkulu berasal dari para tokoh Islam yang pada waktu itu sudah mendirikan perguruan tinggi agama Islam swasta seperti Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Gagasan selanjutnya para tokoh pendidikan Islam bermaksud mengembangkan, meningkatkan, dan memperluas lembaga Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang dipelopori oleh pemerintah. PTAIN yang pertama berdiri berbentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Untuk memperluas bidang kajian keilmuan dan memperluas tenaga ahli bidang keilmuan keagamaan, maka perubahan atau transformasi kelembagaan PTAIN ke bentuk baru perlu dilakukan dengan tanpa melanggar aturan perundang-undangan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) saat itu berdiri hanya pada beberapa yang hanya berdiri di beberapa kota. Lingkup pengembangan IAIN masih terbatas di beberapa kota di Jawa, diantaranya Bandung, Yogyakarta, dan Solo. Secara bertahap pemerintah mendirikan IAIN baru hingga di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk meluaskan kelembagaan dibentuklah cabang-cabang lokal jauh di kota-kota sekitarnya. Pada tahun 1997 pemerintah meresmikan cabang lokal jauh IAIN menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN. Lingkup keilmuan STAIN dan IAIN khusus pada disiplin ilmu-ilmu keagamaan Islam saja.

tenaga ahli dalam bidang ilmu agama Islam yang sangat diperlukan, baik oleh pemerintah maupun, kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan keperluan pengembangan keilmuan serta meningkatkan kualitas.² Selain beberapa tujuan di atas tujuan perubahan dan alih status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) adalah menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam secara mutlak.³

Salah satu mutu yang diharapkan masyarakat dalam memilih perguruan tinggi adalah kualitas kelembagaan dan ragam keilmuan yang ditawarkan di perguruan tinggi tersebut. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat mendaftar di perguruan tinggi Islam tampak semakin tinggi dari tahun ke tahun, baik pada program studi agama terutama program studi umum. Untuk memacu perkembangan integrasi keilmuan, maka jaringan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi atau lembaga keilmun terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang pengembangan sains dan teknologi, terus dilakukan secara intensif. Kehadiran UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pendidikan dan ikut berkontribusi dalam kemajuan

² Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang pertama didirikan oleh pemerintah (Kementerian Agama) adalah IAIN Sunan Kalijogo di Yogyakarta pada tahun 1968 dan diikuti oleh provinsi lainnya yang memenuhi syarat sosial keagamaan Islam. Dari IAIN ini telah menghasilkan lulusan sarjana ahli dalam bidang keilmuan keagamaan Ke-Islaman yang dan keberadaanya telah dapat dirasakan oleh masyarakat di Indonesia.

³ Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri. Selanjutnya dalam perkembangan PTAI maka lahirnya UIN juga diharapkan dapat berkolaborasi dengan lembaga atau perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama. Dengan demikian, kehadiran UIN dengan visi integrasi keilmuan dan peradaban, dapat memperluas dan memperluwes pemahaman pembelajar dalam mengkaji Islam yang ajarannya dengan tidak meninggalkan atau tertinggal dalam pengembangan sains dan teknologi. Hadirnya UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu juga pada dasarnya memiliki tujuan lain untuk mendukung terwujudnya Bengkulu sebagai Kota Religi dan Kota Pendidikan, sebagaimana dicita-citakan mendiang Presiden Pertama RI. Soekarno.

peradaban kelimuan dan keislaman di wilayah Bengkulu pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Saat ini UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mempunyai empat fakultas (Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Program Pasca Sarjana). Jumlah Program Studi 24 program studi untuk Strata-1 dan 5 (lima) Program Studi Program Strata-2 (Magister) dan 2 (dua) Program Studi Strata-3 (Doktor). Fakultas dan mayoritas Program Studi yang ada tersebut mengkaji ilmu keislaman dan minor khusus mengkaji keilmuan umum.

Pasca transformasi menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, secara otomatis diperlukan tindak lanjut pengembangan kapasitas kelembagaan yang sesuai dengan visi misi dan tujuan pendirian UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu⁴ sebagai berikut:

“Visi:

Menjadi Pusat Studi Islam dan Peradaban Berwawasan Kebangsaan dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.

Misi Universitas:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dalam ilmu keislaman dan sains, yang saleh, profesional, dan moderat yang berwawasan kebangsaan;
- b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional bereputasi global;
- c. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dalam membangun kehidupan sosial yang cerdas, saleh, produktif, dan sejahtera;
- d. Meningkatkan kualitas kerjasama pada tingkat nasional dan internasional dalam mendorong peningkatan daya saing lulusan; dan
- e. Memantapkan tata kelola dan kepemimpinan yang adil dalam membangun Universitas yang bersih dan berwibawa.

Tujuan Universitas:

⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

- a. Meningkatkan kualitas lulusan dalam studi keislaman dan sains yang berakhlak mulia, berakhlakul karimah, profesional, dan moderat;
- b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah bereputasi yang responsif terhadap pengembangan keilmuan dan kepentingan bangsa kebangsaan;
- c. Meningkatkan kualitas pengabdian dalam mengembangkan masyarakat yang cerdas, saleh, produktif, dan sejahtera berwawasan kebangsaan;
- d. Meningkatkan kualitas kerja sanna berskala nasional dan internasional dalam mewujudkan daya saing lulusan; dan
- e. Meningkatkan budaya birokrasi dan kepemimpinan yang adil, bersih, dan responsif.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas tersebut UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai organisasi akademik yang terintegrasi, harus ada kebijakan dalam upaya mengembangkan kapasitas kelembagaan yang harus dilakukan oleh jajaran pimpinan universitas. Pengembangan kapasitas kelembagaan tersebut di antaranya adalah mutu kelembagaan secara komprehensif: mutu akademik, mutu layanan akademik, mutu SDM, mutu sarana prasarana, mutu kerjasama, mutu lulusan, mutu publikasi, dan mutu hubungan dengan masyarakat.

Rektor sebagai pucuk pimpinan akademik tertinggi, memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan dan keputusan sebagai dasar pengembangan lembaga yang diselaraskan dengan keseimbangan sarana pendidikan yang ada, atas kepentingan sivitas akademika, kebutuhan masyarakat, dan pemangku kepentingan lain seperti Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan pengamatan secara objektif, bahwa saat ini UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sedang mulai menata dan mempersiapkan dan mencari bentuk pengembangan Universitas yang menjadi khas UIN Fatmawati Sukarno

Bengkulu. Hal ini dilakukan saat ini melalui beberapa analisis, antara lain pendekatan empiris memahami dan berusaha mengatasi segala problematika yang ada, dan pendekatan normatif untuk menjadi dasar kebijakan pimpinan. Mengingat UIN ini adalah milik masyarakat Provinsi Bengkulu, bahkan Indonesia, maka kebijakan pimpinan ke depan juga harus didasarkan atas kebutuhan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah.⁵

Berdasarkan fakta tersebut, maka beberapa hal menarik yang akan mempengaruhi perkembangan universitas dalam bentuk kebijakan Rektor dan jajaran pimpinan lainnya. Atas dasar tersebut menarik untuk menjadi objek penelitian yang sekaligus menjadi sumbangsiah bagi pimpinan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Oleh karena itu penelitian ini akan mengungkap tentang arah dan orientasi kebijakan pengembangan universitas oleh pimpinan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, keinginan atau harapan masyarakat Provinsi Bengkulu, dan Pemerintah daerah, serta harapan besar dari kementerian agama RI.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pengembangan kelembagaan UIN berdasarkan persepsi sivitas akademika, masyarakat, dan pemerintah daerah, bahkan persepsi pemerintah pusat (Menteri Agama), dan beberapa model pengembangan UIN yang secara akademik mendapatkan nilai unggul. Persepsi-persepsi tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah tawaran dan rujukan arah kebijakan oleh pimpinan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

B. Rumusan Masalah

⁵ Pidato Plt Rektor UIN Fatmawati Sukarno BengkuluBengkuluBengkulu Dr H Zulkarnain MPd, pada serahterima jabatan 2 Agustus 2021 di Aula Djamaan Nur UIN Fatmawati Sukarno BengkuluBengkuluBengkulu.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirinci ke dalam lima pertanyaan penelitian.

1. Bagaimana potret alih bentuk kelembagaan dan program pengembangan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?
2. Bagaimana persepsi Sivitas Akademika tentang arah pengembangan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?
3. Bagaimana persepsi Pemerintah Daerah dan masyarakat Bengkulu tentang arah pengembangan Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu?
4. Bagaimana persepsi lembaga pendidikan SLTA tentang arah pengembangan Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu?
5. Bagaimana kebijakan Kementerian Agama tentang arah pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Untuk memokuskan pembahasan dan batasan analisis permasalahan atas pertanyaan penelitian di atas adalah:

1. Rumusan masalah pertama, dibatasi pada deskripsi proses perubahan IAIN menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dimulai sejak munculnya gagasan Rektor dan segenap pimpinan IAIN Bengkulu (sejak tahun 2017) hingga beralihnya status menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu saat ini (2022). Deskriptifitas unit analisis difokuskan kepada hal-hal yang melatarbelakangi keinginan alih status, tujuan alih status, proses perjuangan alih status, hambatan dan tantangan alih status, serta keadaan yang mendukung

terwujudnya menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu serta kebijakan perencanaan pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu saat ini. Fokus pembahasan dan kajian ini dimulai sejak Pelaksana Tugas Rektor atau Plt Rektor hingga definitif Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Data diambil dari hasil wawancara, catatan pidato-pidato atau sambutan-sambutan Rektor, baik sebagai planning/perencanaan maupun aplikasi kebijakan yang telah dilaksanakan.

2. Fokus pembahasan dan kajian pada permasalahan kedua, adalah pendapat dan opini sivitas akademika UIN Fatmawati Sukarno tentang keinginannya arah pengembangan lembaga serta respon sivitas terhadap kebijakan pimpinan dalam program pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ke depan.
3. Fokus pembahasan dan kajian pada permasalahan ketiga adalah persepsi atau tanggapan pemerintah daerah kabupaten dalam dan/atau Provinsi Bengkulu dan masyarakat terhadap perkembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan harapannya terhadap arah pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ke depan.
4. Fokus pembahasan dan kajian pada permasalahan keempat persepsi atau tanggapan pimpinan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada dalam wilayah kabupaten dalam Provinsi Bengkulu terhadap perkembangan UIN Fatmawati Sukarno dan harapannya terhadap arah pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ke depan.

5. Fokus pembahasan dan kajian pada permasalahan kelima adalah kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama dan kementerian terkait tentang arah perubahan kelembagaan dan alih status PTKIN baik dari STAIN menjadi IAIN, maupun dari IAIN menjadi UIN.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan menemukan argumen-argumen yang komprehensif dari berbagai elemen masyarakat, pendidikan menengah atas, universitas, dan pemerintah tentang arah pengembangan kelembagaan dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Secara rinci, tujuan penelitian tersebut sebagai berikut.

Pertama, mendeskripsikan secara komprehensif keadaan lembaga UIN Fatmawati Sukarno dalam berbagai aspek dan mendeskripsikan latar belakang, tujuan, dan hal-hal lain dalam proses perubahan bentuk kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sekaligus mendeskripsikan perencanaan pengembangan universitas saat ini.

Kedua, memaparkan dan menjelaskan persepsi atau opini atau pendapat dosen, mahasiswa, dan pegawai UIN Fatmawati Sukarno tentang perubahan status lembaga saat ini dari berbagai aspek dan harapannya tentang arah pengembangan lembaga serta respon sivitas terhadap kebijakan pimpinan dalam program pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ke depan.

Ketiga, mendeskripsikan dan menjelaskan persepsi atau tanggapan pemerintah daerah kabupaten dalam Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan masyarakat, baik masyarakat umum, maupun organisasi kemasyarakatan atau keagamaan terhadap UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan harapannya terhadap arah pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ke depan.

Keempat, mendeskripsikan dan menjelaskan tentang persepsi atau tanggapan kepala sekolah/madrasah maupun pimpinan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada dalam wilayah kabupaten dalam Provinsi Bengkulu terhadap perkembangan UIN Fatmawati Sukarno dan harapannya terhadap arah pengembangan UIN Fatmawati Sukarno ke depan.

Kelima, mendeskripsikan konsep pemerintah pusat (Kementerian Agama) tentang harapannya terhadap pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia. Untuk penguatan realisasi pengembangan juga dilakukan Branch Marking ke UIN Walisongo, Universitas Negeri Semarang, UIN Sunan Kalijaga, dan UII Yogyakarta.

E. Kajian Pustaka

Berikut ini diuraikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan riset ini, yaitu:

1. Pendapat masyarakat Desa Air Selimang terhadap UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan oleh Wiwin Ines di tahun 2021. Berdasarkan

riset ini diketahui bahwa masyarakat menganggap bahwa kampus ini merupakan kampus penghasil akademisi Islam. Jika dibandingkan lagi dengan riset yang akan dilaksanakan ini tampak keduanya sama-sama berfokus pada persepsi masyarakat terhadap UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Namun, kelebihan dari riset ini nantinya selain persepsi, riset ini akan focus pada aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Tidak hanya itu, jika penelitian di atas hanya berdasarkan sudut pandang masyarakat, maka penelitian akan berbasis kaca mata dari masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga umum.

2. Usaha Peningkatan Kualitas Kampus UNISBA berdasarkan pendapat masyarakat Bandung. Riset ini ditulis oleh Aliah dan Riani di tahun 2013. Dari riset ini diketahui bahwa masyarakat menginginkan peningkatan akreditasi pada kampus ini. Selain itu, peningkatan kualitas layanan adalah menjadi harapan masyarakat. Jika dibandingkan dengan proposal penelitian ini maka, keduanya memang sama-sama membahas persepsi masyarakat yang berupa harapan. Hanya saja, objek kedua penelitian ini tetaplah berbeda yaitu UNISBA dan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Pendapat masyarakat Padang Garugur mengenai IAIN Padang Sidempuan. Riset ini ditulis oleh Pohan di tahun 2019. Hasil risetnya yaitu masyarakat memiliki persepsi terhadap kampus berupa daya tarik kampus yaitu asrama selama satu tahun. Jika dibandingkan dengan proposal ini. keduanya sama-sama menyoroti persepsi masyarakat. Hanya saja pada proposal ini, selain masyarakat, pemda, dan civitas akademika juga disorot. selain itu, objek

penelitian juga berbeda. Jika riset di atas menyoroiti persepsi masyarakat terhadap kampus IAIN Padang Sidampuan, maka proposal ini menyoroiti persepsi serta aspirasi masyarakat untuk kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

F. Kerangka Teori

1. Teori Persepsi

Menurut Peter bahwa persepsi merupakan proses observasi dari luar mengenai sehubungan dengan pemahaman, iidentifikasi dari suatu objek⁶. Selain itu menurut pandangan psikologi komtemporer bahwa persepsi itu lebih bersifat interfensi. Di mana hal ini akan menjadi berbeda disetiap refrensi. Pendapat lainnya dikemukakan oleh P Chaplin bahwa persepsi merupakan proses mengenali objek dengan pancaindera yang sifatnya sistematis⁷. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi (sensory stimuli)⁸. Jadi berdasarkan beberapa pendapat di atas persepsi merupakan proses pengenalan suatu objek lewat serangkaian pengamatan yang memanfaatkan pancaindera.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi persepsi antara lain: a). Minat, di mana rendah tingginya minat seseorang, akan menyebabkan tinggi

⁶ Peter, J.P dan Jerry C.O. 2017. Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran (edisi 9). Jakarta: Salemba Empat, hlm. 39

⁷ J.P Chaplin, Kamus Besar Psikologi, penerjemah: Kartini Kartono, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 358.

⁸ Jalaluddin Rakhmat, psikologi komunikasi, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2013), h.

rendahnya juga persepsinya; b). Kepentingan, yaitu kepekaan akan suatu objek akan dipengaruhi oleh kepentingan tersebut. c). Kebiasaan, di mana jika seseorang terbiasa merasakan suatu objek, maka persepsinya akan semakin terbentuk. ; d). Kecendrungan, di mana seseorang akan memiliki persepsi yang memiliki kecendrungan tertentu, meskipun objek yang dirasakannya sifatnya bervariasi⁹.

Suatu perguruan tinggi tidak akan lepas dari kebijakan yang bersumber dari model kepemimpinan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dimiyati¹⁰ bahwa keputusan atau kebijakan sangat dipengaruhi oleh seorang pemimpin. Pengambilan keputusan atau kebijakan juga merupakan cerminan dari sifat seorang pemimpin.

2. Teori Kepemimpinan

Veithzal menyatakan bahwa hal yang mempengaruhi gaya kepemimpinan antara lain: a.) Kepimpinan yang berkarakter melayani. b). Karakter kepemimpinan yang sifatnya mau mendengarkan pendapat, lalu melakukan perbaikan kinerja; c). Kebiasaan berorganisasi yang disiplin.¹¹

Ardiansyah dan Awaloedin¹² (2021:39) membagi public kepemimpinan menjadi dua jenis, yaitu: a). Kepemimpinan transaksional, yaitu pola kepemimpinan yang berusaha memotivasi bawahannya lewat *reward* dan *punishment*. Lewat dua hal ini, reward atau hadiah pastinya akan memberikan

⁹ Peter, J.P dan Jerry C.O. 2017. Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran (edisi 9). Jakarta: Salemba Empat., hlm. 39

¹⁰ Dimiyati, A. Hamdan.2014. Model Kepemimpinan Dan Sistem Pengambilan Keputusan. (Bandung : Pustaka Setia, hlm. 39

¹¹ Veithzal, Rivai. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hal 34

¹²Ardiansyah, Tedy & Awaloedin, Dipa Teruna. 2021. Model Kepemimpinan Tepat Dalam Mempengaruhi Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Di Indonesia. Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021, hlm. 39

gairah untuk semangat bekerja, sementara punishment atau hukuman akan menciptakan rasa takut dalam memberikan pelayanan yang buruk; b). Kepemimpinan Transformasional yaitu kepemimpinan yang berusaha mengevaluasi semua kinerja bawahannya dan mampu mengidentifikasi segala perubahan yang akan terjadi di masa depan.

3. Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah aturan resmi yang dibuat suatu organisasi yang harus dipatuhi oleh siapapun yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan kelangsungan hidup suatu lembaga (Arwildayanto, 2018:6)¹³. Sementara itu, Bakry¹⁴ (2010:2) menyatakan bahwa kebijakan merupakan keputusan yang dipakai untuk memajemen sisetem keuangan, SDM, dan SDA untuk kepentingan bersama. Jadi berdasarkan kedua pendapat ini kebijakan merupakan usaha sadar dari seorang pemimpin untuk membuat keputusan atau tindakan dengan tujuan untuk menyeimbangkan kestabilan suatu lembaga.

Lebih lanjut William N (Arwidayanto (2018:9) mengungkapkan bahwa kebijakan memiliki pola analisis. Analisis tersebut antara lain: a). Pendekatan empiris yang berusaha mengatasi segala problematika yang ada ; b). Evaluatif yaitu berusaha menemukan makna atas objeknya ; c). Pendekatan normatif di mana terdapat usaha untuk bertindak yang didasari oleh kebijakan.¹⁵

¹³ Arwildayanto. 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan. CV CENDEKIA PRESS, Hlm.6

¹⁴ Bakry, Noor Ms. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 2

¹⁵ Arwildayanto. 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan. CV CENDEKIA PRESS, Hlm.6

4. Teori Revolusi Industri

Revolusi Industri 4.0 merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perguruan tinggi dalam penentu kebijakan¹⁶. Pada tahap ini lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu untuk mengusai, menganalisis, serta menggunakan system informasi. Hal ini tentunya layak untuk dijadikan wacana kebijakan di perguruan tinggi saat ini. Salah satu kebijakan dari pemerintah yaitu kampus merdeka belajar. Dimana pada kebijakan ini terdiri dari beberapa usaha yaitu: belajar di luar prodi sebanyak tiga semester, menciptakan prodi baru, melaksanakan sstem akreditasi, dan perguruan tinggi negeri dipayungi oleh badan hukum.

Berdasarkan penelitian dari Rohyati¹⁷ bahwa beberapa alasan siswa memilih perguruan tinggi antara lain: kecocokan minat, Biaya pendidikan yang dianggap layak, kemudahan akses kampus, serta menjadi buah bibir masyarakat pada umumnya. Hal ini tentunya merupakan bagian aspirasi dari masyarakat tentang bagaimana kualitas pelayanan suatu perguruan tinggi seharusnya. Apalagi menjadi pembicaraan orang banyak. Hal ini tentu akan menciptakan persepsi masyarakat akan kualitas suatu pendidikan.

5. Teori Perubahan Sosial

¹⁶ Purba,Sukarman. 2021. Analisis Kebijakan Pendidikan. Yayasan Menulis Kita hlm. 102

¹⁷ *Rochyati. 2015. Faktor yang Paling Mempengaruhi Siswa Atas Pilihan Perguruan Tinggi : Sebuah Penelitian Eksploratori. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya (JMBS) <https://doi.org/10.29259/jmbs.v13i4.3146>*

Perubahan sosial¹⁸ adalah suatu variasi dari cara hidup yang disebabkan baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, kompetisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi dan akulturasi budaya dan perubahan-perubahan baru dalam masyarakat.¹⁹ Beberapa kondisi primer yang perubahannya akan dapat mempengaruhi kondisi-kondisi lain dalam masyarakat adalah kondisi ekonomis, teknologis, geografis, politis maupun edukatis.²⁰ Para ilmuwan membedakan perubahan dalam masyarakat menjadi tiga jenis, yakni perubahan peradaban, perubahan kebudayaan, dan perubahan sosial. Perubahan peradaban biasanya dikaitkan dengan perubahan unsur-unsur yang lebih bersifat fisik, seperti penggunaan mesin dan sarana komunikasi. Perubahan budaya menyangkut aspek ruhaniah seperti keyakinan, nilai-nilai, penghayatan seni dan ilmu pengetahuan, norma hubungan antara anak dengan orang tua, murid dengan guru dan bawahan dengan atasan dan sejenisnya. Sedangkan perubahan sosial menurut Selo Soemardjan menunjuk pada perubahan aspek-aspek hubungan sosial, pranata-pranata masyarakat, dan kelompok.²¹

Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan merupakan bagian dari proses yang sama. Meski demikian, dapat dibedakan secara konseptual.²² Woods menyatakan; *'Where culture may be define as prescriptions, and social*

¹⁸ Perubahan, asal kata ubah, berubah, menjadi lain (berbeda) dari semula, berganti (pikiran, haluan, arah, dsb.). Perubahan adalah hal (keadaan) berubah, peralihan, dan pertukaran. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 1094. Yang dimaksud perubahan dalam penelitian ini adalah perubahan situasi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan pada masyarakat Melayu Kota Bengkulu.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi...*, hlm. 97.

²⁰ *Ibid.* hlm. 98.

²¹ Mudjia Raharjo, *Sosiologi Pedesaan; Studi Perubahan Sosial*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 26.

²² CM. Wood, *Culture Change*, (Los Angeles: Brown Company Publisher, 1975), p. 8.

interaction which occur. Social change refers to a modification in the structure or function of the social system'.²³ Budaya didefinisikan sebagai deskripsi untuk hidup masyarakat yang mengacu pada suatu kumpulan terorganisir dari manusia yang mengikuti preskripsi tersebut dan mengikuti sistem sosial dari pola-pola interaksi sosial yang terjadi. Sedangkan perubahan sosial mengacu pada modifikasi dalam struktur atau fungsi dari sistem sosial yang ada. Analisis tentang perbedaan antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan juga dikemukakan oleh Horton dan Hunt,²⁴ perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur sosial dan hubungan sosial, sedangkan perubahan kebudayaan mencakup perubahan dalam segi-segi budaya masyarakat.

6. Teori Asas Pendidikan Islam

Menurut Imam al-Ghazali, tujuan lembaga pendidikan Islam ada tiga; *pertama*, mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan saja, *kedua*, pembentukan akhlak, dan *ketiga*, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁵ Untuk itu diperlukan pelaksanaan pendidikan dengan tiga asas pendidikan, yaitu riyadhah, nasehat, dan memberikan perlindungan.²⁶

²³ *Ibid.* p. 9

²⁴ P.B. Horton, dan C.L. Hunt, *Sosiologi, Jilid II*, Terj. Amiruddin Ram, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 280.

²⁵ Disarikan dari Bab ke-1 Ilmu dan Belajar (Etika belajar dan mengajar, tugas-tugas pengajar yang membimbing), lihat Imam Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Lc., (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 28-34. Lihat juga Imam Al-Ghazali, *Mukhtasyar Ihya' 'Ulumuddin*, Terj. Abu Madyan Al-Qurtubi, (Depok: Keira Publishing, 2014), hlm. 14-19. Lihat juga Heri Gunawan, *Pendidikan Islam; Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), hlm. 325. Lihat juga Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 57-59.

²⁶ Heri Gunawan, *Pendidikan...*, hlm. 336. Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran...*, hlm. 96-104. Imam Al-Ghazali, *Ibid.* Dan Imam Al-Ghazali, *Ibid.*

Pertama, asas pemberian latihan-latihan (*riyadhah*). Kegiatan pemberian latihan kepada anak harus sedini mungkin, karena hal itu akan memiliki pengaruh yang sangat positif dalam perkembangan anak selanjutnya. Asas ini bertujuan memberikan keterampilan (psikomotorik).

Kedua, pemberian pengertian dan nasehat. Al-Ghazali berkata: “Apabila pertumbuhan anak itu baik, maka nasehat-nasehat itu akan meresap, berpengaruh, berguna, dan teguh di hatinya, seperti teguhnya ukiran pada batu pada saat dewasa nanti”. Nasehat-nasehat itu diberikan kepada anak agar mendapat pengertian tentang perbuatan dan perilakunya sehari-hari, sehingga ketika dewasa nanti menjadi teguh dan kuat kepribadinya. Asas ini bertujuan membentuk kekuatan intelektual (kognitif). *Ketiga*, memberikan perlindungan kepada anak dari pergaulan yang buruk. Asas ini bertujuan memberikan komitmen nilai moral anak.

Tiga asas tersebut berimplikasi pada tiga fungsi lembaga pendidikan Islam. Asas pertama melahirkan fungsi pendidikan untuk mengembangkan potensi anak didik dan menciptakan keterampilan melalui inovasi. Asas kedua melahirkan fungsi pendidikan untuk mengembangkan potensi intelektual dan pembentukan kepribadian anak. Asas ketiga melahirkan lembaga pendidikan Islam berfungsi sebagai perlindungan dan integrasi sosial.²⁷ Dalam konteks respons lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan Islam terhadap fenomena perubahan sosial dan fungsi keluarga pada masyarakat Melayu muslim

²⁷ Hal ini sebagaimana teori tentang fungsi pendidikan yang dikemukakan David Popenoe yang dikutip Vembriarto, bahwa fungsi pendidikan ada empat yaitu: transmisi kebudayaan masyarakat, menolong individu memilih dan melakukan peranan sosialnya, menjamin integrasi sosial, dan sumber inovasi sosial. Lihat Vembriarto S.T., *Sosiologi Pendidikan*, (Yogyakarta, Gunung Agung, 1990), hlm. 80.

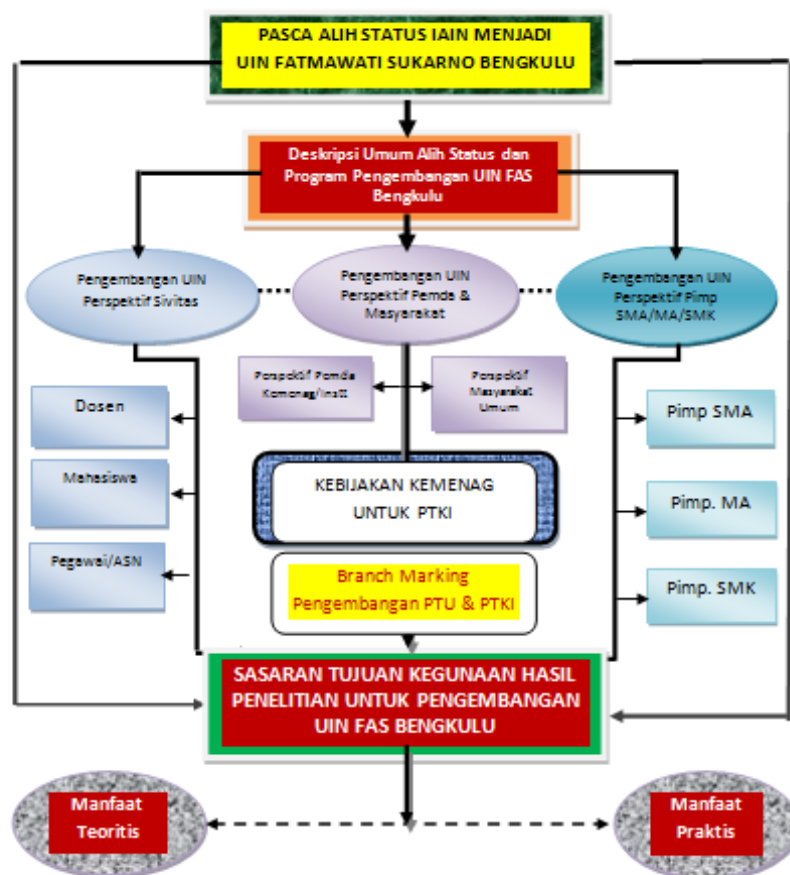
Kota Bengkulu, data dianalisis dengan teori fungsi lembaga sosial dan teori asas pendidikan Islam.

G. Kerangka Konseptual Penelitian

Pasca menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Rektor dan jajaran pimpinan memiliki kebijakan arah pengembangan (yang saat ini sedang dihimpun secara maraton dalam Rencana Induk Pengembangan, Renstra, dan Renop). Sementara itu penelitian ini juga menghimpun data tentang persepsi arah pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dari berbagai elemen masyarakat; Sivitas Akademika, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan Menengah Atas, Lembaga Sosial Keagamaan dan masyarakat sendiri.) Data persepsi tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan kajian dan sumbangsih dalam mengambil kebijakan.

Alur penelitian ini dapat dipahami melalui peta konseptual penelitian di bawah ini.

Gambar 3
Skema Kerangka Konseptual Penelitian



H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif dengan pendekatan sosiologis. Penelitian dilakukan di beberapa tempat. Pertama di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan subjek penelitian pimpinan universitas, dosen, pegawai dan mahasiswa, serta pemangku kepegangan lainnya seperti securiti dan petugas kebersihan. Kedua, pihak yang mewakili pemerintah kabupaten dalam Provinsi Bengkulu, misalnya kepala bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag

Kesra) dan atau yang mewakili. Ketiga, di SMA dan MA, SMK di beberapa kabupaten dalam Provinsi Bengkulu. Keempat, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Kelima masyarakat umum dan lembaga organisasi kemasyarakatan dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

Sumber data penelitian dapat dikelompokkan beberapa subjek tertentu sesuai lokasi penelitian. Di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Bengkulu Bengkulu dengan subjek penelitian atau sumber data penelitian adalah rektor, para wakil Rektor, Kepala Biro AUPK, Koordinator Perencanaan dan Keuangan. Sedangkan dari lingkungan sivitas akademika yang menjadi sumber data adalah dosen, pegawai dan mahasiswa, securiti, dan outsursing UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu .

Sumber data lainnya adalah kepala bagian atau kasubag Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabag Kesra Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sumber data penelitian di masyarakat adalah, orangtua/wali mahasiswa, kepala desa, Camat, dan pimpinan lembaga kemasyarakatan dan organisasi keagamaan yang dipilih secara acak sesuai tujuan dalam provinsi Bengkulu.

Sumber data penelitian dari lingkungan lembaga pendidikan formal di SMA dan MA, SMK di beberapa kabupaten dalam Provinsi Bengkulu adalah para kepala sekolah atau kepala madrasah atau wakil kepala atau guru pada sekolah/madrasah tersebut.

Sebagai penguatan studi banding dalam pengembangan universitas sumber data Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (UIN Semarang), Universitas Negeri Semarang (UNES), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (UII Yogyakarta), dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Yogyakarta) dan Bagian Pengembangan Akademik Subdit Ketenagaan Diktis Kemenag RI di Jakarta.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Pedoman penelitian dalam pelaksanaan dikembangkan sesuai dengan tuntutan realitas tempat penelitian untuk mendapatkan data yang tepat, akurat dan lengkap yang dapat menjawab beberapa pertanyaan tentang pengembangan kebijakan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Wawancara yang peneliti lakukan ada beberapa model. Wawancara dengan responden secara langsung dan tidak berterus terang kalo peneliti sedang meminta penilaian dan persepsi tentang UIN Fatmawati Sukarno BengkuluBengkuluBengkulu. Peneliti datang sebagai tamu untuk ngobrol santai dengan kapasitas sebagai ketua Lembaga Penjaminan Mutu hadir untuk meminta saran-saran dari berbagai elemen dan stake holder tentang UIN Fatmawati Sukarno BengkuluBengkuluBengkulu ke depan. Di sela-sela obrolan tersebut maka terdapat penilaian dan persepsi dari responden tentang keadaan UIN Bengkulu saat ini. Model pengumpulan data wawancara seperti ini dirasakan lebih mendapat data yang jujur dari responden.

Metode analisis data yang digunakan dengan Analisis Model Miles dan Huberman (1992) yaitu dengan cara : 1) Pengumpulan data; 2) Reduksi data; 3)

Penyajian data, dan; 4) Penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan terhadap sivitas akademika UIN Fatmawati Sukarno BengkuluBengkuluBengkulu, Masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Penelitian ini berusaha menghasilkan suatu model arah pengembangan kebijakan berdasarkan persepsi sivitas akademika, masyarakat dan pemerintah daerah peningkatan kapasitas kelembagaan UIN Fatmawati Sukarno BengkuluBengkuluBengkulu. Wawancara, Kuesioner dan *Fokus Group Discussion* masih dilakukan saat menyusun model arah pengembangan kebijakan untuk mendapatkan masukan balik (*feed back*) sehingga diperoleh rancangan awal arah model pengembangan kapasitas kelembagaan.

Tabel. 1
Matriks Pengumpulan Data

Tujuan	Data Primer		Data Skunder	
	Wawancara	Survei	Dokumen ntasi	
Mencari data berkenaan dengan persepsi tentang arah kebijakan pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Perencanaan model arah	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Wawancara • Subtansi : seluruh informasi berkaitan dengan persepsi tentang arah kebijakan pengembangan UIN Bengkulu, Perencanaan model arah kebijakan pengembangan UIN Bengkulu Informan : Sivitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Alat : Kuisisioner • Subtansi : Berkenaan dengan persepsi tentang arah kebijakan pengembangan UIN Bengkulu, Perencanaan model arah kebijakan pengembangan UIN 	<ul style="list-style-type: none"> • Alat : Foto • Cara Kerja : catat dan foto kegiatan sebagai bukti fisik 	<ul style="list-style-type: none"> • Focus Group Discussin (FGD) • Subtansi : data-data penunjang berkenaan dengan persepsi tentang arah kebijakan pengembangan UIN Bengkulu, Perencanaan

kebijakan pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	Mahasiswa, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Pemilihan Informan : Purposif dan Snowball	Bengkulu • Digunakan sebagai data penunjang • Sampel : purposif	model arah kebijakan pengembangan UIN Bengkulu • Sumber : sivitas akademika, Masyarakat, Pemerintah daerah
--	--	---	---

1. Alih Perubahan dan Pengembangan

Membahas proses perubahan alih status kelembagaan dan program pengembangan kelembagaan, ada tiga aspek yang penting dipertimbangkan, yaitu tempat, objek, dan waktu.²⁸ Objek utama dan unit analisis penelitian ini adalah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dari sejak proses perjuangan meningkatkan status mulai dari tahun 2018 (beralih status tahun 2021) hingga program pengembangan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2025. Pertimbangan akademis membatasi kurun waktu tersebut adalah, pertama, masa perjuangan pimpinan IAIN Bengkulu tahun 2017-2021 dalam perjuangan perubahan menjadi (beralih status tahun 2021 dari IAIN

²⁸ Dalam perspektif sosiologis, perubahan sosial merupakan sebuah isu yang tidak akan pernah selesai untuk diperdebatkan (karena akan tetap dan terus terjadi dan berpengaruh secara signifikan terhadap hampir semua aspek dalam sistem sosial, termasuk institusi keluarga). Perubahan sosial menyangkut kajian ilmu sosial yang meliputi tiga dimensi waktu yang berbeda; dulu (*past*), sekarang (*present*), dan masa akan datang (*future*). Lihat Nanang Martono, *Sosiologi...*, hlm 3.

Bengkulu). Kedua, masa kepemimpinan Rektor UIN (beralih status tahun 2021 hingga masa bhakti tahun 2025).²⁹

2. Jenis, dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif terdapat tiga aspek penting, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.³⁰ Dalam metode kualitatif, pengamatan mendalam terhadap situasi sosial ketiga aspek tersebut dilakukan dengan secara cermat bahkan harus ada yang berulang ke lokasi penelitian untuk melengkapi data. Analisa data penelitian dilakukan dengan pendekatan konseptual program pengembangan PTKI dari pemerintah pusat sebagai bentuk ideal, pendekatan sosiologis dengan mengedepankan dinamisitas pendapat sivitas, masarakat, pemerintah Bengkulu, dan pendekatan teoritis.

3. Wilayah dan Subjek Penelitian

Mengingat keluasan pengambilan data tentang persepsi masyarakat dan pemerintah daerah Bengkulu yang luas dan kompleks, penelitian lebih memusatkan pengambilan data pada lembaga berpengaruh, seperti perorangan/pejabat dengan kapasitas sebagai kepala desa, pimpinan madrasah,

²⁹ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 Tanggal 21 Mei 2021, masa kepemimpinan Rektor IAIN Bengkulu Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M. Ag., MH (masa bhakti 2017-2021).

³⁰ James Spradley, *The Ethnographic Interview, (Metode Etnografi)*, Terj. Misbah Zulfa Elizabeth, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm.175-249.

SMK, SMA, Kemenag kabupaten, dan KUA. Sedangkan pemerintah daerah Bengkulu difokuskan pada pejabat Pemda Kota/Kota di Provinsi Bengkulu.

4. Subjek Informan Penelitian

Dalam menentukan subjek informan penelitian, peneliti melakukan secara cermat guna menemukan informan yang tepat dan data yang akurat/valid. Selama masa prapenelitian, penulis telah memiliki informasi awal dari sivitas akademika, masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2
Jumlah Informan Penelitian

Sivitas Akademika	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	Lembaga Pendidikan Menengah Atas	UIN/UN/UIS/ Kemenag RI
15 dosen	5 Pemda	5 MAN	2 PTKIN
90 mahasis	5 Kemenag	5 SMA	1 Univ. swasta
1 peg	1 KUA	5 SMK	1 PTN
	2 Kades		1 Kemenag
	1 MUI		

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibedakan dalam dua jenis, yaitu data primer dan skunder. Data primer digunakan untuk menjawab fokus analisis penelitian, data sekunder digunakan untuk menambah penjelasan tentang kondisi umum lokasi penelitian dan tema-tema kebijakan pengembangan yang berhubungan dengan program pengembangan UIN Bengkulu. Strategi pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (*indept-interview*).

Adapun data konkrit diperoleh melalui pengamatan partisipatif sivitas akademika dan berulang-ulang guna mengetahui ruang aktifitas yang mengindikasikan pelaksanaan program UIN Bengkulu ke depan, dan kontekstualitasnya dengan arah pengembangan UIN Bengkulu. Dalam teknik ini peneliti mengikuti berbagai hasil rapat-rapat pimpinan. Wawancara peneliti lakukan kepada beberapa informan penelitian agar mendapatkan data secara baik. Untuk menjaga otentitas data penelitian, penulis mengacu kepada penggunaan standar keabsahan data yang disampaikan faisal yaitu: 1) kepercayaan (*credibility*), 2) keteralihan (*transferability*), 3) dapat dipertanggungjawabkan (*dependability*), dan 4) penegasan atau kepastian (*conformability*)³¹.

6. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis dalam tiga proses kegiatan pokok, sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data, yaitu reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.³² Data terpilih direduksi, disederhanakan, dan

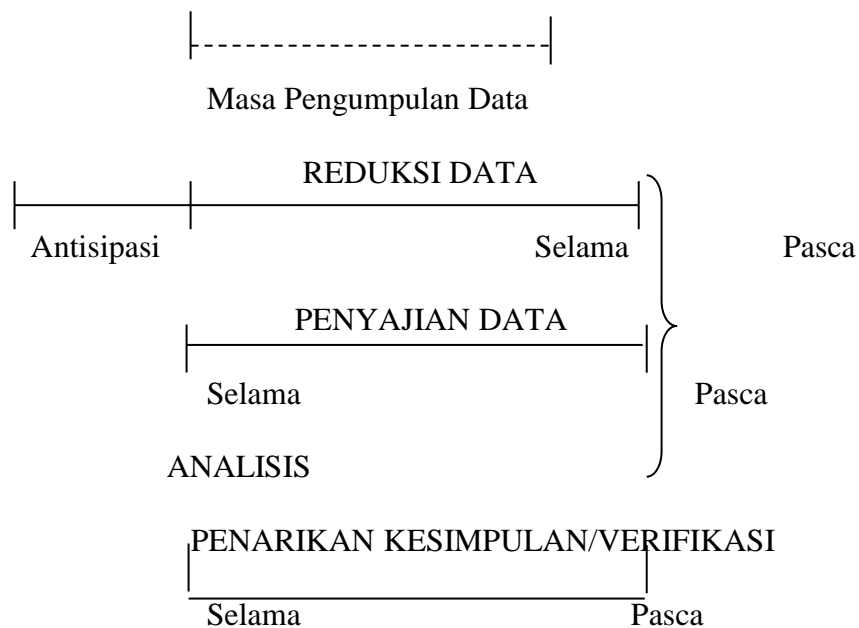
³¹ Lihat Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, (Malang: Yayasan Asih Asuh, 1990). Juga dapat dilihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 270-277.

³² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: (Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohandi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 18-20.

ditransformasikan dari data kasar. Pada saat menyajikan data, dilakukan seleksi sekumpulan informasi yang dapat memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Untuk memperoleh tema penelitian, dilakukan analisis domain, taksonomi, analisis komponensial, dan analisis untuk menemukan tema budaya.³³

Gambar 4

Skematika Analisis Data Penelitian: Model Alir³⁴

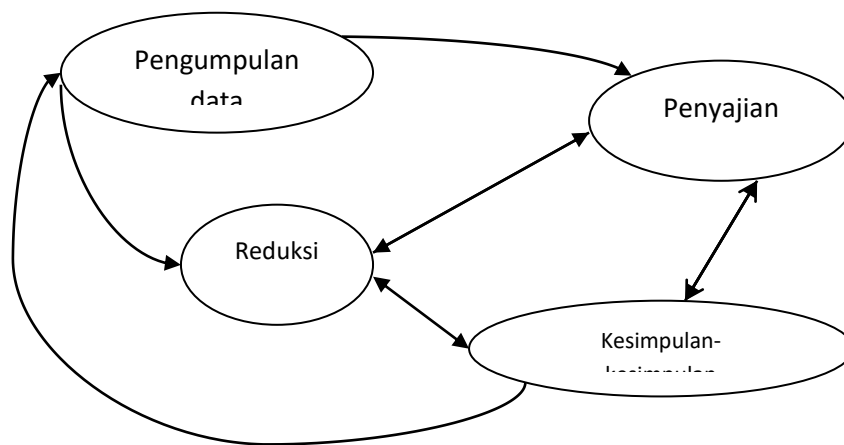


³³ James Spradley, *The Ethnographic...*, p.175-249.

³⁴ Matthew B. Miles, *Qualitative...*, p. 19.

Gambar 5

Skematika Analisis Data Penelitian: Model Interaktif³⁵



Dalam menganalisis data, dalam proses mereduksi data penulis melakukan pemilihan dan pemilahan data, memusatkan perhatian data yang utama serta menyederhanakan data, mengabstrakkan dan mentransformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Selanjutnya penulis menyajikan data sesuai dengan hasil analisis tema. Penyajian data adalah sekumpulan informasi

³⁵ *Ibid.*, p. 20

yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kesimpulan-kesimpulan yang telah dikonsepsi, selanjutnya dilakukan diverifikasi ulang selama penelitian berlangsung, sehingga makna-makna yang muncul dari data dapat diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.

Untuk lebih memahami prosedur metode penelitian yang penulis lakukan untuk dalam penelitian ini, berikut disajikan reduksi operasional penelitian dalam

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum penelitian ini menjelaskan tentang arah pengembangan kelembagaan UIN Fatmawati Sukarno BengkuluBengkuluBengkulu ke depan berdasarkan kebijakan pimpinan universitas saat ini, berdasarkan persepsi dan harapan beberapa elemen sosial, diantaranya persepsi sivitas akademika, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Dalam mendeskripsikan secara komprehensif dapat dibagi dalam beberapa bab dengan unit analisis yang berbeda dan saling terkait. Setiap bab membahas tema pokok yang berbeda dan memiliki kausalitas dengan tema yang dibahas dalam bab –bab selanjutnya lainnya. Secara keseluruhan bab adalah kesatuan konstruksi analisis kajian yang saling menjelaskan antar tema yang saling melengkapi dan hubungan sebab akibat, dan saling melengkapi secara kolaboratif.

Bab pertama, Pendahuluan. Merupakan pokok bahasan yang menjelaskan tentang alasan pentingnya dilaksanakannya penelitian ini serta bagaimana penelitian ini dilakukan. Hubungan antar sub pokok bahasan dalam bab tersebut adalah saling melengkapi dan menjelaskan secara rasional. Bab kedua, sejarah

perkembangan pendidikan tinggi keagamaan Islam Negeri di Bengkulu, mendeskripsikan tentang sejarah perkembangan berdirinya Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Bengkulu dari masa ke masa hingga menjadi UIN Bengkulu saat ini, dan penjelasan khusus proses alih status menjadi UIN Bengkulu. Paparan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum deskripsi unisitas perjuangan perubahan PTKI menjadi signifikan bagi masyarakat. Hubungan dengan bab sebelumnya adalah sebagai penjelasan dasar tentang perjalanan sejarah perjuangan UIN Bengkulu.

Bab ketiga, deskripsi umum dan kebijakan pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, mendeskripsikan tentang keadaan umum UIN Bengkulu saat ini dan program arah pengembangan UIN Bengkulu. Hubungan dengan bab sebelumnya adalah sebagai penjelasan tentang kebijakan arah pengembangan UIN Bengkulu oleh Rektor saat ini.

Bab keempat, persepsi sivitas akademika tentang arah pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian kedua, yaitu deskripsi tentang persepsi sivitas akademika terhadap kebijakan pimpinan dan harapan pengembangan UIN Bengkulu ke depan. Bab kelima, persepsi pemerintah daerah dan masyarakat tentang arah pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian ketiga, yaitu deskripsi tentang persepsi pemerintah daerah dan masyarakat terhadap kebijakan pimpinan dan harapan pengembangan UIN Bengkulu.

Bab keenam, persepsi lembaga pendidikan menengah atas dan sederajat tentang arah pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian keempat, yaitu deskripsi tentang persepsi lembaga pendidikan menengah tingkat atas terhadap kebijakan pimpinan dan harapan pengembangan UIN Bengkulu ke depan. Bab ketujuh, Kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Agama) tentang arah pengembangan PTKI, merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian kelima, yaitu deskripsi tentang program pemerintah pusat (kemenag) tentang kebijakan PTKIN di Indonesia dan hasil studi benchmarking ke beberapa PTKI dan PTN. Bab kedelapan, kesimpulan dan saran/rekomendasi. Pada bab ini hasil penelitian diakumulasi secara praktis dan mendeskripsikan tentang signifikannya hal-hal penting untuk disampaikan kepada pimpinan dan pihak terkait di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.



BAB II
SEJARAH PERKEMBANGAN
PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKI)
DI BENGKULU

A. Deskripsi Umum Tentang Bengkulu

Provinsi Bengkulu terletak memanjang di daerah Pesisir Pantai Samudra Hindia dari Utara (perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat) sampai ke Selatan (hingga perbatasan dengan Provinsi Lampung). Disebelah Timur terdapat Bukit Barisan dan Samudera Hindia di bagian Barat. Luas wilayah mencapai 1.978.870 hektar atau 19.788,7 kilometer persegi. Secara astronomis terletak pada $2^{\circ} 16''$, $3^{\circ} 31''$ LS dan $101^{\circ} 01''$ dan $103^{\circ} 41''$ Bujur Timur. Cuaca siang hari pada umumnya panas, dikarenakan adanya angin laut yang menghembus ke daerah rendah, dan pada malam hari udara cenderung dingin yang disebabkan oleh adanya angin darat. Topografi sepanjang bagian tengah dari Selatan ke Utara, berbentuk pegunungan Bukit Barisan, dan variasi dataran rendah dan tinggi yang fluktuatif.

Berdasarkan sejarah, Bengkulu beridiri sebagai bentuk hasil perjuangan masyarakat Bengkulu selama 30 tahun dan menunjukkan hasilnya ketika diawali terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1965 tanggal 16 November 1965 tentang Penghapusan Daerah Karesidenan dan Kawedanan. Selanjutnya disusul terbit Undang Undang Nomor: 9/1967 jo PP No. 20/ 1968 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 20/1968, tanggal 18 November 1968 tentang Terbentuknya Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu resmi sebagai

Provinsi ke-26. Ali Amin, SH, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Selatan ditunjuk Presiden menjadi Gubernur pertama pertama Bengkulu.

Saat terbentuknya, Provinsi Bengkulu terdapat beberapa Kabupaten/kota, diantaranya Kotamadya Bengkulu (Ibukota Provinsi Bengkulu), Kabupaten Rejang Lebong (ibukota di Kota Curup), Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota di Kota Manna), dan Kabupaten Bengkulu Utara (sementara waktu itu juga ibukota di Kotamadya Bengkulu). Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara dari Kotamadya Bengkulu ke Kota Argamakmur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976, dan diresmikan 8 Oktober 1976.

Di era reformasi tahun 1998, berdasarkan Undang Undang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran kabupaten juga berpengaruh pada bertambahnya kecamatan, desa/kelurahan. Pemekaran wilayah dilakukan, dari empat kabupaten menjadi sembilan kabupaten, dan satu kota definitive, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Kabupaten/Kota dalam Otonomi Provinsi Bengkulu

Nomor	Kabupaten Pemekaran	Jumlah Kabupaten Sebelum Otonomi Daerah
1	Bengkulu Utara	Bengkulu Utara
2	Mukomuko (2003)	
3	Bengkulu Tengah (2008)	
4	Rejang Lebong	Rejang Lebong

5	Lebong (2005)	
6	Kepahyang (2005)	
7	Bengkulu Selatan	Bengkulu Selatan
8	Kaur (2004)	
9	Seluma (2004)	
10	Kota Bengkulu	Kotamadya Bengkulu

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2011*, (Bengkulu: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2011), hlm. 52-53.

Provinsi Bengkulu sampai saat ini dipimpin beberapa gubernur:

1. M. Ali Amin, SH (1968-1979) daerah asal Palembang,
2. R. Soeprapto, BA, (dua Repelita 1979-1989), asal Kabupaten Nganjuk Jawa Timur,
3. Drs. H. Razie Yachya (1989-1994), asal dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
4. Aziz Ahmad, SH, (1994-1999), asal Mukomuko Provinsi Bengkulu;
5. Ir. H. Hasan Zen, (1999-2004) asal Kabupaten Lahat Sumatera Selatan,
6. Agusrin M. Najamuddin, ST, (2004-2010) asal Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,
7. H. Junaidi Hamzah, M. Pd, (2011-2015), asal Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu,
8. H. Ridwan Mukti, SH (2015-2016), asal dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan.
9. H. Rohidin Mersyah (2018-2020 & 2020-sekarang) berasal dari Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.

Jumlah penduduk Bengkulu pada tahun 2020 mencapai 2,1 juta jiwa. Keadaan angka pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu antara tahun 2015-2020 rata-rata 1,49 pertahun. Jumlah penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*), laki-laki 51,78% dan perempuan 49,22%.

Secara geografis, Kota Bengkulu terletak di sepanjang Pesisir Pantai Samudera Hindia dengan luas wilayah 151,7 km². Secara astronomis, terletak pada 3° 45'-30° 59' Lintang Selatan dan 102° 14'-02° 22' Bujur Timur. Kota Bengkulu³⁶ dibentuk pada 17 Maret 1719. Tahun 2022 Kota Bengkulu sudah berusia 302 tahun.³⁷ Ketinggian daratan antara 0-40 meter di atas permukaan laut (DPL). Topografi tanah bergelombang mencapai 60%, selebihnya merupakan bidang datar. Demikian juga dengan lingkungan perumahan penduduk yang nampak kurang teratur karena menyesuaikan kondisi kedataran tanah. Kota Bengkulu berbatasan langsung dengan 2 (dua) kabupaten, yakni Kabupaten Seluma di sebelah Selatan, dan Kabupaten Bengkulu Tengah di sebelah Timur dan Utara. Di bagian Barat berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Jumlah kecamatan dan kelurahan dalam Kota Bengkulu, sepanjang era reformasi mengalami penambahan (pemekaran). Kota Bengkulu terdiri 9

³⁶ Berdasarkan catatan sejarah, nama Bengkulu berasal dari kata *Bangkai di hulu, Empang ke Hulu* yang erat dengan peristiwa peperangan di masa Kerajaan Muara Bangkahulu. Koloni Inggris menyebutnya dengan istilah *Bencoolen* yang digunakan dalam konteks menyebut orang-orang Bengkulu. Dalam catatan sejarah Banten disebutkan *Bangkulon* yang berarti *wilayah di bagian Barat*. Nama tersebut selanjutnya semula digunakan untuk sebutan wilayah pusat perekonomian di sekitar pelabuhan pada jaman kolonial Inggris (sekarang di Kelurahan Pasar Bengkulu). Kelurahan Pasar Bengkulu sendiri sekarang, oleh masyarakat disebut juga daerah Kota Tua (cikal bakal dari Kota Bengkulu sekarang).

³⁷ Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Bengkulu Nomor I tahun 1991, setiap tanggal 17 Maret ditetapkan dan diperingati sebagai hari jadi Kota Bengkulu. Berdasarkan ketetapan tersebut berarti Kota Bengkulu berdiri pada tahun 1719 M.

kecamatan dan 67 kelurahan dengan luas wilayah yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan geografis wilayah kelurahan dan intensitas kepadatan penduduknya. Hal ini seiring dengan perjalanan pemerintahan otonomi daerah dan sistem pemerintahan desentralisasi. Pendekatan pemekaran wilayah adalah berbasis kesejahteraan sosial. Desentralisasi dan pemekaran wilayah merupakan upaya mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya sebagai efektifitas menyejahterakan hidup rakyat. Sembilan (9) kecamatan tersebut dengan luas wilayah yang berbeda-beda, sebagai berikut:

Tabel :2.2

Luas Kota Bengkulu Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Prosentase (%)
1	Selebar	26,36	18,56
2	Kampung Melayu	23,44	15,25
3	Ratu Agung	11,02	7,26
4	Gading Cempaka	14,42	9,51
5	Singaran Pati	14,44	9,52
6	Teluk Segara	12,76	13,82
7	Ratu Samban	12,84	13,87
8	Muara Bangkahulu	23,18	15,28
9	Sungai Serut	13,53	8,92
	Jumlah	151,70	100,00

Sumber: Badan Statistik Kota Bengkulu, *Kota Bengkulu Dalam Angka Tahun 2020*, (Bengkulu: Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, 2020).

B. Awal Berdirinya PTKI Di Bengkulu

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu³⁸ merupakan lembaga hasil transformasi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu³⁹, dan IAIN Bengkulu merupakan hasil transformasi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu,⁴⁰ sedangkan STAIN Bengkulu merupakan hasil pengembangan dari Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang di Bengkulu, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh di Bengkulu. Berikut ini dipaparkan sejarah perjalanan PTI di Bengkulu.

1. Periode Yayasan Taqwa (YASWA)

Cikal bakal sejarah perkembangan Perguruan Tinggi Islam di Bengkulu tidak terlepas dari perkembangan pendidikan Islam di Palembang. Sebelum masuknya IAIN Raden Fatah Palembang di Bengkulu, adalah dari fenomena pendirian Fakultas Ushuluddin Swasta milik Yayasan Taqwa (Yaswa) Palembang ini di bawah pimpinan mantan Gubernur Sumatera Selatan. Fakultas Ushuluddin Swasta milik Yayasan Taqwa berdiri dan diresmikan pada tanggal 14 September 1963, dan K.H. Zainal Abidin Fikri dan Drs. Husnul Yakin, ditetapkan sebagai

³⁸ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Tertanggal 21 Maret 2021.

³⁹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Kelembagaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

⁴⁰ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 tentang Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu. Tertanggal JUNI 2007.

Dekan dan Wakil Dekan pertama., H. Muhammad Husein. Yayasan Taqwa ini juga membidani lahirnya Fakultas Syariah Swasta di Curup.⁴¹

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul gagasan untuk mendirikan IAIN tersendiri di Sumatera Selatan. Syarat untuk mendirikan IAIN tersebut membutuhkan tiga fakultas. Pada saat itu sudah ada dua fakultas yang berstatus negeri, yakni Fakultas Syariah Palembang dan Fakultas Tarbiyah Jambi. Untuk melengkapi fakultas tersebut, salah satu di antara dua fakultas yang sudah ada harus dinegerikan, yakni Fakultas Syariah di Curup dan Fakultas Ushuluddin di Bengkulu, dan diputuskan dalam rapat pengurus Yaswa, adalah Fakultas Ushuluddin di Curup yang dinegerikan. Karena di Palembang sudah ada Fakultas Syariah, maka Fakultas Syariah di Curup diganti nama menjadi Fakultas Ushuluddin di Curup dan dinegerikan pada tanggal 14 November 1964 dengan Dekan pertamanya adalah K.H. Muhammad Amin Addary. Bersamaan dengan penegerian Fakultas Ushuluddin di Curup tersebut juga diresmikan pula IAIN Raden Fatah Palembang.

2. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Bengkulu

Tiga tahun sejak berdirinya Fakultas Ushuluddin di Curup, pada tahun 1967 Yayasan Taqwa (Yaswa) Sumatera Selatan Perwakilan Bengkulu mengganti nama Fakultas Ushuluddin yang ada di Kota Praja Bengkulu menjadi Fakultas Syari`ah Yaswa.⁴² Fakultas Syariah Yaswa Bengkulu kembali diperjuangkan agar

⁴¹ Sejarah dan Perkembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2003.

⁴² Dekan pertama fakultas ini dijabat oleh Djalal Suyuthie, sedangkan Pembantu Dekan I dijabat oleh Drs. Adjis Ahmad, Pembantu Dekan II oleh Sulaiman Effendi, S.H., dan Pembantu Dekan III oleh Saifuddin Jachja. Setelah periode Djalal Suyuthi, fakultas ini dipimpin oleh Drs. Suandi Hambali sebagai Dekan, A. Moeharram, BA sebagai Sekretaris merangkap Pembantu Dekan III,

dapat dinegerikan oleh Tim Usaha Penegerian⁴³ dengan dukungan penuh dari Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu, H.M. Ali Amin, SH. Pada Juni 1971 Fakultas Syariah Bengkulu diresmikan menjadi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang Cabang Bengkulu dengan Dekan pertama Drs. Djamaan Nur.

Problem awal yang dihadapi adalah kurangnya dosen dan karyawan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menghadapi kondisi ini KH. Djamaan Nur selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Bengkulu merekrut beberapa dosen dan karyawan yang berstatus PNS dari instansi lain, untuk mengabdikan atau diperbantukan di Fakultas Syariah. Di antaranya adalah Drs. H. Badrul Munir Hamidy, Zainal Hakim, BA dan H. Rifa'i Djais. Selain itu, direkrut pula beberapa dosen lulusan dari IAIN lain, seperti Drs. H. Chaidir Hadi, Drs. H. Moh. Yusuf Ya'cub, Drs. H. Amri Said, Drs. Tablawi Amin, Drs. Moh. Damry Harahap, dan Drs. Parmi Nurdin.

Fakultas Syariah Bengkulu dan Fakultas Ushuluddin Curup pernah terancam ditutup oleh Ditperta Departemen Agama RI melalui program rasionalisasi. Namun dengan berbagai upaya para pengelolanya, kedua fakultas ini batal ditutup, karena dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang diminta oleh Ditperta. Ketentuan-ketentuan seperti sarana-prasarana, dosen dan mahasiswa

Sulaiman Effendi sebagai Pembantu Dekan I, dan Drs. Basri AS sebagai Pembantu Dekan II. Nama-nama lainnya yang ikut mengelola Fakultas Syariah Yaswa antara lain Zainal Hakim sebagai Tata Usaha dan Badrul Munir Hamidy mengelola bagian pengajaran. Mahasiswa-mahasiswa pertama Fakultas Syariah Yaswa ini antara lain Siti Nurbaya, Hasnah, Fauziah, Mukhtar Afrudi, Hazairin Amin, Ibnu Idham, Khairunnisa (sekarang Ketua Aisyiyah Daerah Kota Bengkulu), Rifa'i Djais, dan Zainal Arifin.

⁴³ Tim Penegerian diketuai oleh M. Zein Rani (Walikota Bengkulu) dengan anggota Tim adalah Drs. H. Adjis Ahmad (Sekretaris), Drs. Suandi Hambali, Moeharram, BA, Syukran Zainul, BA, Darwis (Danrem Bengkulu), Sulaiman Effendi, Drs. Basri AS, Zainal Hakim dan lain lain.

ternyata sudah sesuai dengan ketentuan suatu fakultas yang tidak terkena rasionalisasi.

Pada awal jabatannya sebagai Gubernur Bengkulu, Soeprapto membangkitkan perjuangan rakyat Bengkulu untuk memiliki IAIN yang berdiri sendiri di Daerah Bengkulu. Keinginan ini dikomunikasikan oleh Gubernur Soeprapto kepada H. Alamsyah Ratu Prawiranegara, Menteri Agama R.I. ketika itu. Keinginan tersebut disampaikan Suprpto dalam pidato sambutan Upacara Dies Natalis ke XV IAIN Raden Fatah Palembang di Kotamadya Bengkulu pada bulan Nopember 1979.

3. Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Bengkulu

Pada saat itu Provinsi Bengkulu baru memiliki dua fakultas dalam lingkungan IAIN yaitu Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syari`ah di Bengkulu. Untuk pendirian IAIN masih perlu dipersiapkan satu fakultas lagi yang berbeda dengan fakultas yang sudah ada. Fakultas yang lebih tepat dibuka adalah Fakultas Tarbiyah. Ketika itu telah ada satu Fakultas Tarbiyah Swasta yang berstatus terdaftar di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk memperlancar perjuangan tersebut disepakati Fakultas Tarbiyah di Manna dipindahkan ke Kotamadya Bengkulu untuk dibenahi dan dipersiapkan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN. Pada tahun 1982 fakultas tersebut dipindahkan ke Kotamadya Bengkulu dengan nama Fakultas Tarbiyah Semarak Bengkulu.

Masyarakat Bengkulu merasakan betapa pentingnya kehadiran Fakultas Tarbiyah di daerah ini. Karena melalui lembaga pendidikan tinggi agama ini akan dilahirkan guru-guru umum di madrasah-madrasah dan guru-guru agama untuk

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Atas di Kota Bengkulu. Untuk itu masyarakat mengharapkan agar fakultas tersebut diperjuangkan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah yang berkedudukan di Bengkulu.

Keinginan tersebut disampaikan kepada Rektor IAIN Raden Fatah Palembang. Setelah dibahas dalam sidang senat pada tahun 1983, Senat IAIN Raden Fatah Palembang menyetujui usul pendirian Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu dan menugaskan Rektor IAIN Raden Fatah agar mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana Fakultas Tarbiyah di Bengkulu. Rencana-rencana dimaksud antara lain menghubungi Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dan mengadakan studi kelayakan untuk pembukaan fakultas tersebut.

Berdasarkan persetujuan Senat IAIN Raden Fatah dan Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu, Rektor IAIN Raden Fatah Palembang menerbitkan Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Fatah Palembang Nomor : XV Tahun 1984 tanggal 1 Juli 1984 tentang Operasional Lokal Jauh Fakultas Tarbiyah Jurusan Tadris Bidang Studi IPS di Bengkulu. Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 1984, Rektor IAIN Raden Fatah Palembang, Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, meresmikan berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu sekaligus melantik Drs. Badrul Munir Hamidy sebagai Kuasa Dekan. Berkat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu maupun para ulama dan cendekiawan serta umat Islam pada umumnya, maka Fakultas Tarbiyah IAIN

Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Setelah melalui perjuangan yang sungguh-sungguh dan tiada henti dari civitas akademika IAIN Raden Fatah di Bengkulu, dan dengan dukungan Pemerintah Daerah Tingkat I Bengkulu, Kakanwil Departemen Agama Provinsi Bengkulu serta berbagai lapisan masyarakat, maka fakultas ini dapat dinegerikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Bengkulu pada tanggal 9 Juli 1994 yang diresmikan oleh Dirjend Binbaga Islam Departemen Agama R.I.

4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu

Dengan telah lengkapnya tiga fakultas di Provinsi Bengkulu (Ushuluddin di Curup, Syari`ah dan Tarbiyah di Bengkulu) berarti persyaratan untuk menjadi IAIN tersendiri telah terpenuhi. Maka Gubernur Bengkulu saat itu Drs.H. Adjis Ahmad meminta kepada panitia persiapan IAIN Bengkulu yang telah dibentuk oleh Gubernur sebelumnya Drs, H. A. Razie Jachja untuk meningkatkan kerjanya dalam menghadirkan IAIN tersendiri di Bengkulu. Dengan kerja keras panitia, maka pada September 1995 tim studi kelayakan persiapan IAIN Bengkulu telah dapat merampungkan tugasnya, menyiapkan proposal pendirian IAIN Bengkulu. Selanjutnya bapak Gubernur menyampaikan surat permohonan pendirian IAIN Bengkulu kepada Menteri Agama R.I dengan tembusan kepada pihak-pihak yang berkompeten tertanggal 4 September 1996 Nomor 425/4837/B.6 dilengkapi dengan proposal pendirian IAIN Bengkulu.

Namun pada saat yang bersamaan pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan akan menertibkan perguruan tinggi dalam lingkungan Departemen Agama R.I, fakultas-fakultas cabang (di luar kampus induknya) ditetapkan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang jumlahnya di seluruh Indonesia sebanyak 33 STAIN. Berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor: 11 tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : E/125/1997, Menteri Agama R.I., Dr. H.Tarmizi Taher, meresmikan pendirian 33 STAIN tersebut di Seluruh Indonesia (termasuk STAIN Bengkulu) pada tanggal 30 Juni 1997. Dengan kebijakan ini, maka harapan masyarakat Bengkulu untuk memiliki IAIN sendiri dapat dikatakan pupus (sementara).

STAIN Bengkulu merupakan penggabungan dari Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Bengkulu. Pada saat diresmikan STAIN Bengkulu terdiri dari 3 (Tiga) Jurusan dan 6 (Enam) Program Studi, yakni (1) Jurusan Syariah dengan dua program studi Ahwal al-Syakhshiyah (AHS) dan Muamalah (MUA). (2) Jurusan Tarbiyah dengan dua program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan (3) Jurusan Dakwah dengan Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) dan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI). Unit pendukung yang ada saat itu adalah, Unit Perpustakaan, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Pusat Pengkajian Islam dan kebudayaan (PPIK), Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) dan Unit Pelayanan Bahasa (UPB).

Dalam perjalanya selama 15 tahun STAIN Bengkulu dipimpin oleh: Ketua pertama oleh Drs. H. Badrul Munir Hamidy (dari tanggal 30 Juni 1997 sampai

dengan 7 Maret 2002). Selanjutnya sejak tanggal 7 Maret 2002 Ketua STAIN Bengkulu dijabat oleh DR. Rohimin, M.Ag dan ia terpilih kembali menduduki jabatan ketua untuk periode 2006-2010. Ketua keempat dijabat oleh Dr. H. Sirajuddin M.M.Ag., M.H sejak 2010 sampai alih status STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu. Selama kepemimpinan Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag., M.H Jurusan dan Program Studi mengalami penambahan, sampai Desember 2012 STAIN Bengkulu memiliki 4 (empat) Jurusan (Syariah, Tarbiyah, Ushuluddin, dan Dakwah) dengan 12 Program Studi. Jurusan Syariah dengan 4 Program Studi, yaitu Ahwal al-Syakhshiyah (AHS) dan Muamalah (MUA), Ekonomi Islam (EKIS) dan DIII Perbankan Syariah (PBS). Jurusan Tarbiyah dengan 4 program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Jurusan Dakwah dengan 2 Program Studi, yaitu Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) dan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI). Jurusan Ushuluddin dengan 2 Program Studi, yaitu Filsafat Pemikiran Politik Islam (FPPI), dan Tafsir Hadis (TH).

Pada masa kepemimpinan Dr. H. Sirajuddin M.M.Ag. MH usaha untuk menjadi IAIN Bengkulu terus dilakukan, berdasarkan Peraturan Presiden R.I Nomor 51, tanggal 25 April 2012 STAIN Bengkulu berubah status menjadi IAIN Bengkulu. Pada tanggal 13 Maret tahun 2013 IAIN Bengkulu diresmikan oleh Menteri Agama R.I Suryadharma Ali dengan Rektor pertama Prof, Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H., periode 2013-2017. Saat diresmikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu memiliki 3 (Tiga) Fakultas, yakni (1) Fakultas

Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), (2) Fakultas Tarbiyah dan Tadris (FTT), dan (3) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD).

5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Setelah proses alih status STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu berdasarkan peraturan Presiden nomor 21 tahun 2012 tanggal 25 April 2012, Rektor IAIN Bengkulu pada saat itu, Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH menginisiasi pemisahan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Januari 2013 yang disampaikan kepada Dekan FSEI IAIN Bengkulu pada waktu itu, Dr. Asnaini, M.A sehingga pada awal Februari 2013, secara resmi Dekan FSEI mengajukan surat permohonan Tim Penyusun Proposal pemisahan kepada Rektor IAIN Bengkulu menjadi Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Berdasarkan keputusan rapat Senat IAIN Bengkulu Nomor In.16/009/SN-IAIN Bkl/I/2014 hari Jumat Tanggal 03 Januari 2014 Senat memberikan pertimbangan/persetujuan/untuk pemisahan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) menjadi Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Diketahui langsung oleh Dekan FSEI (Dr. Asnaini, M.A) beserta Tim mulai menyusun proposal pemisahan Fakultas. Proposal pemisahan dapat diselesaikan dan dibuat lembar pengesahan oleh Rektor Prof. H. Sirajuddin M. M.Ag., M.H pada Februari 2014. Setelah melalui pembahasan maka pada 09 September 2014 Rektor mengajukan surat pengantar proposal pemisahan Fakultas dan pendirian Ma'had Al-Jami'ah kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan nomor :

In.16/OT.00/1551/2014 dan mengajukan surat Permohonan Pendirian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan nomor : In.16/OT.00/1573/2014.

Pemisahan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengembangan program-program studi yang di butuhkan di masyarakat dan merupakan upaya dalam mengembangkan kelembagaan yang kemudian menjadi cikal bakal transformasi IAIN Bengkulu menjadi UIN FAS dimana syarat peningkatan status kelembagaan dari IAIN menjadi UIN minimal harus memiliki 4 (empat) Fakultas. Maka, pada 5 Juni 2015 Menteri Agama R.I menerbitkan PMA Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu, dimana IAIN Bengkulu memiliki 4 (empat) Fakultas yang terdiri dari Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris (FTT), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Selain beberapa satuan akademik fakultas, pada periode 2013-2017 terdapat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang diketuai Dr. Samsudin, M. Pd, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan ketua Dr. Suherman, M. Pd, Makhad AlJamiah (Ketua Dr. M. Nasron HK, M. Ag), Kepala Unit Perpustakaan Dr. Ali Akbar Jono, M. Pd), dan Kepala Pusat Bahasa dan Kajian Islam dan Kebudayaan, Drs Hifzan Bustami, M. Pd.

6. IAIN Bengkulu Periode 2017-2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/54243 tanggal 27 Juli 2017, Prof, Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H., kembali terpilih menjadi

Rektor IAIN Bengkulu periode kedua (2017-2021). Kepemimpinan Rektor Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M. Ag., MH dalam periode tersebut didukung oleh beberapa Wakil Rektor berikut:

Rektor : Prof, Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H.,

Wakil Rektor I : Dr. H. Zulkarnain Dali, M. Pd.

Wakil Rektor II : Dr. Moh. Dahlan, M. Ag.

Wakil Rektor III : Dr. Samsudin, M. Pd.

Pada tahun 2020 rektor melakukan perputaran pejabat untuk masa 2020-2021 dengan susunan pimpinan Rektorat sebagai berikut:

Rektor : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H.,

Wakil Rektor I : Dr. Samsudin, M. Pd.

Wakil Rektor II : Dr. Moh. Dahlan, M. Ag.

Wakil Rektor III : Dr. H. Zulkarnain Dali, M. Pd.

Kepemimpinan Rektor juga didukung oleh para dekan berikut; Dekan Fakultas Syariah (Dr. Imam Mahdi, MH), dibantu oleh Wakil Dekan I (Dr. Yusmita, M. Ag), Wakil Dekan II (Dr. , M. Ag), Wakil Dekan III (Dr. Supardi, M. Ag). Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris (Dr. Zubaedi, M. Ag., M. Pd), dibantu oleh Wakil Dekan I (Dr. Ali Akbar Jono, M. Pd), Wakil Dekan II (Dr. Fauzan Amin, M. Ag), Wakil Dekan III (Dr. Irwan Satria). Pelaksana Akademis Ketua Jurusan Tarbiyah (Nurlaili, M. Pd. I), Ketua Jurusan Bahasa (Dr. Kasmantoni, M. Ag), dan Ketua Jurusan Sain Teknologi (Deni Febrini, M. Pd). Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (Dr. Suherman, M. Pd) dibantu oleh Wakil Dekan I (Dr. Suryani, M. Ag), Wakil Dekan II (Dr.Suwarjin, M.Ag),

Wakil Dekan III (Dr. Murkilim, M. Ag). Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (Dr. Asnaini, M. A), dibantu Wakil Dekan I (Dr. Nurul Hak, M. Ag), Wakil Dekan II (Dr. Suryani, M. Ag), Wakil Dekan III (Dr. Fatimah, MA).

Dalam pada itu peningkatan mutu perguruan tinggi, hingga bulan Mei 2021 IAIN Bengkulu memiliki 4 Fakultas dan 25 (dua puluh lima) program studi sarjana (S1), 6 (enam) program studi pascasarjana (S2), dan 1 (satu) program studi doktor (S3), dengan rincian sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah dan Tadris, dengan 9 (Sembilan) program studi:
 - a. Pendidikan Agama Islam (PAI),
 - b. Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
 - c. Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)
 - d. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).
 - e. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
 - f. Tadris Matematika
 - g. Tadris IPA
 - h. Tadris IPS
 - i. Tadris Bahasa Indonesia
2. Fakultas Syari'ah, dengan 3 (tiga) program studi:
 - a. Ahwal al-Syakhshiyah/Hukum Keluarga Islam (HKI)
 - b. Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 - c. Hukum Tata Negara Islam/ Siyasah syar'iyah (HTN)
3. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwahh, dengan 9 (sembilan) program studi:

- a. Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IQT)
 - b. Ilmu Hadis (IH)
 - c. Filsafat Agama (FA)
 - d. Bahasa dan Sastra Arab (BSA)
 - e. Akhlak Tasawuf (AT)
 - f. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
 - g. Komunikasi dan penyiaran Islam (KPI)
 - h. Bimbingan Konseling Islam (BKI)
 - i. Manajemen Dakwah (MD)
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 4 (Empat) program studi:
- a. Ekonomi Syariah (ES)
 - b. Perbankan Syariah (PS)
 - c. Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA)
 - d. Manajemen Haji dan Umrah (MHU)
5. Program Pasca Sarjana Magister (S2), dengan 6 (Enam) program studi:
- a. Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS)
 - b. Pendidikan Agama Islam (PAI)
 - c. Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
 - d. Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)
 - e. HUKum Tata Negara (HTN)
 - f. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
6. Program Pascasarjana doktor (S3), dengan 1 (Satu) program studi:
- a. Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pada saat ini, para alumni IAIN Bengkulu telah berkontribusi besar bagi pembangunan daerah dan nasional di berbagai bidang kehidupan. Mereka telah berkiprah di berbagai bidang baik pemerintah maupun swasta (PNS di berbagai instansi, TNI, Polri, BUMN, perusahaan swasta, legislatif, praktisi hukum, pegawai bank, jurnalis, pengusaha, dan sebagainya).

C. Alih Status IAIN Menjadi UIN Bengkulu

Ketika berubah menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pilihan prodi diharapkan lebih beragam dan diversikasi profesi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat provinsi Bengkulu dan kebutuhan nasional, IAIN Bengkulu meningkatkan alih status menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Transformasi IAIN menuju UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu didorong oleh keinginan untuk mewujudkan lembaga pendidikan tinggi yang benar-benar mampu menjadi pusat pengembangan ilmu dan kaderisasi calon-calon pemimpin bangsa.

Perubahan IAIN menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu merupakan upaya strategis dan futuristik dalam memperkuat kapasitas kelembagaan lembaga pendidikan tinggi Islam, agar mempunyai kemampuan untuk merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang akan terus meningkat dan semakin bervariasi. Transformasi juga diperlukan sebagai konsekuensi logis dari keberadaan IAIN Bengkulu sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi pada umumnya dan sistem pendidikan tinggi Islam khususnya, untuk dapat memberikan kontribusi maksimal

terhadap upaya-upaya pemerataan dan peningkatan mutu serta relevansi pelayanan pendidikan tinggi.

Menyadari tanggung jawab akademik dan dinamika perubahan kebutuhan pembangunan masyarakat, sejak tahun 2013 IAIN Bengkulu telah menerapkan konsep *wider mandate* (mandat diperluas) untuk melakukan diversifikasi Program Studi (Prodi). Dengan konsep tersebut, lembaga pendidikan tinggi Islam ini telah memiliki prodi non keagamaan, antara lain: Prodi Tadris IPS, Tadris IPA, Tadris Bahasa Indonesia dan Tadris Matematika.

Namun demikian, pembinaan prodi tersebut masih belum optimal di bawah Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Pengembangan ilmu-ilmu umum dengan format *wider mandate* tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena masih terbatasnya otoritas kelembagaan dan keilmuan. Pengenalan ilmu-ilmu umum sejauh ini hanya terbatas pada pengembangan prodi dan konsentrasi, karena sebagai sebuah institut IAIN Bengkulu hanya memiliki otoritas penuh dalam bidang ilmu keislaman. Akibatnya, berbagai prodi umum tidak dapat berkembang secara maksimal, karena tidak ada penambahan fakultas baru.

Tanpa pembukaan fakultas baru, saat ini otoritas keilmuan IAIN Bengkulu belum banyak beranjak dari mandat awal keilmuan yang dimilikinya, yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan melalui empat fakultas studi keislaman, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, serta Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.

Dalam rangka memantapkan perluasan otoritas keilmuan dan untuk dapat mengembangkan berbagai bidang ilmu yang relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat, maka status kelembagaan IAIN harus diubah menjadi UIN. Perubahan status dari "institut" ke "universitas" akan memberikan otoritas dan ruang kreatifitas keilmuan yang lebih luas pada seluruh sivitas akademik, untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi Islam menjadi lembaga pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki daya saing tinggi. Proses transformasi diharapkan menggeser paradigma pengembangan keilmuan dari konsep perluasan mandat (*wider mandate*) ke konsep mandat penuh (*full mandate*), dan dari paradigma dikotomi ilmu ke paradigma integrasi ilmu.

Atas dasar kebutuhan masyarakat provinsi Bengkulu dan kebutuhan nasional, maka pada tahun 2017, Rektor IAIN Bengkulu, Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH bersama Tim mulai melakukan terobosan untuk meningkatkan mutu dan kapasitas kelembagaan dengan menyusun proposal transformasi IAIN Bengkulu menjadi UIN FAS melalui Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0393 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penetapan Tim Penyusun Proposal Transformasi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Bengkulu. Setelah perjalanan penyusunan proposal berjalan lancar, maka melalui Surat Keputusan Senat Institut No. 5 Tahun 2018, tertanggal 16 November 2018, Senat IAIN Bengkulu menyatakan bahwa para anggota Senat Institut mendukung sepenuhnya pimpinan IAIN Bengkulu untuk melakukan langkah-langkah transformasi IAIN menjadi UIN FAS, dan setelah perjalanan panjang yang dimulai dari tahun 2017 hingga

2021 dalam upaya langkah transformasi kelembagaan IAIN Bengkulu menjadi UIN FAS, maka pada tanggal 11 Mei 2021 status kelembagaan IAIN Bengkulu resmi dan sah berubah menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu melalui Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2021 bersama 5 (Lima) IAIN lainnya, yaitu IAIN Jember, IAIN Tulungagung, IAIN Purwokerto, IAIN Samarinda, dan IAIN Surakarta.

1. Dasar Pertimbangan dan Tujuan Alih Status

Ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika kehidupan manusia. Perkembangan sains dan teknologi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang yang lainnya seperti pendidikan, sosial, politik, hukum, dan agama. Era sains dan teknologi dinyatakan oleh Alvin Toffler sebagai titik awal dalam era dimana terjadi revolusi industri (*Future Shock*).⁴⁴ Menurut Alvin Toffler, dunia bergerak secara progresif menuju masa depan yang tak seorangpun dapat mengendalikan dan hanya sedikit yang dapat memprediksi sebagiannya⁴⁵.

Azyumardi Azra mengemukakan bahwa dinamika pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung begitu cepat dalam dasawarsa terakhir telah mengantarkan Indonesia ke dalam barisan negara-negara yang disebut dengan *New Industrialized countries* (NICS) atau negara-negara industri baru.⁴⁶ Walaupun Indonesia telah melakukan upaya-upaya nyata untuk

⁴⁴ Saefudin, Asep. 2005. Perkembangan Teknologi dan Komunikasi : Perspektif komunikasi peradaban. (Mediator Vol. 9 No. 2), hlm. 386

⁴⁵ Saefudin, Asep. 2005. Perkembangan Teknologi dan Komunikasi : Perspektif komunikasi peradaban. (Mediator Vol. 9 No. 2), hlm. 386

⁴⁶ Tolchah, Moch. 2015. Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru. (LKIS Pelangi Aksara: Yogyakarta), hlm. 29

mencapai kemajuan tersebut, tetapi pembangunan itu masih jauh dari selesai. Bahkan Indonesia justru harus meningkatkan momentum program pembangunannya itu.

Teknologi modern saat ini memungkinkan proses dalam berbagai bidang kehidupan manusia berlangsung dengan sangat cepat. Misalnya dalam bidang produksi, transportasi, dan lainnya. Kondisi seperti ini, mendorong perguruan tinggi termasuk IAIN Bengkulu mulai mengadopsi nilai-nilai "instantisme". Nilai ini mungkin pada mulanya hanya dikenal dan dianut dalam dunia industri. Namun, ketika dunia industri menunjukkan kemampuannya, kemudian nilai yang sama dicoba dianut dan diterapkan pada sektor-sektor lain, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Padahal belakangan terbukti bahwa tidak setiap nilai yang dibawa oleh temuan-temuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa selaras dengan konteks tempat ia akan diadopsi. Sebab itu sikap selektifitas harus dilakukan.

Untuk mencapai sifat dan kebijakan selektif dan kritis itu, tidak ada alternatif lain kecuali menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keahlian dan keterampilan. Dengan program pembangunan SDM yang berkualitas tinggi, Indonesia akan *survive* di tengah pertarungan ekonomi dan politik internasional yang terus kian kompetitif.

Di bidang pendidikan, sosial, dan budaya seperti dilansir oleh kritikus sosial Erich Fromm, adopsi-adopsi nilai-nilai yang dibawa oleh ilmu pengetahuan dan teknologi telah memunculkan situasi alienasi atau

keterasingan pada diri manusia.⁴⁷ Nurcholish juga menyatakan bahwa adopsi nilai-nilai baru yang ditawarkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara serampangan, alih-alih melahirkan ilmuwan yang mumpuni, justru melahirkan ”teknokrat-teknokrat tanpa perasaan”⁴⁸. Azyumardi Azra menjelaskan bahwa adopsi-adopsi nilai-nilai baru dari sains dan teknologi haruslah bersifat kritis dan holistik.⁴⁹ Oleh sebab itu, pendidikan Islam secara ideal berfungsi membina dan menyiapkan peserta didik yang berilmu, berteknologi, berketerampilan tinggi dan sekaligus beriman dan beramal shaleh. Konferensi Internasional Pertama tentang pendidikan Islam di Makkah pada tahun 1977 merumuskan tujuan pendidikan Islam sebagai berikut:

“Pendidikan bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui jiwa, intelek, diri manusia yang rasional, perasaan dan indera. Karena itu pendidikan harus mencakup pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya: spiritual, intelektual, imajenatif, fisik, bahasa, baik secara individual maupun secara kolektif, dan mendorong semua aspek ini ke arah kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan Muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah baik secara pribadi, komunitas maupun seluruh umat manusia”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem pendidikan, termasuk pendidikan tinggi Islam, haruslah mampu menatap dan membaca peluang dan perkembangan zaman yang muncul dalam masyarakat sebagai konsekuensi dari adanya perubahan yang tidak ada akhirnya. Hal ini sesuai dengan misi pendidikan Nabi Muhammad saw yang menanamkan akidah yang benar, yakni

⁴⁷ Sutikna, Nana. 1996. Keterasingan Manusia dalam Historisitas : Sebuah Telaah Kritis Terhadap Konsep Manusia Menurut Erich Fromm. Jurnal Filsafat, hlm. 35

⁴⁸ Sutikna, Nana. 1996. Keterasingan Manusia dalam Historisitas : Sebuah Telaah Kritis Terhadap Konsep Manusia Menurut Erich Fromm. Jurnal Filsafat, hlm. 36

⁴⁹ Tolchah, Moch. 2015. Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru. (LKIS Pelangi Aksara: Yogyakarta), hlm. 57

akidah tauhid yang mengesakan Tuhan, yang *by extension*, tandas Azra⁵⁰, memahami seluruh fenomena alam dan kemanusiaan sebagai satu kesatuan, suatu hal yang holistik. Dalam kerangka pemikiran tauhid yang terakhir, misi pendidikan Islam berusaha membangun insan yang berkualitas yang seimbang, beriman, berilmu, (ber-iptek) dan beramal; cakap secara lahiriah maupun batiniah; berkualitas secara emosional dan rasional, atau memiliki EQ dan IQ yang tinggi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi berperan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) dan agama sebagai etik. Dua hal itu harus bergerak secara integratif untuk membangun dinamika kehidupan yang positif. Paradigma itu telah dikembangkan oleh Ian G Barbour⁵¹ untuk membangun kemitraan secara sistematis dan ekstensif antara saintek dan agama untuk mencari titik temu diantara keduanya. Pertemuan saintek dan agama tidak hanya ketika keduanya membutuhkan, tetapi pendekatan integrasi ini sejak awal telah memiliki asumsi dan landasan teori bahwa saintek dan agama memiliki keterikatan yang sangat erat, sains menjadi pijakan rasional bagi agama dan agama menjadi pijakan etik bagi pengembangan sains dan teknologi. Artinya perguruan tinggi, dituntut untuk merespon dengan cerdas dan memasukkannya dalam kebijakan pengembangan kelembagaan Perguruan Tinggi ke depan, agar tidak ditinggalkan.

⁵⁰ Azra, Azumardi. 1999. Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, hlm. 55

⁵¹ Ian G. Barbour, Juru Eicara Tuhan Antara Sains dan Agama, Terj. E.R. Muhammad, Bandung: Mizan, 2002, P. 47-94

Di bidang sosial, kemajuan ilmu dan pengetahuan telah merelatifkan batas-batas teritorial budaya, identitas, bahkan geografi. Kemajuan ilmu dan pengetahuan memungkinkan batas-batas relatif mencair, dan tidak tertutup kemungkinan menghilang. Padahal, dalam konteks kebangsaan, salah satu karakteristik Indonesia sebagai Negara bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya. Sebuah Negara bangsa yang mengikat lebih 1128 (seribu seratus dua puluh delapan) suku bangsa (data BPS) dan bahasa, ragam agama dan budaya di sekitar 17,580 pulau, yang membentang dari 6° 08' LU hingga 11° 15' LS, dan dari 94° 45' BT hingga 141° 05 BT (Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, 2012). Batas-batas inilah sesungguhnya yang mendefinisikan dan meneguhkan keberadaan sebuah bangsa di antara bangsa-bangsa lain. Tetapi globalisasi tidak saja merelatifkan batas-batas identitas sosial maupun territorial, globalisasi juga mendorong demokratisasi namun di sisi lain menghambatnya. Relativitas tersebut terjadi karena adanya saling ketergantungan. Menurut Giddens⁵², proses peningkatan kesalingtergantungan masyarakat dunia dinamakan dengan globalisasi. Ditandai oleh kesenjangan tingkat kehidupan antara masyarakat industri dan masyarakat dunia ketiga (yang pernah dijajah Barat dan mayoritas hidup dari pertanian). Dengan kata lain, globalisasi adalah sebuah proses dan kondisi mutakhir umat manusia yang berwajah ganda, ia merupakan sebuah *gerak relativisasi* namun pada saat yang sama merupakan *gerak revitalisasi*. Menurut Jurgen Habermas bahwa masyarakat industri dan masyarakat modern merupakan proyek yang tidak

⁵² Giddens, Anthony & Critis His. 1989. Social Theory Of Modern Societies . (Cambridge Univerity Perss : New York),

memiliki akhir. System sosial tumbuh semakin kompleks, terintegrasi dan dicirikan oleh alasan-alasan argumental. Pada saat bersamaan, kehidupan dunia global dapat diamati dengan meningkatnya diferensiasi, sekularisasi, dan kelembagaan norma-norma yang reflektif dan kritis. Dalam konteks itulah yang menawarkan teori kritis yang hendak memadukan antara rasionalisme instrumental dan rasionalisme kritis. Dengan kata lain, antara logika sains positivistik dan logika religius spiritual memiliki ruang untuk dikembangkan.

Pada saat itu, IAIN Bengkulu mau tidak mau harus menempatkan globalisasi sebagai salah satu pendorong untuk menuju lembaga pendidikan berkelas internasional. Perubahan harus mengikuti perkembangan global yang ada. Kenyataannya, bahwa perubahan yang ditawarkan dan ditimbulkan ilmu pengetahuan dan teknologi tidaklah berhenti. Canton⁵³ melukiskan masa depan sebagai “masa depan yang ekstrem” (*the extreme future*). Disebut ekstrem, karena masa depan tampaknya merupakan era yang sama sekali jauh berbeda dari masa kini atau masa lalu, baik dari segi perspektif yang mendasari maupun temuan-temuan baru yang diajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disebut ekstrem, karena tantangan dan Aliskonsekuensi yang harus ditanggung pun sama sekali berbeda dengan tantangan yang pernah muncul pada era sebelumnya.

Dengan demikian, perubahan tidak akan segera berhenti. Perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus terjadi, karena itu lembaga pendidikan tinggi yang tidak mau ditinggalkan oleh masyarakatnya

⁵³ Canton, J. (2007). *The Extreme Future: the top trends that will reshape the world in the next 20 years*. New York: Plume Book

harus selalu melihat ini sebagai tantangan dan menjadikannya sebagai acuan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas kelembagaan secara lebih visioner.

Pengelola lembaga pendidikan tinggi sebaiknya melakukan upaya-upaya pengembangan kelembagaan secara terus menerus sehingga program-program yang ditawarkan senantiasa aktual, sejalan dengan dinamika perkembangan sains dan teknologi serta kebutuhan sumber daya manusia. Mereka dituntut untuk mampu mengembangkan program-program akademik yang relevan dan bermutu tinggi, agar dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia yang relevan dan bermutu, sesuai tuntutan, globalisasi. Tanpa melakukan langkah-langkah pengembangan secara signifikan, relevan, dan berkelanjutan, dapat dipastikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan tinggi akan tenggelam dan terhanyut oleh arus globalisasi, karena tidak akan memiliki kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*) yang cukup untuk dapat merespons berbagai peluang dan tantangan yang muncul dari proses globalisasi. Tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai, cepat atau lambat lembaga-lembaga pendidikan tinggi akan menjadi bulan-bulanan arus globalisasi dan tidak dapat diandalkan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia.

Fenomena tersebut menurut M. Amin Abdullah ⁵⁴ menuntut perlunya pembaharuan pendidikan tinggi termasuk pendidikan tinggi Islam dalam empat

⁵⁴ M . Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan IntegratifInterkonektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 404-405. Lihat juga M. Amin Abdullah, "Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN Sunan Kalijaga: Dari Pendekatan Dikotomis-Atomistik Kearah Integratif-Interkonektif" dalam Fahrudin Faiz, (ed.),

level. Pertama, level kelembagaan. Pembaharuan atau perubahan kelembagaan dalam bentuk transformasi dari lembaga yang sudah ada. Kedua, level substansi kurikulumnya dari pengajaran ilmu-ilmu agama murni bergeser dengan pengajaran ilmu-ilmu umum didalam lembaga pendidikan Islam. Level ketiga, pada aspek metodologis, yaitu metode pengajaran yang selama ini diterapkan atau diimplementasikan di lembaga pendidikan islam dianggap kurang memadai atau ketinggalan (*out of date*). Level keempat pada sisi fungsi secara tradisional fungsi pendidikan Islam meliputi transfer ilmu-ilmu keislaman kemudian memelihara tradisi Islam dan melahirkan ulama. Dengan adanya dinamika ilmu pengetahuan tersebut, maka lembaga pendidikan islam diharuskan melakukan perubahan untuk menjawab dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Paradigma dan Distingsi Keilmuan

Dalam upaya membangun relevansi tersebut, problem keilmuan yang terjadi di Indonesia harus diselesaikan, yakni adanya pemisahan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, atau setidaknya *paradigma independensi* dalam pemikiran Ian G Barbour⁵⁵. Paradigma independensi ini telah berkembang hingga masa kini. Adanya sejumlah Universitas Negeri di Indonesia yang mengembangkan ilmu-ilmu umum atau sains dan teknologi tetapi tidak ada ruh keagamaan/keislamannya, padahal dalam ajaran Islam telah ditanamkan basis keilmuan sains dan teknologi, serta khazanah ilmu-ilmu

Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi (Yogyakarta: SUKA Press, 2007), h. 37-38.

⁵⁵ Ian G. Barbour, Juru Eicara Tuhan Antara Sains dan Agama, Terj. E.R. Muhammad, Bandung: Mizan, 2002, P. 47-94

keislaman karya ulama klasik sudah dikembangkan sebagaimana dikembangkan oleh Ibnu Sina. Pada sisi yang lain, ada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang hanya mengembangkan basis keilmuan agama Islam sebagai tugas utamanya sehingga kedua bentuk kelembagaan pendidikan tinggi agama Islam tersebut belum memadai untuk menjawab dinamika perkembangan dan tantangan zaman di era global yang sarat dengan sains dan teknologi ini. Oleh sebab itu, jalan independensi tidak mungkin bisa dipertahankan di Indonesia. Lebih dari itu, kedua bentuk kelembagaan baik STAIN ataupun IAIN, bisa mengembangkan mandatnya atau *widermandate* hanya sampai batas *paradigma dialog*, yakni paradigma pembanguna keilmuan yang hendak membangun sinergi antara sains dan agama jika keduanya ada titik singgung yang sama-sama memerlukan. Jadi, sifatnya hanya tentatif dan instan, tidak intensif. Oleh sebab itu, *paradigma integrasi* ala Ian G Barbour⁵⁶ sangat dibutuhkan sebagai basis keilmuan dan kinerja dalam transformasi IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. *Pradigma integrasi* itu dikembangkan dengan spesifikasi *paradigma revitalisasi keilmuan* ala Mulyadhi Kartanegara.

Paradigma revitalisasi keilmuan ala Mulyadhi Kartanegara sebagai model-model kajian keilmuan Islam kontemporer diharapkan mampu menawarkan wawasan keilmuan agama Islam yang kontekstual-komprehensif dan berguna bagi pemberdayaan seluruh elemen

⁵⁶ Ian G. Barbour, *Juru Eicara Tuhan Antara Sains dan Agama*, Terj. E.R. Muhammad, Bandung: Mizan, 2002, P. 47-94

masyarakat Bengkulu yang memerlukan wawasan keilmuan agama Islam. Model-model kajian keilmuan Islam kontemporer tersebut tidak hanya berpijak kepada penjelasan literal/tersurat terhadap nas-nas keagamaan (baca: *bayani*) atau penjelasan tersirat terhadap nas-nas keagamaan (baca: *qiyasi*), tetapi juga berusaha mensinergikan dan mendialektikakan dengan perkembangan wacana keilmuan dan sains kontemporer (baca: *istishlahi*). Dengan kata lain, pembangunan wawasan keilmuan Islam di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dilakukan dengan mensinergikan antara *applied science* (ilmu-ilmu terapan) dengan *pure science* (ilmu-ilmu dasar)⁵⁷. Dengan meminjam bahasa Hans G Gadamer⁵⁸ hal ini bisa disebut dengan *fusion of horizons*, yaitu mendialektikakan wacana keilmuan Islam dengan wacana sains dan teknologi kontemporer yang merupakan keniscanaan untuk membangun wawasan keilmuan Islam yang kontekstual-holistik. Wacana keilmuan Islam ini dibangun sebagai upaya mengkonter wacana keilmuan Islam yang konservatif dan terasing dari realitas kehidupan sosial umat dan bangsa, yang dalam bahasa Mohamed Abied Al-Jabiri disebut dengan *al-`aql al-bayâni*⁵⁹.

Dengan meminjam pemikiran Kuntowijoyo, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tidak boleh menggunakan sistem pemikiran panteologisme atau nalar

⁵⁷ Abdullah, Amin. M, 1996. Studi Agama: Normatifitas atau Historisitas?. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 4-10

⁵⁸ Rahmatulah, 2019. Menakar Hermeneutika Fusion of Horizons H.G. Gadamer dalam Pengembangan Tafsir Maqasid Alquran. [Nun Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara](#). Issue : [Vol 3, No 2 \(2019\)](#) Publisher : Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Indonesia DOI : [10.32495/nun.v3i2.47](#)

⁵⁹ Islah Gusmian, "Metodologi Penafsiran Emansipatoris: Ilmu Sosial sebagai Alat Analisis Teks Kitab Suci" dalam Jurnal Ilmiah Citra Ilmu, (Temanggung: STAINU Press, 2008), hlm. 5

serba Islam yang meremehkan pemikiran rasio dan realitas empirik. Hal ini sesuai dengan spirit wahyu al-Qur'an yang berfungsi tidak hanya sebagai pembeda (*furqan*), tetapi juga pendorong pemanfaatan akal pikiran, observasi empiris, dan intuisi sebagai satu kesatuan⁶⁰. Pembangunan wacana keilmuan Islam yang kontekstual-holistik telah digariskan oleh al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 27 dan surat Al-Ghasyiyya ayat 17-20 yang pada intinya menghendaki umat manusia untuk beriman kepada Allah dan meneliti serta memikirkan ciptaan-Nya. Disinilah letak kekuatan wacana keilmuan yang ditawarkan oleh UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yaitu eksistensinya yang hendak tumbuh dan berjalan seiring dengan tradisi kenabian dan *salafunas shaleh* serta perkembangan sains dan teknologi kontemporer, sehingga kebenaran ajaran Islam terbuka dan berkembang seiring dengan perkembangan kepentingan bangsa dan ilmu pengetahuan/sains dan atau teknologi (*shalihun likulli zamanin wa makanin*). Dua sistem keilmuan tersebut akan dibangun dan dikembangkan oleh UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk melahirkan sarjana yang mampu mengintegrasikan wacana keislaman, kemanusiaan, sains, serta mampu bekerja profesional dan menjadi penggerak perubahan dan kemajuan masyarakat.

Paradigma kajian keislaman, sains dan teknologi yang akan dikembangkan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu jika diklasifikasikan lebih rinci, maka ia dapat dijabarkan menjadi tiga tahapan perkembangan nalar kajian keilmuan Islam dan sains, yaitu. *Pertama, nalarbayânî* (linguistik)

⁶⁰ Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam (Bandung: Mizan, 1997), hal 168

yang berusaha mengkaji dan memahami ajaran Islam dengan menggunakan cara interpretasi linguistik (kebahasaan). Fokus utama kajian ini adalah menggali makna tekstual-normatif dalam merumuskan pemahaman terhadap ajaran Islam. Metode ini menggunakan analisis kebahasaan dalam proses pencarian dan penggalian makna, sehingga metode kajian keilmuan ini menekankan pada penguasaan yang mendalam dan komprehensif terhadap khazanah keilmuan Islam. Kajian keilmuan ini masuk kategori wilayah kajian ‘*Ulum al-Diin* yang berfungsi mendalami dan menggali khazanah keilmuan Islam seperti ulumul qur’an, ulumul hadis, ushul fiqh, fiqh, aqidah, muamalah, tarikh tasyari’, ta’limul mutaalim, ilmu-ilmu thib, ilmu hawayan, ilmun nabat, dan lain-lain. Oleh sebab itu, wilayah kajian keilmuan ini menjadi bahan material keilmuan yang akan dikembangkan dengan pendekatan rasionalisasi di dalam tahapan *nalar ta’lili* dan *nalar istislahi*.

Kedua, nalar ta’lili (kausasi) adalah suatu metode kajian keilmuan yang berusaha melakukan perluasan kajian dalam proses penggalian dan pemahaman terhadap nas-nas Islam melalui proses analogis (baca: metode *qiyâs*). Logika keilmuan yang digunakan adalah logika deduktif dalam memahamikenyataan empiris. Dengan kata lain, nalar keilmuan ini berusaha menguji teori-teori keilmuan Islam/khazanah keilmuan Islam dan mengembangkannya sesuai dengan tuntutan kehidupan aktual masa kini. *Nalar ta’lili* merupakan tahapan pemikiran dan kajian keilmuan Islam yang berusaha melakukan rasionalisasi dan upaya untuk mempertemukan dengan realitas empiris dan faktual, sehingga wilayah kajian ini masuk kategori *social*

sciences. Wilayah ini –jika meminjam istilah M Amin Abdullah- banyak didominasi *al-Fikr al-Islamiy, Islamic Thought* atau Pemikiran Islam, sehingga ilmu-ilmu Islam tersebut sudah mulai melakukan upaya pendalaman dengan melalui pendekatan historis, sosiologis, politis, ekonomis, matematis, saintis, hermeneutis, sistimatis dan sudah mulai terbuka untuk mengembangkan wacana ‘*Ulum al-Diin*. Wilayah kajian keilmuan ini masuk kategori pendekatan dialogis –meminjam istilah Ian G barbour⁶¹-, sehingga pendalaman terhadap wacana keilmuan Islam ini masih masuk kategori tahap awal dalam mengkaji ilmu-ilmu agama Islam dengan pendekatan sains dan teknologi modern. Karakter nalar keilmuan yang digunakan adalah nalar deduktif yang menjadi ciri khas nalar modernitas, sehingga nalar keilmuan ini perlu disempurnakan dengan *nalar istishlahi*.

Ketiga, nalar istishlâh adalah suatu metode kajian keilmuan Islam yang berangkat dari logika induktif, sehingga wacana keilmuan agama Islam di sini dikembangkan melalui proses yang rasional-empiris-positivistik dengan merujuk kepada perkembangan aktual dalam bidang keilmuan sains, teknologi dan seni. Wilayah kajian keilmuan ini masuk kategori *humanities*. Wilayah kajian keilmuan ini -meminjam istilah M Amin Abdullah- masuk kategori *cluster* baru keilmuan Islam yang disebut dengan *Dirasat Islamiyyah* atau *Islamic Studies*. Cara kerja untuk memperoleh data (*process* dan *procedure*), cara berpikir mendekati persoalan akademik yang dihadapi (*approaches*), asumsi-asumsi dasar yang digunakan (*basic assumption*) merupakan kelanjutan

⁶¹ Ian G. Barbour, *Juru Eicara Tuhan Antara Sains dan Agama*, Terj. E.R. Muhammad, Bandung: Mizan, 2002, P. 47-94

dari *nalar bayani* dan *nalar ta'ili*. Fungsi *Islamic Studies* ini berusaha mengembangkan tradisi kajian keilmuan yang berkembang dalam *Ulum al Diin* dan *al-Fikr al-Islamiy*. Wilayah *Islamic Studies* juga mengembangkan tradisi *research* (penelitian) lapangan, pengamatan historis-empiris yang 'objektif' tentang dinamika sosial, ketersambungan (*continuity*) dan perubahan (*change*), pola (*pattern*) dan *trends* pergumulan sosial-politik, ekonomi, budaya, pola-pola ketegangan, konflik, harmoni dan merekam pluralitas interpretasi makna oleh para pelaku di lapangan, sehingga *Ulum al-Diin* di sini dikaji secara integratif fengan beragam pendekatan kajian keilmuan sains, teknologi dan seni seperti metode dan pendekatan historis, psikologis, antropologis, sosiologis, politis, ekonomis, matematis dan lain-lain.

3. Faktor Strategis dan Pembangunan SDM

Sivitas akademika IAIN Bengkulu menyadari sepenuhnya bahwa satu-satunya jalan yang harus ditempuh agar lembaga pendidikan tinggi Islam ini dapat terus bertahan dan bersaing di era globalisasi adalah dengan mereformasi diri, dan cara terbaik untuk melakukan reformasi diri itu adalah dengan bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Bengkulu. Transformasi harus dilakukan, agar lembaga pendidikan tinggi ini memiliki kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*) dan otoritas keilmuan (*academic authority*) yang lebih luas untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di era globalisasi.

Perubahan IAIN menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu merupakan upaya strategis dan futuristik dalam memperkuat kapasitas kelembagaan lembaga pendidikan tinggi Islam ini, agar mempunyai kemampuan untuk merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang akan terus meningkat dan semakin bervariasi. Transformasi juga diperlukan sebagai konsekuensi logis dari keberadaan IAIN Bengkulu sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi pada umumnya dan sistem pendidikan tinggi Islam khususnya, untuk dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap upaya-upaya pemerataan dan peningkatan mutu serta relevansi pelayanan pendidikan tinggi.

Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 menjelaskan bahwa (a) Pembangunan harus mampu menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; (b) Pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan (c) Pembangunan harus mampu menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung oleh tata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga kualitas sosial masyarakat yang berlangsung saat ini terdapat kesenjangan dalam pembangunan dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Dalam menjawab persoalan ekonomi dan persoalan kehidupan lainnya tersebut, maka pendidikan memiliki peran penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh sebab itu, rancangan RPJMN 2015-2019

tersebut menentukan arah kebijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, salah satunya dengan cara meningkatkan akses, mutu, kesejaheraan, subsidi pendidikan tinggi islam agar pendidikan tinggi keagamaan islam dapat melakukan inovasi-inovasi yang mampu mendukung daya saing bangsa.

Dalam menjawab persoalan-persoalan globalisasi dan masalah nasional lainnya, Kementerian Agama RI membuat kebijakan, program dan strategi pelaksanaan kegiatan ditjen pendidikan Islam tahun 2010-2014, diantaranya Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam. Keluaran (*outputs*) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya akses pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), 2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan PTKI. 3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan PTKI. 4) Meningkatnya mutu tata kelola PTKI. Oleh sebab itu, keluaran (*outputs*) tersebut dilakukan dengan cara antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana PTKI, peningkatan mutu lulusan dan daya saing bertaraf internasional; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak; pengembangan Ma`had Aly pada PTKI; penataan program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel memenuhi kebutuhan pembangunan. Salah satu cara menempuh kebijakan tersebut adalah dengan melakukan transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN.

Transformasi IAIN menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dikarenakan akan mampu mendukung dan mengembangkan potensi-potensi

bersama yang ada di Bengkulu pada khususnya dan potensi nasional pada umumnya, sebagaimana dikemukakan Iqbal Mujtahid, dalam makalahnya yang berjudul *Strategi Pembangunan Daerah di Provinsi Bengkulu Indonesia Menuju MDGs 2015*, di antaranya:

- 1) Aspek Pembangunan potensi wisata diwilayah Bengkulu adalah obyek-obyek wisata yang cukup lengkap, baik wisata alam pegunungan maupun wisata alam pantai, wisata budaya dan sebagainya. Potensi wisata ini akan lebih prospektif apabila dikembangkan secara sinergis melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan bersama di wilayah Bengkulu.
- 2) Aspek Pembangunan Perdagangan dan Industri, pengembangan industri diarahkan dengan memperhatikan potensi lokal. Kemudahan akses terhadap sumber daya alam, tenaga kerja, dan pasar serta keterkaitan antar industri, menjadi pertimbangan dalam pengembangan industri diwilayah Bengkulu. Kebijakan strategis bersama yang mendesak adalah membangun komitmen bersama tentang kajian pengembangan perdagangan dan perindustrian strategis yang dapat dikelola bersama-sama oleh sembilan kabupaten dan satu kota. Kebijakan tersebut diawali dengan pengembangan zonasi sebagai acuan penetapan arah kebijakan umum daerah, khususnya bidang pembangunan perdagangan dan industri
- 3) Aspek Pembangunan. Pembangunan Pertanian dan perkebunan, kesenjangan kebijakan dibidang pemasaran hasil-hasil kebun dan

pertanian diwilayah Bengkulu merupakan hal mendesak yang yang perlu segera ditangani. Kebijakan penetapan harga hasil pertanian yang berbeda antar wilayah dapat mengakibatkan mekanisme pasar hasil pertanian mengarah kepada kondisi yang tidak diharapkan, seperti adanya perang harga produk pertanian yang merugikan petani produsen. Oleh karena itu, kebijakan yang terkait dengan pemasaran hasil pertanian dsangat perlu dikembangkan dalam kerangka kebijakan bersama.

- 4) Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia, dibidang ketenagakerjaan yang dihadapi bersama adalah kenyataan bahwa besarnya penduduk usia produktif tidak didukung kualitas yang tinggi serta terbatasnya lapangan kerja yang tersedia. Untuk pembinaan terhadap tenaga kerja, khususnya bagi yang akan bekerja ke luar daerah atau ke luar negeri perlu membentuk sebuah lembaga PJTKI bersama yang mengelola masalah ketenagakerjaan yang memfasilitasi para pencari kerja dengan memberikan informasi lowongan kerja baik dalam maupun luar negeri, mendukung dokumen legalitas tenaga kerja Indonesia, memberikan pelatihan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja, memeberikan perlindungan hukum dan dukungan finansial bagi TKI yang mengurus dokumen keimigrasian.
- 5) Aspek Pengembangan Investasi, Peranan investasi sangat strategis dalam pembangunan ekonomi, karena hal ini bermanfaat bagi peyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan daerah. Oleh

karena itu, upaya sumber daya lokal harus disertai dengan upaya peningkatan investasi daerah.

4. Perjuangan Alih Bentuk Kelembagaan

Dalam menjawab dinamika dan pengembangan potensi-potensi bersama tersebut, IAIN Bengkulu telah melakukan berbagai tahap upaya transformasi kelembagaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Propinsi Bengkulu pada khususnya dan bangsa pada umumnya. Sejarah perjuangan transformasi IAIN Raden Fatah Bengkulu dan STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu cukuplah panjang, menurut beberapa sumber, telah mencapai lebih kurang 30 tahun dan telah 10 kali pergantian menteri. Perjuangan transformasi STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu khususnya dimulai kembali pada tahun 1999, dimana ketua STAIN Bengkulu mengajukan permohonan Rekomendasi Kepada Gubernur Bengkulu Agusrin Najamuddin, untuk merekomendasikan tentang transformasi STAIN Ke IAIN. Surat tersebut dengan Nomor : Sti.03/PP.00.3/1132/2009, tanggal 30 September 2009.

Berdasarkan surat permohonan Ketua STAIN Bengkulu, pada tanggal 29 Oktober 2009 Gubernur Bengkulu mengeluarkan rekomendasi alih Status STAIN ke IAIN, dengan nomor surat 421.411.267, dimana Gubernur menyampaikan bahwa pada prinsipnya kami sangat mendukung dan menyetujui usul alih status dari STAIN Ke IAIN. Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut, selanjutnya gubernur melalui Keputusan Gubernur Bengkulu nomor B 276A.III tanggal 29 Oktober membentuk TIM Persiapan Perubahan Status STAIN menjadi IAIN Bengkulu. Selanjutnya Gubernur

Bengkulu kembali mengeluarkan Surat keputusannya dengan nomor M 304 A. III pada tanggal 17 Desember 2009, perihal peretujuan alih sttus STAIN menjadi IAIN Bengkulu.

Kemudian setelah pergantian kepemimpinan STAIN Bengkulu tahun 2010, perjuangan alih status/transformasi ini semakin digalakkan oleh Ketua STAIN Bengkulu yang baru, Dr. H Sirajuddin M, M.Ag., MH. Ketua STAIN kemudian membentuk Panitia dengan Surat keputusan Ketua STAIN Nomor 0594 tahun 2010 tentang Usul Alih Status Kelembagaan STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu.

Dengan segala daya dan upaya yang dilakukan bersama sejumlah pihak melalui tahapan yang panjang, akhirnya berkat rahmat Allah yang maha kuasa apa yang dicita-citakan terjawab sudah, yakni lahirnya IAIN Bengkulu yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Setelah keluarnya Peraturan Presiden RI, Ketua STAIN Bengkulu kemudian menyiapkan Organisasi dan Tata Kerja Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2012 tertanggal 23 November 2012. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Menteri Agama RI, Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si., melantik Dr. H Sirajuddin M, M.Ag., MH sebagai Rektor IAIN Bengkulu Periode 2013-2017 pada tanggal 23 Januari 2013 dan

kemudian diresmikan oleh Menteri Agama RI, DR. H. Suryadharma Ali, M.Si, pada Rabu 13 Maret 2013 yang memiliki tiga fakultas; Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris dan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

Dalam menjawab dinamika dan perkembangan kebutuhan masyarakat di Propinsi Bengkulu pada khususnya dan bangsa pada umumnya, IAIN Bengkulu kemudian mengembangkan Fakultas Baru, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pemecahan dari Fakultas Syariah yang ortaker tersebut sudah dibahas dan direkomendasi oleh Kementerian terkait, disamping pengembangan Ma'had al-Jami'ah IAIN Bengkulu juga sedang dalam tahapan pengusulan Izin.

Dengan adanya pengembangan kelembagaan tersebut, ternyata juga belum memadai dalam menjawab tantangan dan problem potensial yang harus dijawab oleh IAIN Bengkulu. Oleh sebab itu, sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam pertama dan terbesar di Propinsi Bengkulu ini harus melakukan langkah-langkah transformatif secara signifikan. Pengelolaan dan pengembangannya selama 3 tahun sangat terikat pada mandat awal pendiriannya, yaitu mendidik calon-calon pegawai pemerintah dalam bidang ilmu-ilmu agama, melalui tiga fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, dan Fakultas Tarbiyah dan Tadris.

Dengan mandat keilmuan yang sangat terbatas, peran dan kontribusi IAIN Bengkulu dalam pembangunan SDM sangat terbatas pada bidang sosial

keagamaan. Dalam usianya yang ke-3 IAIN Bengkulu telah menyelenggarakan 4 kali wisuda sarjana dan melahirkan 1.500 Sarjana S-1 dan 300 Sarjana S-2 dalam enam bidang ilmu Syari'ah, Ekonomi Islam, Ushuluddin, Adab dan Dakwah, dan Tarbiyah dan Tadris.

Alumni IAIN Bengkulu telah terdistribusi ke sejumlah pekerjaan, baik sebagai pegawai maupun pegawai swasta, dengan membawa bekal sains keagamaan yang mereka geluti. Berdasarkan Survey Tim IAIN Bengkulu 2014 tergambar bahwa mayoritas (75 %) alumni IAIN Bengkulu berkarir di lingkungan Kementerian Agama, sebagian kecil (25%) berkarir di lingkungan Pemerintah Daerah dan 5% tersebar di berbagai instansi lainnya, termasuk di sektor swasta. Banyak dari alumni tersebut yang menduduki posisi pimpinan dan menjadi *leading sector* dalam berbagai aktivitas sosial keagamaan dan kemasyarakatan, baik di tingkat lokal maupun nasional, bahkan internasional.

Institusi pendidikan ini telah berupaya memantau lulusan dengan mencari informasi langsung dari alumni yang masih berhubungan dengan dosen pembimbing, dosen yang dikenal, dan mahasiswa yang masih aktif kuliah. Sesuai dengan informasi yang sangat terbatas tersebut diperoleh keterangan bahwa yang dimaksud kesuksesan alumni ditandai dengan diserapnya mereka sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Dr. Zulkarnain Dali M. Pd, Dr. Ujang Mahadi M.Si, Dr. Asnaini M.Ag, Musmulyadi M. Pd, Suwarjin M. Ag, Drs. Supardi, M. Ag, Saefudin M. Si, Nurlaili M. Pd.I adalah representasi alumni IAIN Bengkulu yang diangkat sebagai dosen IAIN Bengkulu. Alumni IAIN Bengkulu yang lain seperti Atisar Sulaiman, S.Ag

(Kemendiknas Provinsi Bengkulu), Zahdi Tahir M.HI (Kabid Haji Kemenag Provinsi Bengkulu), Drs. Darmadi (Sekretariat PTA Propinsi Bengkulu), Drs. Almizan (Kabag Kesra Pemkot Bengkulu), Saibu, S.Ag (Juru Sita PA Kota Bengkulu), Juni Muslimin, S.Ag, MA (Kasi Kelembagaan dan Ketalaksanaan Kantor Wilayah Depatemen Agama Bengkulu), dan Ermen Fanseri, S.Ag (Guru SMA Bengkulu), Drs. Zainal Abidin (Kepala Kemenag Muko-muko), John Ramadhan, S.Ag, (Staf Khusus Kementerian PDT), Herliardo (Ketua PKB Provinsi Bengkulu) adalah sedikit dari nama-nama alumni yang dianggap sukses karena memperoleh pekerjaan. Hal ini dapat dipahami karena jurusan yang dimiliki oleh IAIN Bengkulu secara pragmatis hanya pada bidang pekerjaan yang agak terbatas pada instansi pemerintah. Bagaimanapun juga, harapan terkuat dari alumni Fakultas Tarbiyah dan Tadris adalah menjadi guru baik di lingkungan Kemenag maupun Kemendiknas. Prospek alumni Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam adalah menjadi pegawai KUA dan Hakim di Pengadilan Agama, perbankan syariah atau bisnis syariah, dan prospek alumni Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah adalah menjadi penyuluh di Penamas Depag dan beberapa formasi lain di lingkungan Depag dan instansi lain.

Jika ditelaah, ada sejumlah instansi yang diidentifikasi akan menjadi pengguna jasa alumni (*stakeholder*) dari IAIN Bengkulu, yaitu lembaga pemerintah (Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek dan Dikti, Kementerian Hukum dan HAM, dan Pemda), dunia usaha, LSM, dan beberapa lembaga lainnya. Dengan demikian inisiatif

dan perjuangan dalam transformasi IAIN Bengkulu menjadi UIN Bengkulu merupakan langkah terbaik dan akan menjadi harapan banyak pihak karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan pragmatis mereka, di samping aspek idealnya yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dalam ruang lingkup yang lebih luas.

Perlu diketahui bahwa tidak banyak ditemukan lembaga agama sebagai sentra belajar yang serius dan intensif semacam pesantren di Bengkulu bila dibandingkan dengan jumlah lembaga di Pulau Jawa, apalagi lembaga pendidikan tinggi agama yang fokus dalam bidang kajian tertentu. Apabila digeneralisir, masyarakat Bengkulu belakangan ini memiliki sikap cukup antusias terhadap agama dan terdorong memberi apresiasi yang tinggi terhadap Islam itu sendiri. Mereka sangat merindukan kehadiran lembaga UIN, yang dinilainya akan lebih signifikan dalam melahirkan alumni sebagaimana diurai sebelumnya karena dinilai lebih berkemampuan untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di masa kini. Jika IAIN Bengkulu nantinya menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu akan memperluas peluang dalam merealisasikan kegiatan Tri dharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) dalam rangka ikut memecahkan problem sosial dan sekaligus mengembangkan potens-potensi masyarakat di Propinsi Bengkulu pada khususnya dan bangsa pada umumnya.

Usul Transformasi IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu diharapkan akan dapat memberi kemudahan terhadap kelangsungan

kuantitas dan kualitas pembangunan keagamaan (rohaniah) dan profesionalisme kerja. Gagasan ini jika direalisasikan, diprediksikan tidak akan mengalami kesulitan karena semua elemen masyarakat di Propinsi Bengkulu telah mendukungnya. Mempertimbangkan panggilan akademik serta merespon dinamika perubahan kebutuhan pembangunan masyarakat, maka sejak tahun 2014 IAIN Bengkulu telah mengimplementasikan konsep *wider mandate* (mandat diperluas) untuk melakukan diversifikasi Program Studi (Prodi) yang kemudian direalisasikan secara praktis awal tahun 2015 dengan telah mengusulkan prodi-prodi umum, yakni Prodi Pendidikan IPA, Prodi Pendidikan IPS, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dan Prodi Pendidikan Matematika ke Kementerian Ristek dan Dikti melalui Rekomendasi Kementerian Agama RI. Dengan konsep dan langkah tersebut, IAIN Bengkulu tidak lagi terlalu terpaku pada mandat awalnya sebagai pusat pendidikan ilmu-ilmu keagamaan semata, tetapi mulai membuka prodi-prodi ilmu-ilmu umum. Namun pengembangan ilmu-ilmu umum di IAIN Bengkulu belum dapat berkembang secara maksimal, karena masih terbatasnya kapasitas kelembagaan dan otoritas keilmuan yang dimiliki. Pengenalan ilmu-ilmu umum hanya terbatas pada pengembangan prodi dan konsentrasi pada fakultas-fakultas yang telah ada (*existing faculties*), sehingga belum memiliki basis dan orientasi pengembangan yang memadai.

Eksistensi prodi berbasis umum diakui akan meningkatkan animo calon mahasiswa untuk studi di IAIN Bengkulu, namun belum dapat mengubah wajah lama IAIN Bengkulu sebagai pusat pengembangan ilmu-ilmu

keagamaan dan pendidikan SDM bidang sosial keagamaan. Dengan kondisi ini, masih sangat sulit bagi lembaga pendidikan tinggi Islam ini untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi dan merespons berbagai peluang dan tantangan yang muncul di era globalisasi.

Agar lembaga pendidikan tinggi Islam ini memiliki fondasi dan kapasitas kelembagaan yang kuat untuk mengembangkan berbagai bidang ilmu yang relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat, maka status kelembagaannya harus ditransformasikan dari format "institut" atau IAIN Bengkulu menuju format "universitas" atau UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Transformasi menuju universitas akan memberikan kapasitas kelembagaan yang lebih besar dan otoritas keilmuan yang lebih luas bagi lembaga pendidikan tinggi Islam ini, sehingga memungkinkan bagi para pengelolanya untuk dapat mendisain program-program akademik yang relevan dan kontekstual, dengan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Bertransformasi menjadi UIN akan membuat lembaga ini memiliki kapasitas kelembagaan yang besar dan mandat keilmuan yang tidak terbatas untuk dapat beradaptasi dengan trend perkembangan dunia pendidikan tinggi dan menjawab berbagai tantangan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan sumber daya manusia yang terus meningkat dan semakin bervariasi.

Sedangkan tujuan dari transformasi IAIN menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah untuk meningkatkan status dan kapasitas

kelembagaannya, agar menjadi sebuah universitas yang memiliki eksekusi (keunggulan) akademik dan distingsi (keberbedaan) akademik, *accountable*, dan mempunyai temuan-temuan ilmiah yang bermanfaat signifikan terhadap pemecahan problem sosial dan sekaligus pengembangan potensi-potensi umat. Dari sini, diharapkan dapat memberikan peran dan sumbangan secara maksimal optimal dalam proses pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkiprah pada pembangunan di Bengkulu khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Dasar pertimbangan dan tujuan alih status sebagaimana diuraikan di atas menggambarkan bahwa transformasi IAIN menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan, untuk membuat lembaga pendidikan tinggi Islam ini mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi dan merespons tuntutan dan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta SDM di era globalisasi. Keharusan tersebut dapat dilihat dari tiga kebutuhan utama, yaitu kebutuhan akan otoritas keilmuan yang lebih luas, kapasitas kelembagaan yang lebih besar, dan relevansi serta daya saing yang lebih tinggi.

5. Berbagai Dukungan Alih Status

Transformasi IAIN menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu didukung oleh para pemangku kepentingan yang ada di seluruh wilayah Bengkulu, seperti dukungan civitas akademik, dukungan pemda dan masyarakat, dukungan tokoh masyarakat, dukungan dipa, dan proyeksi dukungan bantuan luar negeri.

Sivitas Akademika IAIN Bengkulu senantiasa mendukung ide transformasi IAIN-UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dukungan ini tertuang dalam Keputusan Senat IAIN Bengkulu No. 005 tahun 2018 tentang Transformasi IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Menurut pertimbangan civitas transformasi diperlukan agar terjadi peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dalam mengembangkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner yang unggul dan kompetitif sebagai wujud sumbangsih pembangunan bagi bangsa dan Negara.

Dukungan rencana transformasi IAIN menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu telah didukung, baik secara moril maupun materiil oleh para kepala daerah, diantaranya Gubernur Bengkulu, para Bupati dalam Provinsi Bengkulu, Wali Kota Bengkulu, DPRD Provinsi dan Kota Bengkulu, Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Kajati, Kajari, MUI, Kapolda, Danrem, para Rektor/Ketua/pimpinan beberapa Perguruan Tinggi di Bengkulu. Secara umum, surat dukungan mereka berisi harapan agar transformasi IAIN menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu segera direalisasikan dan dapat mendorong terjadinya pengembangan paradigma keilmuan, baik yang berbasis pada agama maupun yang berbasis pada sains. Mereka sangat berharap kiranya UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memberikan kontribusi positif pada kualitas keilmuan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Bengkulu. Rencana transformasi IAIN menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu juga mendapat sambutan dan dukungan positif dari tokoh-tokoh masyarakat Bengkulu, baik yang

berdomisili di Bengkulu di daerah-daerah lain, termasuk mereka yang telah menjadi tokoh di Provinsi Bengkulu, seperti Gubernur Bengkulu, dr. Rohidin Mensyah, Universitas Bengkulu, Kemenag Provinsi Bengkulu, MUI Provinsi Bengkulu, dan para tokoh masyarakat yang lain.

Semua dukungan terhadap rencana transformasi IAIN menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu bertitik tolak pada komitmen bersama (*collective commitment*) untuk mewujudkan lembaga pendidikan tinggi yang mampu menjawab kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta SDM, menjadi salah satu ikon penting bagi kota Bengkulu, dan menjadi kebanggaan masyarakat Bengkulu.

6. Perpres 45/2021 Lahirnya UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu lahir berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Alih Bentuk Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. UIN Bengkulu terbentuk pada maa Rektor Prof. Dr. Sirajuddin M., M. Ag., MH. Perubahan atau transformasi kelembagaan ini pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan penting bagi masyarakat Provindi Bengkulu. Diantaranya tujuan tersebut adalah untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli dalam bidang ilmu agama Islam baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu diharapkan menjadi PTKIN pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman di Provinsi Bengkulu. UIN Bengkulu

adalah wujud memantapkan posisi umat Islam di Provinsi Bengkulu untuk berkecimpung dalam pengembangan keilmuan secara komprehensif. UIN Bengkulu dalam operasional akademiknya akan membuka beberapa fakultas baru dengan sejumlah program studi (prodi) umum. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu diharapkan mampu mendialektika secara integratif dalam kajian ilmu keislaman dan ilmu umum sehingga memberi warna baru peradaban keilmuan melalui integrasi keilmuan. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ke depan juga diharapkan dapat berkolaborasi dengan lembaga atau perguruan tinggi lain. Program kerja sama pada bidang pengembangan akademik.

Bahasan tentang UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu akan diperdalam lebih detail pada Bab selanjutnya.



BAB III
DESKRIPSI UMUM
DAN KEBIJAKAN ARAH PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGGKULU

D. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah “Menjadi Pusat Studi Islam dan Peradaban berwawasan Kebangsaan dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul”.⁶² Visi ini sejalan dengan visi dan misi Kementerian Agama. Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan misi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sarjana yang ahli dalam ilmu keislaman dan sains, yang soleh, professional, moderat yang berwawasan kebangsaan.
2. Meningkatkan kualitas penelitian, publikasi ilmiah bereputasi nasional dan global.
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dalam membangun kehidupan sosial yang cerdas, soleh, produktif dan sejahtera.
4. Meningkatkan kualitas kerjasama pada tingkat nasional dan internasional dalam mendorong peningkatan daya saing lulusan.

⁶² Peraturan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

5. Memantapkan tata kelola dan kepemimpinan yang adil dalam membangun *Good University Governance* (GUG).

Tujuan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah:

1. Peningkatan kualitas lulusan dalam studi keislaman dan sains yang berakhlakul karimah, professional dan moderat;
2. Peningkatan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah bereputasi yang responsif terhadap pengembangan keilmuan dan kepentingan kebangsaan;
3. Peningkatan kualitas pengabdian dalam mengembangkan masyarakat yang cerdas, soleh, produktif dan sejahtera berwawasan kebangsaan;
4. Peningkatan kualitas kerjasama berskala nasional dan internasional dalam mewujudkan daya saing lulusan;
5. Peningkatan budaya birokrasi dan kepemimpinan yang adil, bersih dan responsif.

Sedangkan sasaran UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah:

1. Memperkuat kualitas sistem pendidikan yang berperspektif moderat;
2. Meningkatkan kualitas Dasen dan Tenaga Kependidikan;
3. Meningkatkan standar dan sistem penjaminan mutu;
4. Meningkatkan reputasi dan kerja sama pada level internasional;
5. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Meningkatkan prestasi Mahasiswa dan kualitas lulusan;
7. Meningkatkan kualitas tata pamong dan tata kelola yang efektif dan

akuntabel;

8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mewujudkan layanan prima, efisien dan efektif; dan meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan.

B. Struktur Satuan Akademik dan Birokrasi

(1) Fakultas, Program Studi, Lembaga, dan UPT

Pengembangan satuan kelembagaan akademik UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang eksisting saat ini merupakan program pengembangan yang selama ini dilakukan oleh pimpinan sebelumnya sejak dari masa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), hingga sekarang UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Berdasarkan ketentuan yang baru, struktur kepemimpinan akademik UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah sebagai berikut:

7. Fakultas Syari'ah, dengan 3 (tiga) program studi:

- d. Ahwal al-Syakhshiyah/Hukum Keluarga Islam (HKI)
- e. Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)
- f. Hukum Tata Negara Islam/ Siyasah syar'iyah (HTN)

8. Fakultas Tarbiyah dan Tadris, dengan 9 (Sembilan) program studi:

- j. Pendidikan Agama Islam (PAI),
- k. Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
- l. Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)
- m. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).
- n. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

- o. Tadris Matematika
 - p. Tadris IPA
 - q. Tadris IPS
 - r. Tadris Bahasa Indonesia
9. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwahh, dengan 9 (sembilan) program studi:
- a. Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IQT)
 - b. Ilmu Hadis (IH)
 - c. Filsafat Agama (FA)
 - d. Bahasa dan Sastra Arab (BSA)
 - e. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
 - f. Komunikasi dan penyiaran Islam (KPI)
 - g. Bimbingan Konseling Islam (BKI)
 - h. Manajemen Dakwah (MD)
10. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 4 (Empat) program studi:
- a. Ekonomi Syariah (ES)
 - b. Perbankan Syariah (PS)
 - c. Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA)
 - d. Manajemen Haji dan Umrah (MHU)
11. Program Pasca Sarjana Magister (S2), dengan 6 (Enam) program studi:
- g. Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS)

- h. Pendidikan Agama Islam (PAI)
 - i. Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
 - j. Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)
 - k. HUKUM Tata Negara (HTN)
 - l. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
12. Program Pascasarjana doktor (S3), dengan 2 (Dua) program studi:
- b. Pendidikan Agama Islam (PAI)
 - c. Studi Islam (SI)

Dalam melaksanakan program akademik dan pendukung akademik, Rektor dibantu oleh 2 (dua) lembaga. Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor. Berdasarkan struktur kelembagaan adalah:

(2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat:

- a. Pusat Penelitian dan Penerbitan
 - b. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c. Pusat Studi Gender dan Anak
 - d. Pusat Moderasi Beragama
 - e. Pusat Studi Halal
 - f. Pusat Klinik Kesehatan
2. Lembaga Penjaminan Mutu Akademik:
- a. Pusat Penjaminan Mutu Akademik
 - b. Pusat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Akademik

Selain lembaga Rektor dibantu oleh unit pelaksana teknis (UPT)

berbentuk pusat. Pusat dipimpin oleh seorang kepala pusat:

1. Pusat Perpustakaan
2. Pusat Makhad Al-Jami'ah
3. Pusat Pengembangan bahasa
4. Pusat Studi Quran dan Ibadah Masyarakat
5. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

- Struktur Organisasi dan Birokrasi

Struktur tata pamong Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh birokrasi akademik dan non akademik dalam struktur yang instruksional, herarkis, dan koordinatif.

Tabel 3.1
Struktur Organisasi Rektorat UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Nomor		Jabatan		Nama
AK	NA	Akademik	Non Akademik dan UPT	
1		Rektor		Prof. Dr. Zulkarnain MPd
2		Wakil Rektor I		Dr. Khairuddin, M. Ag
3		Wakil Rektor II		Prof. Dr. Zubaedi Mag MPd
4		Wakil Rektor III		Dr Fatimah MA
	5		Biro AUAK	Dr. Mukhlisuddin MH
	6		Kepala SPI	Dr. Khairiyah MPd
	7		Kabag Umum	Sri Ihsan MPd
	8		Koor. Perencanaan Keuangan	JF Ahmad Nazir, SE dan

9	Pusat Makhad	Dr. H Rozian Karnedi Mag
10	Pusat Perpustakaan	Syahril, M.Pd
11	Pusat TIPD	Prof. Andang Sunarto, S.Si., M.Kom., PhD
12	Pusat Bahasa	Dr Riswanto MPd
13	Pusat QIK	Drs H Rizkan Syahbudin
14	Pusat Pengembangan Karir	Arif rahman Hakim M.Pd Ph.D

Tabel 3.2
Struktur Organisasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Nomor		Jabatan		Nama
AK	NA	Akademik	Non Akademik dan UPT	
1		Dekan		Dr. Swarjin MA
2		Wakil Dekan I		Dr. Miti Yarmunida Mag
3		Wakil Dekan II		Dr. Iim Fahima Mag
4		Wakil Dekan III		Werry Gusmansyah, S.HI.,MH
	5		Kabag TU	Edi Irwansyah, S.Sos
6		Kajur Syariah		Werry Gusmansyah, S.HI.,MH
7		Sekret. Jurusan		Fauzan S.Ag., MH
8		Koor. Prodi HKI		Etry Mike, M.H
9		Koor. Prodi		Badrun Tamam, M.Hum

	HES		
10	Koor. Prodi HTN		Ifansyah Putra, M.Sos

Tabel 3.3
Struktur Organisasi Fakultas Tarbiyah dan Tadris
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Nomor	Jabatan		Nama
	AK	NA Akademik Non Akademik dan UPT	
1		Dekan	Dr. Mus Mulyadi, M.Pd
2		Wakil Dekan I	Dr. Edi Ansyah, M.Pd
3		Wakil Dekan II	Dr. Ali Akbarjono, S.Ag., M.Hum., M.Pd
4		Wakil Dekan III	Dr. Iwan Satria, M.Pd
	5	Kabag TU	Helvi Mardiatun, S.Pd
6		Koor. Prodi PPG	Dr. Pasmah Chandra S.Pd.I., M.Pd.I
7		Kajur Tarbiyah	Aziza Aryati, M.Ag
8		Sekret. Jurusan	Adi Saputra, M.Pd
9		Koor. Prodi PAI	Hengki Satriarno, M.Pd.i
10		Koor.Prodi PGMI	Abdul Aziz, M. M.Pd
11		Koor.Prodi PIAUD	Ixsir Eliya, M.Pd
12		Kajur Pendidikan Bahasa	Risnawati, M.Pd
13		Sekret. Jurusan	Rossi Delta Fitriana, M.Pd
14		Koor. Prodi	Akhirudin, M.Pd.i

PBA		
15	Koor.Prodi B.ING	Feny Martina, M.Pd
16	Koor.Prodi B.INDO	Heny Friantari, M.Pd
17	Kajur Pendidikan Sains & Sosial	M. Hidayaturrahman, M.Pd
18	Sekret. Jurusan	Fatrica Syafri, M.Pd
19	Koor. Prodi MTK	Nurlia Latipah, M.Pd, Si
20	Koor. Prodi IPA	Qqomariah Hasanah, M.Si
21	Koor. Prodi IPS	Khosi'in, M.Pd., Si

Tabel 3.4
Struktur Organisasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Nomor		Jabatan		Nama
AK	NA	Akademik	Non Akademik dan UPT	
1		Dekan		Dr. Aan Supian, M.Ag
2		Wakil Dekan I		Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I
3		Wakil Dekan II		Dr. M. Ridho Syabibi, M.Ag
4		Wakil Dekan III		Dr. Japarudin, M.Si
	5		Kabag TU	Joyo, S.Ag
6		Kajur Ushuluddin		Dr. Ashadi Cahyadi S.Sos.I.,MA
7		Sekret. Jurusan		Armin Tedy, S.Th.,M.Ag
8		Koor. Prodi IH		Agusri Fauzan, MA
9		Koor. Prodi AFI		M.Zikri, M.Hum

10	Koor. Prodi IQT	H. Syukraini Ahmad, M.Ag
11	Kajur Adab	Robeet Thadi S.Sos MSi
12	Sekret. Jurusan	Ahmad Abas Musofa, M.Ag
13	Koor. Prodi BSA	M. Azizullah Iliyas, MA
14	Koor. Prodi SPI	Arum Puspita Sari, MA
15	Kajur Dakwah	Wira Hadikusuma, M.Si
16	Sekret. Jurusan	Pebri Prandika Putra, M.Hum
17	Koor. Prodi BKI	Dilla Astarini, M.Pd
18	Koor. Prodi KPI	Musyaffa, M.Sos
19	Koor. Prodi MD	Ihsan Rahmat, MPA

Tabel 3.5
Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Nomor		Jabatan		Nama
AK	NA	Akademik	Non Akademik dan UPT	
1		Dekan		Dr. H. Suradi, M.Ag
2		Wakil Dekan I		Dr. Nurul Hak, MA
3		Wakil Dekan II		Dr. Desi Isnaini, MA
4		Wakil Dekan III		Eka Sri Wahyuni SE, MM
	5		Kabag TU	Mamah Rohmah, SE.MM
6		Kajur EKIS		Yenti Sumarni, S.E.,MM
7		Sekret. Jurusan		Aan Shar, MM
8		Koor.Prodi Perbankan Syariah		Aan Shar, MM

9	Koor.Prodi Ekonomi Syariah	Nonie Afrianty, S.E.I., M.E
10	Kajur Manajemen	Idwal B, MA
11	Sekret. Jurusan	Adi Setiawan, M.E.I
12	Koor.Prodi MAZAWA	Debby Arisandi, M.BA
13	Koor.Prodi Manajemen Haji dan Umrah	Faisal Muttaqin, M.S.M

Tabel 3.6
Struktur Organisasi Program Pascasarjana
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Nomor		Jabatan		Nama
AK	NA	Akademik	Non Akademik dan UPT	
1		Direktur		Prof. Dr. Rohimin, M.Ag
2		Wakil Direktur		Dr Imam Mahdi, S.H, M.H
4		Kaprodi S3 Studi Islam		Dr. Asnaini, MA
5		Sekret. Prodi S3 Studi Islam		Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
8		Kaprodi S3 PAI		Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I
9		Sekret. Prodi		Dr. Al Fauzan Amin, M.Ag
10		Kaprodi HTN		Dr. Ismail Jalili, MA
11		Sekret. Prodi		Dr. Moc. Iqbal, M.Si
12		Kaprodi MPI		Dr. Mindani, M.Ag
13		Sekret. Prodi		Dr. Moc. Iqbal, M.Si

14	Kaprodi PAI	Dr. Nurlaili, M.Pd
15	Sekret. Prodi	Dr. Desy Eka Citra, M.Pd
16	Kaprodi Hukum Islam	Dr. Zurfah Nurdin, M.Ag
17	Sekret. Prodi	Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
18	Kaprodi AFI	Dr. Ismail, M.Ag
19	Sekret. Prodi	Dr. Moc. Iqbal, M.Si
20	Kaprodi PIAUD	Dr. Nelly Marhayati, M.Si
21	Sekret. Prodi	Dr. Alimni, M.Pd

Tabel 3. 7
Struktur & Birokrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Nomor		Jabatan		Nama
AK	NA	Akademik	Non Akademik dan UPT	
1		Ketua		Dr. Suhirman, M.Pd
2		Sekretaris		Saepudin, M.Ag
3		Kapus Penelitian		Dayun Riyadi, M.Ag
4		Kapus Pengabdian Masyarakat		Evan Stiawan, MM,
5		Kapus Studi Anak Gender		Ahmad Syarifin, M.Ag
6		Kapus Studi Halal		Khozin Zacky, M.A
7		Kapus Klinik Kesehatan		Ocik Lestari, S.ST
8		Kapus Publikasi Ilmiah		Romi Adetio Setiawan, MA, Ph.D

9	Kapus Moderasi Beragama	Dr. Pasmah Chandra S.Pd.I., M.Pd.I
---	-------------------------	------------------------------------

Tabel 3.8
Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Nomor		Jabatan		Nama
AK	NA	Akademik	Non Akademik dan UPT	
1		Ketua		Dr. Samsudin, M.Pd
2		Sekretaris		Rini Fitria, S.Ag., M.Si
3		Kapus Pengembangan Mutu Akademik		Yunida Een Pryanti, SE
4		Kapus Pengawaan dan Pengendalian Mutu Akademik		Drs. H Hendri Kusnadi, M.H.I

- Prinsip Integrasi Keilmuan

Agar dapat eksis di tengah-tengah dinamika perkembangan dan persaingan lembaga pendidikan tinggi yang sangat ketat, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu akan dikembangkan menjadi lembaga pendidikan tinggi yang memiliki beberapa distingsi atau keunikan dan keunggulan sebagai berikut:

Integrasi Agama dan Sains

Paradigma keilmuan Islam sejatinya bersifat non-dikhotomik/holistik yang berhasil mengantarkan peradaban Islam dalam meraih era kegemilangan/keemasan. Dalam perjalanan sejarah dewasa ini, pendidikan tinggi di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia justru menerapkan

dikotomi antara agama dan sains. Selain menghambat perkembangan sains, dikotomi tersebut mengkerdilkan pemahaman keagamaan, dan memecahbelah kaum intelektual. Kaum intelektual terbelah dua menjadi kelompok agamawan dan saintis. Masing-masing kelompok cenderung berjalan sendiri tanpa sinergi dan kerjasama, sehingga menciptakan kesenjangan antara agama dan sains dan belum dapat memberikan kontribusi maksimal pada upaya peningkatan kualitas hidup beragama, berbangsa, dan bernegara. Epistemologi, ontologi, dan aksiologi berbagai program Tri Dharma pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu akan dirancang, diarahkan, dan dikembangkan ke arah unifikasi agama dan sains, dalam rangka melahirkan para agamawan yang berwawasan sains dan para saintis yang berwawasan agama.

Dengan konsep integrasi agama dan sains, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu akan berkembang menjadi perguruan tinggi alternatif yang memiliki paradigma keilmuan, program-program Tri Dharma, dan karakteristik lulusan yang unik. Universitas Islam Negeri (UIN) Bengkulu akan menjadi salah satu lembaga pendidikan tinggi di wilayah Sumbagsel yang akan membekali para lulusannya dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sains sebagai satu kesatuan. Di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, agama dan sains diikat oleh semangat dan moral akademik yang sama (*shared academic spirit and moral*), sehingga berpadu, menjadi satu kesatuan yang mewarnai semua kegiatan Tri Dharma. Di fakultas-fakultas keagamaan, berbagai kegiatan Tri Dharma dikaitkan dan dipadu dengan perkembangan sains dan di fakultas-fakultas sains, berbagai kegiatan Tri Dharma dikaitkan

dan dipadu dengan nilai-nilai keagamaan. Di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, studi keislaman akan diperkaya dengan pendekatan saintis dan studi sains akan diperkaya dengan pendekatan keagamaan. Unifikasi agama dan sains akan diwujudkan dengan mengembangkan "Konstruksi Ilmu Berbasis Filsafat Ilmu Holistik-Terpadu dengan simbolisasi "Rumah Ilmu".

Upaya awal membangun konstruksi ilmu yang holistik (Islami, sesuai fitrah) dimulai dengan mengkonstruksi paradigma atau cara pandang (worldview) yang menjadi landasan pengembangan ilmu. Ibarat sebuah rumah paradigma adalah fondasi yang menjadi pijakan bangunan di atasnya. Konstruksi keilmuan holistic terdiri atas lima elemen penting, yaitu: konsep tentang hakikat Tuhan, realitas, ilmu, etika atau nilai, dan kebajikan. Atau dengan menggunakan klasifikasi lain yaitu: konsep metafisika, kosmologi, ontology, dan eskatologi. Lima konsep ini adalah konsep-konsep paradigma Islam yang berbasis pada ajaran Tauhid.

Konsep ilmu holistic yang akan diterapkan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu secara ontologis antara lain berbicara tentang sumber dan obyek ilmu dan berpijak pada cara pandang yang mengintegrasikan sumber dan obyek ilmu dengan landasan Tauhid. Bahwa sumber ilmu itu yang hakiki adalah Allah SWT. Dari Allah muncul sumber-sumber berupa pancaindera, akal, intuisi, dan khabar shaadiq (wahyu). Adapun obyek ilmu bukan hanya realitas fisik-material, tetapi juga realitas mental- spiritual. Dimensi iman (keyakinan) dengan segala turunannya dan akhlak juga dapat dipelajari dan dikembangkan menjadi disiplin ilmu tersendiri, tidak hanya menjadi ilmu

agama, tetapi juga ilmu- ilmu kejiwaan (psikologi Islam, misalnya menghasilkan teori kecerdasan spiritual, hypnoterapi Islam, ruqiyah, dan sebagainya), dan ilmu-ilmu lainnya.

Konsep kosmologi Islam menyatakan bahwa alam ini diciptakan oleh zat Yang Maha Esa bernama Allah SWT, jadi alam bukan terjadi dengan sendirinya sebagaimana pandangan materialisme/naturalisme. Alam ini adalah wahana yang luas untuk mencari tanda-tanda eksistensi dan kebesaran Allah [ayatinaa fi al-afaaqi wa fii anfusihim), melalui sains dan teknologi, dalam rangka menemukan bahwa eksistensi dan kebesaran Allah itu benar/ obyektif (al-haqq) adanya. Ini berbeda dengan pandangan materialisme yang berpandangan bahwa eksistensi alam semata untuk dieksplorasi dan dieksploitasi (melalui sains dan teknologi) demi kepentingan manusia, tidak ada tujuan lebih dari itu.

Untuk menunjang unifikasi agama dan sains, semua mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu wajib memiliki kompetensi minimal baca-tulis Al-Qur'an pada tahun pertama mereka sebagai mahasiswa. Semua mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu diwajibkan mengikuti program pembinaan baca-tulis al-Qur'an. Setelah lulus pembinaan mereka akan diberikan sertifikat kelulusan dan sertifikat tersebut menjadi persyaratan wajib untuk mengikuti ujian komprehensif dan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kompetensi Baca-Tulis Al-Qur'an diharapkan menjadi bekal berharga bagi para lulusan semua fakultas dan prodi yang ada di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, untuk dapat mengaktualisasikan diri mereka di tengah

masyarakat. Di samping itu, beberapa matakuliah pengantar unifikasi sains dan agama akan didesain dan wajib diambil oleh semua mahasiswa, seperti interkoneksi Islam dan Sains, Islam dan Peradaban Global serta Islam, Inter-relasi Psikologi Barat dan Psikologi Islam, serta modernisasi manajemen haji dan Umroh.

C. Sarana Prasarana dan SDM

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki area lahan 68,5 Ha, dengan luas bangunan 67.937 M², yang terdiri dari gedung Rektorat, gedung pertemuan, gedung fakultas, gedung ruang belajar, gedung olah raga, masjid, lembaga, perpustakaan, dan UPT, dan asrama mahasiswa, serta gedung-gedung perkuliahan di empat fakultas dan pascasarjana. Bila diasumsikan bahwa setiap mahasiswa membutuhkan 5 M², sementara UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki 6.982 mahasiswa, maka selayaknya kampus ini memiliki luas bangunan 49.937 M². Ruang-ruang kuliah multimedia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pelayanan jaringan internet 5 bandwidth (MBPS) mampu melayani keperluan akademik mahasiswa.

Jumlah gedung berdasarkan fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.1
Jumlah Gedung Berdasarkan Fungsinya

Nomor	Jenis Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor	11 unit	Keadaan baik
2	Gedung Ruang belajar	133 RB	Keadaan baik
3	Gedung Laboratorium	9 unit	Keadaan baik
4	Gedung Pertemuan	5 unit	Keadaan baik
5	Masjid	1 unit	Keadaan baik

6	Lapangan olahraga	5 lokasi	Keadaan baik
7	Gedung olah raga	1 unit	Keadaan baik
8	Gedung Makhad	2 unit	Keadaan baik
9	Gedung Perpustakaan	1 unit	Keadaan baik
10	Guest Haouse	1 unit	Keadaan baik
11	Gedung Unit usaha	2 unit	Keadaan baik

Sumber: Data Inventaris dari bagian Umum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu⁶³

Pembangunan untuk penambahan terhadap kekurangan sarana prasarana secara bertahap dan berkelanjutan terus dilakukan hingga saat ini/DIPA UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022.

Seiring dengan sarana prasarana yang ada, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, dalam menjalankan roda akademik didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dosen yang memenuhi jumlah terbatas (sesuai keadaan yang ada). Rincian jumlah dosen yang telah berkualifikasi Profesor, Doktor, dan Magister sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Jumlah *Human Capital* / SDM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

No	Variabel Dosen/ASN/Mhs	Jumlah	Keterangan
1	Guru Besar (Profesor)	5 orang	Aktif
2	Lektor Kepala	43 orang	Aktif
3	Lektor	90 orang	Aktif
4	Asst. Ahli	97 orang	Aktif
5	Pegawai ASN	132 orang	Aktif
6	Mahasiswa	9.982 orang	Aktif

Sumber: <https://data.uinfabengkulu.ac.id>⁶⁴

Tabel 3.1.3
Jumlah Dosen Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi	Strata 3 (Doktor)	Strata 2 (Magister)	Total Jumlah
----	-------------	----------------------	------------------------	-----------------

⁶³ *Sumber: Data Inventaris dari bagian Umum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*

⁶⁴ *Sumber: <https://data.uinfabengkulu.ac.id>*

1	Guru besar	5	0	5
2	Lektor Kepala	25	18	43
3	Lektor	18	72	90
4	Asst. Ahli	2	95	97
	Total	50	185	235

Sumber: <https://data.uinfabengkulu.ac.id>

Untuk meningkatkan kualifikasi dosen berpendidikan Doktor, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terus memberi kesempatan kepada dosen yang masih berpendidikan Magister untuk melakukan studi lanjut sesuai dengan jurusan yang menjadi base kompetensinya. Sementara itu rektor terus mendorong dosen untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi di Luar Negeri. Namun jika tidak memungkinkan melanjutkan strata tiga di Perguruan tinggi luar negeri, tetap dapat melanjutkan di PTKI atau PTU dalam negeri.

D. Rencana Program Unggulan

(1) Program Bahasa Asing

Pembinaan bahasa asing di perguruan tinggi pada umumnya hanya terbatas pada bahasa Inggris. Tetapi di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, pembinaan bahasa asing akan dilakukan pada dua bahasa, yaitu Arab dan Inggris. Bagi yang berminat dan membutuhkan, akan disediakan juga pembinaan bahasa asing lainnya, seperti India, Cina dan Persi. Kursus Bahasa Cina dimungkinkan diselenggarakan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga kursus Bahasa Cina yang ada di Bengkulu. Bahasa India akan diselenggarakan melalui kerja sama dengan JNU (University of Jawaharlal

Nehru) India. Penguatan Bahasa Persi akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kedubes Iran.

Semua mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu diwajibkan mengikuti program pembinaan bahasa asing, terutama bahasa Arab dan Inggris, agar mereka memiliki kompetensi bahasa asing yang memadai untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan mengembangkan karir akademik. Untuk dapat menyelesaikan studi, mereka diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi bahasa Arab dan Inggris dengan skor minimal yang telah ditentukan oleh Pusat Bahasa.

(2) Pusat Kajian Manajemen Haji dan Umroh

IAIN Bengkulu membawa misi akademik dalam mesebagai wadah *Tafaqquh fi al-addin*, sekaligus berperan sebagai *center of excellence* dalam pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang berwawasan keislaman yang mencerminkan Nusantara. Warna Kuning Emas pada tulisan *Tafaqquh fi al-addin* dan *center of excellence* melambangkan kejayaan IAIN Bengkulu dan eksistensinya menjadi harapan masyarakat dalam membangun peradaban bangsa dan Negara. Tulisan berbahasa Inggris setengah lingkaran, *center of excellence*, berarti Pusat Keunggulan, yang melambangkan IAIN Bengkulu sebagai pusat kajian ilmu-ilmu sains dan kewirausahaan. Gambar Bunga Raflesia berwarna merah, melambangkan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagai lembaga pendidikan yang membangun wawasan keilmuan berdasarkan kerifan lokal masyarakat Provinsi Bengkulu. Dua Bintang

berwarna biru yang mengapit tulisan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, melambangkan ketinggian dan keluhuran. Perisai berwarna kuning berbentuk lengkung ke atas, melambangkan kekuatan dan keagungan civitas akademika IAIN Bengkulu. Bingkai Segi Lima Dasar Warna Hijau melambangkan civitas akademika IAIN Bengkulu sebagai pelopor pembangunan masyarakat yang damai-sejahtera berasaskan nilai-nilai Islam dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara akademik, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi pusat kajian manajemen haji dan Umroh di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dengan spesifikasi keunggulan ini akan melengkapi keunggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan tinggi lain di kawasan ini. Jika IAIN Sumatera Utara memiliki spesifikasi kajian bidang Ekonomi Syariah, IAIN Semarang bidang Ilmu Falak/Astronomi, dan IAIN Mataram bidang Ulumul Qur'an, UIN Palembang akan memiliki spesifikasi kajian bidang Peradaban Islam Melayu, maka UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki unggulan dalam pengembangan keilmuan dan manajemen haji dan umrah. Pilihan spesifikasi ini diambil berdasarkan analisis kondisi empiris bahwa belum ada PT yang mengembangkan kajian ini. Pada hal haji dan umroh menjadi ibadah yang menuntut regulasi, pengelolaan/penanganan dan pengawasan yang semakin modern seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Hal ini juga mengingat ibadah haji dan umroh bersifat multidimensi atau kompleks. Di dalam ada dimensi ibadah/ritual, transportasi, IT, manajemen dan lain-lain.

Haji dan umroh sudah saatnya menjadi fokus dan lokus kajian secara spesifik dalam wadah prodi, dan fakultas. Hal didasari sejumlah pertimbangan. *Pertama*, dasar dan payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Eksistensi undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 ini belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat. Karena substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat mempresentasikan terselenggaranya ibadah haji secara paripurna (professional). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 dalam prakteknya akan selalu memunculkan masalah, yaitu antara lain karena: regulasi dan operasi terpusat dalam satu institusi, satuan kerja yang bersifat ad hoc, subsidi APBN / APBD, penetapan BPIH, pelayanan (akomodasi, transportasi, katering, serta kesehatan), koordinasi lintas instansi dan Stake Holders.

Kendati penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan kegiatan rutin setiap tahun, namun tidak pernah sepi dari masalah, seperti jauhnya pemondokan jamaah dari Masjid al-haram, daya tampung dan fasilitas pemondokan yang tidak memadai, transportasi antarjemput jamaah yang kacau, adanya pungutan yang tidak bertanggung jawab, distribusi *catering* yang kacau, penelantaran calon jamaah oleh KBIH atau penyelenggara haji khusus, dan lain sebagainya. Adanya berbagai masalah tersebut sudah barang tentu memberikan dampak tidak baik bagi pemerintah dan jamaah. Pemerintah dianggap tidak pernah serius mempersiapkan dan menyelenggarakan prosesi ibadah haji. Hal tersebut tentu lama-kelamaan bisa

menghilangkan kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintah. Mengemukakan discourse tentang perlunya swastanisasi haji sesungguhnya bermula dari kenyataan tersebut. Banyak kalangan percaya bahwa hanya melalui swatanisasi haji, penyelenggaraan haji di Indonesia akan berjalan lebih baik. Namun demikian, tidak sedikit pula kalangan yang meragukannya, sebab pengalaman pada masa lalu tidak membuktikan hal tersebut.

Kedua, sampai saat ini, masih ada sejumlah isu aktual yang masih mewarnai penyelenggaraan haji, antara lain: bunga tabungan, dana talangan, dana abadi umat, daftar tunggu, dan sertifikat manasik. Berkaitan dengan isu bunga tabungan dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tabungan haji dari setoran awal jamaah calon haji yang kini mencapai sekitar Rp. 40 Trilyun dengan bunga rata-rata Rp. 1,5 – 2 Trilyun pada setiap tahunnya dikuasai oleh Kementerian Agama dan dipergunakan untuk mensubsidi jama'ah yang berangkat (jama'ah) yang masih menunggu mensubsidi jama'ah yang berangkat). Hal memunculkan persoalan, apakah hukum dan keabsahan bunga tabungan yang dimanfaatkan tanpa izin dari jamaah calon haji. Selain itu, jumlah bunga yang besar itu berpotensi rawan penyimpangan dan penyelewengan, sebagaimana ditelisik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berkaitan dengan dan talangan haji yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan dan kini menjadi tren di masyarakat pada hakekatnya telah mendistorsi syarat istitha'ah haji. Meski dengan dalih sebagai akad qardh

(piutang) dan ijarah (sewa menyewa jasa) tetapi secara syar'ii, penggabungan antara piutang dan jual beli itu dilarang. Di samping dana talangan itu menimbulkan praktik rentenir dan sangat memberatkan masyarakat. Selama masa penantian banyak dari mereka yang harus tersiksa dengan cicilan piutang. Bahkan sepulang menunaikan ibadah haji pun, seringkali masih menanggung beban cicilan biaya perjalanan hajinya.

Berkaitan dengan dana Abadi Umat yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Kini, jumlah dana tersebut konon telah mencapai sekitar Rp. 2,5 Trilyun. Dana itu tidak dapat dimanfaatkan sejak dibekukan pada tahun 2005. Semestinya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, peruntukan DAU harus ditujukan kepada kemaslahatan umat yang meliputi kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Berkaitan dengan daftar tunggu. Secara nasional daftar tunggu calon jamaah haji hingga kini sudah mencapai sekitar 1,9 juta orang, sementara kuota haji Indonesia setiap tahunnya hanya 211.000 orang, sehingga semakin hari semakin panjang daftar tunggu (*waitinglist*) untuk keberangkatan haji. Meski Pemerintah telah mengajukan permohonan agar diberikan kuota tambahan sebanyak 30.000 orang kepada Pemerintah Arab Saudi, tetapi itu bukan solusi. Hal ini perlu kebijakan yang tepat, tegas dan cerdas untuk mengatasinya.

Berkaitan dengan sertifikat manasik. Sebagaimana diketahui, manasik haji yang lazim dilakukan sebelum calon jamaah haji berangkat menunaikan ibadah haji saat ini terasa kurang intensif dan bahkan terkesan hanya formalitas belaka, sehingga kurang berdampak pada kemampuan dan penguasaan seseorang terhadap substansi manasik apalagi manasik haji. Padahal kemampuan dan penguasaan terhadap Manasik Haji akan menentukan kualitas haji. Untuk itu, syarat istitha'ah semestinya juga mencakup penguasaan aspek ilmu dan pengetahuan agama. Dalam proses manasik haji, perlu ada uji membaca Al Quran, dan pengetahuan agama lainnya. Bagi yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat manasik dan diperkenankan berangkat melakukan ibadah haji.

Jika dicermati, sejauh ini masih ditemui sejumlah permasalahan yang mewarnai penyelenggaraan Ibadah Haji yang perlu dicermati. *Pertama*, muncul penilaian dari eksternal bahwa manajemen penyelenggaraan ibadah haji bahwa selama ini aspek kelembagaan, pengelolaan keuangan, peningkatan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji masih belum efektif. Undang – Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji belum tegas memisahkan antara fungsi regulator, operator dan evaluator, selama ini tiga fungsi tersebut masih dimonopoli oleh Kementerian Agama sehingga ketika fungsi – fungsi tersebut terpusat di satu titik maka peluang abuse of power menjadi lebih besar bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklasifikasi terdapat 48 titik lemah penyelenggaraan ibadah haji antara lain regulasi, kelembagaan, tata laksana dan manajemen

sumber daya manusia sehingga menempatkan Kementerian Agama sebagai salah satu kementerian dengan indeks integrasi terendah (versi KPK tahun 2011) oleh karena itu munculna gagasan untuk pemisahan antara regulator, operator, dan evaluator dalam revisi Undang – Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, merupakan respons positif dan rasional bagi upaya perbaikan sistem penyelenggaraan haji yang lebih baik, professional dan akuntabel.

Kedua, sistem pendaftaran calon jamaah haji yang dianggap masih menyisakan permasalahan. Besarnya kuota jamaah haji yang diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia kepada Indonesia ternyata tidak mampu mengakomodir jumlah calon jamaah haji yang ingin berangkat ke tanah suci. Hal ini berimbas terhadap semakin membengkaknya daftar tunggu (waiting list) calon jamaah haji Indonesia yang kini mencapai sekitar 1,9 juta orang sementara kuota haji Indonesia setiap tahunnya hanya berkisar 210.000 orang. Animo tinggi ummat Islam untuk menunaikan ibadah haji Kementerian Agama disinyalir dipicu oleh merebaknya praktek Dana Talangan Haji yang diberikan oleh pihak perbankan baik itu Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Hal ini mengakibatkan panjangnya daftar antrean tunggu calon jamaah haji. Rasionalitasnya adalah dana Talangan Haji yang diberikan oleh Bank maka memperlonggar seseorang untuk dapat mendaftar, diikuti untuk mendapatkan nomor porsi atau seat calon jamaah haji melalui bantuan pinjaman dana dari Bank yang kemudian diangsur dalam kurun waktu

tertentu. Berangkat dari sini maka muncul anggapan dana talangan haji telah mereduksi syarat *istitho'ah* (kemampuan) untuk melaksanakan haji.

Ketiga, sistem pengelolaan keuangan Haji, setiap tahun Pemerintah menentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang meliputi biaya penerbangan, biaya pemondokan di Makkah dan Madinah serta living cost jamaah haji, sebelumnya setiap calon jamaah haji harus menyetor awal dana tabungan haji ke Bank untuk mendapatkan porsi atau seat kemudian melunasi sesuai besaran BPIH ketika jamaah haji tersebut berangkat. Tabungan Haji dari setoran awal calon jamaah haji ini yang kini mencapai 40 triliun rupiah dengan bunga rata – rata 1 triliun rupiah yang dikelola oleh Kementerian Agama dipergunakan untuk mensubsidi kebutuhan jamaah haji yang berangkat lebih dahulu namun praktek ini minim sandaran hukumnya karena penggunaan bunga dari tabungan jamaah haji juga tanpa persetujuan calon jamaah haji yang belum berangkat serta besarnya bunga tabungan haji berpotensi rawan penyimpangan dan penyelewengan seperti yang disinyalir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain bunga tabungan haji hal yang paling disoroti adalah tentang pengelolaan Dana Abadi Ummat (DAU) yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Ummat dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber halal yang tidak mengikat. Ide ini digagas ketika Menteri Agama dijabat oleh Tarmizi Taher dan saat ini diperkirakan Dana Abadi Ummat tersebut mencapai 2,5 triliun rupiah, sesuai amanat pasal 47 ayat 1 UU no 13 Tahun 2008 Dana Abadi Ummat haruslah dikelola dan dikembangkan untuk

kemaslahatan ummat namun prakteknya pemerintah lebih memilih menempatkan DAU ini dalam bentuk sukuk (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) berupa Suku Dana Haji (SHDI) hal ini diperburuk dengan pencatatan dan pelaporan DAU yang belum transparan dan akuntabel apalagi Badan Pengelola Dana Abadi Ummat secara *ex officio* masih dijabat oleh pejabat Kementerian Agama yang seharusnya sesuai dengan amanah Undang – Undang disyaratkan melibatkan unsur masyarakat didalam pengelolaan DAU.

Penyelenggaraan Ibadah Haji sesungguhnya sangat multidimensi banyak pihak yang terlibat dan banyak hal yang terkait didalamnya, untuk itu profesionalisme pelayanan ibadah haji menjadi sebuah keniscayaan bagi pemerintah sebagai otoritas tunggal penyelenggara ibadah haji, kita semua berharap carut marut penyelenggaraan ibdah haji dan kisah pilu calon jamaah haji yang gagal berangkat tidak menjadi sebuah ritual dan lagu wajib yang kita dengar setiap bulan haji tiba

Diduga, faktor-faktor penyebab munculnya masalah-masalah tersebut dikarenakan tiga hal, yaitu: (1) ketidaksesuaian antara idealitas dan realitas, (2) Ketidaksepadanan antara terbatasnya otoritas dan wewenang dengan besarnya tugas dan tanggung jawab, (3) Pengorganisasian yang bersifat *ad hoc*.

Menyadari kondisi perhajian dan umroh di atas maka Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu akan mengembangkan Pusat Kajian haji dan umroh yang diharapkan dapat menjadi wadah yang berfungsi sebagai lingkungan akademik yang mampu melayarti para peminat

kajian keislaman dari seluruh dunia untuk memperdalam dan menginformasikan aspek akademik dan manajemen haji dan umroh, sehingga mampu mengungkapkan segi-segi profesionalitas, efektif dan efisiensi pengelolaan haji dan umroh sehingga menyempurnakan pelaksanaan rukun Islam yang kelima ini.

Pusat Kajian haji dan umroh akan didukung oleh Program Studi SI, S2, dan S3, serta jurnal internasional, perpustakaan, laboratorium, galeri haji dan umroh, sehingga benar-benar menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mampu melayani atau memfasilitasi para peminat kajian haji dan umroh.

(3) Pusat Pengembangan Karir (*Career Development Center*)

Pusat Pengembangan Karir (*Career Development Center*) adalah wadah pembinaan karakter kewirausahaan (*entrepreneurial character*) bagi para mahasiswa, agar mereka memiliki sikap mandiri, ketrampilan, inisiatif, kreatifitas, dan keberanian untuk menjadi seorang *enterprebeur*, yaitu sosok pencipta pekerjaan (*job creator*), bukan sebaliknya, menjadi pencari kerja (*Job seeker*). Pembinaan akan memperhatikan keseimbangan antara aspek *hard skill* (ketrampilan kerja) dan aspek *softskill* (integritas). Pembinaan *hardskill* akan memprioritaskan berbagai ketrampilan kerja yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM). Adapun pembinaan *softskill* akan memprioritaskan pendidikan integritas, kepedulian, dan etos kerja.

(4) Program Kelas Internasional

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam proposal ini bahwa salah satu strategi pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah "internasionalisasi." Salah satu langkah awal yang akan ditempuh untuk menggulirkan proses internasionalisasi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah dengan membuka Kelas Internasional pada beberapa program studi yang telah memiliki sumber daya memadai. Kelas Internasional bertujuan untuk memperkenalkan pola pelayanan pendidikan tinggi berstandar internasional kepada seluruh sivitas akademika, sebagai pembangkit semangat dan kesadaran untuk mengembangkan budaya mutu dan meningkatkan daya saing. Keberadaan Kelas Internasional diharapkan menjadi lokomotif pengembangan kelembagaan dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, agar semua kegiatan Tri Dharma yang dilaksanakan di lembaga ini sejalan dan relevan dengan trend perkembangan kegiatan akademik di dunia internasional.

(5) Ma'had Al-Jamiah

Salah satu fungsi lembaga pendidikan, selain media transfer ilmu dan teknologi, riset, serta pengembangan ilmu adalah pembentukan karakter (character building). Fungsi ini yang seringkali terabaikan dan kurang menjadi perhatian para pengelola perguruan tinggi. Karena itu tidak heran jika kemudian dari perguruan tinggi lahir alumni-alumni yang cerdas dan

terampil, tetapi tidak memiliki integritas dan sejumlah karakter yang mulia lainnya.

Untuk mengoptimalkan fungsi pembentukan karakter peserta didik, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu akan mengintegrasikan pendidikan universitas dengan Ma'had 'Aly (Pesantren Tinggi). Selain difungsikan sebagai wahana pembentukan karakter peserta didik melalui berbagai program kegiatan, Ma'had 'Aly juga akan menjadi media untuk mengembangkan kemampuan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris serta tahfiz al-Qur'an para mahasiswa. Semua mahasiswa baru dari seluruh fakultas dan prodi akan diasramakan di Ma'had 'Aly. Mereka akan tinggal di asrama Ma'had 'Aly selama satu tahun (dua semester). Model pengembangan Ma'had 'Aly yang menjadi benchmark UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu kelak adalah Ma'had 'Aly UIN Maliki Malang yang sudah 8 tahun ini sangat sukses dalam pembentukan karakter dan kompetensi bahasa asing dan tahfiz Qur'an mahasiswanya.

E. Kebijakan Arah Pengembangan

(1) Visi Misi Kementerian Agama

Visi dan misi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN Bengkulu) ditetapkan berdasarkan visi dan misi Kementerian Agama yang merujuk pada Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, dan mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5

tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta aspirasi masyarakat.⁶⁵

Atas dasar hal tersebut Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut: “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Dalam rangka mencapai Visi Kementerian Agama, maka ditetapkan Misi yang berorientasi pada Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan kesembilan Misi di atas, terdapat 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan Visi Kementerian Agama, yaitu misi nomor 1, 3, 5, dan 8, sehingga Kementerian Agama menetapkan Misi sebagai berikut:



Gambar. 3.1 Misi Kementerian Agama

Tabel di atas dapat dijelaskan berikut:

- 1) Misi pertama (yaitu, meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5);
- 2) Misi kedua (yaitu, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5;
- 3) Misi ketiga (yaitu, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3);
- 4) Misi keempat (yaitu, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3);
- 5) Misi kelima (yaitu, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, dan Misi keenam (yaitu, memantapkan tata kelola

kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8.

- 6) Tujuan Renstra Pendidikan Islam 2020-2024 disusun dengan merujuk pada enam tujuan Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu:
- a. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
 - b. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
 - c. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
 - d. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
 - e. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
 - f. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang Bersih, Melayani dan Responsif.

Dari 6 (enam) tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama tersebut di atas, terdapat 4 (empat) tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam menetapkan Renstra 2020-2024, yaitu tujuan 2, 4, 5, dan 6. Kelima tujuan Kementerian Agama yang relevan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (tujuan 2),

- 2) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas; (tujuan 4),
- 3) Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; (tujuan 5), dan
- 4) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif; (tujuan 6).

Berdasarkan pada kelima tujuan tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan tugas dan fungsinya, merumuskan tujuan sebagai berikut:

- 1) Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam;
- 2) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas;
- 3) Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
- 4) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani dan responsif.

(2) Visi Misi Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Kementerian Agama di atas, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki visi “Menjadi Pusat Studi Islam dan Peradaban berwawasan Kebangsaan dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat,

cerdas dan unggul”.⁶⁶ Dalam rangka mencapai visi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka ditetapkan misi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berorientasi dan sejalan dengan misi Kementerian Agama. Adapun misi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sarjana yang ahli dalam ilmu keislaman dan sains, yang soleh, professional, moderat yang berwawasan kebangsaan.

Misi ini mendukung misi Kementerian Agama nomor 2;

- 2) Meningkatkan kualitas penelitian, publikasi ilmiah bereputasi nasional dan global.

Misi ini mendukung misi Kementerian Agama nomor 5;

- 3) Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dalam membangun kehidupan sosial yang cerdas, soleh, produktif dan sejahtera.

Misi ini mendukung misi Kementerian Agama nomor 2 dan 5;

- 4) Meningkatkan kualitas kerjasama pada tingkat nasional dan internasional dalam mendorong peningkatan daya saing lulusan.

Misi ini mendukung misi Kementerian Agama nomor 5;

- 5) Memantapkan tata kelola dan kepemimpinan yang adil dalam membangun *Good University Governance* (GUG).

Misi ini mendukung misi Kementerian Agama nomor 6;

Sejalan dengan tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tujuan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah:

⁶⁶ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

- 1) Peningkatan kualitas lulusan dalam studi keislaman dan sains yang berakhlakul karimah, professional dan moderat;
- 2) Peningkatan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah bereputasi yang responsif terhadap pengembangan keilmuan dan kepentingan kebangsaan;
- 3) Peningkatan kualitas pengabdian dalam mengembangkan masyarakat yang cerdas, soleh, produktif dan sejahtera berwawasan kebangsaan;
- 4) Peningkatan kualitas kerjasama berskala nasional dan internasional dalam mewujudkan daya saing lulusan;
- 5) Peningkatan budaya birokrasi dan kepemimpinan yang adil, bersih dan responsif.

Sedangkan sasaran UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah:

- 1) Memperkuat kualitas sistem pendidikan yang berperspektif moderat;
- 2) Meningkatkan kualitas Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- 3) Meningkatkan standar dan sistem penjaminan mutu;
- 4) Meningkatkan reputasi dan kerja sama pada level internasional;
- 5) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Meningkatkan prestasi Mahasiswa dan kualitas lulusan;
- 7) Meningkatkan kualitas tata pamong dan tata kelola yang efektif dan akuntabel;
- 8) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mewujudkan layanan prima, efisien dan efektif; dan meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan.

(3) Program Pengembangan UIN Bengkulu

Untuk mencapai Visi Misi Tujuan dan Sasaran tersebut maka program pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam beberapa tahap, dari data yang diperoleh disusun sebagai berikut⁶⁷ :

(1) Program Jangka Pendek (2019-2024)

Beberapa program pengembangan dalam jangka waktu selama 4 tahun (periode) Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Percepatan Guru Besar (15 GB)

Dalam program peningkatan kualifikasi Dosen ke Guru Besar selama kepemimpinan Rektor 2022-2025 adalah terwujudnya 15 orang dosen guru besar. Saat ini sudah tercapai 5 orang, 2 GB diantaranya pada tahun 2022, yaitu Prof. Dr. Zubaedi, M. Ag., M. Pd dan Prof. Andang Sunato Ph.D. Usulan PAK GB sampai saat ini sudah mencapai 9 orang, 3 sudah ke Kementerian, selebihnya masih dalam proses persetujuan Senat.

b. Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan Doktor (Dalam Negeri dan Luar Negeri)

⁶⁷ Data diperoleh dan dialah dari pidato beberapa kegiatan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Prof. Dr. H. Zulkarnain, M. Pd: 1) Pidato Sambutan saat pelantikan para wakil dekan, Kajur dan Koordinator Program Studi, ketua lembaga, dan kepala pusat di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Senin tanggal 10 Januari 2022. 2) Pidato Sambutan saat pelantikan para ketua dan sekretaris Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Selasa 22 Februari 2022. 3) Rapat Tim Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Senin 18 April 2022. 4) Rapat Koordinasi Pimpinan dan Rapat Kerja bersama Tim Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu di Curup pada tanggal 10 - 12 Juni 2022. 5) Rapat FGD Penelitian yang diselenggarakan oleh Tim Penelitian khusus Selasa 26 Juli 2022.

Saat ini dosen yang studi lanjut ke Strata 3 ke PT Luar Negeri berjumlah 6 orang, dan 12 orang PTN dalam negeri.

c. Penambahan Prodi S-2 & S-3

Program studi Strata 3 yang baru terbit ijin penyelenggaraannya adalah Program Doktor Studi Islam. Saat ini sedang sosialisasi untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023.

d. Penambahan Prodi S-2 & S-1 Umum dan Sain

Pasca perubahan kelembagaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, penambahan Program Studi bidang Umum pada Strata 1 akan ditambah sesuai kebutuhan sepanjang dapat diijinkan oleh pihak Dirjen Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti. Saat ini pendirian prodi umum pada PTKI dalam keadaan moratorium/ditutup sementara.

e. Peningkatan Akreditasi Prodi Unggul

Perubahan sistem akreditasi saat ini menuntut Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) telah berubah konversi peringkat Unggul, Baik Sekali, dan Baik. Akreditasi peringkat A (Unggul) saat ini baru berjumlah 5 Prodi. Dalam waktu 4 Tahun ke depan APT diprogramkan menjadi Unggul dan APS Unggul minimal mencapai 5 APS.

f. UIN Bengkulu dari Satker menjadi BLU

Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan tercapai dalam waktu 3 tahun ke depan (2024).

g. Penguatan Pembelajaran Unggul

Untuk menuju Pembelajaran Unggul Rektor memprogramkan Laboratorium Terpadu untuk semua Prodi pada tahun 2024 selesai di bangun.

h. Peningkatan Kualitas Layanan Akademik Berbasis Digital

i. Implementasi MBKM

Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dimulai tahun akademik 2022-2023.

j. Peningkatan Mutu Lulusan

Prioritas utama dalam peningkatan program mutu lulusan adalah melalui proses pembelajaran yang Unggul sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Dengan adanya laboratorium maka mutu lulusan dapat tercapai.

(1) Program Jangka Menengah (2019-2035)

a. Universitas Unggul di tingkat Nasional

Seiring dengan berbagai upaya penguatan dan peningkatan di berbagai bidang tersebut, pencapaian terhadap visi misi secara berangsur pada tahun 2035 harus sudah menjadi perguruan tinggi Islam Unggul.

b. Desain Kurikulum dan memperkuat Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital, dan Kebutuhan Pasar Modern.

c. Pola Modeling Pembinaan Kemahasiswaan menuju Generasi Millennial Berwirausaha Digital .

d. Penguatan Pengabdian Masyarakat berbasis Implementasi Moderasi Beragama dan Nilai Kebangsaan.

- e. Program *Double Degree* dan Kuliah Model UT secara *On-line*

Hal ini sesuai dengan program Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Bahwa masa pembelajaran selama Pandemi Covid-19 telah memberi inspirasi untuk diselenggarakan PTKI dengan sistem Online. Program ini akan diselaraskan dengan pihak Direktur PTKI Kementerian Agama.

(2) Program Jangka Panjang (2019-2045)

- a. Kampus Modern

Dalam jangka waktu 25 tahun ke depan, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu diprogramkan menjadi Kampus/Universitas Modern. Menuji Universitas Moderen mulai saat ini secara bertahap dilakukan persiapan dalam berbagai aspek akademik dan non akademik.

- b. Universitas Unggul di Kawasan Asia

Dalam jangka waktu 25 tahun ke depan, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu akan dikembangkan menjadi Kampus/Universitas Unggul dan Modern di Kawasan Asia. Hal ini didukung oleh adanya pembangunan dan penguatan bidang akademik, pendukung akademik, dan SDM yang dalam kurun waktu 25 tahun akan tercapai dengan riil.

Beberapa point penting program perencanaan pengembangan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, baik Program Jangka Pendek (5 tahun), Program Jangka Menengah (15 Tahun), dan Program jangka Panjang (25

Tahun) yang dicanangkan akan disusun dalam Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang saat ini dalam proses penyusunan.



BAB IV
PERPSEPSI DAN HARAPAN
CIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

A. Persepsi dan Harapan Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

a. Sarana dan Prasarana

1. Perlunya Pelayanan Digitalisasi

Diperlukan pelayanan cepat, tepat, dan terarah. Oleh karena itu, digitalisasi pelayanan yang serba online salah satu solusinya. Perlunya penyediaan website/ sosmed khusus untuk prodi mengenai penyebaran informasi kemahasiswaan. Sehingga, mahasiswa tidak lagi hanya bertanya pada senior mengenai informasi apapun. Pendaftaran apapun seperti ujian munaqosyah atau proposal dapat dilakukan melewati sistem online yang sewaktu-waktu dapat menjadi sumber data. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Dilla Astari, Dosen BKI, bahwa,

“Pendaftaran misalnya proposal. Itu kan ada beberapa buah judul yang diajukan ke staff. Kalau daftar proposal, daftar SK pembimbing, daftar ujian, itu kan kita kan sedangkan kita masing-masing memang banyak kerjaan. Harusnya ada digitalisasi kayak misalnya mau daftar kompre mereka tinggal daftar lewat online. Nanti seandainya kalau perlu berkasnya Kaprodi atau kajur tinggal lihat sistem.”

Dari pernyataan di atas sebenarnya dapat disimpulkan bahwa banyak sekali tugas administrasi khususnya dalam dunia prodi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu system digital yang mempermudah pelayanan.

Selain pelayananan, dibutuhkan juga perawatan agar pelayanan tetap terjaga. Seperti halnya pelayanan digital SIAKAD di mana, ini merupakan aplikasi yang memudahkan pelayanan dalam hal penilaian antara dosen dan mahasiswa. Hanya saja, kecepatan aplikasi Siakad sewaktu-waktu dapat berubah. Untuk mengupload nilai saja butuh waktu yang lama untuk *loading*. Sementara mahasiswa butuh pelayanan yang cepat. Oleh karena itu, server Siakad memang hendaknya juga diperhatikan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ade, Dosen Bahasa Indonesia, bahwa “*Yang kedua itu kami download kami siakad, itu apo servernyo lagi maintenance?*” yang jika diterjemahkan yaitu, “*Yang Kedua itu ketika kami download dari siakad, itu apakah siakadnya sedang perbaikan?*”

Selain itu, sudah lumrah dalam dunia administrasi, persetujuan dari seorang atasan atau individu dibuktikan lewat tanda tangan. Hanya saja permasalahannya adalah tidak setiap saat atasan tersebut selalu ada di tempat. Bisa saja sewaktu-waktu ia berada di luar kota, sedang rapat, dan lain sebagainya. Hal ini akan cukup mempersulit untuk meminta tanda persetujuan ini, jika keberadaannya tidak ada ditempat. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas yang mempermudah hal tersebut, agar jarak tindak menjadi halangan. Salah satunya adalah tanda-tangan digital. Di mana setiap orang dapat menandatangani suatu dokumen lewat gawai yang ia miliki. Hal sebenarnya sudah diungkapkan oleh Ilham Syukri, Dosen Ilmu Quran dan Tafsir, bahwa:

“Zaman sekarang apa (tugas) yang tidak mungkin kan bisa di-online-kan. Segalanya untuk mengajukan surat cuti, nggak perlu lagi maju dan tantangan deh. Kan, tinggal dekan mengklik saja, karena sudah ada tanda tangan online.”

Dari wawancara ini sebenarnya dapat disimpulkan bahwa banyak sekali hal-hal administrative sehubungan dengan persetujuan pimpinan. Jadi, agar pelayanan bisa cepat dan tepat, maka sebaiknya lembaga sudah mengenal system persetujuan secara online yaitu tanda tangan digital.

Perubahan pelayanan administrasi yang lebih baik sangat dibutuhkan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi pada dokumen yang dimiliki oleh lembaga. Hanya saja ketika peralihan kepemimpinan yang baru, dokumen-dokumen lama otomatis tidak mereka miliki. Adakalanya ada rasa segan untuk meminta data tersebut pada orang-orang sebelumnya. Hal ini otomatis akan sangat memberatkan pihak baru yang mulai bekerja. Oleh karena itu, sebaiknya data-data tersebut tersimpan pada suatu komputer database, agar tidak terlalu merepotkan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Dilla Astari, Kaprodi Bimbingan Konseling bahwa,

“Terus di Prodi nih kita kan gak ada komputer nih. Kita merasa pas peralihan dari satu pimpinan ke pimpinan yang lain ya kita bingung data-datanya gitu. Untungnya, Saya masih menjalani komunikasi yang baik dengan Kaprodi yang kemarin. Jadi bisa minta data ini dan itu. Tapi ada beberapa data yang saat beliau sedang sibuk hal ini cukup menyulitkan. Tapi tapi kalau sistem kita

kan bisa ambil. dokumen sebelumnya kan sudah ada tertinggal di satu komputer.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan pelayanan yang efektif dan efisien dalam lembaga perguruan tinggi. Oleh karena itu, teknologi informasi memiliki peran penting dalam pelayanan ini. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Indrayani bahwa, dunia digital tak akan bisa lepas dari dunia perguruan tinggi. Teknologi informasi juga bukan semata-mata untuk prestise atau gengsi, melainkan merupakan hal wajib bagi sebuah institusi pendidikan. Selain itu, Kurniadi juga mengungkapkan bahwa daya saing sebuah perguruan tinggi dapat dilihat dari terwujudnya karakteristik kampus digital. Selanjutnya Yunis dan Surendro juga mengungkapkan hal yang sama bahwa Tata kelola sebuah perguruan tinggi yang baik tak akan terpisahkan dengan teknologi informasi.⁶⁸

2. Perbaikan Ketertiban Kendaraan

Ketertiban kampus akan menciptakan kenyamanan tersendiri bagi semua pihak. Namun adakalanya ketertiban sendiri terganggu, saat penataan parkir kendaraan yang berantakan. Hal ini begitu mengganggu stabilitas kinerja dosen, mahasiswa, dan staf kampus yang ingin berpindah

⁶⁸ Siregar, R. (2004). *Internet: Strategi penggunaannya di perpustakaan perguruan tinggi. Librabry. usu. ac. id, 30.*

ke tempat yang lain. Dampaknya adalah hal ini dapat saja menyebabkan keterlambatan dalam mobilisasi kerja mereka sendiri. Oleh karena itu, disarankan ketertiban parkir kendaraan hendaknya mulai diperhatikan. Hal ini senada berdasarkan wawancara pada Ade, Dosen Bahasa Indonesia, yaitu *“Nah parkir itu kadang kala idak berarturan. Kito udah banyak, idak pulo teratur. Kadang bingung parkir di manolah ini.”*

“Nah tempat parkir terkadang tidak teratur. Terkadang jadi bingung di mana seharusnya menempatkan kendaraan.”

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa, masih terdapat permasalahan sehubungan dengan penataan parkir kendaraan. Hal ini nantinya akan sangat menghambat mobilisasi setiap orang yang berkecimpung di sana. Oleh karena itu, dibutuhkan penataan manajemen yang lebih baik agar tercipta ketertiban yang diinginkan.

Adapun tujuan tata tertib di lingkungan pendidikan sebenarnya adalah untuk menciptakan ketenangan bagi peserta didik, agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Wisnu bahwa tujuan ketertiban di lembaga pendidikan adalah menciptakan ketenangan bagi peserta didik; lancarnya pembelajaran; dan pencapaian tujuan dari lembaga pendidikan tersebut⁶⁹.

Permasalahan di atas sebenarnya sudah menjadi tugas pihak keamanan seperti sekuriti atau satpam. Di mana mereka memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga keamanan serta ketertiban wilayah kampus. Hanya

⁶⁹ Kurniawan, W. A. (2018). *Budaya tertib siswa di sekolah*. CV Jejak (Jejak Publisher). Hal 14.

saja, mereka masih saja memiliki kekurangan. Hal ini seperti pendapat Muthia bahwa fungsi satpam yang seharusnya menciptakan dan mempertahankan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus kenyataannya tidak berjalan secara efektif, seharusnya satpam dalam menjalankan fungsinya mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, yang meliputi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lingkungan/satuan tempat mereka kerja, khususnya berhubungan dengan keamanan fisik.⁷⁰

3. Perlunya Sebuah *Icon* sebagai Simbol Kebanggaan Institusi

Rasa bangga perlu ditanamkan kepada setiap individu yang hidup dalam institusi tersebut. Kebanggaan itu dapat dibangun dalam bentuk simbol seperti bangunan, gerbang, patung, dan lain sebagainya. Selain itu, saat ini, era digitalisasi sudah merambah ke setiap individu. Simbol kebanggaan ini akan menjadi iklan gratis untuk memamerkan institusi pada dunia luar melalui media sosial. Hal ini seperti yang diungkapkan Mussafa, selaku Kaprodi KPI bahwa,

“Kayak di Pare-Pare dia gak mau jadi UIN. Tetapa sekolah apa gitu. Institut sain Al quran negeri. Dan tampilan kampusnya modern. Kursinya milenial warna warnis seperti di kafe-kafe begitu. Itu konsepnya futuristik gitu. Laboratorium komputernya bagus gitu. Itu butuh orang-orang keuangan, perencanaan, hingga rektornya berpikir futuristik. Nah itu sekarang mulai didorong dari orang2 perencanaan. Itu mereka diberikan kesempatan melancong ke kampus-kampus luar. Bahkan di Pare-pare itu auditoriumnya sudah kayak di Australia itu kayak teater keong ya. Kursi

⁷⁰ Muthia, W. (2012). *Ketidakefektifan Fungsi Satpam di Kampus UNP. Fakultas Ilmu Sosial* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).

auditoriumnya itu kayak kursi bioskop. Penggunaan mereka menggunakan SBSN dengan kata lain tidak menggunakan DIPA.”

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa objek simbol cukup diperlukan bagi suatu perguruan tinggi sebagai sarana promosi. Hal ini tidak terlepas dari era digital di mana media social akan menjadi ajang iklan gratis suatu lembaga perguruan tinggi. Hal ini sejalan seperti penelitian Aninditia, bahwa rasa bangga masyarakat dapat menjadi ajang promosi suatu objek. Misalnya perilaku masyarakat Banda Aceh yang mengajak teman atau anggota keluarga dari luar kota ataupun luar negeri untuk berkunjung ke monumen bencana menunjukkan bahwa adanya rasa bangga sehingga mendorong mereka untuk mengenalkan monumen bencana tersebut ke orang lain. Selain hal itu, masyarakat yang sering mengunjungi atau bekerja di monumen bencana menunjukkan bahwa keberadaan monumen bencana memiliki arti penting dan menimbulkan rasa bangga tersebut.⁷¹

4. Perlunya Perbaikan Lab

Setiap bidang ilmu memiliki memiliki praktik sebagai penyempurnaan dari teori. Praktik diperlukan sebagai bentuk aplikasi dari ilmu tersebut. Praktik dapat dilaksanakan di laboratorium. Hanya saja, jika Lab yang dimiliki masih belum maksimal, ilmu yang diserap juga tidak akan maksimal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Esti Alfiah, selaku dosen Ekonomi Islam, bahwa

⁷¹ Anindita, N. (2018). Fungsi Sosial Monumen Bencana bagi Masyarakat Lokal (Studi Kasus Kapal Tsunami Lampulo dan Kapal PLTD Apung di Banda Aceh). Hal 72

“Lab merupakan penunjang aktifitas mahasiswa untuk lebih dirangkul. Karena ini untuk kebutuhan prodi dan institut.”

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa masih dibutuhkannya perbaikan laboratorium pembelajaran untuk mahasiswa. Hal ini merupakan kebutuhan suatu prodi sebagai bentuk pengamalan dari ilmu para mahasiswa. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Hamdani dan Kurniati bahwa Lab berfungsi sebagai kelengkapan antara teori dan praktik.⁷²

5. Perlunya Pemanfaatan E-Book sebagai Pengganti Buku

Dunia kampus tidak akan terlepas dari dunia digital. Jika dahulu seorang peneliti atau mahasiswa harus repot mencari buku di berbagai perpustakaan, maka saat ini mereka bisa mendapatkan ragam literasi hanya lewat dari genggam tangan dan dalam waktu yang hitungan menit. Ragam sumber tersebut dapat datang dari berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, dosen hendaknya *melek* teknologi, agar mempermudah dalam akses berbagai sumber. Nantinya akan berdampak pada kekayaan materi yang ia miliki. Saat ini, buku tidak lagi dicetak dalam bentuk lembaran kertas. Buku juga bisa diperoleh lewat *softfile* yang bisa dibeli atau didownload secara gratis lewat internet.

Hal ini berdasarkan wawancara pada Ilham Gilang, Dosen Tadris IPS bahwa,

“Dosen masih pakai cara yang lama, misalnya beli buku, sementara keterbatasan kita masih memiliki buku karena tidak ada pusat buku ajar.”

⁷² Fauziah, E., Senjiati, I. H., & Febriadi, S. R. (2017). Model Pemberdayaan Laboratorium Bank Mini Syariah di Perguruan Tinggi. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8, 102-18. Hal 105

Nah sementara dosen ini masih berpatokan punya buku. Oleh karena itu, kita juga harus memanfaatkan e-book.”

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa dosen masih mengandalkan buku-buku secara manual. Padahal UIN FAS Bengkulu sendiri masih jauh dari sumber penjualan buku primer. Oleh karena itu, dosen seharusnya juga mengenal e-book agar referensi dapat kaya dan beragam, karena kemudahannya dalam mengakses. Sejalan dengan itu, Suparno berpendapat bahwa e-book memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh buku pada umumnya, yaitu halaman yang tebal bukan penghalang untuk mobilitas. Kita juga dapat mengakses dan mengirim dalam hitungan detik. Selain itu, guru dapat menghemat waktu dalam mencari informasi, ketika berhadapan dengan e-book. Cukup duduk manis dan *searching* lewat internet, maka data yang diinginkan dapat diperoleh.⁷³

6. Perlunya Pemanfaatan Medsos sebagai Media Pembelajaran

Sebagian masyarakat berasumsi bahwa media sosial merupakan sarana untuk hiburan. Padahal di sisi lain media sosial ibarat pedang bermata dua, satu berdampak negatif dan satu lagi berdampak positif yang berupa pemanfaatan untuk sarana pengajaran. Misalnya para mahasiswa dapat membuat konten pembelajaran yang tepat. Berdasarkan karakteristiknya, media sosial dapat menjadi media pembelajaran. Konten ini sebaiknya

⁷³ Khairrani, A. (2019). E-Book sebagai media pembelajaran di masa depan. *Jurnal Repository Universitas Negeri Jakarta*. Hal 5.

mendapatkan pengawasan dari dosen ahli di bidangnya agar dapat terhindar dari kesalahan. Selain itu, konten ini nantinya disertai dengan ragam rujukan atau referensi yang berkualitas. Sehingga pada akhirnya pembelajaran dapat dilakukan dalam dunia digital. Yang pada akhirnya ini dapat menjadi marketing nama kampus agar dapat dilihat banyak orang di luar sana.

Hal ini berdasarkan pendapat Ilham Gilang, Dosen Tadris IPS bahwa *“Terus medsos masih dipandang dosen sebagai media entertain. Padahal mahasiswa bisa bikin akun tentang video pembelajaran. Misalnya tentang tokoh-tokoh bangsa. Nah dari tik tok tu. Dan lebih bagus lagi dilengkapi dengan rujukan.”*

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa media sosial dapat menjadi media pembelajaran yang efektif. Hal ini karena di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antar partisipannya. Teroklah antara dosen dan para mahasiswa. Komunikasi ini dapat dilakukan di manapun dan kapanpun karena konsepnya yang memanfaatkan teknologi digital. Hal ini akan sangat memudahkan proses pembelajaran yang terhalang oleh jarak dan waktu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Narullah bahwa media sosial memiliki karakteristik yaitu jaringan yang dapat menghubungkan setiap individu, informasi yang dapat menjadi bahan pembelajaran, serta interaksi yang nantinya akan memunculkan timbal balik antara dosen dengan mahasiswa.⁷⁴

⁷⁴ Alaby, M. A. (2020). Media sosial whatsapp sebagai media pembelajaran jarak jauh mata kuliah ilmu sosial budaya dasar (ISBD). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 273-289. Hal 24

7. Perlunya Akses Gratis Jurnal Berbayar

Kualitas sebuah perguruan tinggi dapat dilihat dari karya tulis yang dimiliki. Untuk mencapai itu semua, seorang dosen wajib menulis di taraf internasional. Oleh karena itu, diperlukan referensi yang berkualitas. Setidaknya mengutip referensi dari jurnal lain yang dianggap setara atau lebih kualitasnya. Yang menjadi permasalahan adalah referensi yang berbobot ini mayoritas berbayar. Biaya yang ditanggung pun tidaklah murah. Oleh karena itu, sebaiknya pihak perguruan tinggi hendaknya mempermudah para dosen untuk mengakses jurnal berbayar ini secara gratis dengan cara berlangganan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Zikrie, Dosen Bahasa dan Sastra Arab, dalam wawancara, ia mengungkapkan bahwa, "*Terus jago mengenai akses jurnal. Contoh Kampus UGM sudah mampu mengakses secara gratis jurnal-jurnal berbayar.*"

Jadi, akses jurnal gratis dibutuhkan agar dapat meningkatkan kualitas karya tulis dosen dan mahasiswa. Yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan daya saing perguruan tinggi, di mana dosen akan memahami ragam teori dan ilmu terbaru, sehingga mereka tidak tertinggal. Hanya saja bayarannya yang pastinya mahal. Hal ini sejalan dengan pendapat Satria bahwa pentingnya berlangganan jurnal internasional akan membuat dosen mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Hanya saja permasalahan baru akan muncul yaitu dibutuhkan biaya yang tidak murah.⁷⁵

a. Sumber Daya Manusia

⁷⁵ Satria, A. (2010). Seputar Menulis Di Jurnal Internasional. *Jurnal Pustakawan Indonesia*, 10(2). Hal 36

1. Perlunya Membangun Ruang Diskusi antar Dosen

Kualitas suatu perguruan tinggi juga ditentukan oleh tingkat keilmuan yang dimiliki dosen. Keilmuan ini hendaknya selalu baru, berkualitas, dan banyak. Ada banyak metode atau cara agar dosen mampu demikian. Salah satunya adalah dengan meningkatkan komunikasi antar dosen. Hal ini akan membuat rasa kekeluargaan dan solidaritas dan rasa kekeluargaan semakin membaik. Oleh karena itu perlu diadakannya ajang silaturahmi agar dapat menjadi ajang tukar pikiran dan ilmu baru. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Ade, Dosen Bahasa Indonesia, bahwa

“Kami kadang kala itu sejauh ini seharusnya kita disediakan ruang studi, diskusi buat kawan-kawan. Itu sering sepi buat kumpul-kumpul. Sampai-sampai ketemu dosennya beberapa kali. Membangun hubungan kawan-kawan tu kan semakin bagus. Kito ado ruang buat diskusi.”

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa disarankan untuk menciptakan ruang diskusi atau forum komunikasi antar dosen, agar dapat membangun chemistry yang baik/silaturahmi antar para dosen. Hal ini senada yang diungkapkan oleh Wulan bahwa pentingnya forum diskusi dosen bertujuan untuk proses *knowledge sharing*. Hal ini nantinya akan berfungsi sebagai *collaboration library* atau sumber pustaka kolaborasi. Di mana ini merupakan suatu media komunikasi berbagi ilmu antar dosen.⁷⁶

2. Peningkatan Gairah Menulis Dosen Senior

Beberapa dosen senior beralasan mereka sudah tidak mampu lagi menulis dengan alasan usia. Oleh karena itu, mayoritas karya yang dihasilkan

⁷⁶ Kaniawulan, I., Muttaqin, M. R., & Jatira, D. U. (2020). Sistem Manajemen Pengetahuan Forum Diskusi Dosen sebagai Sumber Pustaka Kolaborasi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 7(1), 51-58. Hal 52

oleh mereka sangat minim. Permasalahan ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan penggantian dosen junior yang memiliki kemampuan menulis kepada dosen senior. Seperti dalam riset gabungan, di mana keduanya dapat berkolaborasi dalam hal tenaga, pikiran, dan biaya.

Hal ini berdasarkan wawancara kepada Ihsan Rahmat, Dosen Manajemen Dakwah, bahwa:

“Kemudian dari segi penelitian. Rata-rata dosen itu sekedar mengajar aja. Dia sudah putus asa untuk naik jabatan. Yang produktif kan dosen-dosen muda aja. Jangankan kito ngomong soal scopus, yang sinta bae sudah susah. Ada beberapa hal yang saya praktikkan caronyo ado dosen gandengan namonyo. Jado dosen senior di prodi digandeng samo dosen junior. Caronyo bisalah Junior yang nulis, senior yang biyai atau ngasih ide. Memang berbagi tulisan. Itu tu kenapa di borang akreditasi, berapa banyak tulisan dosen itu diperhatikan. Jadi perkaranyo kami di MD yang nulis itu dosen junior. Solusinyo nanti boleh itu di-SK-kan Kaprodi/rektor buat sistem gandengan itu. Jadi, perlu ado terobosan konsorsium penulisan dosen. Jadi bukan mata kuliah aja. Bisa aja melibatkan dosen DLB satu.”

“Kemudian dari segi penelitian. Rata-rata dosen itu hanya sekedar mengajar. Mereka sudah putus asa untuk naik jabatan. Yang produktif kan hanya dosen-dosen muda. Jangankan soal scopus, yang sinta saja mereka susah untuk tembus. Ada beberapa hal yang saya praktikkan, yaitu dosen pendamping namanya. Jadi, dosen senior digandeng dengan dosen junior. Caranya yaitu dosen junior yang menulis, sementara dosen senior bisa dalam sumbangsi pembiayaan dan ide. Nantinya mereka dapat berbagi tulisan. Yang itu itu akan bermanfaat di boring akreditasi dalam hal penilaian tulisan dosen. Jadi permasalahan yang kami miliki adalah penulis banyak dari dosen junior. Oleh karena itu, mereka dapat dibuatkan SK untuk menciptakan

sistem ini nantinya. Jadi buakn semata-,ata mata kuliah saja. Hal ini nantinya juga dapat melibatkan dosen DLB juga. “

Jadi, berdasarkan wawancara sebelumnya, maka diketahui salahs atu permasalahan kampus yaitu rendahnya minat menulis, khususnya dosen senior, sehingga diperlukan sistem partner ini. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa dosen-dosen muda yang berkualitas yang dapat menjadi agen perubahan dalam rangka perubahan kualitas dosen ke arah yang lebih baik. Solusi ini sebenarnya sejalan dengan pendapat Wisarja bahwa salah satu kiat dalam menciptakan perubahan adalah pemilihan agen-agen perubahan dalam suatu lembaga, yang nantinya dapat membuat lingkungan kerja yang kondusif.⁷⁷

3. Dosen terlalu Disibukkan dengan Tugas Staf .

Pengetahuan dosen mengenai seluk beluk manajemen prodi dan kampus itu adalah hal yang baik. Hal ini diharapkan agar dosen nantinya memiliki kemampuan manajemen yang bagus ketika memimpin suatu lembaga kampus. Hanya saja terlalu sibuk dalam dunia administrasi dan staf, membuat tugas utama dosen, Tri Dharma Perguruan Tinggi akan terasa menyulitkan. Dosen terkadang lebih banyak berkarya ketika masih belum diangkat PNS, namun ketika diangkat, daya tulis mereka berkurang karena disibukkan dengan administrasi. Sementara itu, staf sebagai pembantu dosen dalam menyelesaikan urusan administrasi prodi sangatlah dibutuhkan. Oleh

⁷⁷ Wisarja, I. K., & Gunarta, I. K. (2019, July). KEPEMIMPINAN YANG IDEAL (Prinsip-Prinsip Pemimpin dalam Melakukan Perubahan): KEPEMIMPINAN YANG IDEAL (Prinsip-Prinsip Pemimpin dalam Melakukan Perubahan). In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya* (No. 1, pp. 35-51) hal 40.

karena itu, disarankan untuk formasi penerimaan PNS jangan hanya membuka lowongan dosen saja, melainkan staf yang diletakkan sesuai dengan keahliannya dan diberikan peningkatan kemampuannya secara berkala.

Hal ini berdasarkan wawancara kepada Ixir Eliyah, Dosen Prodi Piauud bahwa *“Hal yang perlu diperhatikan itu terutama SDM adalah perekrutan. Paling tidak ketika kita sudah menjadi UIN kita sudah memiliki SDM yang mumpuni. Kita sendiri sudah memiliki banyak dosen baik dari dalam maupun luar negeri. Nah tapi kita masih kekurangan staf atau administrasi. Memang dosen menjadi staf itu perlu. Karena ketika menjabat saya harus tahu bagaimana alur pengajuan SK, dan sebagainya. Nah kalau nantinya menjadi Kaprodi tidak tahu apa-apa bagaimana bisa menyelesaikan masalah nantinya. Begitu juga nantinya menjadi akaur, dekan, rektor. Selanjutnya adalah menjadi staf itu terlalu lama. Mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi.”*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa UIN FAS sebenarnya masih kekurangan dalam segi sumber daya manusia khususnya di bidang administrasi. Sementara dosen sendiri sudah cukup jumlahnya untuk beberapa tempat. Hanya saja, dampak dari kurangnya staf administrasi membuat tugas dosen menjadi rangkap jabatan yaitu mengajar dan administrasi. Hal ini pastinya akan sangat membebani dosen. Mereka akan lebih sibuk dengan administrasi ketimbang melaksanakan Tri Drama Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat). Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Sudjarwo bahwa, para dosen yang memiliki jabatan pada akhirnya menjadi minim karya khususnya karya tulis. Hal ini diakibatkan kesibukan mereka pada dunia manajemen dan birokrasi, seperti pertemuan, administrasi, dan undangan sehingga

mempersempit waktu untuk baca, tulis, dan kegiatan ilmiah lainnya. Situasi ini pada akhirnya membuat dosen terjebak dalam kondisi mengutamakan tugas sampingan serta mengesampingkan tugas utama.⁷⁸

b. Pelayanan dan Administrasi

1. Perlunya Metode Pendekatan Pada Dosen Senior dalam Hal Pengumpulan Tugas.

Kedisiplinan adalah kunci keberhasilan pencapaian suatu tujuan, khususnya bagaimana kedisiplinan dalam penyelesaian tugas. Sehubungan dengan hal ini, beberapa para dosen masih terkesan lamban dalam hal pengumpulan tugas, karena merasa lebih senior. Tentunya muncul rasa segan dari pimpinan yang masih tergolong junior. Oleh karena itu, dari pihak pimpinan perlu semacam metode, atau seperti *law and punishment* kepada segenap pihak dosen. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Ihsan Rahmat, Dosen Manajemen Dakwa, bahwa :

“Pertama, kelemahan kito ini, seperti baik itu dari Kaprodi, LPM atau UPM belum ada mekanisme yang bisa menekan dosen-dosen ini untuk mengumpulkan semacam jurnal atau RPS. Kami dari prodi ini hanya bisa menekan dari sisi DLB saja. Kenapa DLB? Karena DLB ini agak takut. Tapi kami kesulitan ketika yang senior (Dosen). Bahkan ada beberapa senior itu yang RPS terpaksa kami (buat).”

“Pertama, kelemahan kita baik di tingkat Kaprodi, LPM atau LPPM adalah belum ada mekanisme yang bisa menekan dosen untuk disiplin dalam hal pengumpulan tugas seperti jurnal kuliah atau RPS. Kami dari prodi hanya mampu menekan dari Dosen Luar Biasa DLB saja, karena mereka masih belum berani. Sementara itu, untuk senior masih terasa sulit karena ketidakdisiplinan ini. Yang pada akhirnya, tugas mereka seperti RPS terpaksa kami yang buat.”

⁷⁸ Sujarwo, S. (2005). Pengembangan dosen berkelanjutan. *Makal. Perkuliahan Univ. Negeri Yogyakarta*, 1-20. Hal 5

Berdasarkan wawancara di atas, karakteristik dosen senior yang tidak disiplin dalam pengumpulan tugas akan sangat menghambat kelancaran tugas suatu lembaga. Hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip dasar kedisiplinan. Di mana menurut Malayu Hasibuan bahwa kesadaran akan kepatuhan tata tertib sangat dibutuhkan oleh lembaga atau perusahaan. Ini bertujuan agar apa yang dicita-citakan oleh sebuah lembaga atau perusahaan dapat tercapai.⁷⁹ Lebih lanjut lagi, Meyrina mengungkapkan bahwa dalam meningkatkan kedisiplinan kerja, maka dibutuhkan metode *reward* dan *punishment* (Hadiah dan hukuman) yang didasarkan pada kualitas kerja dengan untuk menciptakan motivasi dalam dunia kerja agar lebih berprestasi lagi.⁸⁰ Permasalahan di atas sebenarnya telah bertolak belakang dengan kedisiplinan dosen yang mana telah diatur dalam Beban Kinerja Dosen yang meliputi Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran. Karena di dalamnya pengajaran tidak hanya tindakan masuk ke dalam kelas, melainkan diperlukan bukti tindakan tersebut yang berupa RPS, absen, jurnal, dan sebagainya⁸¹.

2. Lambatnya Pencairan Gaji DLB

Lamanya pencairan gaji menjadi problematika bagi dosen Luar Biasa (DLB). Apa yang menjadi hak mereka ini adakalanya diterima ketika

⁷⁹ Sitompul, S. S., & Hutagalung, R. (2017). PENGARUH FAKTOR DISIPLIN KERJA, PENGAWASAN KERJA DAN PENILAIAN KINERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. WAJA PERDANA. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, 2(2), 227-237. Hal 229

⁸⁰ Meyrina, S. A., & Susana, R. (2017). Pelaksanaan Reward Dan Punishment Terhadap Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(2), 139-157. Hal 140.

⁸¹ Suroyo, S., Kurniatun, T. C., & Herningsih, H. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Akademik dan Kedisiplinan Dosen Terhadap Kepuasan dan Prestasi Belajar Taruna Politeknik Pelayaran Sorong. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 2183-2201.

memasuki pertengahan semester berikutnya. Masalah ini pastinya akan menghambat stabilitas kinerja dari dosen itu sendiri. Oleh karena itu, disarankan untuk pencairan dapat dilaksanakan sesuai waktunya. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Ade, Dosen Bahasa Indonesia, yaitu:

“Mohon maaf dari bicara honor, itu kan sensitif. Dulu kadang kala sempat agak lambat. Memang kadang jadi problem. Jadi kadang belum cair. Kita dak tau kan. Pokoknya lumayan lamolah. Sampai ujian lagi semester yang baru.”

Jika dilihat lagi berdasarkan wawancara di atas. Permasalahan yang dihadapi adalah keterlambatan pembayaran hak para dosen. Padahal dosen sendiri merupakan sumber daya manusia yang memiliki skill, kemampuan, pikiran, dan perasaan, sehingga akan sangat berpengaruh pada pencapaian suatu lembaga.⁸² Lebih lanjut lagi, Sujudi mengungkapkan bahwa sehubungan dengan hak para dosen, di perguruan tinggi yang tidak memenuhi beutuhan minimalnya maka hal ini akan memaksa dosen mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari.⁸³ Di sisi lain, Yunita mengungkapkan bahwa sumber daya manusia memiliki potensi yang strategis, sebagai alat daya saing suatu lembaga. Semua itu akan percuma, jika suatu lembaga memiliki modal yang mumpuni, tetapi memiliki sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Pada akhirnya tujuan lembaga pun hanya akan menjadi mimpi semata. Oleh karena itu, sumber

⁸² Sutrisno , Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Kencana Perenada Media Group 2009) h. 99

⁸³ Nayyif Sujudi, N. (2020). *Manajemen Dosen Perguruan Tinggi Swasta (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Sistem Berbasis Life Cycle Dalam Manejemen Dosen Telkom University)* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). Hal 3

daya manusia perlu didukung rasanya nyaman dan aman dari segenap lingkungan yang ada di sekelilingnya, agar tumbuh etos kerja yang baik.⁸⁴

3. Birokrasi yang berbelit belit

Administrasi dan birokrasi yang berbelit-belit cukup merepotkan. Ada banyak pintu yang wajib dilewati. Beberapa terkadang pintu-pintu tersebut tidak terlalu wajib untuk dilewati. Misalnya pada penandatanganan honor reviewer jurnal. Hal ini sangat tidak mungkin dilakukan, karena reviewer sendiri banyak berada di luar provinsi. Jika menggunakan jasa pengiriman pun hal ini kan memakan biaya yang cukup besar. Selain itu, terlalu banyak pintu yang membuat mahasiswa juga kerepotan. Misalnya seperti pendatangan Skek yang butuh 5-6 dosen. Permasalahan ini diketahui berdasarkan wawancara kepada Ifansya, Dosen HTN, bahwa:

“Dalam hal penelitian sehubungan dengan administrasi kita itu ribet. Terlalu banyak pintu yang harus diselesaikan. Termasuk dalam hal pelaporan. Itu sangat ribet ketimbang kebijakan kampus luar atau umum. Mereka cukup sekali laporan sudah. Dan kadang kala keribetan tidak sebanding dengan apa yang didapat oleh peneliti.”

Hal ini juga diperkuat berdasarkan wawancara pada, Ilham Syukri Dosen, IQT bahwa:

”Kelemahan registrasi kita ini yang kita rasakan kan Masih masih banyak yang melewati berbagai pintu. contoh tembusan Skek anak-anak itu ada berapa orang yang menandatangani. itu sampai minta 5-6 dosen. hari ini dosennya satu, ada dua lainnya nggak ada ada itu kan yang terpenting hanya sekedar syarat. Seharusnya satu hari bisa selesai, malah itu bisa jadi berapa hari. itu kan akhirnya terbengkalai mahasiswa itu.”

⁸⁴ Yunita, E. (2016). *Sistem Penentuan Gaji Karyawan Muslim PT. Palma Mas Sejati (PMS) Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah di Tinjau dari Etika Bisnis Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu). Hal 2

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa masih terdapat jalur birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini nantinya akan sangat menyulitkan dosen dan mahasiswa dalam hal khususnya administrasi. Sejalan dengan hal di ini, Yunita mengekemukakan bahwa birokrasi yang terlalu hirarkis, terlihat saat ada kebiasaan kerja yang harus menunggu petunjuk, perintah dan persetujuan dari atasan. Akibatnya kreatifitas, inisiatif, dan sikap kemandirian birokrasi menjadi berkurang. Kualitas pelayanan birokrasi dinilai buruk, lama, berbelit-belit. Hal itu berbeda sekali dengan swasta yang memberikan pelayanan interaktif, kompetitif dan cepat.

Di sisi lain, Pelayanan yang baik terhadap publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi yang merasa dirinya adalah bagian dari publik (pelayan publik), bukan birokrasi yang mempersulit publik dengan berbagai peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang sengaja di persulit. Untuk itu reformasi birokrasi yang benar-benar peka terhadap kepentingan publik dan memiliki akuntabilitas terhadap publik sangatlah penting untuk diwujudkan.⁸⁵

B. Persepsi dan Harapan Civitas Akademik UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

1. Penambahan Fasilitas Wifi

⁸⁵ Lestari, R. A. (2019). Reformasi Birokrasi Sebagai Pelayan Publik. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1). Hal 64 dan 67.

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai tujuannya. Salah satu sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan adalah kebutuhan kecepatan internet khususnya Wi-Fi. Sering kali para staf akademika menggunakan kuota internet pribadi saat bekerja. Hal ini digunakan semata-mata agar pelayanan tidak tertunda. Selain itu, kenyamanan ruangan di perpustakaan terasa kurang, akibat panasnya ruangan. Oleh karena itu, diperlukan pendingin udara agar kondisi ruangan terasa nyaman.

Hal ini berdasarkan wawancara kepada Ahmad Furqon, Staf Perpustakaan, bahwa

“Kalau pendapat saya sebagai pegawai UIN Fas Bengkulu, ada hal yang sangat kurang bagi kami. Kani ini kekurangan alat pendingin atau AC. Terutama untuk pelayanan lantai dua. Kami merasa tidak enak pada para tamu khususnya para dosen. Kemudian, kami kekurangan mengenai bandwidth atau wifi. Karena kami tugasnya menyimpan soft file. Dan kami pernah pakai kuota pribadi. Karena anak-anak mau cepat untuk peminjaman dan pengembalian. Jika anak terlambat dalam pengembalian maka akan ada denda nantinya. Selanjutnya kami minta lahan parkir di halaman kami itu. Kalau bisa dibuatkan.”

Dari permasalahan di atas, diketahui permasalahan yang dimiliki adalah kenyamanan ruangan, kenyamanan area parkir, dan fasilitas Wi-Fi. Keduanya merupakan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja karyawan. Hal ini sejalan dengan pendapat Fanesa bahwa sarana dan prasarana kantor merupakan penunjang dalam meraih tujuan suatu lembaga. Hal ini menjadi sangat penting karena dapat menjamin kemudahan karyawan dalam bekerja. Oleh karena itu,

sebenarnya sangatlah dibutuhkan suatu sistem manajemen pengelolaan sarana dan prasarana yang baik.⁸⁶

2. Penambahan fasilitas layar proyektor

Dalam dunia pembelajaran, media belajar sangat penting untuk membantu guru dalam mentransfer ilmu yang dimiliki. Salah satunya adalah media visual. Media ini akan membuat peserta didik semakin dekat dengan dunia materi yang dimiliki guru. Oleh karena itu, untuk mempermudah guru dalam penyampaian materi, maka diperlukan media pembelajaran, salah satunya yaitu layar proyektor dengan akses mudah di setiap ruangan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Prio Utomo, staf Tata Usaha dan Umum Rektorat menyatakan bahwa, *“Dari segi sarpras saya itu heran, dulu saja di kampus saya satu kelas satu infokus. Di sini malah antri untuk pinjam infokus.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa perlunya penambahan media layar proyektor di setiap ruangan. Agar mahasiswa lebih bersemangat memahami materi lewat media audio visual. Hal ini sejalan dengan pendapat Apriyani bahwa pengajaran dengan memanfaatkan media Layar proyeksi akan meningkatkan semangat bagi peserta didik, agar nantinya terjadi peningkatan kualitas

⁸⁶ Fanesa, F. (2020). *Persepsi Pegawai terhadap Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor di Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang). Hal 1

pencapaian. Peserta didik pun akan memperoleh pembelajaran yang lebih nyata karena media ini merangsang visual⁸⁷.

3. Perlunya peningkatan kenyamanan ruangan

Kenyamanan kondisi ruang kerja sangat berpengaruh pada kinerja karyawan. Salah satunya adalah kondisi suhu ruangan. Suasana ruangan yang panas ini diperparah dengan teriknya matahari yang begitu bebas masuk ruangan. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan ini dibutuhkan pendingin ruangan dan gordena sebagai pelindung sinar matahari. Hal ini berdasarkan wawancara Helvi Mardiatun, Staf Fakultas Tarbiyah dan Tadris bahwa:

“Kalu gedung baru ini masalah AC. Di gedung baru ini lau tengok sendiri kalo dari jam 1 ke bawah panas nian. Kalau bisa jugo maslah kursi. Kursi ayuk ni tengoklah. Meja-meja maaf ngecek idak belaci lagi. Terus hordeng, walaupun idak dikasih ac tapi yang penting hordeng.”

“Gedung baru ini kami memiliki masalah yaitu pendingin udara. Bisa dilihat sendiri di gedung baru ini akan terasa sangat panas di saat pukul satu ke atas. Selain itu maslah lainnya yaitu fasilitas kursi. Kursi saya ini bisa dilihat sendiri, selain itu meja-meja juga tak memiliki laci. Selain itu dibutuhkan juga goreden dan AC sebagai bentuk kenyamanan ruangan.

Berdasarkan wawancara di atas, maka diketahui keinginan dari karyawan Tarbiyah dan Tadris adalah peningkatan sarana dan prasarana, khususnya kenyamanan ruangan, agar kinerja dapat menjadi lebih maksimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Amaliah bahwa prasarana merupakan alat penunjang keberlangsungan kinerja pegawai

⁸⁷ Apriyani, D. D. (2017). Pengaruh penggunaan media proyeksi terhadap hasil belajar matematika. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 7(2). Hal 116.

yang dapat berupa ruangan, listrik, dan lain-lain. Hal ini haruslah menjadi bahan perhatian, agar para karyawan dapat bekerja lebih efektif dan efisien.⁸⁸

4. Etika Dosen dan Mahasiswa

Baik dosen maupun mahasiswa keduanya dituntut memiliki sikap dan kepribadian yang baik. Dosen sendiri merupakan contoh bagi murid-muridnya, sementara mahasiswa sendiri tingkat kesuksesannya dapat dilihat dari indikator kepribadian. Hanya saja, masih ditemukan sikap yang kurang baik di antara keduanya, seperti wawancara yang dilakukan pada Ibu Helvi Mardiatun, Staf Tarbiyah dan Tadris:

“Terus dari mahasiswa itu dari segi pakaian. Ado kadang tu masuk dalam nampaklah buntut. Ado pakai jeans. Ini ado kadang tu yang bikin kami jengkel tu. Bukan ayuk jugo yo tapi dosen-dosen yang lain jugo. Di mano dosen-dosen yang baru itu cak cuek. Pendidikan itu jugo bukan penjamin. Padahal senyum ajo jadilah.”

“Terus dari mahasiswa dari segi pakaian. Ada mahasiswa yang masuk di mana lekukan pantat begitu ditonjolkan. Ada juga yang memakai jeans. Selain itu juga ada hal lainnya yang membuat kami begitu jengkel, di mana dosen-dosen muda begitu cuek. Dengan senyum sebenarnya sudah cukup. Padahal pendidikan sendiri hendaknya mencerminkan kualitas ahlak.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Rosmiati Staf Fakultas Tarbiyah dan Tadris, yaitu

“Kalau kami itu dari mahasiswa segi pakaian. Kalau kadang tu mahasiswa itu idak assalamulaikum lagi. Yang baru-baru inilah. Itulah yang banyak idak tau. Banyak idak negur.” “Yang kami soroti adalah dari segi pakaian mahasiswa. Selain itu mahasiswa

⁸⁸ Amaliah, H. N. (2019). Sarana Prasarana Kantor Sebagai Penunjang Produktivitas Kantor Yang Efektif Dan Efisien. *Jurnal Manajemen Kantor*. Hal 4

masuk tanpa salam terlebih dahulu. Selain itu dosen-dosen yang baru ini kebanyakan sulit untuk bertegur sapa.”

Dari wawancara tadi sebenarnya dapat disimpulkan bahwa terdapat saran untuk tenaga pendidik dan mahasiswa untuk lebih meningkatkan kualitas sikap. Dalam lembaga pendidikan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru atau dosen adalah kepribadian. Hal ini sejalan dengan salah satu kompetensi guru atau dosen yang diatur dalam UU No 14 tahun 2005 pasal 69 ayat 2 yang jika disederhanakan lagi akan menjadi beberapa indikator yaitu: a) Pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mentransfer ilmu, agar peserta didik memahami materi; b). Kepribadian yaitu karakteristik yang dimiliki seorang guru yang dapat menjadi contoh bagi peserta didik; c). Sosial yaitu kemampuan dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sekolah, sesama guru, orang tua, dan murid; d). professional yaitu kemampuan guru yang dilihat dari segi pengetahuan yang dimiliki.

C. Persepsi dan Harapan Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

a. Sarana dan Prasarana.

Sarana-dan prasarana ini merupakan bagian dari tahap perencanaan awal suatu lembaga pendidikan, karena kemajuan lembaga pendidikan tidak akan terlepas dari sarana dan prasaranan yang dimiliki. Seperti pendapat Nasrudin mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor penting untuk mencapai tujuan dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah tersedianya sarana dan prasarana. Lebih lanjut lagi Mulyasa mengungkapkan bahwa sarana perndidikan merupakan media untuk

mendukung proses pembelajaran bagi peserta didik, seperti ruangan, alat tulis, gedung, meja, dan lain-lain, sehingga tujuan pendidikan akan tercapai jika penggunaan sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, Barnawi mengungkapkan hal yang sama bahwa sarana dan prasarana merupakan alat yang mendukung kegiatan dalam dunia pendidikan, sehingga proses pembelajaran yang baik tidak akan terpisahkan dari sarana dan prasarana. Lebih lanjut lagi Nasrudin mengungkapkan bahwa, selain pendidik, sarana dan prasarana adalah faktor penting yang menunjang dunia pendidikan. lembaga pendidikan seolah akan pincang jika tanpa memperhatikan sarana dan prasarana yang baik. Sarana juga hendaknya juga didukung oleh suatu manajemen yang baik terkait pemberdayaan suatu lembaga pendidikan.⁸⁹ Selain itu, Lestari juga mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana merupakan indikator suksesnya suatu lembaga pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Oleh karena itu diperlukan peningkatan secara bertahap sejalan dengan pertumbuhan zaman saat ini yang sudah canggih yang berstandar di masa dunia ekonomi digital. Nantinya diharapkan akan dapat menghasilkan alumni-alumni terbaik yang dapat bersaing dalam dunia kerja.⁹⁰ Dari hasil wawancara kepada

⁸⁹ Nasrudin, N., & Maryadi, M. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Pembelajaran di SD. *Manajemen Pendidikan*, 13(2), 15-23. Hal 16

⁹⁰ Lestari, N. D., & Yusmiono, B. A. (2018). Analisis Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk Menunjang Kegiatan Belajar Mahasiswa di Universitas PGRI Palembang Tahun Akademik 2016/2017. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 3(1), 41-51. Hal 41

mahasiswa diketahui beberapa menginginkan peningkatan sarana dan prasarana. Berikut hasil wawancaranya:

1. Perlunya peningkatan kenyamanan di dalam kelas, seperti penyediaan pendingin udara untuk kenyamanan kelas. Hal ini didasarkan pada wawancara pada mahasiswa HTN, Bimahanda, yaitu *“Kurangnyanya Fasilitas didalam kelas maupun luar kelas kalo di dalam kelas kipas masih macet rusak” dan masih panas kurang fokus di sistem belajar dan mengajar.”*
2. Disarankan untuk menciptakan kantin yang lebih bersih, nyaman, dan kekinian di dalam kampus⁹¹. Hal ini didasarkan pada wawancarapada mahasiswa Hukum Ekonomi Islam, Okta Rio F, bahwa *“Dan kantin yang ada di kampus kita kurang bersih sebaiknya kantin yang ada di kampus kita di rehap ulang agar kebersihan makanan terjamin.”*
3. Disarankan untuk melengkapi fasilitas wifi mahasiswa di kampus. Hal berdasarkan pendapat Mika mahasiswa Manajemen Dakwah, bahwa *“Perlu dilengkapi dengan fasilitas WiFi terutama di gedung Fuad agar lebih memudahkan mahasiswa untuk mengakses pembelajaran.”*
4. Disarankan untuk memperbaiki kualitas jalan aspal yang dimiliki kampus, karena masih ditemukannya jalanan yang masih kurang rata. Hal ini berdasarkan pendapat Septi Anggraini, mahasiswa PBS, bahwa *“Harapan untuk kampus semoga jalan di kampus yang berubang di aspal semoga mulus.”*

⁹¹ Okta Rio P, Ekonomi Syariah

5. Disarankan untuk meningkatkan jumlah tempat sampah di kampus, agar memudahkan mahasiswa untuk menempatkan sampah pada tempatnya. Hal ini berdasarkan pendapat Septi Anggraini, mahasiswa PBS, bahwa *“Lalu tempat sampah pada setiap ruangan juga belum banyak tersedia, sehingga hal ini dapat menyebabkan kebersihan kampus kita terganggu.”*
 6. Disarankan untuk meningkatkan kembali fasilitas alat-alat praktik. Hal ini berdasarkan wawancara pada Hajja Vandini, Mahasiswa KPI yang menyebutkan *“Kelemahan nya pasilitas yang kurang memadai kurang nya alat alat praktek dan lain-lain.”*
 7. Disarankan untuk memaksimalkan pemeliharaan fasilitas kelas seperti jendela. Hal ini berdasarkan pendapat Husni Wibowo, mahasiswa KPI, *“Kurang nya fasilitas dikampus seperti ada nya kelas yang semua jendelanya pecah terutama di bagian prodi.”*
 8. Perlu adanya desain tata letak kampus yang baik, sehingga dapat memotivasi mahasiswa. Hal ini didasarkan pada wawancara pada Dera Soraya, mahasiswa KPI, bahwa *“Saya berharap agar kampus UIN FAS bisa lebih memanfaatkan lahan yang banyak kosong menjadi gedung atau taman yg lebih berguna.”*
- b. Kompetensi Dosen

Dalam rangka memajukan kualitas pendidikan, dosen benar-benar dituntut untuk menjadi profesional. Indikatornya yaitu pelayanan terbaik dari dosen pada mahasiswa. Pelayanan tersebut akan

dapat menjadi maksimal jika didukung oleh sumber daya manusia (dosen).⁹²

Indikator lainnya terlihat dari perannya sebagai motivator penggerak mahasiswa serta pengetahuan terbaru di bidangnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Maonde bahwa dosen dituntut menjadi profesional melalui peran motivatornya kepada mahasiswa untuk membangkitkan minat belajar. Tahrir mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, di antaranya, yaitu: teknik pengajaran, disiplin, kompetensi, sarana dan prasarana, situasi pembelajaran, manajemen kepemimpinan, serta beban perkuliahan. Jika dilihat lagi berdasarkan pendapat di atas sebenarnya diketahui kompetensi seorang dosen sangatlah dituntut. Kompetensi ini akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Pengalaman mengajar, pendidikan formal yang dimiliki dosen, serta pengalaman dalam mengikuti beragam pelatihan. Selain itu, kompetensi guru atau dosen di ataur dalam UU No 14 tahun 2005 pasal 69 ayat 2 yang jika disederhanakan lagi akan menjadi beberapa indikator yaitu: a) Pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mentransfer ilmu, agar peserta didik memahami materi; b). Kepribadian yaitu karakteristik yang dimiliki seorang guru yang dapat menjadi contoh bagi peserta didik; c). Sosial yaitu kemampuan dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sekolah, sesama guru, orang

⁹² Suroyo, S., Kurniatun, T. C., & Herningsih, H. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Akademik dan Kedisiplinan Dosen Terhadap Kepuasan dan Prestasi Belajar Taruna Politeknik Pelayaran Sorong. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 2183-2201

tua, dan murid; d). professional yaitu kemampuan guru yang dilihat dari segi pengetahuan yang dimiliki.

Di sisi lain, Gordon menyebutkan bahwa aspek kompetensi seorang guru meliputi: a. Pengetahuan yaitu sehubungan dengan pengetahuan metode pembelajaran; b). Pemahaman yaitu sehubungan dengan penguasaan materi; c). Kemampuan yaitu kemampuan guru sehubungan dengan profesionalisme; d). Value yaitu kemampuan guru sehubungan dengan kepribadian dan moral; e). Minat yaitu kemampuan guru sehubungan dengan kecenderungannya dalam melakukan sesuatu khususnya dalam bidang dunia pendidikan.⁹³ Dari beragam pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi seorang guru atau dosen sebenarnya meliputi kemampuan dan kepribadian. Kemampuan tersebut berupa kemampuan dalam menyampaikan materi serta kemampuan dalam menguasai atau memahami materi. Sementara, dalam hal kepribadian meliputi moral atau karakteristik yang patut menjadi contoh untuk peserta didik, serta kemampuan bersosialisasi dengan individu di sekitarnya. Sehubungan dengan kompetensi dosen, terdapat beberapa masalah yang dikeluhkan oleh mahasiswa, berikut hasil wawancaranya yaitu:

1. Mahasiswa sering kali kerepotan karena dosen yang sewaktu-waktu mengubah jadwal. Hal ini didasarkan pada wawancara mahasiswa HTN, Meilani Intan yaitu, "*Hanya saja terkadang*

⁹³ Febriani, R., Sudaryono, S., & Rohmah, S. (2019). Pengaruh Persepsi Kompetensi Dasar Dosen Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 31-46.

dosen sering mengubah jadwal kuliah dadakan, sehingga sering kali keteteran.”

2. Lambannya respon dosen ketika bimbingan seringkali merepotkan mahasiswa dalam penyelesaian tugas-tugasnya. Oleh karena itu, dosen hendaknya memiliki respon yang baik terhadap mahasiswa. Hal ini berdasarkan pendapat Ogi Saputra mahasiswa Tadris IPA, bahwa *“Proses pembelajaran tidak sesuai dengan jadwal yang membuat mahasiswa kebingungan, dan banyak dosen yang susah dihubungi saat mau ketemu.”*
3. Disarankan dosen untuk datang lebih tepat waktu, sehingga dapat menunjukkan keprofesionalan dosen. Hal ini berdasarkan pendapat Enti Puspita Sari, mahasiswa PBS, *“Saya berharap kampus kita kedepannya akan menjadi lebih baik lagi, dan sistem belajar serta kapasitas dosen dalam mengajar lebih meningkat lagi, dosen datangnya tepat waktu dan mahasiswa harus lebih rajin dalam belajar.”*
4. Perlu adanya manajemen waktu yang baik dalam proses pembagian waktu belajar mahasiswa. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Dewi M, Mahasiswa PBS, bahwa *“Dalam segi pelayanan proses pembelajaran tidak sesuai dengan jadwal yang membuat kebingungan di mahasiswa, selain itu sulitnya bertemu dengan dosen.”*

5. Dosen perlu lebih memahami keadaan mahasiswa. Aturan yang terlalu idealis membuat kurang nyamannya mahasiswa. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Listia Gustini mahasiswa IQT, yaitu *“Ada beberapa dosen yang kurang mengerti keadaan mahasiswa. Tidak memberikan toleransi, dan tidak tau menau apa yang sebenarnya terjadi pada mahasiswa.”*
6. Perlu manajemen waktu mengajar yang baik agar sering tidak terjadi keterlambatan, karena sudah menjadi kewajiban dosen untuk datang tepat waktu. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Fauzi mahasiswa IQT yaitu *“Terkadang dosen telat masuk ruangan, dan kadang kalo gak dihubungi dulu, maka sulit untuk datang ke kelas, seharusnya itu kan kewajiban dosen mengajar dengan tepat waktu.*
7. Dosen perlu mengevaluasi dan memperbaiki metode mengajar. Di mana dosen seharusnya menciptakan metode yang merangsang keaktifan mahasiswa. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Fauzi IQT *Kemudian di kelas dosen terlalu banyak diam, hanya memberikan sepatah dua patah kata aja sebelum keluar ruangan, jadi kebanyakan siswa kadang banyak yang bingung dengan materi perkuliahan.*
8. Perlu adanya perbaikan manajemen dosen untuk mengganti kekosongan waktu akibat ketidakhadiran dosen. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Hasanah T (IQT) yaitu *“Sistem*

perkuliahan yang gak stabil. Dalam artian, kadang dosennya sering ga masuk. Tapi ga ninggalin tugas.”

9. Dosen sebaiknya mengajar sesuai dengan bidangnya. Agar perkuliahan dan ilmu dapat menjadi lebih efektif. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Hasanah mahasiswa IQT yaitu, *“Kita masih sering ketemu dosen yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya. Itu menurut ana sangat mempengaruhi sih dalam proses pembelajarannya.”*

10. Dosen hendaknya tidak hanya berteori tapi juga praktik agar pembelajaran menjadi tidak monoton. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Imelda Mahasiswa IQT yaitu

“Pembawaan setiap dosen mata kuliahnya diubah sistem pengajarannya karna tidak semua mahasiswa suka mendengarkan tanpa mempraktikkan atau lebih diubah menjadi "apa yg membuat siswa/i ingin mendengarkan."

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yezi N, mahasiswa Ilmu Hadist yaitu:

Kelemahan pelayanan kampus kita ini pertama terlalu mengedepankan teori sehingga skill yang ada pada mahasiswa itu kurang terealisasikan karena kampus mengedepankan teori dan teori dan hanya sedikit praktik. Seharusnya harapan saya ketika kita mengambil jurusan prodi itu langsung terjun ke praktik bukan teori yang membuat mereka pusing. Jika selalu mengedepankan teori maka tidak dipungkiri maka mahasiswa menganggap kuliah itu hanya bagian dari menncapai gelar sarjana saja saja. Jika kampus menomosatukan praktik maka skill mahasiswa akan berguna dan akan terbentuk.”

11. Dosen sebaiknya terbuka akan hal-hal baru. Ia sebaiknya tidak ego dan mau mendengarkan argumen atau pendapat dari mahasiswanya. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Bariratul

Inayah mahasiswa SPI yaitu *“Beberapa dosen yang kurang menerima pendapat dari mahasiswa dikala diskusi berlangsung, dan memenangkan argumennya sendiri.”*

12. Dalam bimbingan, dosen sebaiknya tidak menciptakan kebijakan yang dapat menghambat mahasiswa untuk wisuda. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Dera Soraya mahasiswa KPI yaitu *“Kemudian di semester 8 banyak dosen yang membuat peraturan sendiri dalam bimbingan sehingga memperlambat dalam penyelesaian skripsi mahasiswa yang ingin mengejar target untuk cepat tamat karena kalau lewat batas daftar sidang Otomatis bayar kembali, Tidak semuanya mahasiswa itu lahir dari keluarga mampu.”*
13. Dosen sebaiknya mengatur perkuliahan yang sesuai dengan jadwal. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Ogi Saputra mahasiswa tadaris IPA yaitu *“Proses pembelajaran tidak sesuai dengan jadwal yang membuat mahasiswa kebingungan.”*
14. Dosen sebaiknya mempermudah mahasiswa dalam proses komunikasi, khususnya dalam hal kontak whatsapp atau telepon. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Ogi Saputra mahasiswa tadaris IPA yaitu *“Dosen yang susah dihubungi (not responding to chat wa) saat mau ketemu.”*
15. Dosen sebaiknya memperbaiki metode mengajar. Jangan hanya terlalu fokus membaca ketika mengajar, sehingga pembelajaran

pun menjadi sangat membosankan. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Reni S., mahasiswa Tadris Matematika *“Mohon maaf bapak/ibu jujur menurut saya ada kelemahan dari pelayanan dosen, dimana selama saya kuliah di kampus ini saya menemukan salah satu dosen yang cara mengajarnya itu terlalu bergantung kepada tulisan atau kepada buku cara beliau menyampaikan materi itu seperti membaca. Jadi di sini kami sebagai mahasiswa sedikit kesulitan untuk memahami materi tersebut.”*

c. Pelayanan Mahasiswa

Dalam memberikan pelayanan, suatu lembaga perguruan tinggi hendaknya memberikan pelayanan terbaik khususnya bagi mahasiswa sebagai kostumer utamanya. Kunci utama suatu pelayanan adalah manajemen dari pemangku atau pimpinan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hati bahwa kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.⁹⁴

Untuk memberikan pelayanan terbaiknya, pimpinan hendaknya senantiasa mendengarkan permasalahan yang ada di bawah khususnya mahasiswa. Hal ini seperti pendapat Panca Winahyuningih bahwa kunci dalam memenangkan kompetisi persaingan antar lembaga perguruan tinggi adalah pemenuhan aspirasi dari pesert didik. Selanjutnya Bergin mengatakan bahwa hal terbaik yang dilakukan oleh lembaga perguruan

⁹⁴ Hati, S. W. (2013). Pengaruh Kepemimpinan dan Kinerja Dosen Terhadap Mutu Pelayanan di Politeknik Negeri Batam. *IQTISHODUNA*, 9(2), 176-184. Hal 181-182

tinggi adalah memanfaatkan umpan balik dari mahasiswa. Selain itu, Low mengungkapkan hal yang sama bahwa sudah sepantasnya perguruan tinggi memberikan pelayanan yang berorientasi pada mahasiswa, karena mereka adalah pelanggan nomor satu dalam perguruan tinggi.⁹⁵

Syukur mengungkapkan terdapat lima dimensi dalam pelayanan yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi antara lain: a). Sarana dan prasarana yang merupakan bukti fisik; b). Rasa Empati yaitu kemampuan melayani keinginan atau kebutuhan dari pelanggannya secara baik dan beretika; c). Responsif yaitu pelayanan yang cepat dan handal, sehingga tidak membuat pelanggan menunggu terlalu lama dalam penyelesaian masalahnya; d). Keandalan yaitu kemampuan perguruan tinggi dalam menyelesaikan masalah secara efektif; e). Jaminan yaitu pelayanan terbaik yang terlepas dari keragu-raguan dari pelanggan utamanya.⁹⁶ Sehubungan dengan pelayanan ini terdapat beberapa hal yang dikeluhkan oleh mahasiswa, antara lain:

1. Pelayanan informasi sebaiknya diberikan jauh waktu sebelum masa tenggat yang akibatnya akan sangat merepotkan mahasiswa. Hal ini berdasarkan pendapat Deardi mahasiswa HTN, bahwa “*Dari segi pelayanan kurang baik. Untuk informasi yang mendadak mahasiswa banyak salah tangkap atau kebingungan.*”

⁹⁵ Syukur, A. (2018). Hubungan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa dan Loyalitas Mahasiswa Ditinjau dari Model Pembelajaran di Akademi Farmasi Surabaya. *Reformasi*, 8(2), 100-108. Hal 101 -102

⁹⁶ Syukur, A. (2018). Hubungan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa dan Loyalitas Mahasiswa Ditinjau dari Model Pembelajaran di Akademi Farmasi Surabaya. *Reformasi*, 8(2), 100-108. Hal 101 -102

2. Perlu adanya perbaikan pelayanan seperti dari segi keramahan. Kurangnya sikap ramah dari pelayanan kampus membuat mahasiswa merasa kurang nyaman. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Kiki Apriyani, mahasiswa Hukum Ekonomi Islam, bahwa *“Semoga kedepannya lebih banyak ke tindakan dari pada ngasih saran aja dan semoga pelayanan nya lebih ramah lagi biar kami para mahasiswa tidak takut saat berhadapan dengan yang bersangkutan dan tidak memakai embel-embel.”*
3. Perlu adanya evaluasi mengenai lamanya pengeluaran judul, sehingga tidak merugikan mahasiswa itu sendiri. Hal ini berdasarkan wawancara pada Pebi Eliza Ulan, mahasiswa KPI, bahwa *“Sedangkan semester 7 itu sudah baik karena mata kuliahnya praktik langsung seperti KKN, Magang, skripsi, namun skripsi ini dalam masalah judul saat pengeluaran SK pembimbing waktu nya yang lama dari mulai 1 bulan bahkan ada yang tiga bulanan.”*
4. Perlu peningkatan keamanan dan pengawasan lebih dari pihak yang berwenang. Agar kenyamanan mahasiswa tidak terganggu. Hal ini berdasarkan wawancara pada Husni Wibowo mahasiswa KPI, bahwa *“Terutama di bagian parkir dikarenakan sering nya kehilangan helm bagi pengendara motor.”*
5. Pihak kampus hendaknya menciptakan susunan kampus yang islami, seperti dari gaya berpakaian, etika, dan aturan lain

sebagainya. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Listia Gustini mahasiwa IQT yaitu

“Jujur sebenarnya saya memilih masuk kampus UIN Fas bukan karena pilihan saya. Tapi orang tua yang menyarankan di kampus ini. Kesan saya pertama kali masuk kampus ini adalah saya kira semuanya berbau agamis. Tapi, setelah saya menjadi mahasiswa di sini ternyata dari mahasiswa sendiri masih banyak yang tidak mencerminkan mahasiswa UIN.”

Hal yang sama juga juga diungkapkan oleh wawancara kepada Rini Antika mahasiswa Ilmu Hadis, yaitu *“Organisasi belajar mengaji kurang. Harapannya supaya kampus UIN lebih menerapkan lagi agamanya tentang mengaji dan sholat bersama di masjid.”*

6. Kampus hendaknya memiliki aturan yang ketat seperti Law and punishment bagi mahasiswa yang tidak berpakaian mencerminkan nilai-nilai keislaman. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Bariratul Inayah SPI yaitu,

“Karena Universitas membawa nama Islam, maka saya harap ada peningkatan tentang ke-agama-an pada setiap mahasiswa/mahasiswi, khususnya kewajiban memakai hijab bagi perempuan sebagaimana Al-Qur'an mewajibkannya, karena saya memperhatikan masih banyak mahasiswi yang tidak menggunakan hijab diluar kampus.”

7. Sebaiknya pihak kampus membuat program di mana mahasiswa mampu menemukan jati dirinya dan mengasah kemampuan skillnya. Atau skill lain yang di luar bidang tapi sangat bermanfaat. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Rezi Marenzha mahasiswa SPI yaitu *“Lebih open minded untuk mahasiswa agar lebih aktif dan mendorong pemikiran mahasiswa untuk ikut andil di bagian dalam kampus, dan lebih mengalokasikan mahasiswa untuk bebas mencari jati diri dan mengasah SDM.”*
8. Sebaiknya pihak kampus berhati-hati dalam hal penyimpanan dokumentasi administrasi. Oleh karena itu, perlu manajemen penyimpanan administrasi yang baik. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Endnag R Mahasiswa IQT yaitu *“Saya selalu mengumpulkan KRS dan KHS setiap semester, tetapi saya dibilang ada yang tidak mengumpulkan.”*



BAB V
PERSEPSI DAN HARAPAN
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT BENGKULU
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN UIN FAS BENGKULU

A. Diskripsi Umum Masyarakat Kota Bengkulu

1. Keadaan Sosial Masyarakat

Kota Bengkulu adalah ibu kota provinsi Bengkulu, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera, setelah Kota Padang. Sebelumnya kawasan ini berada dalam pengaruh kerajaan Inderapura dan kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939 - 1942 pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Secara astronomis, Kota Bengkulu terletak antara 03 derajat 45' – 03 derajat 59' Lintang Selatan serta 102 derajat 14' – 102 derajat 22' Bujur Timur yang memiliki batasan wilayah antara lain sebelah utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang, terdiri dari dataran pantai dan daerah berbukit-bukit serta di beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil. Di Kota Bengkulu tahun 2015, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 559 mm dengan hari hujan sebanyak 20 hari sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 7 mm dengan hanya 1 hari hujan.

Penduduk Kota Bengkulu pada tahun 2016 mencapai 359.488 jiwa yang terdiri dari 180.289 jiwa penduduk laki-laki dan 179.199 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kota Bengkulu yaitu sebesar 2.381 jiwa/km². Kecamatan terpadat di Kota Bengkulu yaitu Kecamatan Ratu Samban dengan kepadatan penduduk hingga 8.905 jiwa/km² sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Selebar yaitu 1.462 jiwa/km²⁹⁷.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk [Bengkulu](#) sebanyak 2,03 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 1,99 juta jiwa atau 97,67% beragama Islam. Penduduk Bengkulu yang beragama Kristen ada 32,97 ribu jiwa atau 1,62%. Sebanyak 8,06 ribu jiwa atau 0,4% penduduk Bengkulu beragama Katolik. Sebanyak 4,19 ribu jiwa atau 0,21% penduduk Bengkulu memeluk agama Hindu. Terdapat pula 2,11 ribu jiwa atau 0,1% penduduk di provinsi tersebut yang beragama Buddha. Kemudian, 11 orang penduduk Bengkulu memeluk agama Konghucu. Sementara, 107 jiwa atau 0,01% penduduk Bengkulu menganut aliran kepercayaan⁹⁸.

Percepatan arus informasi, globalisasi dan krisis *multidimensional* telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupandan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Termasuk terkikisnya nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah Waljama'ah dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, ada tiga bentuk keragaman dalam masyarakat modern. Pertama, keragaman subkultur; keagaman ini ditandai

⁹⁷ Data sumber PU-net Bengkulu, <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/6> Diakses tgl 31 Juli 2022, pukul 16.09

⁹⁸ Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Juni 2021

dengan munculnya subkultursubkultur baru diluar kultur dominan. Kedua, keragaman perspektif; keragaman ini muncul dari anggota masyarakat yang kritis terhadap nilai-nilai dominan yang dianggap tidak ideal dan harus dievaluasi untuk memperbaiki keadaan, hal ini misalnya muncul gerakan feminis dalam Islam. sebagai kritik terhadap nilai-nilai normatif yang patriarkal. Ketiga, keragaman komunal; keragaman ini muncul bila terdapat anggota-anggota masyarakat yang hidup secara berkelompok, terorganisir dengan baik, memiliki sistem dan norma hidup yang berbeda dari masyarakat pada umumnya⁹⁹. Misalnya munculnya gerakan-gerakan keagamaan baru.¹⁰⁰ Penerapan nilai-nilai sosial dari pesan atau ajaran agama dalam kehidupan nyata¹⁰¹. Secara umum tujuan pendidikan nilai-nilai ketuhanan dalam pendidikan Islam adalah supaya peserta didik memiliki dan meningkatkan secara terus menerus nilai-nilai iman dan taqwa kepada Allah. Sedangkan secara khusus, dapat dirumuskan dua tujuan utama yaitu; *pertama*, untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dan *kedua*, untuk menginternalisasikan nilai-nilai ketuhanan sehingga dapat menjiwai lahirnya nilai etik insani¹⁰². Nilai-nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat¹⁰³

⁹⁹ Said, Muhammad. 2015. Rethinking Islamic Theology Mengagas Teologi Sosial dalam konteks Pluralisme dan Multikulturalisme (Perspektif Pemikiran Teologi Fethullah Gulen). <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i2.991>
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia>

¹⁰⁰ Bikku Parekh dalam Lucia Ratih Kusuma Dewi” kembalinya Subyek: sosiologi memaknai kembali multikulturalisme” jurnall sosiologi masyarakat, 74.

¹⁰¹ Wahyudin Darmalaksana, 2022. The need for social theology to strengthen the social functions of Islamic banking in Indonesia. HTS Teologiese Studies/Theological Studies

¹⁰² M. Chabib Thoha, Kapita Selektta Pendidikan Islam, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Hal. 73

¹⁰³ Kamal, Tamrin. Urgensi Studi Teologi Sosial Islam.hlm. 34 AL Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2019 e-ISSN : 2685-1881
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alhikmah>

Teologi sosial, yang dekat dengan alam kemanusiaan, diupayakan juga mampu menjembatani kebuntuan pemikiran Islam yang kaku dan cenderung fanatis sempit dengan menghadirkan suasana keberagamaan yang ramah dan harmonis tanpa harus meninggalkan nilai-nilai pokok ketauhidan. Hal ini tidak lain supaya keimanan kepada Allah SWT sebagai pondasi keberagamaan termanifestasikan dalam bentuk-bentuk kebajikan dalam kehidupan sehari-hari; kepedulian terhadap keadilan sosial, penyelesaian permasalahan dan konflik keagamaan, pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup umat manusia secara merata dan sebagainya¹⁰⁴.

Untuk mewujudkan dan mengembangkan teologi sosial, dibutuhkan kesadaran akan pentingnya objektifikasi. Ketika masyarakat semakin plural, terlebih dalam ruang negara bangsa, maka ummat Islam harus menerima pluralisme sebagai konsekuensi logis dari kehidupan berbangsa.

2. Konsep Teologi Sosial Pendidikan dalam Perspektif Islam

Dalam perkembangannya, Perguruan tinggi menjadi tujuan pendidikan bagi masyarakat untuk menuntut ilmu yang lebih banyak lagi selepas Sekolah Menengah Atas. Selain itu, Perguruan Tinggi sebagai pusat peradaban dalam mencetak kaum intelektual. Lembaga perguruan tinggi semaksimal mungkin dan semenarik mungkin harus dapat bersaing dengan sesama perguruan tinggi lainnya untuk memperoleh mahasiswa yang banyak juga berkualitas. Namun sebagai

¹⁰⁴ Rakhman, Alwi Bani. 2013. Teologi Sosial; Keniscayaan Keberagamaan yang Islami Berbasis Kemanusiaan, hlm.178 ([ESENSIA Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin](http://dx.doi.org/10.14421/esensia.v14i2.755)) <http://dx.doi.org/10.14421/esensia.v14i2.755>

lembaga pendidikan terkadang hanya menjual tempat sekolah sebagai lembaga pendidikan bagi orang-orang yang akan masuk ke perguruan tingginya.¹⁰⁵

Bahkan Perguruan Tinggi sebagai salah satu elemen dalam Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tanggungjawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan visi Indonesia 2030 untuk menciptakan masyarakat yang maju, sejahtera, mandiri dan berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing tinggi dalam kancah internasional, Perguruan Tinggi termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta mampu memberikan tawaran solusi terhadap berbagai masalah kemanusiaan dan kebangsaan¹⁰⁶.

Perubahan yang dapat dilakukan tidaklah hanya terbatas pada aspek perilaku individu semata, namun juga berlaku bagi perilaku masyarakat secara keseluruhan. Namun harus disadari, untuk terjadinya perubahan pada perilaku masyarakat, harus diawali dengan perubahan pada diri individu itu sendiri atau dengan kata lain *Ibda bi Nafsih*. Dalam konteks ini, pendidikan berperan untuk mengarahkan perilaku manusia dalam membangun kebersamaan. Pengarahan yang perlu dilakukan bukanlah dengan kekuatan dan kekerasan, akan tetapi melalui metode yang mengarahkan kemampuan manusia untuk membuat kesepakatan dalam masyarakat¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Wardani Wardani, "Agenda Pengembangan Studi Islam Di Perguruan Tinggi: Mempertimbangkan Berbagai Tawaran Model Integrasi Ilmu," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 2 (2016): 255–82.

¹⁰⁶ Mujahidah Mujahidah and Ismail Suardi Wekke, "Transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia," 2019

¹⁰⁷ Ahmad Arafat al-Qadhi, *al-Fikr al-Tarbawiy 'inda al-Mutakallimin al-Muslimin wa Dauruhu fi Bina al-Ghard wa al-Mujtama'*, (Mesir: Al Haiah al Mishriyyah al Ilmiyyah lil Kitab, 1992), hal.238. Lihat juga dalam Suwito dan Fauzan (ed.), *Sejarah Pemikiran Tokoh Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 2003), hal. 11

Dewasa ini, kajian tentang Nilai semakin banyak diminati orang. Buku yang membahas Nilai banyak kita temui di perpustakaan-perpustakaan, terutama di Negara-negara yang berpenduduk Muslim dan Negara Barat yang mayoritas penduduknya non muslim. Hal ini menjadi salah satu bukti betapa tingginya minat masyarakat terhadap Pendidikan Nilai. Hanya saja, tingkat ketertarikan mereka tidak dapat diklaim sebagai penerimaan bulat-bulat terhadap Pendidikan Nilai. Jika diteliti lebih dalam, ketertarikan mereka terhadap Pendidikan Nilai dapat dilihat pada dua kecenderungan. *Pertama*, kecenderungan terhadap fitrah atau naluriah. *Kedua*, kecenderungan pada persoalan akademis. Kecenderungan pertama mengisyaratkan bahwa manusia sesungguhnya membutuhkan sentuhan-sentuhan spiritual atau rohani. Kesejukan dan kedamaian hati merupakan salah satu kebutuhan yang ingin mereka penuhi lewat sentuhan spiritual.

Adapun kecenderungan yang kedua mengisyaratkan bahwa Pendidikan Nilai memang menarik untuk dikaji secara akademis. Kecenderungan kedua ini memosisikan kajian Pendidikan Nilai hanya sebagai sebuah pengayaan keilmuan di tengah keilmuan-keilmuan lain yang berkembang di dunia. Kecenderungan-kecenderungan di atas menuntut adanya pengkajian Pendidikan Nilai dalam kemasan yang proporsional dan fundamental. Hal ini dimaksudkan agar Pendidikan Nilai yang kian banyak menarik peminat itu dapat dipahami dalam kerangka ideologis yang kuat, di samping juga untuk memagari Pendidikan Nilai supaya tetap berada di jalur yang benar. al-Quran dan Hadits merupakan kerangka acuan pokok yang selalu dipegangi oleh umat Islam. Maka dari itu, dalam kajian

Pendidikan Nilai perlu adanya pembatasan terhadap akulturasi budaya luar terhadap pendidikan nilai¹⁰⁸.

Dalam konteks inilah, pendidikan diposisikan tidak saja sebagai *humaninvestment* yang mempunyai perspektif multidimensional baik sosial, budaya, ekonomi dan politik, tetapi juga merupakan usaha sadar dan sistematis yang dilakukan manusia agar menyadari posisinya sebagai *kholifah fil ardli* yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan dirinya untuk menjadi manusia yang bertakwa, beriman, berilmu dan beramal shaleh. Sehingga dalam sebuah kredoyang berlaku dalam tradisi Islam, berupa Ilmu yang Amaliah dan Amal yang Ilmiah dapat terinternalisasi dalam setiap insan. Secara ideal, tujuan yang ingin dicapai dari proses pendidikan dalam perspektif teologi pendidikan adalah mencetak generasi Rabbani, yaitu generasi yang memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah hamba Allah. Hubungan timbal balik antara pencipta, manusia dan lingkungannya dalam konteks pembentukan insan kamil (yang berakhlak al-karimah)¹⁰⁹.

Tanggungjawab sosial perguruan tinggi bukanlah semata-mata diwujudkan dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat semata, sebagaimana yang telah diformulasikan dalam visi dan misi. Tanggung jawab sosial perguruan tinggi juga menuntut bahwa setiap produk sosial yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat juga menyisakan ruang interaksi (pengawasan, akses informasi, dan sebagainya) antara perguruan tinggi dan masyarakat. Interaksi antara perguruan tinggi dan

¹⁰⁸ Dimaksudkan pada nilai-nilai teologis pendidikan Islam

¹⁰⁹ Jalaluddin, Teologi Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Hal. 9

masyarakat terkait dengan pelayanan sosial yang diberikan akan menciptakan akuntabilitas sosial yang efektif bagi perguruan tinggi¹¹⁰. Konsep tentang akuntabilitas sosial sendiri nampaknya belum begitu populer di perguruan tinggi. Akuntabilitas sosial selama ini merupakan gagasan yang menjadi sorotan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, sebab pemerintahlah yang menjadi pelayan utama masyarakat. Selayaknya entitas pemerintah, perguruan tinggi sebagai institusi yang memberikan pelayanan publikpun mesti memiliki akuntabilitas sosial. Apalagi hal ini telah diperjelas dalam tujuan sosial pendirian UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dengan demikian, akuntabilitas sosial menjadi media yang menjembatani pihak UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan masyarakat luas melalui produk-produk sosial yang diberikan.

Kemampuan untuk mau dan dapat melihat teks yaitu fakta dan realita gejala-gejala sosial masih merupakan tugas yang berat bagi kebanyakan perguruan tinggi kita. Kemampuan ini hanya dapat ditingkatkan apabila syarat-syarat minimal suatu perguruan tinggi sudah dipenuhi antara lain prasarana kampus yang memadai, peralatan laboratorium, perpustakaan yang berfungsi, dan armada dosen yang siap tempur artinya punya dedikasi dan kemampuan profesional yang tinggi. Erat kaitannya dengan meningkatkan kemauan dan kemampuan lembaga pendidikan tinggi untuk melihat fakta sosial, ialah tumbuhnya suatu budaya kampus juga meminta perubahan

¹¹⁰ Rayyani, Wa Ode & Ahmad Abbas. Akuntabilitas Kinerja dalam Bingkai Tauhid Sosial: Suatu Refleksi Teologi Al Ma'Un. hlm. 176, (Kamaya : Jurnal Ilmu Agama) Vol. 3 No. 2(2020) <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya>

citra dari masyarakat dan para mahasiswa mengenai kehidupan akademik¹¹¹.

Demikian suatu pandangan mengenai salah satu aspek pengembangan pendidikan tinggi kita dalam mengantisipasi perubahan masyarakat. Pengelolaan berkenaan dengan mobilisasi sumber agar lembaga pendidikan tinggi itu dapat berprestasi semaksimalnya sesuai apa yang diinginkan masyarakat dari lembaga itu. Ada kemungkinan bahwa struktur kelembagaan pendidikan tinggi kita perlu disesuaikan kembali (restrukturisasi) sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai suatu ilustrasi, tuntutan terhadap profesi kependidikan semakin meningkat yaitu bahwa profesi kependidikan menuntut penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang kokoh.

B. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undangundang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah¹¹². Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur,

¹¹¹ Pomalingo, Samsi. 2014. Perguruan Tinggi Dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Dalam Konteks Sosial-Budaya Masyarakat Indonesia, hlm. 121. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 119-134, ISSN 2443-2067. <http://www.journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/44>>.

¹¹² Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Malang, 2017, Hlm.1

Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sistem pendidikan sesuai dengan UU Sisdiknas dimana pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian sinergisitas pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan dengan pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi sebagai pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi menurut PP 38 tahun 2007.

Menurut Harson¹¹³, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai berikut:

¹¹³ Harsono Boedi. 2008. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksaaannya Jilid 1, Jakarta.

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan. Tugas ini adalah untuk turut serta melaksanakan peraturan perundangundangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.
- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh

pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat¹¹⁴. Keterkaitan antara pendidikan tinggi dan pemerintah daerah dapat dilihat dari dua sisi. Pendidikan tinggi dapat berperan menunjang upaya pemerintah daerah dalam pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah, terutama sektor-sektor ekonomi, sosial, dan budaya. dalam hal ini, tentunya dengan memperhatikan prioritas kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dan pemerintah daerah dapat berperan menunjang pengembangan pendidikan tinggi, khususnya kegiatan perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu di masa depan, perguruan tinggi dan pemerintah daerah harus berperan secara proaktif dan partisipatif untuk menciptakan sinergi dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah terutama kesenjangan dalam hal kualitas pendidikan masyarakat dan kesenjangan pembangunan daerah. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mendukung pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah terutama kualitas tenaga pendidik, pendidikan usia dini, dasar dan menengah melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. Dan pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan (*regulator*), pendorong dan pemfasilitasi (*enabler*) akan berusaha mengkoordinasikan kebutuhan-kebutuhan

¹¹⁴ Sinyo Harry Sarundajang. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, Hlm.77

masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan kepada pihak perguruan tinggi. Serta pemerintah daerah diharapkan dapat menginformasikan hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan termasuk hasil pembangunan yang sudah dicapai, sehingga perguruan tinggi dapat merespon secara positif sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah menjadi sumber data dalam penelitian, dimana pemerintah daerah juga memiliki sinergisitas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini merupakan pemerintah daerah yang langsung memiliki keterkaitan terhadap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pada kabag kesajetaraan dan pelayanan pada sekretaris daerah di provinsi Bengkulu yang terdiri dari 5 kabupaten di Provinsi Bengkulu.¹¹⁵ Pemilihan sumber data dari setiap kabupaten didasarkan pada banyaknya mahasiswa yang berasal dari daerah tersebut dan memiliki kerjasama langsung dengan lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

b. Persepsi Dan Harapan Pemerintah Daerah

1. Tentang Mutu Sarana Prasarana UIN FAS Bengkulu

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan suatu proses investasi manusia yang mempunyai peran dan fungsi penting dalam

¹¹⁵ Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Seluma.

kerangka pembangunan nasional secara global atau menyeluruh. Pendidikan sebagai suatu sistem yang paling mempengaruhi, bergantung, berkoordinasi dan sistematis dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan upaya mencerdaskan bangsa merupakan tujuan utama suatu lembaga pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sangatlah penting, karena dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana yang di lembaga pendidikan akan terpelihara dan jelas kegunaannya. Dalam pengelolaan pihak sekolah harus dapat bertanggungjawab terhadap sarana prasarana terutama kepala sekolah yang langsung menangani tentang pengelolaan sarana prasarana tersebut.

Pentingnya sarana dan prasarana guna menunjang proses pendidikan, diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XII pasal 45: (1) Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik; dan (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk pengadaan alat atau media dalam proses belajar mengajar agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal, efektif dan efisien¹¹⁶.

¹¹⁶ Ainullah, Nurla Isna. 2011. Pendidikan Karakter. Jogjakarta: Laksana

Tanpa sarana dan prasarana pendidikan, proses pendidikan akan mengalami kesulitan yang sangat serius, bahkan bisa menggagalkan pendidikan. Oleh karena itu sarana dan prasarana mesti dikelola dengan tata kelola yang baik agar dapat berkembang secara dinamis dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Adapun sarana dan prasarana UIN FAS Bengkulu menurut Pemerintah daerah yang mana peneliti mengadakan wawancara dengan pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 5 kabupaten¹¹⁷ seperti dibawah ini. Wawancara yang peneliti lakukan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Kasi Kesejahteraan Sosial Bapak Faizan sebagai berikut¹¹⁸ :

“Melihat perkembangan IAIN beralih status menjadi UIN sekarang sudah dapat dipastikan adanya perubahan-perubahan terkait sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi tersebut, gedung perkuliahan bertambah dan lainnya”.

Sama halnya dengan Bapak Faizan. Dalam melakukan wawancara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Kabag Kesejahteraan sosial Bapak Agus Supianto selaku Alumni dari UIN FAS Bengkulu mengatakan¹¹⁹:

“Melihat perkembangan UIN sekarang membuat saya juga selaku alumni bangga akan perubahan dan perkembangannya. Saya tahu persis bagaimana perjuangan kami yang terkadang menjadi cemoohan teman-teman pada zaman kami kuliah S1 yang masih berstatus STAIN jalan masih merah, masih banyak babi hutan, kondisi prasarana yang sangat memprihatinkan. Namun dengan perubahan sekarang kami bangga selaku

¹¹⁷ Lima Kabupaten ini dipilih dengan pertimbangan yang lebih mendasar dalam pemilihan lokasi penelitian dimana adanya karakteristik khusus yang melekat pada setting yang dipilih dan wilayah memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Seperti pengguna alumni, pengguna layanan dan mahasiswa tersebar lebih banyak di kabupaten tersebut.

¹¹⁸ Wawancara Bapak Faizan Tanggal 29 April 2022

¹¹⁹ Wawancara Bapak Agus Supianto Tanggal 6 April 2022

alumni juga”.

Sejalan apa yang dikatakan Bapak Faizan dan Bapak Agus Supianto. Pandangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang diwakilkan oleh Kabag Kesra Kepahiang Bapak Mashuri Renoldi dan merupakan alumni dari UIN FAS Bengkulu, berdasarkan data wawancara seperti berikut¹²⁰ :

“Dari tahun ketahun dari saya masuk S1 dan melanjutkan S2 dan Sekarang pun banyak perubahan yang terjadi. Saya ingat persis waktu masih STAIN perjuangan kami luar biasa untuk STAIN tidak kami dengarkan cemoohan teman-teman dengan kuliah di STAIN yang mana dulu jika masuk STAIN merupakan buangan dari Universitas lain yang tidak menerima. Namun dilihat sampai ke kondisi sekarang jauh memiliki perkembangan yang signifikan. Sarana dan prasarana amat sangat luar biasa sehingga saya bangga menjadi lulusan dari UIN FAS Bengkulu sekarang”.

Berdasarkan pendapat dari pemerintah daerah tersebut tentang sarana dan prasarana UIN FAS Bengkulu, peneliti menyimpulkan sarana dan prasarana sudah cukup baik sejauh perkembangan dan alih status STAIN ke IAIN dan ke UIN. Namun hal tersebut tetap menjadi perhatian universitas untuk dapat memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana di perguruan tinggi sehingga dalam hal perkuliahan, layanan akademik dan lainnya memberi kenyamanan untuk mahasiswa, masyarakat, dosen, tenaga kependidikan serta masyarakat.

Demikian hal nya wawancara yang dilakukan pada Kantor Kementerian Agama di lima kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, mewakili pemerintahan daerah. Seperti wawancara yang dilakukan kepada

¹²⁰ Wawancara Bapak Mashuri Renoldi Tanggal 26 April 2022

Bapak H. Sipuan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah mengenai sarana dan prasarana di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sekaligus sebagai mahasiswa Strata 3 UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, sebagai berikut¹²¹ :

“Sarana dan prasarana yang ada di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sudah cukup baik. Namun, untuk dilengkapi/ dibenahi fasilitas belajar sehingga menciptakan kenyamanan dalam belajar. dan untuk penataan sarana dan prasarana misalnya infokus, colokan listrik disediakan di dekat tempat duduk mahasiswa, dan penataan suasana kelas supaya indah dipandang, dan ketika menggunakan sarana dan prasarana tidak menimbulkan kerunyaman dan lainnya”.

Sama halnya dengan Bapak H. Sipuan, Kakanwil Kementerian Agama Seluma dalam hal ini diwakilkan oleh Kabag Haji Umroh Bapak Yulian Ansori juga sebagai Alumni UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan¹²² :

“Sarana dan Prasarana sudah cukup baik, sudah lengkap dan mendukung, akan tetapi kedepannya untuk dibenahi dalam hal penambahan jaringan WIFI, penataan infokus yang tepat, dan kemudian disetiap meja untuk disediakan terminal listrik supaya tidak menggunakan terminal listrik yang ditarik dari dinding”.

Adapun wawancara pada Kakanwil Kabupaten Kaur Bapak Irawadi mengatakan¹²³:

“Dari sisi sarana dan prasarana, saya rasa sudah berkembang dengan baik sejalan dengan perubahan alih status dari STAIN ke IAIN bahkan sampai sekarang menjadi UIN. Ada banyak perkembangan yang terjadi, baik dari segi pembangunan ruang belajar dan fasilitas pendukung

¹²¹ Wawancara Bapak H. Sipuan Tanggal 22 Maret 2022

¹²² Wawancara Bapak Yulian Ansori Tanggal 29 Maret 2022

¹²³ Wawancara Bapak Irawadi Tanggal 7 April 2022

lainnya”. Serta untuk segera mengambil alih lahan yang terbengkalai diatas tanah UIN sehingga dapat diolah menjadi sarana dan prasarana UIN misal dengan membuat gedung serba guna dan asrama atau kost-kostan yang dapat disewakan kepada masyarakat pengguna, bahkan dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa-mahasiswa S2 dan S3 yang dari daerah jauh untuk bermalam di lokasi UIN”.

Sama halnya yang disampaikan Kabag Haji dan Umroh Bapak Bujang Reslan mengungkapkan¹²⁴ :

“Sarana dan prasarana saya rasa sudah baik, dan berharapsegera untuk menambah gedung-gedung belajar untuk mendukung pembelajaran dan organisasi, dan berharap cepat untuk mendirikan Fakultas umum karena UIN layak untuk bersaing dengan Universitas lain terutama di Bengkulu”.

Demikian pula yang disampaikan Kabag TU Kantor Wilayah Kabupaten Kaur Bapak Nupajarmansyah menyebutkan¹²⁵ :

“sarana dan prasarana yang sudah ada untuk dirawat dengan baik dan ditambah dengan fasilitas yang lebih dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa seperti tempat diskusi, jaringan WIFI disetiap tempat diskusi mahasiswa”.

Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Abdullah selaku Kabag TU Kantor Kemenag Kabupaten Kepahiang, menyatakan¹²⁶ :

“Kemajuan sarpras dari tahun ke tahun cukup memadai dan memenuhi. Namun, lahan luas kenapa belum di olah secara pribadi oleh UIN. Misal untuk membuat rumah singgah para mahasiswa S2 dan S3 yang berasal dari luar kota Bengkulu untuk keperluan bimbingan atau konsultasi dengan dosen. Hal ini menjadi bermanfaat untuk UIN dan memenuhi fasilitas pendukung mahasiswa”.

¹²⁴ Wawancara Bapak Bujang Reslan Tanggal 7 April 2022

¹²⁵ Wawancara Bapak Nupajarmansyah Tanggal 7 April 2022

¹²⁶ Wawancara Bapak Abdullah Tanggal 26 April 2022

Menurut Bapak Syarif Hidayatullah selaku Kasi Keagamaan menyatakan¹²⁷ :

“Sarpras yang ada saat ini sudah cukup baik namun untuk menjadi lebih baik lagi, dapat membuat sarana atau fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran dan keindahan UIN. Misal untuk membuat tempat layanan kesehatan atau ruang publik untuk mahasiswa bahkan dosen nyaman dalam belajar-mengajar”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Kesiswaan SMA N 1 Seluma Bapak Arlan, melihat sarana dan prasarana yang ada di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu¹²⁸ :

“Untuk sarana dan prasarana saya rasa tidak dapat berbicara banyak, namun saya dapat melihat dari luar saja ketika mengantarkan siswa lomba di GSG UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Saya melihat, fasilitas untuk belajar sangat lah baik, gedung-gedung belajar yang besar dan bagus, perpustakaan yang sangat luas dan bagus. Kedepannya sarana dan prasarana ini dapat lebih baik lagi karena UIN merupakan pencetak orang-orang yang cerdas dan berilmu”.

Dari MAN Kaur pun mengutarakan pendapatnya yaitu Ibu Mufliha Fitriani selaku Alumni dan pengguna lulusan mengungkapkan¹²⁹ :

“Senang sekali dengan perubahan alih status IAIN menjadi UIN, hal ini menjadi modal awal untuk merangkul lulusan sekolah menengah untuk masuk ke UIN. Kemudian fasilitas belajar yang didapat sangat lah baik, dan untuk ditambah kelengkapan fasilitas misal ada kendaraan seperti sepeda untuk dipinjam dan dipakai mahasiswa menuju gedung-gedung yang jauh dijangkau untuk pejalan kaki. Dan kedepannya menyiapkan fakultas-fakultas umum untuk bisa bersaing dengan universitas negeri seperti Universitas Bengkulu”.

Adapun ungkapan yang disampaikan oleh Ibu Emy Herawati selaku Ka.Prodi PAI pada STIT AL-Qur’aniah juga selaku mahasiswa S3

¹²⁷ Wawancara Bapak Syarif Hidayatullah Tanggal 26 April 2022

¹²⁸ Wawancara Bapak Arlan Tanggal 30 Maret 2022

¹²⁹ Wawancara Ibu Mufliha Fitriani Tanggal 6 April 2022

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu¹³⁰ :

“Jumlah mahasiswa yang sudah banyak tiap tahun nya, selayaknya untuk ditambah dan dijaga sehingga menciptakan kenyamanan saat belajar. Selama belajar sarana dan prasarana sudah sangat mendukung pembelajaran”.

Menurut Bapak Bambang Utoyo selaku Kepala KUA Kepahiang dan selaku alumni mengatakan¹³¹ :

“Kalau melihat perkembangannya, sarana dan prasarana sangat berkembang. Ketika saya kuliah S1 dan masih STAIN gedung perkuliahan, fasilitas pendukung belajar, jalan menuju kampus sangat tidak layak, namun sekarang saya menjadi senang melihat perkembangan yang sangat signifikan terjadi. Dan saya bangga sekarang kampus saya dulu sudah menjadi UIN dan sekarang bisa menjadi kompetitor di Bengkulu”.

Menurut Bapak Imam Ghozali sebagai Kepala MAN Insan Cendikia Bengkulu Tengah menyebutkan¹³² :

“Saya mungkin tidak terlalu banyak berbicara terkait sarana dan prasarana namun dilihat dari perkembangannya UIN memiliki perkembangan yang sangat baik”.

Adapun hal yang diungkapkan guru MAN Insan Cendikia Ibu Defa sekaligus sebagai Alumni mengatakan :

“Melihat perubahan yang signifikan saya sangat bangga dengan perkembangan UIN, dan kedepan nya untuk menambah fasilitas gedung-gedung kuliah bahkan perbaikan gedung sampai dengan fasilitas pendukung kenyamanan dalam belajar. Walaupun IAIN sudah berubah menjadi UIN namun masih terdapat fasilitas yang belum mencukupi kebutuhan mahasiswa, sehingga terdapat kecenderungan mahasiswa untuk melaksanakan tugas diskusi misalnya di sekitar halaman”.

Adapun Menurut Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum MAN

¹³⁰ Wawancara Ibu Emy Herawati Tanggal 8 April 2022

¹³¹ Wawancara Bapak Bambang Utoyo Tanggal 27 April 2020

¹³² Wawancara Bapak Imam Ghozali Tanggal 23 Maret 2022

Seluma Bapak Budi Utomo menyampaikan¹³³ :

“ Sarpras di UIN sudah bagus dalam penilaian masyarakat, gedung-gedung perkuliahan yang bagus dan besar. Namun, kedepannya untuk menyediakan fasilitas beasiswa yang banyak dan beragam bahkan full sampai lulus kuliah untuk calon mahasiswa yang tidak memiliki biaya dalam melanjutkan kejenjang perkuliahan sebab terutama dari sekolah sini, siswa banyak orang tua nya tidak dapat melanjutkan anak-anak nya ke bangku perkuliahan setelah lulus SMA padahal anak dan orang tua nya berharap untuk mendapatkan fasilitas tersebut serta menjangkir pengguna beasiswa dengan baik”.

Menurut Ketua MUI Talo Kabupaten Seluma Bapak Maulana mengatakan¹³⁴ :

“Mahasiswa yang selalu meningkat untuk didukung fasilitas yang layak. Dengan perubahan UIN sekarang sudah cukup banyak perubahan dari segi sarana prasarana yang ada di UIN. Kedepannya dengan sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dan keselamatan”.

Menurut Ibu Rifa selaku guru Fisika MAN Manna Bengkulu Selatan selaku Alumni UIN mengatakan¹³⁵ :

“Sarana dan prasarana sudah cukup baik, gedung-gedung sudah bagus, namun mungkin untuk kedepannya lebih diperhatikan dalam hal pendingin ruangan atau kipas angin yang kadang tidak ada atau bahkan tidak berfungsi. Ketika cuaca panas, membuat belajar tidak nyaman”.

Lain hal yang disampaikan ibu Sherin selaku alumni dan Penyuluh Agama Non PNS di KUA Kepahiang sebagai berikut¹³⁶ :

“Fasilitas saya rasa cukup memadai namun untuk ruang publik dan ruang laboratorium memiliki fasilitas yang kurang, seperti jaringan

¹³³ Wawancara Bapak Budi Utomo Tanggal 30 Maret 2022

¹³⁴ Wawancara Bapak Maulana Tanggal 29 Maret 2022

¹³⁵ Wawancara Ibu Rifa Tanggal 23 Maret 2022

¹³⁶ Wawancara Ibu Sherin Tanggal 27 April 2022

wifi dan tempat diskusi mahasiswa saya rasa tidak memungkinkan”

Dengan demikian, dilihat dari segi jumlah mahasiswa yang ada di UIN FAS Bengkulu hingga saat ini sangat meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, sudah selayaknya fasilitas sarana dan prasarana juga diupayakan seimbang dengan jumlah mahasiswa yang kuliah. Menambah ruangan kelas untuk perkuliahan, ruang laboratorium untuk praktek, Jaringan Internet di sekitar area publik di lingkungan UIN FAS Bengkulu, ruang aula untuk kegiatan mahasiswa dan dosen, ruang sholat selain masjid seperti musholla, ruang olahraga, dan juga kamar mandi mahasiswa. Semua fasilitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas *outcomes* (lulusan) yang nantinya akan keluar dari kampus dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.

Walaupun IAIN sudah berubah menjadi UIN namun masih terdapat fasilitas yang belum mencukupi kebutuhan mahasiswa, sehingga terdapat kecenderungan mahasiswa untuk melaksanakan tugas diskusi misalnya di sekitar halaman kampus. Ketidaknyamanan ini semakin dipicu dengan ruang diskusi seperti gazebo di area lingkungan UIN FAS Bengkulu, jaringan WIFI yang bisa diakses oleh mahasiswa, petunjuk arah gedung-gedung yang ada di lingkungan UIN FAS Bengkulu sehingga memudahkan mahasiswa ataupun yang berkepentingan di UIN FAS Bengkulu dapat mengetahui arah tempat yang akan dituju.

Menindak lanjuti tentang sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan mutu sarana dan prasarana di UIN FAS Bengkulu dengan

perkembangan kedepannya. Proses penataan yang bersangkutan dengan pengadaan, pendayagunaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan agar tercapai suasana proses belajar-mengajar yang kondusif dan nyaman sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Beberapa harapan yang di kemukakan oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu. Seperti yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Kasi Kesejahteraan Sosial Bapak Faizan sebagai berikut¹³⁷ :

“Kedepannya UIN FAS Bengkulu dapat menambah fakultas umum sehingga kedepannya dapat menjaring mahasiswa lebih banyak lagi. Jenis- jenis sarana pendidikan untuk di upgrade seperti media dan alat pembelajaran, prabot-prabot dan lainnya”.

Sejalan dengan ungkapan dan pernyataan tersebut. Bapak Agus Supianto selaku Kabag Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kaur mengungkapkan¹³⁸ :

“Mengingat pentingnya peranan sarana dan prasarana pendidikan bagi kelancaran proses belajar mengajar, maka perlu dilakukan usaha-usaha tertentu kearah pengelolaan, pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana pendidikan secara efektif dan efisien serta penyusunan yang obyektif dan rasional dengan menjaga sarana dan prasarana yang sudah ada dan menambah sarana yang belum ada di UIN FAS Bengkulu”.

Di sisi lain nya diungkapkan Bapak Mashuri Renoldi Kabag Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepahiang sekaligus merupakan alumni dari UIN FAS Bengkulu mengungkapkan harapannya untuk UIN FAS

¹³⁷ Wawancara Bapak Faizan Tanggal 29 Maret 2022

¹³⁸ Wawancara Bapak Agus Supianto Tanggal 6 April 2022

Bengkulu dalam menjaga mutu sarana dan prasarana UIN FAS Bengkulu kedepannya sebagai berikut¹³⁹ :

“Melihat perkembangan UIN dan bagaimana nantinya bisa dan dapat bersaing dengan Universitas lainnya yang ada di Bengkulu dan menjadi daya tarik masyarakat selain dengan menambah fakultas umum, kedepannya menjaga dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan UIN FAS Bengkulu, dan dengan dana yang efisien Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan diperlukan fasilitas pendukung yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Mungkin kedepannya dengan lahan yang luas selain adanya gazebo tempat persinggahan para mahasiswa yang berjalan kaki ataupun hanya sekedar untuk berdiskusi, mungkin kedepannya ada fasilitas sepeda yang lengkap dengan tempat parkir khusus sepeda yang bisa dipakai mahasiswa untuk menuju gedung-gedung sehingga memudahkan mahasiswa mengakses lingkungan UIN FAS Bengkulu serta bisa menciptakan lingkungan yang ramah di UIN FAS Bengkulu”.

Adapun yang disampaikan oleh Bapak H. Sipuan harapannya dalam menjaga mutu UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai Berikut¹⁴⁰:

“Dengan perubahan status UIN, dapat menambah fakultas-fakultas dan prodi bersifat umum baik S1 dan Pascasarjana. Sehingga bisa menjaring mahasiswa. Sarana dan prasarana untuk diperbaharui menjadi lebih baik dari sebelumnya”.

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Imam Ghodzali Kepala Madrasah Insan Cendikia Bengkulu Tengah mengatakan¹⁴¹ :

“Harapannya kedepan menjaga mutu dan sarana prasarana dengan menambah fakultas dan program studi yang bersifat umum sehingga anak-anak yang memiliki minat ke sains dapat melanjutkan di UIN dan menarik calon mahasiswa lainnya. Dengan mutu dan fasilitas menjadi baik dari sebelumnya diharapkan akreditasi universitas dan prodi-prodi bisa berubah menjadi amat baik”.

¹³⁹ Wawancara Bapak Mashuri Renoldi Tanggal 26 April 2022

¹⁴⁰ Wawancara Bapak H.Sipuan Tanggal 22 Maret 2022

¹⁴¹ Wawancara Bapak Imam Ghodzali Tanggal 23 Maret 2022

Lainhal yang diampaikan oleh bapak Yulian Ansori Kabag Haji dan Umroh Kakanwil Kementerian Agama Kabupaten Seluma menyebutkan harapan kedepannya¹⁴² :

“Perbaiki pelayanan UIN kedepannya untuk melakukan perubahan pelayanan baik dari segi saps dan layanan akademik bakan layanann bimbingan dan/atau ujian mahasiswa”.

Bapak Sri Widodo, Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemerintah daerah Bengkulu Tengah menyampaikan pada saat FGD sebagai berikut :

“Sebagaimna yang sudah ada seperti desa binaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Pemkab berharap bisa kerjasama dengan UIN Bengkulu dalam bentuk lainnya dengan penambahan desa binaan. Pemkab telah menerima manfaat manfaat alam kegiatan KKN di bulan Ramadhan di kabupaten Bengkulu Tengah. Kami berharap agar KKN selanjutnya dilakukan pada bulan ramadhan juga. UIN Bengkulu sebagai mitra bagi Pemkab Benteng dalam mensejahterakan masyarakat Bengkulu Tengah”¹⁴³.

Bapak Prof. Dr. Johanes pakar Pendidikan Universitas Bengkulu menyampaikan pada saat FGD, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai perguruan tinggi yang dapat berkompetisi dan menselaraskan arah kebijakan perguruan tinggi dengan memperhatikan sebagai berikut :

“1) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu harus membuat standar pengembangan berdasarkan SN Dikti. No 20 tahun 2003; 2) Kemudian harus membuat standar Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan SN Dikti. No 20 tahun 2003. Paparan dalam RIP, RENSTRA dan RENOP; 3) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu harus membuat pengembangan yang lebih dalam IKT (Indikator Kinerja Tambahan) di atas SN Dikti. No 20 tahun 2003. Paparan dalam RIP, RENSTRA dan RENOP. Perhatikan dalam RIP, RENSTRA dan RENOP harus mencerminkan visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan; 4) UIN Fatmawati

¹⁴² Wawancara Bapak Yulian Ansori Tanggal 29 Maret 2022

¹⁴³ Bapak Sri Widodo, Kabag Ortala Bengkulu Tengah. FGD di Hotel Latansa, 26 Juli

Sukarno Bengkulu harus membuat trobosan yang spektakuler bagi kebutuhan masyarakat sehingga diminati mahasiswa; 5) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu harus tetap tegak dalam ciri ilmu keagamaan. Jangan memperbanyak membuka disiplin ilmu umum; 6) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu harus Perkuat Prodi ilmu keagamaan Bukan prodi umum; 7) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu harus mengikuti perkembangan multikultural yang sedang trend dalam pembangunan bangsa oleh pemerintah; 8) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu harus menjadi PTKI *agen of change*. Agen perubahan. Masalahnya, perubahan di masyarakat lebih cepat dari pada di perguruan tinggi; 9) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu harus cermat dalam mengantisipasi pasi perubahan yang terjadi pada anak didik yang lebih cepat berubah dari pada kita; 10) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu harus pandai membaca peluang atas pertumbuhan ekonomi masyarakat; 11) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu harus siap menjadi Badan Layanan Umum (BLU)”¹⁴⁴.

Adapun harapan yang disampaikan oleh Ibu Mufliah Fitriani

Kepala MAN Kaur sebagai berikut¹⁴⁵ :

“Dari segi sarana dan prasarana untuk diperbaiki, seperti layanan administrasi untuk lebih cepat dan tanggap, dan untuk menyediakan ruang terbuka diskusi mahasiswa diluar pembelajaran kelas misalnya gazebo tempat diskusi atau persinggahan mahasiswa dengan jaringan WIFI yang dapat digunakan mahasiswa”.

Dodi Irsan, mewakili Mitra Lembaga Pendidikan Tinggi

Keagamaan menyampaikan beberapa hal pada saat FGD, sebagai berikut :

“harapannya kedepan untuk dapat UIN Bengkulu bisa kerjasama dengan STIES NU Bengkulu dalam hal pengabdian masyarakat. UIN BENGKULU memberi inspirasi kepada kemajuan STUES NU dalam hal memajukan institusi”¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Bapak Prof. Dr. Johanes, Pakar pendidikan Universitas Bengkulu. FGD di Hotel Latansa, 26 Juli 2022

¹⁴⁵ Wawancara Ibu Mufliah Fitriani Tanggal 6 April 2022

¹⁴⁶ Bapak Dodi Irsan, STIES NU Bengkulu, mitra lembaga pendidikan tinggi. FGD di Hotel Latansa, 26 Juli 2022

Adapula yang disampaikan Ibu Emy Herawati mengenai harapan kedepannya terhadap UIN, sebagai berikut¹⁴⁷ :

“Dengan beralihnya status menjadi UIN kedepannya banyak fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan mahasiswa kedepannya, seperti jaringan WIFI yang kuat yang dapat di akses disetiap sudut UIN dalam menunjang belajar mahasiswa”.

Sama hal yang disampaikan Ustad Heri Yulianto Pembimbing pada Pondok Pesantren Mahrfatul Ilmi¹⁴⁸ :

“Harapan nya kedepan untuk UIN dapat membuka program studi pascasarjana yang baru sehingga kami dapat melanjutkan studi pascasarjana nanti sesuai basic keilmuan kami. Serta pondok pesantren makhrifatul ilmi dengan UIN kedepan nya ada kerjasama, pertukaran tenaga pengajar dan/atau lainnya”.

Ibu Rifa mengungkapkan hal lain akan tentang harapan nya untuk UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu beberapa tahun kedepan¹⁴⁹ :

“Harapan untuk UIN kedepannya, memperbaiki fasilitas yang ada dan menambah fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan mahasiswanya. Dan semoga nanti ada beasiswa untuk melanjutkan studi pascasarjana yang diadakan UIN Fatmawati Sukarno”.

Selanjutnya, Ibu Sherin sebagai Penyuluh Agama Non PNS di KUA Kephaiang sekaligus sebagai alumni mengatakan¹⁵⁰ :

“Harapannya dengan perubahan IAIN menjadi UIN dapat menambah fasilitas penunjang mahasiswa dalam belajar dan berorganisasi, serta melengkapi laboratorium pembelajaran dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman”

Dengan demikian, dari hasil wawancara diatas banyak harapan kedepannya untuk UIN FAS Bengkulu untuk perkembangan dan

¹⁴⁷ Wawancara Ibu Emy Herawati Tanggal 8 April 2022

¹⁴⁸ Wawancara Bapak Heri Yulianto Tanggal 9 April 2022

¹⁴⁹ Wawancara Ibu Rifa Tanggal 23 Maret 2022

¹⁵⁰ Wawancara Ibu Sherin Tanggal 27 April 2022

kemajuan UIN FAS Bengkulu. Sarana dan prasarana pendidikan yaitu untuk mempengaruhi dan mendukung aktivitas dan proses pembelajaran dan layanan di UIN FAS Bengkulu secara efektif dan efisien. Paradigma sarana dan prasarana tersebut mengandung atribut pokok sebagai kebutuhan mahasiswa dosen , masyarakat dan bahkan pengguna lulusan. Memiliki suasana akademik (*academic-atmosphere*) dalam penyelenggaraan program studi, adanya komitmen kelembagaan (*institutional commitment*) dari para pimpinan dan staf terhadap pengelolaan organisasi yang efektif dan produktif, keberlanjutan program studi, serta efisiensi program secara selektif berdasarkan kelayakan dan kecukupan. Dimensi-dimensi tersebut mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat strategis untuk merancang dan mengembangkan usaha penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta berorientasi pada masa yang akan datang.

2. Tentang Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian. Usaha untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat dalam program-program pembangunan di berbagai bidang, menuntut perguruan tinggi untuk senantiasa terus menerus meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara terpadu dan bersistem, terutama dalam pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar ilmu yang diberikan oleh

perguruan tinggi bersifat prospektif sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam pengertian umum, pengabdian seringkali yang disebut sebagai pengabdian adalah sesuatu yang dilakukan tanpa pamrih ataupun tanpa kompensasi apapun. Namun pada sisi yang lain, semua kegiatan untuk masyarakat sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan sehingga memerlukan sesuatu kepastian pendanaan untuk keberlangsungan kegiatan tersebut¹⁵¹. Pengabdian kepada masyarakat adalah pengamalan ilmu, teknologi dan kesenian (IPTEK) yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya mensukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan menuju tercapainya manusia Indonesia yang maju adil dan sejahtera¹⁵².

Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah, sikap, inovatif dan kreatif.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk kegiatan intrakulikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada

¹⁵¹ Fuaduddin. Pengembangan dan Inovasi Kurikulum. Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002: hlm,287

¹⁵² *Ibid*, : 288

mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu kegiatan yang menambah daya kritis dan pengalaman bagi mahasiswa dalam bentuk nyata yaitu melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata¹⁵³.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sejatinya salah bentuk implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian. Namun, KKN juga bisa menjadi peluang implementasi Tri Dharman Perguruan Tinggi bentuk lainnya yakni pengajaran dan penelitian. Mahasiswa dituntut memiliki kreativitas dan perilaku inovatif guna memenuhi ketiga hal tersebut. Dalam penelitian kali ini penulis ingin mewujudkan menjadi 3 hal sempurna Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara melaksanakan KKN sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan salah satunya pengajaran dan selanjutnya merubah menjadi penelitian¹⁵⁴

Adapun tujuan dilaksanakannya KKN sebagai berikut¹⁵⁵ :

- a. Meningkatkan kepedulian dan kemampuan Mahasiswa dalam mempelajari serta mengatasi masalah social di wilayah domisilinya maupun masyarakat luas melalui bantuan penyusunan rencana dan pendampingan pada pelaksanaan program inovatif dan kreatif melalui penerapan ilmu, pengetahuan serta teknologi;
- b. Menggalang komitmen, kepedulian serta kerjasama berbagai stakeholders dalam upaya mengatasi kemiskinan, pemberdayaan

¹⁵³ Sardiansyah, Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Bagian Dari Pengembangan Kompetensi Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Samudra Kkn Tahun 2017), JIM UPB Vol 7 No.1

¹⁵⁴ Peranan Kuliah Kerja Nyata sebagai Wujud Pengabdian Kepada Masyarakat di Tengah Pandemi-19 (Studi Kasus IAIN Salatiga 2021)

¹⁵⁵ *Ibid*,

social di berbagai aspek khususnya bidang Pendidikan serta keagamaan, dan dalam kerangka mengatasi permasalahan social lainnya;

- c. Meningkatkan kemampuan Mahasiswa melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat sesuai arahan pembangunan Manusia dalam mencapai target serta sasaran *Millenium Development Goals*, potensi, kompetensi, sumber daya serta kemampuan lingkungan dalam wadah kerjasama masyarakat, swasta, pemerintah dan Lembaga lainnya;
- d. Menumbuhkan dan mematangkan jiwa pengabdian kepada masyarakat dan bertanggungjawab terhadap proses pembangunan dan masa depan bangsa, negara serta agama;
- e. Meningkatkan komunikasi antara Lembaga Perguruan Tinggi dengan masyarakat sehingga Mahasiswa dapat lebih berperan dalam pembangunan sesuai permasalahan di masyarakat.

Dengan kata lain, Kuliah Kerja Nyata merupakan alat sebagai pengembangan kepribadian mahasiswa (*personality development*), pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), dan pengembangan kelembagaan (*institutional development*).

Oleh karena itu, sasaran Kuliah Kerja Nyata tidak hanya masyarakat, tetapi juga mahasiswa sebagai pelaku, dan perguruan tinggi sebagai pengelola dan penyandang sebagian dana. Mahasiswa harus memiliki pandangan bahwa banyak hal yang ada dalam masyarakat dapat

dipelajari agar KKN menjadi pengalaman berharga untuk mengarungi proses pendewasaan dan pematangan menuju manusia seutuhnya. Dengan demikian, proses KKN merupakan ajang pembelajaran bagi mahasiswa, masyarakat, dan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan kapasitas masing-masing.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan pengguna yang merasakan langsung hasil dari Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan mahasiswa yang kembali ke masyarakat. Adapun menurut Bapak Faizan Kasi Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma sebagai berikut¹⁵⁶ :

“Dengan melaksanakan KKN, mahasiswa diharapkan mendapatkan pengalaman yang berharga dalam rangka pendewasaan pola pikir dan perilaku, pembelajaran dalam kehidupan nyata di masyarakat, pemaduan dunia kampus yang teoritis dengan kehidupan masyarakat yang realistik”. Dan pelaksanaan KKN mahasiswa untuk dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan minimal satu sampai dua kelompok untuk ditempatkan di desa benar-benar terpencil dan dapat membantu masyarakat desa yang memang membutuhkan arahan dan bimbingan sehingga bermanfaat untuk masyarakat. Sejalan dengan program bupati seluma, dimana di desa-desa terpencil terdiri dari 4 desa berbeda kecamatan membutuhkan mahasiswa KKN desa tersebut terpencil, di pedalaman diarah pegunungan sehingga saya rasa sangat membantu dan bermanfaat untuk masyarakat disana. Untuk akses transportasi sekarang sedang dibangun jalan sehingga kendaraan bisa meakses desa-desa tersebut”.

Dalam melakukan wawancara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Kabag Kesejahteraan sosial Bapak Agus Supianto mengatakan¹⁵⁷ :

¹⁵⁶ Wawancara Bapak Faizan Tanggal 29 Maret 2022

¹⁵⁷ Wawancara Bapak Agus Supianto Tanggal 6 April 2022

“Mahasiswa yang diletakan di Kabupaten Kaur, bagaimana jika mahasiswa yang akan melakukan Kuliah Kerja Nyata yang berasal dari Kabupaten Kaur kembali ke tempat asal untuk dapat bermasyarakat misal dalam hal menjadi khotib, pembaca doa di acara-acara, membimbing baca Qur’an. Mahasiswa yang melakukan KKN dapat membantu untuk mengarahkan pendidikan karakter pada pelajar di Kaur dengan kegiatan-kegiatan atau program yang memang langsung dari UIN FAS Bengkulu. Dan mungkin untuk kedepannya bisa dilakukan mahasiswa yang kembali ke daerah asal mereka untuk melakukan KKN ataupun Praktik kerja lapangan sehingga untuk menekankan mahasiswa untuk dapat bermasyarakat dan memahami budaya setempat sehingga dapat menerapkan karakter, budaya dan adat di Kabupaten Kaur dibangkitkan kembali”.

Di sisi lain nya diungkapkan Bapak Mashuri Renoldi Kabag Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepahiang mengungkapkan ¹⁵⁸:

“KKN memiliki peran dan fungsi yang mulia, yaitu diharapkan mampu memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diarahkan agar terbentuk masyarakat pembelajar, suatu masyarakat yang memiliki kesadaran akan potensi dan kemampuan untuk menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan agar mampu mencapai keadilan dan kesejahteraan itu terasa ketika pengalaman saya dalam melaksanakan KKN bagaimana mengubah persepsi masyarakat dan menjadi pengembangan keberibadian saya di masyarakat dengan membaur di masyarakat dengan membawa nama baik alamater. Sehingga KKN itu sangat perlu dilakukan karena dapat membuka pikiran ataupun persepsi kedepannya untuk memulai bermasyarakat dan kedepannya kita menjadi apa. Dan untuk KKN dapat dilakukan di daerah Kepahiang juga karena kami sudah lama tidak mendapatkan mahasiswa KKN dari UIN FAS Bengkulu”.

Pada kesempatan yang sama, peneliti mewawancarai Bapak Irawadi Kakanwil Kementerian Agama Kabupaten Kaur mengenai Kuliah Kerja Nyata sebagaimana penjelasannya¹⁵⁹ :

“Mahasiswa KKN hendaknya untuk memberikan pendidikan keagamaan (non formal) terhadap siswa atau anak-anak baik itu

¹⁵⁸ Wawancara Bapak Mashuri Renoldi Tanggal 26 April 2022

¹⁵⁹ Wawancara Bapak Irawadi Tanggal 6 April 2022

dalam bentuk program atau bentuk lainnya untuk membentuk pendidikan keagamaan anak-anak di desa – desa terpencil dan/atau daerah yang memiliki pemahaman yang kurang”. Seperti bagaimana di suatu desa di kabupaten ini dirasa masih sangat kurang dalam pemahaman karakter agama sebab masih memegang teguh suatu tradisi kearifan lokal yang cenderung menyimpang. Hal tersebut sangat dibutuhkan mahasiswa KKN dari UIN untuk membantu”.

Sejalan dengan apa yang Bapak Irwandi kemukakan, Bapak Bujang Ruslan juga menyampaikan terkait dengan KKN mahasiswa, sebagai berikut¹⁶⁰ :

“Menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Irwandi sebelumnya, mahasiswa KKN sangat diharapkan untuk membantu permasalahan yang ada di Kaur terutama mengenai tradisi kearifan lokal yang cukup menyimpang. Dikatakan menyimpang disini sebagai contoh ketika terjadi pembunuhan didaerah tersebut timbal balik dari perbuatan tersebut dengan keluarga korban melakukan balas dendam, dengan melakukan pengerusakan sampai pengusiran, hal ini tidak bisa diselesaikan oleh pihak tetua adat, atau lainnya, polisi hanya meredam agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tradisi kearifan lokal yang cukup menyimpang ini lah yang membutuhkan bantuan setidaknya pemahaman kepada generasi penerus terutama anak-anak dan remaja”.

Selanjutnya, Bapak Maulana menjelaskan pendapatnya terkait dengan Kuliah Kerja Nyata sebagai berikut¹⁶¹ :

“KKN dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain dengan pengaplikasian ilmu yang di dapatkan di bangku perkuliahan. Perlu adanya KKN mahasiswa untuk di daerah Batu Tugu Talo, Seluma. Dengan KKN dapat membantu dan membimbing masyarakat sehinga dapat saling menghargai dan belajar dari lingkungan masyarakat”.

Adapun Bapak Bambang Utoyo mengatakan terkait KKN sebagai berikut¹⁶²:

¹⁶⁰ Wawancara Bapak Bujang Ruslan Tanggal 6 April 2022

¹⁶¹ Wawancara Bapak Maulana Tanggal 29 Maret 2022

¹⁶² Wawancara Bapak Bambang Utoyo Tanggal 27 April 2022

“Saya berkaca dengan pengalaman saya dahulu ketika KKN. KKN merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dimana ditempatkan dipedesaan, disini banyak pembelajaran yang saya dapatkan seperti bagaimana membaur dengan masyarakat, bagaimana masyarakat welcome dengan kita, bagaimana dapat bersosialisasi serta berinteraksi dengan warga. Artinya sebagai mahasiswa harus memiliki kesiapan mental dan ilmu untuk dapat terjun ke lapangan, kita harus siap ketika diminta melakukan hal yang terkadang belum pernah kita lakukan, misal menjadi imam atau khatib”.

Lain hal yang disampaikan Bapak Yulian Ansori Kabag Haji dan Umroh Kakanwil Kementerian Agama Seluma dimana¹⁶³ :

“KKN sangat membantu kegiatan yang ada di masyarakat. Kami sudah lama tidak mendapatkan mahasiswa KKN dari UIN, mungkin dapat berkoordinasi dengan pimpinan wilayah tidak hanya di pemerintah daerah atau camat namun sektor kementerian agama juga di libatkan untuk membina dan mengarahkan adik-adik mahasiswa sehingga nanti stigma masyarakat dan mereka di segani masyarakat karena ada kekuatan adik-adik mahasiswa di daerah tersebut”.

Sama hal yang disampaikan Bapak Yulian Ansori, Bapak Kabag TU Kakanwil Kementerian Agama Kepahiang mengatakan terkait KKN

¹⁶⁴.

“dalam hal KKN, kami sudah lama tidak mendapatkan mahasiswa KKN dari UIN. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan UIN sehingga mahasiswa tidak di tempatkan di desa-desa di kabupaten kepahiang. Namun seyogyanya untuk meratakan penempatan mahasiswa UIN ke kepahiang. Supaya mahasiswa merasa aman dan di hargai di masyarakat dalam arti tidak dipandang sebelah mata hendaknya nanti jika ke kepahiang untuk menjalin komunikasi dan membangun kerjasama langsung ke sektor daerah (lintas sektoral) misal diketahui kementerian agama, dandim, kepolisian sektor daerah setempat yang tujuannya dilakukan untuk mahasiswa sehingga menjadi penguat, karena kelemahannya jika hanya dari pemerintah daerah langsung kepada desa banyak hal-hal

¹⁶³ Wawancara Bapak Yulian Ansori Tanggal 29 Maret 2022

¹⁶⁴ Wawancara Bapak Abdullah Tanggal 26 April 2022

yang tidak diinginkan terjadi”.

Dengan demikian, dari hasil wawancara tersebut didapatkan bahwa dengan adanya KKN masyarakat menjadi lebih sejahtera, dan mahasiswa sendiri memperoleh pengalaman berharga untuk proses pendewasaannya. Pada gilirannya, perguruan tinggi asal mahasiswa memperoleh keuntungan karena program perguruan tinggi dapat terlaksana melalui KKN. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman empiris kepada mahasiswa untuk hidup ditengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengajarkan kepada mahasiswa cara identifikasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Kuliah kerja nyata secara langsung akan menunjukkan keterkaitan langsung antara dunia pendidikan dan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat. Interaksi yang baik antara mahasiswa dengan masyarakat setempat dengan masyarakat diperlukan yang namanya keterampilan sosial yaitu kemampuan individu untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain baik secara verbal maupun nonverbal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, di mana keterampilan ini merupakan perilaku yang dipelajari. Mahasiswa dengan keterampilan sosial akan mampu mengungkapkan perasaan baik positif maupun negatif dalam hubungan interpersonal¹⁶⁵.

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 mengartikan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu kegiatan sivitas

¹⁶⁵ Perdana, R, P,dkk. 2013. Dampak Kebijakan Ekonomi Kedelai Terhadap Kinerja Ekonomi Perkedelaaian Indonesia [jurnal].Malang : Pascasarjana Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya.

akademika dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Menurut Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, “Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang terdiri dari cara-cara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam upaya pengembangan wawasan, pengetahuan, sampai upaya untuk meningkatkan keterampilan yang dilakukan oleh civitas akademika sebagai bentuk dharma bakti serta wujud kepedulian untuk berperan aktif meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas terlebih bagi masyarakat ekonomi lemah”¹⁶⁶. Dalam hal pengabdian kepada masyarakat yakni menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat seperti yang sudah disampaikan sebelumnya memang memberikan manfaat besar dan cakupannya luas. Tidak hanya bermanfaat bagi institusi atau perguruan tinggi, namun juga kepada masyarakat sekaligus kepada dosen. Dilihat dari sisi dosen, berikut adalah beberapa manfaat pengabdian masyarakat bagi dosen seperti : 1) melatih keterampilan kepemimpinan; 2) melatih kemampuan menyelesaikan masalah; 3) mengembangkan kemampuan komunikasi; 4) memperkuat relasi; 5) membangun kolaborasi dalam bentuk pengembangan pembangunan suatu daerah, maka akan melakukan

¹⁶⁶ Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia : 2011

kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu yang paham masalah pembangunan infrastruktur; dan 6) melaksanakan tugas dan tanggung jawab dosen, membantu dosen memenuhi BKD (Beban Kerja Dosen) sekaligus membuka kesempatan untuk naik jabatan akademik. Sebab angka kredit dosen yang sudah memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kenaikan jabatan akademik. Sehingga dosen bisa memiliki karir yang terus menanjak dengan memegang jabatan akademik yang tinggi¹⁶⁷.

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dijalankan dosen dengan melakukan riset, penyuluhan, pelatihan, loka karya, publikasi, proyek-proyek percontohan dan bahkan membuka konsultasi. Secara sederhana, pengabdian masyarakat bisa diartikan sebagai proses implementasi atau penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki dosen kepada masyarakat.

Adapun wawancara yang dilakukan kepada Bapak Arlan Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Seluma¹⁶⁸ :

“Untuk kesekolah kami, sudah lama tidak mendapatkan sosialisasi dari UIN dalam hal program studi ataupun beasiswa yang ditawarkan oleh UIN kepada calon mahasiswa, kami sangat mau dan menunggu kedatangan pihak UIN untuk melakukan sosialisasi. Terakhir tahun lalu ada dari fakultas ekonomi dan bisnis islam”.

Sama halnya yang disampaikan Kepala sekolah MAN Insan Cendikia Bengkulu Tengah Bapak Imam Ghozali mengatakan :

“Untuk sosialisasi yang dilakukan di sekolah kami dari UIN memang belum ada, kurang nya sosialisasi terutama ke siswa, terkadang siswa tidak terlalu mengenal UIN Fatmawati Sukarno

UMA) ¹⁶⁷ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Medan Area (LP2M

¹⁶⁸ Wawancara Bapak Arlan Tanggal 30 Maret 2022

Bengkulu. Mereka belum mengetahui gambaran perguruan tinggi, dan adapun pengabdian dosen belum ada, kami sangat berharap untuk adanya pengabdian dosen ke sekolah kami, untuk mengajarkan siswa dan guru-guru”.

Adapun yang di sampaikan oleh Wakil Kurikulum MAN Seluma Bapak Budi Utomo mengatakan¹⁶⁹ :

“Dalam hal sosialisai dari UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu kami pernah mendapatkan sosialisasi, namun kedepan nya kami sangat berharap dapat pembinaan atau pelatihan yang diberikan dosen kepada guru dan Siswa”.

Sejalan dengan hal tersebut Kepala Sekolah MAN Kaur Ibu Mufliha Fitriani¹⁷⁰ :

“Kami sangat bangga, hari ini menerima tamu dari UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, untuk hal kegiatan mahasiswa dan dosen di sekolah kami belum ada. Yang ada kemarin mahasiswa melakukan penelitian saja. Sudah lama sekali kami tidak mendapatkan sosialisasi, terakhir sosialisasi dilakukan fakultas syariah waktu itu, dan itu sudah lama sekali”.

Lain hal yang disampaikan Bapak Faizan mengenai kontribusi pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen di daerah seluma sebagai berikut¹⁷¹ :

“Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dari UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sudah membangun kolaborasi dengan masyarakat dalam bentuk loka karya, proyek percontohan untuk pengembangan desa. Salah satu contoh pada desa lokasi baru yang sekarang sudah berkembang baik jauh dari apa yang dibayangkan dulu yang daerah transmigrasi dan tidak ada potensi apapun di daerah tersebut”.

Adapun yang disampaikan Bapak Agus Supianto kabag kesra

¹⁶⁹ Wawancara Bapak Budi Utomo Tanggal 30 Maret 2022

¹⁷⁰ Wawancara Ibu Mafliha Fitriani Tanggal 6 April 2022

¹⁷¹ Wawancara Bapak Faizan Tanggal 29 Maret 2022

kabupaten kaur menyampaikan¹⁷² :

“Untuk pengabdian dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sangat bermanfaat untuk kemajuan ilmu dan pengetahuan masyarakat. Dimana dalam hal penelitian atau riset yang dilakukan dosen yang nantinya sangat berkontribusi baik untuk masyarakat di daerah Kaur”.

Ibu Emy Herawati mengatakan sebagaimana pengabdian dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai berikut¹⁷³ :

“Kami merasa terhormat dan senang bagaimana dosen UIN melakukan pengabdian masyarakat dalam hal riset atau penelitian di Sekolah Tinggi kami, yang hasil dari riset tersebut dapat menjadi pembelajaran ataupun bahan pemikiran kedepannya”

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari hal yang sudah disampaikan narasumber pengabdian masyarakat sangat besar kontribusi yang dihasilkan. Seyogyanya sebagai dosen yang melakukan tridharma perguruan tinggi hendaknya melakukan pengabdian tidak hanya bermanfaat dalam masyarakat namun, juga bermanfaat untuk sekolah bahkan di segala sektor. Sebab sejatinya, dosen tidak hanya dituntut dan diharapkan untuk bisa berbagi ilmu pengetahuan dengan mahasiswa di perguruan tinggi.

Mengenai Kuliah Kerja Nyata ataupun Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau dosen banyak harapan yang diinginkan terhadap peningkatan Kuliah Kerja Nyata ataupun Pengabdian Masyarakat untuk kedepannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Faizan Kabag Kesra Kabupaten Seluma sebagai berikut¹⁷⁴ :

¹⁷² Wawancara Bapak Agus Supianto Tanggal 6 April 2022

¹⁷³ Wawancara Ibu Emy Herawati Tanggal 8 April 2022

¹⁷⁴ Wawancara Bapak Faizan Tanggal 29 Maret 2022

“Harapannya untuk segera dapat melakukan kerjasama dalam hal pembinaan pada desa binaan kabupaten seluma yang terdiri dari 4 desa binaan da’i. Krisis kepercayaan terhadap suatu hal terkadang anak ataupun masyarakat lebih memilih pemahaman yang berbeda. Sebagaimana nantinya bisa menempatkan mahasiswa KKN ataupun program da’i pada 4 desa binaan tersebut, bersyukur jika semuanya terealisasikan, 1 desa yang menjadi proyek percontohan akan sangat bermanfaat bagi kami dan dapat bersinergi sesuai visi dan misi kabupaten seluma”.

Sejalan dengan hasil tersebut juga disampaikan oleh Bapak Irawadi mengenai harapan Kuliah Kerja Nyata ataupun Pengabdian Masyarakat untuk dilakukan kedepannya¹⁷⁵ :

“Dari segi mutu UIN tidak diragukan lagi, sudah dapat bersaing dengan Universitas lain. Kami sangat membutuhkan pembinaan/pendidikan karakter agama baik bagi anak-anak dan remaja sehingga kedepannya UIN dan Pemerintah daerah dapat bekerjasama dalam hal pengiriman mahasiswa KKN dan dosen bisa memberikan pelatihan, workshop dan lainnya untuk memberikan pemahan pada setiap kalangan”.

Adapun yang disampaikan Bapak Abdullah Kabag TU Kakanwil Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang mengatakan¹⁷⁶ :

“Harapannya untuk UIN kedepan untuk dapat melakukan kerjasama dengan memberikan atau program beasiswa serta kerjasama dengan langsung lapangan dan sosialisasi. Misalnya mengadakan kerjasama dengan pesantren, mahasiswa melakukan praktik lapangan langsung ke pesantren dan bermalam di pesantren dengan alumni pesantren turun dan pulang ke pesantren nya kemarin atau pindah ke pesantren lain. Hal ini dappat dimanfaatkan mahasiswa dan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang anntinya dapat mendatangkan input penguat minat ke UIN bahkan ke prodi-prodi nya langsung. Dan kemudian untuk dibukakan program khusus dengan menjadikan pimpinan pesantren tersebut untuk melanjutkan S2 atau S3 ke UIN dengan otomatis mereka akan menjadi Dosen luar biasa (mengajar di UIN) sehingga dari santri-santri mereka bisa tertarik untuk melanjutkan sarjana di UIN terutama pada peminat prodi-prodi yang laka seperti

¹⁷⁵ Wawancara Bapak Irawadi Tanggal 6 April 2022

¹⁷⁶ Wawancara Bapak Abdullah Tanggal 26 April 2022

ilmu hadis dan lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pemerintah daerah dan Kementerian Agama harapan yang sangat diinginkan kedepannya untuk kemajuan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam peningkatan Kuliah kerja nyata dan Pengabdian Masyarakat, yaitu: *Pertama* meningkatkan mutu kerjasama antara pemerintah daerah, kementerian agama dengan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu; *Kedua* Menjalin komunikasi yang erat dan dapat membangun rasa kekeluargaan dan kerjasama langsung.

3. Tentang Mutu Alumni & Kesiapan Kerja Alumni

Dalam kerangka upaya pencapaian daya saing industri, perguruan tinggi dapat berperan lebih dari sebatas penghasil teknologi, akan tetapi perguruan tinggi dapat mengambil peran sebagai agen perubahan, dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan dan transformasi teknologi. Untuk bisa mengemban peran demikian, suatu jejaring relasi-relasi antara perguruan tinggi dengan penyelenggara pemerintahan (government) dan para pelaku usaha (businessmen/women) perlu dikembangkan.

Mutu berarti kepuasan pelanggan. Dengan demikian, setiap bagian proses dalam organisasi memiliki pelanggan. Kepuasan pelanggan internal akan menyebabkan kepuasan pelanggan organisasi¹⁷⁷. Lulusan sebagai output merupakan bagian dari sistem dalam manajemen mutu Pendidikan. mutu lulusan tidak dapat dipisahkan dari context, input,

¹⁷⁷ Suardi, Rudi. (2001). Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2000. Hal. 3

proses, output dan outcome.

Kesiapan kerja dilihat dari kapasitas seseorang dalam meningkatkan kemampuan bekerjanya yang terdiri dari ilmu pengetahuan dan keahlian serta sikap seseorang tersebut¹⁷⁸. Kesiapan menghadapi dunia kerja sangat dibutuhkan setelah mempunyai bekal yang cukup agar bisa secara optimal meluangkan tenaga dan pikirannya dalam pekerjaan tersebut¹⁷⁹.

Keterserapan alumni UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dari data yang didapat peneliti memiliki daya serap yang cukup baik dalam dunia kerja yang mereka geluti, dan beberapa bidang keilmuan yang dapat mereka aplikasikan dalam menyelesaikan pekerjaan. Banyak alumni yang memiliki daya serap dalam menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan ilmu yang mereka pelajari pada masa perkuliahan.

Mengenai sikap dosen terhadap Mutu Alumni & Kesiapan Kerja Alumni UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, peneliti mewawancari hal ini dengan beberapa narasumber seperti wawancara peneliti dengan Bapak H. Sipuan sebagai berikut¹⁸⁰ :

“Alumni UIN hendaknya dapat mencerminkan lulusan UIN memang tidak semua, namun beberapa yang tidak mencerminkan lulusan UIN. Misal dalam bermasyarakat terkadang ada alumni yang tidak siap jika ditugaskan untuk menjadi imam, khatib

¹⁷⁸ Agusta, Y. N. (2015). Hubungan antara Orientasi Masa Depan dan Daya Juang terhadap Kesiapan Kerja pada Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Mulawarman. *eJournal Psikologi*, 369-381.

¹⁷⁹ A'yun, Qurrota & Fauzi, Imron. Standarisasi Mutu Lulusan sebagai Kesiapan Mahasiswa Calon Guru Profesional pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Journal of Islamic Education Research | Vol. 2 No. 02 Desember (2021) DOI: 10.35719/jier.v2i2.163*

¹⁸⁰ Wawancara Bapak H. Sipuan Tanggal 22 Maret 2022

ataupun memimpin do'a. dengan hal tersebut alumni bisa bersosialisasi dari UNIV lain dan dapat bersaing di dunia kerja serta dapat melakukan pendekatan keagamaan di lingkungan masyarakat”.

Pengalaman lain dirasakan oleh Bapak Maulana tentang mutu alumni dan kesiapan alumni sebagai berikut¹⁸¹ :

“Alumni UIN hendaknya paham tentang islam, terlepas dari prodi mana mereka. Hal ini untuk dapat point penting bagi alumni dalam bermasyarakat, membimbing masyarakat atau membantu masyarakat dalam sisi ilmu agama dengan memimpin do'a, membaca al-q'uran, Imam dan lainnya”.

Sama hal yang disampaikan Bapak Agus Supianto tentang Mutu Alumni UIN sebagai mana diungkapkan :

“mutu alumni UIN tidak kalah dengan Univ lain terutama di Provinsi Bengkulu. Walaupun memang hanya beberapa yang tidak memiliki kesiapan sebagai alumni UIN”

Diharapkan kepada mahasiswa tingkat akhir agar lebih meningkatkan kesiapan kerjanya. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan membuat perencanaan dan usaha, seperti menambah kemampuan sesuai dengan bidangnya, bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan, dan mampu bertahan dalam situasi yang sulit, sehingga dapat menciptakan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja.

Hal tersebut dapat mendorong alumni UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk terus Sebagai alumni perguruan tinggi keagamaan Islam, diharap terdepan dalam menebarkan nilai-nilai keislaman dengan meningkatkan kiprah mereka bagi masyarakat dan negara. Misalnya dapat

¹⁸¹ Wawancara Bapak Maulana Tanggal 29 Maret 2022

menjadi Imam, Khatib, memimpin Do'a. Pertama, merevitalisasi citra diri sebagai kampus *center of excellent* dengan terus menumbuhkan pemikiran keislaman yang universal, menjadikan Islam sebagai inspirasi dan memperkuat sendi kemanusiaan.

4. Harapan tentang Masa Depan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Banyak harapan yang diinginkan untuk kemajuan dan perkembangan UIN FAS Bengkulu kedepan. Sebagaimana menjadi penggerak menciptakan karakter (*creating a character*), memiliki identity brand yang kuat serta berpikir out of the box dan akan sukses jika mengetahui keinginan masyarakat masa depan (society 5.0). oleh karenanya aset yang dimiliki itu seluruhnya bisa diarahkan kepada pencapaian dari harapan publik. Diharapkan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu akan semakin baik, semakin berkembang, semakin berprestasi serta mampu bersaing dengan dunia luar.

Menjawab harapan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Wakil Rektor 1 telah menjawab apa yang menjadi harapan pemerintah daerah dan masarakat ¹⁸²Peningkatan mutu itupun dilakukan secara masif, terencana dan terukur. Dimana dimulai dengan dosen, karyawan, penambahan program studi, penambahan fakultas, program pascasarjana program Doktor hingga penguatan sarana dan prasarana untuk bebrapa tahun kedepan. Hal ini sudah dibuktikan dengan percepatan guru besar menargetkan 10 guru besar ditahun 2022 dan peningkatan kualitas dosen

¹⁸² Kutipan Penjelasan Wakil Rektor 1 Dr. Khairudin, M.H

dimana dirancang dan mempersiapkan agar seluruh dosen tidak ada lagi yang S2 minimal bergelar Doktor dimana mendukung penuh terkait izin belajar dan tugas belajar, serta kedepannya menyiapkan program Doktor di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Selain itu, dalam pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu melakukan pengembangan dengan penambahan program Studi baru di beberapa Fakultas dan akan menambah fakultas baru. Seperti Fakultas Psikologi dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Sains Teknologi dan Fakultas yang menjurus kepada pertanian dan perkebunan untuk menggarap dan memaksimalkan potensi daerah.

C. Persepsi Dan Harapan Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, hidup bermasyarakat dapat diartikan sebagai hidup dalam suatu pergaulan. Kata masyarakat berasal dari bahasa arab “syirk” yang artinya bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya berinteraksi. Sedangkan dalam bahasa inggris dipakai istilah “society” yang berasal dari kata “socius” yang artinya kawan. Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan makhluk-makhluk hidup adalah manusia yang terikat dalam suatu sistem adat-istiadat tertentu.

Sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, sebuah keniscayaan manusia bisa hidup secara individual dalam lingkungannya. Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain

dalam suatu kelompok. Kehidupan masyarakat yang selalu berubah (dinamis) merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Max Weber¹⁸³ mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama membentuk suatu kesatuan dalam wilayah dengan suku dan ras serta tradisi tertentu serta mengarah kepada kehidupan yang kolektif.

Terciptanya generasi yang baik merupakan keberhasilan dari pendidikan yang diberikan kepada anak didik dan tidak terlepas dari pengaruh setiap faktor pendidikan seperti dilingkungan masyarakat, sekolah, dan lainnya. Pada pendidikan yang baik maka tingkat pendidikan anak juga diperhatikan, untuk menunjang dan membuat si anak tersebut menjadi pribadi yang berahklak, maka pertimbangan untuk melanjutkan pendidikan sampai keperguruan tinggi sangatlah di perhatikan bagi si anak, karena pada dasarnya pendidikan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang terbaik untuk si anak setelah pendidikan SLTA sederajat.

2. Persepsi dan Harapan Masyarakat

Partisipasi masyarakat terhadap sekolah sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan proses belajar mengajar pendidikan agama Islam di sekolah. Juga Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar

¹⁸³ Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Perkembangan Hukum Modern dan Rasional: Sosiologi Hukum Max Weber dalam Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988

Nasional Pendidikan, BAB VII pasal 42 ayat 1 dan 2 menyatakan: (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: prabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; dan (2) Setiap satuan pendidikan meliputi: lahan ruang kelas, ruang pimpinan, ruang guru, ruang Tata Usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat olah raga, dan tempat ibadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang perlu dan penting untuk di kelola dengan baik serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan. Peningkatan mutu itupun dilakukan secara masif, terencana dan terukur sebagaimana disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu¹⁸⁴. Dimana dimulai dengan dosen, karyawan, penambahan program studi, penambahan fakultas, program pascasarjana program Doktor hingga penguatan sarana dan prasarana untuk bebrapa tahun kedepan. Hal ini sudah dibuktikan dengan percepatan guru besar menargetkan 10 guru besar ditahun 2022 dan peningkatan kualitas dosen dimana dirancang dan mempersiapkan agar seluruh dosen tidak ada lagi yang S2 minimal bergelar Doktor dimana mendukung penuh

¹⁸⁴ Kutipan Penjelasan Wakil Rektor 1 Dr. Khairudin, M.H

terkait izin belajar dan tugas belajar, serta kedepannya menyiapkan program Doktor di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Selain itu, dalam pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu melakukan pengembangan dengan penambahan program Studi baru di beberapa Fakultas dan akan menambah fakultas baru. Seperti Fakultas Psikologi dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Sains Teknologi dan Fakultas yang menjurus kepada pertanian dan perkebunan untuk menggarap dan memaksimalkan potensi daerah¹⁸⁵. Untuk meningkatkan kualitas dan mutu perguruan tinggi, ternyata tidak ada memerhatikan aspek administrasi dan sarana prasarana perguruan tinggi saja. Peningkatan mutu dan kualitas dosen juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi tersebut.

Seperti kita ketahui, bahwa dosen merupakan pendidik profesional atau juga seorang ilmuwan yang bertugas untuk mengembangkan dan melakukan perluasan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan melalui proses pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan mutu dosen tersebut pasti akan membawa hal positif dan perubahan baik dalam mutu perguruan tinggi.

Secara umum “dosen” tergolong sebagai “pendidik”. Menurut UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional¹⁸⁶, dalam pasal 39 (2) mengatakan bahwa “Pendidik merupakan tenaga profesional yang

¹⁸⁵ Kutipan Penjelasan Wakil Rektor 1 Dr. Khairudin, M.H

¹⁸⁶ Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”.

Dalam pasal 40 (2) ditambahkan bahwa pendidik berkewajiban: a) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis; b) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan c) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dosen sebagai pendidik profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen¹⁸⁷, pasal 1, dikatakan bahwa “Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

a. Tentang Mutu Akademik UIN FAS Bengkulu

Suatu pijakan awal (dasar) untuk memulai melaksanakan suatu proses akademik dalam sistem penjaminan mutu. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam hal mutu akademik dan Harapan Sarana dan

¹⁸⁷ Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Prasarana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menyatakan¹⁸⁸ :

“Harapannya untuk dosen dalam hal administratif penyelesaian tugas akhir untuk dapat ditemui di lingkungan kampus maupun diluar kampus selama tidak mengganggu aktivitas dosen”

Senada apa yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa pascasarjana, disebutkan bahwa¹⁸⁹ :

“Dalam suasan akademik yang memungkinkan terjadinya hubungan yang sehat antara mahasiswa dengan dosen. Misalnya dalam proses bimbingan dan pembelajaran di kelas”.

Adapun ungkapan yang disampaikan Bapak Suimi Fales pada saat FGD menyampaikan :

“STAIN-IAIN-UIN adalah luar biasa. Prestasi bagi sivitas, Daerah, dan masyarakat. Perjuangan yang sangat panjang dan berat berjuang dalam situasi pandemi yang tidak menentu. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menjadi universitas kebanggaan masyarakat Provinsi Bengkulu. Bagaimana UIN dinamis mengikuti perkembangan jaman serta menjadi tujuan kuliah bagi masyarakat dari luar Bengkulu. dengan meningkatkan kualitas dari berbagai elemen: dosen. Pegawai. Pegawai. Fasilitas. Sehingga adanya UIN harus dapat menggeliatkan ekonomi rakyat Bengkulu”¹⁹⁰.

Bapak Rizkan A Rahman Tokoh Agama PWNU/Mewakili Masyarakat Keagamaan Islam Bengkulu menyampaikan :

“UIN baru mulai starting saat ini dan merupakan kebutuhan dan harapan bagi masyarakat sebagai amanah ummat atau masyarakat dengan harapan ilmu dan ketrampilan keagamaan. Masyarakat mendambakan kepandaian keagamaan Islam. Alumni yang berkepribadian Islami. Dalam hal memajukan UIN hendaknya bersinergi dengan lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang dapat memajukan UIN melalui program jangka pendek, menengah dan

¹⁸⁸ Wawancara dengan salah satu Mahasiswa Pascasarjana, Tanggal 25 April 2022

¹⁸⁹ Wawancara dengan salah satu Mahasiswa Pascasarjana, Tanggal 25 April 2022

¹⁹⁰ Bapak Suimi Fales, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, FGD di Hotel Latansa 26 Juli 2022

jangka panjang. UIN jangan hanya mengajarkan teori. Tapi harus yang praktis keagamaan. Mengamalkan ajaran Islam dengan menciptakan perubahan untuk menciptakan perubahan bagi masyarakat”¹⁹¹.

Ustadz Syamlan, Lc Tokoh Agama. Mewakili Masyarakat Keagamaan.

Tokoh Pendidikan menyampaikan pada saat FGD sebagai berikut :

“Wahyu harus menjadi kurikulum UIN. Karena Moral merupakan pusat kerusakan umat. Bukan akalnya yang rusak. UIN Bengkulu harus menyatukan IMAN, ILMU, AMAL. Masjid harus menjadi pusat peribadahan. Dan UIN Bengkulu harus berkapasitas internasional. (Rohmatan Lil alamin) menjangkau umat internasional serta Alumni UIN harus mempunyai basis Keislaman yang kuat”¹⁹².

Profesionalisme dosen itu merupakan salah satu tolok ukur dalam sistem penjaminan mutu akademik. Profesionalisme harus menjadi nilai kultural yang dimiliki dosen untuk selalu menampilkan karya terbaik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dosen, dalam suasana akademik yang memungkinkan terjadinya hubungan yang sehat antara mahasiswa dengan dosen, antar dosen, serta antar mahasiswa. Suasana kondusif diperlukan untuk memungkinkan pengembangan potensi semua pihak secara maksimal, terutama mahasiswa dan dosen, dalam mencapai standar mutu akademik yang unggul.

b. Tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping dharma pendidikan dan pengajaran serta

¹⁹¹ Bapak Rizkan A Rahman Tokoh Agama PWNU/Mewakili Masyarakat Keagamaan Islam Bengkulu, FGD di Hotel Latansa 26 Juli 2022

¹⁹² Ustadz Syamlan, Lc Tokoh Agama. Mewakili Masyarakat Keagamaan. Tokoh Pendidikan, FGD di Hotel Latansa, 26 Juli 2022

dharma penelitian. Usaha untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat dalam program-program pembangunan di berbagai bidang, menuntut perguruan tinggi untuk senantiasa terus menerus meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara terpadu dan bersistem, terutama dalam pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar ilmu yang diberikan oleh perguruan tinggi bersifat prospektif sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam pengertian umum, pengabdian seringkali yang disebut sebagai pengabdian adalah sesuatu yang dilakukan tanpa pamrih ataupun tanpa kompensasi apapun. Namun pada sisi yang lain, semua kegiatan untuk masyarakat sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan sehingga memerlukan sesuatu kepastian pendanaan untuk keberlangsungan kegiatan tersebut¹⁹³. Pengabdian kepada masyarakat adalah pengamalan ilmu, teknologi dan kesenian (iptek) yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya mensukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan menuju tercapainya manusia Indonesia yang maju adil dan sejahtera¹⁹⁴.

¹⁹³ Fuaduddin. Pengembangan dan Inovasi Kurikulum. Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002 hlm, 287

¹⁹⁴ *Ibid*, 288

Seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat Kepala Desa Rena Semanek, Benteng Bapak Elly Haryadi mengatakan¹⁹⁵ :

“Emang di tingkat desa ni pengabdian masyarakat diperbanyak lagi. Selain Kuliah kerja nyata yang dilakukan mahasiswa, dapat dilakukan oleh dosen-dosen dengan melakukan pendampingan atau kegiatan berkaitan dengan seminar bahkan pengajian”.

Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah, sikap, inovatif dan kreatif.

c. Kerjasama Dengan Organisasi Sosial Keagamaan

Interaksi sosial masyarakat Islam merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut antara orang perorangan, antara kelompok maupun antara perorangan dengan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini interaksi masyarakat Islam yang dimaksud ialah antara ormas Islam meliputi Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Shalafi dan Khilafatul Muslimin. Ormas Islam tersebut hidup berdampingan dengan sudut pandang yang berbeda terkait hukum-hukum Islam.

Bentuk interaksi yang baik dalam rangka mengurangi konflik, pertama, adanya kerjasama dalam bidang pertanian, gotong royong membenahi jalan yang dilakukan setiap bulannya, Dua, hasil musyawarah

¹⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Elly Haryadi Tanggal

antar ormas dengan kepala desa (akomodasi) menghasilkan kesepakatan dalam bidang kegiatan agama dilakukan secara bersama meski memiliki perbedaan terkait hukum-hukum Islam yaitu Sholat Idul fitri, dan Idul Adha beserta korban dilakukan bersama dalam waktu yang sama, juga di sepakati setiap bulannya diakan pengajian bergilir di setiap-tiap dusun.

d. Tentang Mutu Lulusan

Peningkatan mutu sekolah akan bermuara pada upaya melahirkan lulusan yang bermutu. Ada beberapa strategi yang dapat dilaksanakan dalam proses meningkatkan mutu lulusan dalam suatu lembaga pendidikan bahwa profil mutu lulusan disebuah lembaga pendidikan merupakan komponen utama yang menunjang mutu lembaga pendidikan¹⁹⁶. Bahwa salah satu strategi dalam meningkatkan mutu lulusan dapat dilakukan dengan membangun budaya sekolah yang bermutu.

“Mutu lulusan tidak dapat dipisahkan dari context, input, proses, output dan outcome. Untuk itu, mutu lulusan yang sesuai dengan keinginan pelanggan Pendidikan adalah output yang mempunyai kriteria sebagai outcome yaitu dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi dan siap untuk bekerja”¹⁹⁷.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Totong Torgona menyampaikan ¹⁹⁸:

“Ketika mahasiswa lulus dari UIN, masyarakat tidak akan tahu dia jurusan apa, yang masyarakat tahu mau jurusan apa saja, semua alumni UIN dapat memahami ilmu agama, alangkah baiknya untuk menjaga almamater yang melekat pada mereka sebagai alumni”

¹⁹⁶ Nur Zazin, Gerakan Manata Mutu, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017. Hlm,135

¹⁹⁷ Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),

¹⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Totong Torgona Tanggal 23 April 2022

Selain itu, upaya meningkatkan capaian kinerja dengan menghadirkan mutu lulusan yang unggul dan kompetitif harus diawali dari mahasiswa yang perlu ditingkatkan pada dua kemampuan intrapersonal skills, yaitu individu untuk mengatur dirinya sendiri untuk unjuk kerja secara maksimal. Sedangkan kemampuan intrapersonal skills, yaitu individu dalam berhubungan dengan orang lain.

Kesiapan menghadapi dunia kerja sangat dibutuhkan setelah mempunyai bekal yang cukup agar bisa secara optimal meluangkan tenaga dan pikirannya dalam pekerjaan tersebut¹⁹⁹. Suatu kondisi individu dalam meningkatkan kemampuan dari ilmu pengetahuan yang di dapat juga kematangan fisik dan mental serta kemampuan yang membuatnya siap untuk memberi respon/jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Setiap individu mempunyai kesiapan kerja yang berbeda-beda, keberhasilan dalam memiliki kesiapan kerja dapat diamati dari aspek-aspek kesiapan kerja.

Adapun Menurut Bapak Elly Haryadi mengatakan ²⁰⁰:

“Untuk dilakukan pembinaan lebih kembali dengan membekali mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir dengan mengelola diri baik hardskill dan softskill mahasiswa sehingga tidak mengalami kesulitan setelah lulus kuliah dan mampu bersaing dengan lulusan lainnya didunia kerja”.

¹⁹⁹ Wagiran, Kesiapan Mahasiswa Dalam Implementasi Pembelajaran Aktif Konstruktif, *Jurnal Kependidikan*, Vol. 35, No. 1, 20.

²⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Elly Hariyadi Tanggal 18 April 2022

Menurut Brady terdapat enam aspek kesiapan kerja yaitu sebagai berikut²⁰¹:

a. Tanggung Jawab (Responsibility)

Tanggung jawab merupakan bentuk kesadaran individu dalam berperilaku untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas selama berada ditempat kerja meskipun tanpa adanya pengawasan dari orang lain.

b. Fleksibilitas (Flexibility)

Fleksibilitas merupakan kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntutan di tempat kerja.

c. Keterampilan (Skills)

Individu yang siap bekerja mengetahui mengenai kemampuan dan keahlian yang dimiliki untuk dibawa ke dalam situasi kerja baru.

d. Komunikasi (Communication)

Individu yang siap kerja memiliki kemampuan komunikasi yang dapat digunakan untuk berhubungan secara interpersonal ditempat kerja.

e. Pandangan diri (Self View)

Pandangan diri (self view) berkaitan dengan proses intrapersonal individu, mengenai keyakinan tentang dirinya dan pekerjaan.

f. Kesehatan dan Keselamatan (Health & Safety)

²⁰¹ Brady. M dan Loonam. J. 2010. Exploring the use of entity-relationship diagramming as a technique to support grounded theory inquiry. Bradford: Emerald Group Publishing.

Individu yang siap kerja dapat menjaga kebersihan dan mampu merawat diri serta sehat secara fisik dan mental.

Adapun sesuai dengan BAB II terkait dengan sarana yang ada pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, fasilitas pusat pengembangan karir yang memiliki fungsi sebagai wadah pembinaan karakter kewirausahaan (*entrepreneurial character*) bagi para mahasiswa, agar mereka memiliki sikap mandiri, ketrampilan, inisiatif, kreatifitas, dan keberanian untuk menjadi seorang enterprebeur, yaitu sosok pencipta pekerjaan (*job creator*), bukan sebaliknya, menjadi pencari kerja (*Job seeker*). Pembinaan akan memperhatikan keseimbangan antara aspek hard skill (ketrampilan kerja) dan aspek softskill (integritas).

Pembinaan *hardskill* akan memprioritaskan berbagai ketrampilan kerja yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM). Adapun pembinaan softskill akan memprioritaskan pendidikan integritas, kepedulian, dan etos kerja. Hal ini dilakukan sebagai langkah membantu dan memfasilitasi mahasiswa ataupun lulusan terhadap kesiapan kerja.

e. Harapan tentang Masa Depan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Banyak harapan yang diinginkan untuk kemajuan dan perkembangan UIN FAS Bengkulu kedepan. Sebagaimana menjadi penggerak menciptakan karakter (*creating a character*), memiliki identity brand yang kuat serta berpikir out of the box dan akan sukses jika

mengetahui keinginan masyarakat masa depan (society 5.0). Karenanya aset yang dimiliki itu seluruhnya bisa diarahkan kepada pencapaian dari harapan publik. Diharapkan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu akan semakin baik, semakin berkembang, semakin berprestasi serta mampu bersaing dengan dunia luar. Tantangan kedepan semakin sulit, maka semua civitas akademika harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan perubahan yang ada di tengah kondisi kampus yang belum mendukung terhadap proses belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas dan kultur akademik.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu Masyarakat yaitu Kepala Desa Desa Sido Urip, Bengkulu Utara Bapak Totong Torgona menyatakan²⁰² :

“Harapan kedepannya dengan kampus ini adalah UIN FAS nantinya dapat mencetak generasi selanjutnya yang dapat mengimplementasikan Islam ke dalam masyarakat”.

Adapun yang disampaikan Bapak Elly terkait harapannya kedepan untuk UIN fatmawati Sukarno Bengkulu, mengungkapkan²⁰³ :

“Kedepannya untuk melakukan sosialisasi terkait UIN karena semua orang banyak belum mengetahui UIN, dan untuk pengabdian ke masyarakat dapat melakukan kegiatan lainnya untuk di lakukan di desa-desa tidak hanya KKN namun dapat terkait pendampingan atau kegiatan berkaitan dengan seminar bahkan pengajian”

Kegiatan KKN sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan peran mahasiswa masih

²⁰² Wawancara dengan Bapak Totong Torgona Tanggal 23 April 2022

²⁰³ Wawancara dengan Bapak Elly Hariyadi Tanggal 18 April 2022

bisa dilakukan dengan rangkaian kegiatan inovatif yang membawa perubahan signifikan bagi masyarakat.

E. KONSIDERASI TEORITIK

Teori yang digunakan yaitu Pengembangan Kelembagaan dan kebijakan publik. Secara etimologi, pengembangan adalah membina dan meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan kelembagaan lebih dipandang sebagai suatu manajemen dan keterkaitan antara sumber daya manusia, keuangan dan hubungan atau sistem kerja antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya.

Pengembangan kelembagaan sering dikenal juga sebagai pembinaan kelembagaan, didefinisikan sebagai proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dengan keuangan yang tersedia. Pengembangan kelembagaan menyangkut sistem manajemen, termasuk pemantauan dan evaluasi, perencanaan dan lain-lain.²⁰⁴ Dalam proses pengembangan, lembaga yang dikembangkan berada di pusat proses. Maksudnya yaitu yang menentukan keberhasilan proses dengan cara menggali riwayat pengembangan dan potensinya di masa depan. Pengembangan dibangun atas dasar pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang telah ada.²⁰⁵

Pengembangan perlu mengupayakan pembentukan cara berpikir yang menghargai saling interaksi diantara anggota lembaga, menghargai

²⁰⁴ Adi, Fahrudin, Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, (Bandung: Humaniora, 2000) hal.128

²⁰⁵ Margaret Dale, Meningkatkan Keterampilan Manajemen, (Jakarta: PT Gramedia, 2003) hal.112

kualitas pengalaman kolektif, dan memaksimalkan potensi mereka dan mencapai perikemanusiaan mereka secara utuh melalui proses masyarakat.²⁰⁶

Dengan demikian, implikasi dari suatu pengembangan menjadi suatu kebijakan publik. Hal ini menurut Subarsono yang mengacu pada faktor-faktor dalam kebijakan publik sebagai berikut ²⁰⁷: 1) Kebijakan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana mencakup lingkungan sosio kultural dan keterlibatan penerima program; 2) hubungan antarorganisasi, Faktor hubungan antarorganisasi sangat diperlukan karena implementasi program perlu koordinasi dengan semua pihak untuk mendapat dukungan penuh; 3) sumberdaya organisasi, meliputi sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia; 4) Karakteristik pelaksana dimana terkait dengan struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Suatu pembangunan yang berpusat pada masyarakat harus memiliki ciri-ciri antara lain: (a) prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara bertahap harus diletakan pada masyarakat itu sendiri; (b) fokus utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber daya yang ada di masyarakat

²⁰⁶ Jim, Ife, *Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal.365

²⁰⁷ Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Hlm. 101

dan untuk memenuhi kebutuhan mereka; (c) pendekatan yang dilakukan dengan mentoleransi *variable local* yang bersifat fleksibel yaitu dengan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat; (d) menekankan pada proses *social learning* dengan interaktif kolaboratif antara birokrasi dan komunitas masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar; dan (e) proses pembentukan *networking* antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan merupakan suatu yang integral dalam pendekatan²⁰⁸.

Temuan penting yang didapatkan dari hasil penelitian, memiliki kesesuaian dan berkaitan erat dengan teori yang ada. Dimana suatu pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pastilah memiliki landasan suatu kebijakan yang akan diambil untuk melihat bagaimana arah perkembangan kedepannya.

Secara substansial sub bahasan ini merupakan analisis teoritis terhadap kajian terdahulu pada pembahasan sebelumnya. Pada dasarnya kerangka konseptual peningkatan kapasitas kelembagaan berperat erat pada teoritis kebijakan, dan kelembagaan. Peningkatan kapasitas kelembagaan tidak hanya muncul terkait sarana dan prasarana saja. *Matachi mengatakan refers not only to skills and knowledge but also to*

²⁰⁸ Sudarmanto, E., & Al., E. (2020). Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan. Yayasan Kita Menulis.

*relationships, values and attitudes, and many others*²⁰⁹. Bertolak dari *proposisi Matachi ini*, peningkatan kapasitas kelembagaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menjadi penting sebagai acuan dalam perumusan dan selanjutnya dalam pengambilan kebijakan terkait tata kelola secara kepemimpinan, kualitas lulusan, kualitas infrastruktur, riset dan pengajaran yang selalu ditingkatkan secara terus menerus. Secara institusional peningkatan kapasitas kelembagaan institusi berupa nilai, budaya kerja, keyakinan, visi misi, serta orientasi pengembangan akademik maupun non akademik. Hal demikian, merupakan kebijakan strategis yang telah disusun sebelumnya yang tidak melibatkan semua stakeholder institusi, baik publik di internal organisasi maupun publik eksternal yang menjadi pengguna utama layanan pendidikan perguruan tinggi, sebagaimana dikemukakan Ghafur bahwasannya kelangsungan hidup perguruan tinggi, tidak lepas dari masyarakat sebagai pengguna²¹⁰. Penting semua kalangan yang terlibat harus memiliki visi yang jauh ke depan berkenaan dengan pengembangan perguruan tinggi Islam.

Beranjak dari kondisi obyektif tersebut, program pengembangan kapasitas serta performa UIN ke depan, diarahkan pada dua hal yang diklaim sebagai *strategic and priority programs*, meliputi: 1) peningkatan kualitas dosen dimana dirancang dan mempersiapkan agar seluruh dosen tidak ada lagi yang S2 minimal bergelar Doktor dimana mendukung penuh

²⁰⁹ Matachi. (2006). *Capacity Building Framework UNESCO-IICBA*. Addis Ababa: United Nations Economic Commission for Africa

²¹⁰ Ghafur, A. Hanif Saha, 2008. *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 5

terkait izin belajar dan tugas belajar, serta kedepannya menyiapkan program Doktor di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu; 2) pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu melakukan pengembangan dengan penambahan program Studi baru di beberapa Fakultas dan akan menambah fakultas baru; 3) meningkatkan kualitas dan mutu perguruan tinggi memerhatikan aspek administrasi dan sarana prasarana perguruan tinggi dengan menambah sarana dan prasarana pendidikan; 4) peningkatan mutu dan kualitas dosen dengan melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan lainnya sesuai dengan keilmuan dosen tersebut. Hal tersebut tidak hanya dalam hal pendidikan saja, namun juga berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



BAB VI
PERSEPSI LEMBAGA PENDIDIKAN MENENGAH ATAS DAN
SEDERAJAT TENTANG ARAH PENGEMBANGAN
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

A. Deskripsi Umum Sekolah/Madrasah di Bengkulu

b. Pengertian Madrasah Aliyah

Madrasah Aliyah (MA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas (SMA) dimana pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Sama seperti SMA, pendidikan madrasah aliyah memiliki masa studi tiga tahun, mulai dari kelas 10/X sampai kelas 12/XII.

Madrasah Aliyah yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs. Aliyah adalah jenjang yang paling tinggi di madrasah. Pada tahun kedua (yakni kelas 11), seperti halnya siswa SMA, maka siswa MA memilih salah satu dari 4 jurusan yang ada, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu-ilmu Keagamaan Islam, dan Bahasa.²¹¹

²¹¹ Kementerian Agama RI, Madrasah Indonesia: Madrasah Prestasiku, Madrasah Pilihanku, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2015), h. 40.

Madrasah Aliyah menyelenggarakan pendidikan pada empat jurusan, antara lain: Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu-Ilmu Keagamaan, dan Bahasa. Kurikulum yang dipakai Madrasah Aliyah sama dengan kurikulum Sekolah Menengah Atas, hanya saja pada MA lebih banyak muatan Pendidikan Agama Islam, seperti Fiqih, Akidah, Akhlak, Al-Quran, Hadits, Bahasa Arab, dan Sejarah Kebudayaan Islam.

Sebagai bagian dari madrasah, madrasah aliyah terintegrasi dengan tingkat madrasah lainnya secara kiproh maupun kedudukan. Kiproh madrasah dan kedudukan legal madrasah dikuatkan kembali dalam dalam UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan bahwa jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Dalam UU Sisdiknas tersebut disebutkan bahwa tugas madrasah adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Kurikulum di madrasah harus menyertakan pengetahuan umum, ini menunjukkan bahwa madrasah merupakan suatu pendidikan yang terintegrasi dalam Sisdiknas.²¹²

Pada akhir tahun ketiga (yakni kelas 12), siswa diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (UN) yang akan menentukan kelulusan siswa. Lulusan madrasah Aliyah dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan

²¹² Alawiyah, Faridah. "Pendidikan madrasah di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 5.1 (2014): 51-58.

tinggi umum, perguruan tinggi agama Islam, atau langsung bekerja. MA sebagaimana SMA, ada MA umum yang sering dinamakan MA dan MA Kejuruan (di SMA disebut SMK) misalnya Madrasah aliyah Kejuruan (MAK) dan madrasah aliyah program keterampilan.

Gambaran umum tentang madrasah tidak akan bisa lepas dari telaah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia dari berbagai fase perkembangan. Meskipun madrasah memiliki posisi dan kedudukan yang sama dengan sekolah umum, tetapi madrasah tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai sekolah Islam. Sebagai sekolah yang berciri khas agama islam dituntut untuk selalu mengadakan upaya-upaya pengembangan dengan konteks zamannya, terutama dalam menghadapi kebijakan pembangunan nasional dibidang pendidikan yang menekankan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Ciri khas madrasah mata pelajaran keagamaan yang dijabarkan dari pendidikan agama islam, yaitu Al-Qur'an, hadits, aqidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan islam, dan bahasa arab, suasana keagamaannya, yang berupa suasana kehidupan madrasah yang agamis, adanya sarana ibadah, penggunaan metode pendekatan yang agamis dalam penyajian bahan pelajaran bagi setiap mata pelajaran yang memungkinkan, dan kualifikasi guru yang harus beragama islam dan berakhlak mulia, disamping memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pengajar berdasarkan ketentuan yang berlaku. (Asrori)(ary-handbook manajemen madrasah/sekolah)

Madrasah aliyah merupakan salah satu input calon mahasiswa yang

akan berkuliah di UIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya yang ada di dalam maupun di luar Propinsi Bengkulu. Untuk menarik minat para siswa seperti ini, berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta berlomba-lomba melakukan yang terbaik sebagai wujud pencitraan mereka dalam menarik simpati para siswa. Kampus UIN Bengkulu misalnya memaksimalkan sosialisasi diberbagai media cetak maupun elektronik dengan tujuan menyampaikan pandangan tentang kampus UIN Bengkulu sebagai wujud pencitraan guna membentuk persepsi yang ada dikalangan para siswa tentang UIN Bengkulu sehingga para siswa memilih kampus nuansa religius tersebut untuk melanjutkan studi strata satu.

Selain melakukan sosialisasi di media cetak maupun elektronik, kampus UIN Bengkulu juga melibatkan Civitas Akademik dan para mahasiswa untuk terjun langsung ke berbagai sekolah yang ada di Propinsi Bengkulu. Salah satu sasarannya adalah MAN Insan Cendekia Bengkulu Tengah, MAN Seluma, MAN Kaur, dan MA Makrifatul Ilmi Manna Bengkulu Selatan. Selain untuk pengambilan data penelitian, madrasah-madrasah di atas juga dimintai bagaimana persepsinya tentang kampus UIN Bengkulu.

Madrasah aliyah yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 4 madrasah aliyah yang tersebar di berbagai lokasi di propinsi Bengkulu dan meyumbang alumninya untuk menjadi mahasiswa di UIN FAS Bengkulu. Madrasah-madrasah tersebut adalah MAN Insan

Cendekia Bengkulu Tengah, MAN Seluma, MAN Kaur, dan MA Makrifatul Ilmi Manna Bengkulu Selatan.

Penelitian dan pengambilan data yang dilakukan di MAN Insan Cendekia Bengkulu Tengah dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022. Wawancara secara intensif dilakukan dengan Imam Ghozali, M.Pd selaku Kepala Sekolah MAN IC Bengkulu Tengah. Salah satu masukan yang cukup penting adalah pernyataan yang mengatakan *“Siswa-siswi MAN Insan CEndekia ini mempunyai IQ atau kecerdasan di atas rata-rata dan madrasah ini berfokus pada keilmuan sains, UIN Bengkulu jangan lewatkan potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi kita. Dengan cara sosialisasi tentang UIN Bengkulu beserta jurusan atau fakultas yang cocok untuk dimasuki ketika melanjutkan kuliah. Ini jangan dilewatkan karena kampus-kampus yang berada di luar provinsi Bengkulu bahkan perwakilan-perwakilan kampus luar negeri cukup gencar untuk melakukan sosialisai di Madrasah kita”*

Penelitian dan pengambilan data di MAN Seluma dilakukan pada hari Selasa 29 Maret 2022 dan bertemu Kepala MAN Seluma Budi Utomo, S.Pd. Salah satu yang menjadi persepsi dan harapan yang disampaikan adalah kerjasama di bidang PPL dan KKN berbasis madrasah asal untuk memancing semangat adik-adik tingkatnya agar melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terutama UIN Bengkulu. Dengan mengadakan kerjasama tersebut madrasah dapat diuntungkan dan kualitas mahasiswa yang melakukan PPL atau KKN berbasis madrasah

asal akan meningkatkan kualitas dan pengalaman individu mahasiswa tersebut.

Kepala MAN Kaur Muflihah Fithriani, S.Ag., M.Pd.I saat peneliti mengambil berkunjung ke madrasah untuk mengambil data mengatakan

“Untuk madrasah, kerjasama aau pengabdian yang bisa dilakukan dengan UIN Bengkulu adalah dengan melakukan kegiatan PPL dan KKN berbasis madrasah, mahasiswa UIN Bengkulu dapat memberikan pengetahuan baru bagi siswa di madrasah.tentang bagaimana proses pebelajaran di perguruan tinggi sekaligus memotivasi siswa-siswa untuk melanjutkan pendidikannya setelah tamat dari madrasah”.

c. Pengertian Sekolah Menengah Atas

Terciptanya generasi yang baik merupakan keberhasilan dari pendidikan yang diberikan kepada anak didik dan tidak terlepas dari pengaruh setiap faktor pendidikan seperti dilingkungan masyarakat, sekolah, dan lainnya. Pada pendidikan yang baik maka tingkat pendidikan anak juga diperhatikan, untuk menunjang dan membuat si anak tersebut menjadi pribadi yang berahklak, maka pertimbangan untuk melanjutkan pendidikan sampai keperguruan tinggi sangatlah di perhatikan bagi si anak, karena pada dasarnya pendidikan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang terbaik untuk si anak setelah pendidikan SLTA sederajat.

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Jenjang pendidikan ini dimulai dari Kelas 10 sampai Kelas 12 dengan siswa yang umumnya berusia 15-18 tahun. Pada tahun pertama yakni kelas 10, siswa

mendapatkan pelajaran umum. Tetapi pada tahun kedua atau Kelas 11, siswa SMA diwajibkan memilih salah satu dari 3 jurusan yang ada, yaitu Sains, Sosial, dan Bahasa yang kurikulumnya disesuaikan dengan jurusan yang dipilihnya. Sekolah menengah atas tidak termasuk dalam program wajib belajar 9 tahun yakni Sekolah Dasar (atau sederajat) 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat) 3 tahun yang dicanangkan pemerintah. Meskipun demikian, sejak tahun 2005 di beberapa daerah seperti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul telah mulai diberlakukan program wajib belajar 12 tahun dengan mengikut sertakan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ditempuh dalam waktu 3 tahun sebagai program belajar yang diwajibkan.

d. Tamatan SLTA sebagai Input bagi UIN Bengkulu

SMA atau SLTA merupakan jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan pengkhususan. (Depdiknas, 2004: 112). Perwujudan pengkhususan tersebut berupa diselenggarakannya penjurusan di mulai di kelas XI (sebelas), yakni, penjurusan pada Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa yang mulai diterapkan pada siswa SMA kelas XI tahun pelajaran 2005/2006. Penjurusan merupakan upaya strategis dalam memberikan fasilitas kepada siswa untuk menyalurkan bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya yang dianggap paling potensial untuk dikembangkan secara optimal. Oleh

karena itu, maka sekolah, guru, dan petugas Bimbingan Konseling (BK) harus mampu menempatkan ke dalam jurusan secara tepat. Menempatkan siswa pada jurusan tertentu secara tepat berarti memberikan peluang kepada siswa untuk dapat berhasil pada masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, bahwa Peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Untuk menghindarkan kemungkinan terjadi ketidaktepatan penjurusan siswa SMA dalam pilihan jurusan tertentu, perlu ada upaya antara lain: pengukuran dan penilaian keefektifan perencanaan penjurusan, keefektifan pelaksanaan penjurusan, keberhasilan siswa setelah penjurusan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penjurusan.²¹³

Salah satu sampel seolah menengah atas dalam penelitian ini adalah SMAN 1 seluma. Di sekolah ini peneliti mendapatkan gambaran tentang persepsi guru dan siswa tentang UIN Bengkulu serta saran dan masukan dalam rangka pengembangan UIN Bengkulu kedepannya. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 1 Seluma Arlan SM, S.Pd mengatakan:

“kebanyakan siswa yang melanjutkan perkuliahan di IAIN Bengkulu mengambil jurusan Tarbiyah karena ikut-ikutan alumni atau teman-temannya yang lain. Sebaiknya pihak UIN Bengkulu sekarang rajin melakukan sosialisasi dan pengenalan jurusan dan prospek perkuliahan di

²¹³ NURHAYATI, FITRIA. *Aplikasi Klasifikasi Penentuan Jurusan SMA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Gresik dengan Metode FK-NN*. Diss. Universitas Muhammadiyah Gresik, 2017.

jurusan lain yang ada di UIN Bengkulu. Dalam bidang kerjasama, pihak UIN dapat mengirim mahasiswa untuk KKN atau PPL di sekolah kami atau sekolah-sekolah yang lain. Peningkatan mutu siswa bisa meningkatkan mutu calon mahasiswa yang akan belajar di UIN Bengkulu.”

B. Persepsi dan Harapan Sekolah dan Madrasah tentang Pengembangan UIN FAS

5. Tentang Mutu dan Harapan Sarpras UIN FAS

Saat ini, UIN Bengkulu memiliki luas bangunan seluas 67.937 M², yang terdiri dari gedung umum (Rektorat, Auditorium, Lembaga dan UPT, Asrama mahasiswa) serta gedung-gedung perkuliahan di empat dan pascasarjana. Bila diasumsikan bahwa setiap mahasiswa membutuhkan 5 M², sementara UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki 6982 mahasiswa, maka selayaknya kampus ini memiliki luas bangunan 49.937 M². Ruang-ruang kuliah multimedia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pelayanan jaringan internet 5 bandwidth (MBPS) mampu melayani keperluan akademik mahasiswa. Dengan melihat perbandingan tersebut dapat disimpulkan, untuk saat ini fasilitas gedung dan ruangan yang tersedia di UIN Bengkulu saat ini sangat memadai. Namun, dalam menghadapi perkembangan selanjutnya UIN tetap harus berbenah dan menambah fasilitas dan kualitas gedung dan ruangan.

Walaupun IAIN sudah berubah menjadi UIN namun masih terdapat fasilitas yang belum mencukupi kebutuhan mahasiswa, sehingga terdapat kecenderungan mahasiswa untuk melaksanakan tugas diskusi misalnya di sekitar halaman kampus. Ketidaknyamanan ini semakin dipicu dengan ruang diskusi seperti gazebo di area lingkungan UIN FAS Bengkulu, jaringan WIFI yang bisa diakses oleh mahasiswa, petunjuk arah gedung-gedung yang ada di lingkungan UIN FAS Bengkulu sehingga memudahkan mahasiswa ataupun yang berkepentingan di UIN FAS Bengkulu dapat mengetahui arah tempat yang akan dituju.

Menindak lanjuti tentang sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan mutu sarana dan prasarana di UIN FAS Bengkulu dengan perkembangan kedepannya. Proses penataan yang bersangkutan dengan pengadaan, pendayagunaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan agar tercapai suasana proses belajar-mengajar yang kondusif dan nyaman sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Beberapa harapan yang di kemukakan oleh Madrasah dan Sekolah di Provinsi Bengkulu. Seperti yang disampaikan oleh Kepala MAN Insan Cendekia Bapak Imam Ghazali, S.Pd., M.Pd sebagai berikut :

“UIN Bengkulu mensosialisasikan fakultas atau program studi saintek beserta keunggulan dan sarana prasarana yang mendukungnya, sehingga siswa-siswa yang memiliki keinginan melanjutkan kuliah di bidang saintek tertarik untuk melanjutkan pendidikannya di UIN

Bengkulu”.

Sejalan dengan ungkapan dan pernyataan tersebut. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 1 Seluma Arlan SM, S.Pd mengungkapkan :

“Sarana dan prasarana yang ada di perguruan Tinggi sebaiknya lengkap dan lebih daripada yang ada di sekolah, jangan sampai sarana yang ada di sekolah justru tidak ditemukan di perguruan tinggi. Contoh laboratorium dan alat-alatnya, sarana komputer dan internet. Siswa yang sudah merencanakan atau ingin melanjutkan pendidikannya sudah sedikit banyak mencari informasi tersebut. Sarana prasarana yang lengkap atau yang belum mereka temukan di sekolah akan menjadi pertimbangan siswa untuk masuk ke universitas-universitas tertentu”.

Dengan demikian, dari hasil wawancara di atas banyak harapan kedepannya untuk UIN FAS Bengkulu untuk perkembangan dan kemajuan UIN FAS Bengkulu. Sarana dan prasarana pendidikan Yaitu untuk mempengaruhi dan mendukung aktivitas dan proses pembelajaran dan layanan di UIN FAS Bengkulu secara efektif dan efisien. Paradigma sarana dan prasarana tersebut mengandung atribut pokok sebagai kebutuhan mahasiswa dosen, masyarakat dan bahkan pengguna lulusan. Memiliki suasana akademik (*academic-atmosphere*) dalam penyelenggaraan program studi, adanya komitmen kelembagaan

(*institutional commitment*) dari para pimpinan dan staf terhadap pengelolaan organisasi yang efektif dan produktif, keberlanjutan program studi, serta efisiensi program secara selektif berdasarkan kelayakan dan kecukupan. Dimensi-dimensi tersebut mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat strategis untuk merancang dan mengembangkan usaha penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta berorientasi pada masa yang akan datang.

Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi persepsi dan harapan sekolah dan siswa terhadap perguruan tinggi. Wawancara dengan Ibu Rifa seorang guru dari MAN 1 Bengkulu Selatan mengatakan:

“ Semua siswa MAN 1 Bengkulu Selatan bahkan rata-rata semua siswa MAN sederajat sudah mengenal dan biasa dengan internet. Pengenalan kampus, baik kegiatan, sarana, kemajuan atau hal yang menarik dari kampus harus disebarluaskan melalui media sosial yang familiar dengan anak-anak muda. Begitu juga dengan penambahan jurusan atau fakultas baru yang sesuai dengan perkembangan zaman

6. Tentang Pengabdian Masyarakat dan KKN Mahasiswa

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma atau tugas pokok dari suatu perguruan tinggi, termasuk UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, disamping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian. Pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat yang dalam realisasinya juga melibatkan dua dharma lainnya, diharapkan

akan selalu ada keterkaitan bahkan kemanunggalan antara Perguruan Tinggi, dalam hal ini UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan masyarakat.

Karena itu pulalah diharapkan ada upaya secara sadar untuk dapat menghindari terjadinya isolasi Perguruan Tinggi (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) dari masyarakat lingkungan. Dan usaha-usaha tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi itu sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam PP 60/ 99 (BAB II psl. 2) yang berbunyi :

a). *Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. b). Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional*

Karena pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tugas pokok Perguruan Tinggi, maka pelaksanaannya harus didukung oleh seluruh sivitas akademika PT tersebut dan dilandasi pemahaman yang benar tentang pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan PP 60/99 (BAB III psl 3 ayat 4) yang menyatakan bahwa :

Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Harus disadari bahwa masyarakat, khususnya di daerah Propinsi Bengkulu dan sekitarnya pada saat ini telah mengenal bahwa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Propinsi Bengkulu sebagai perguruan tinggi Islam milik Negara adalah gudangnya ilmu pengetahuan, terutama keislaman. Karena itu UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebenarnya dituntut untuk selalu mengupayakan secara maksimal agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan tersebut secara praktis dan mampu memecahkan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari.

Sementara itu saat ini sedang ramai dibicarakan mengenai otonomi daerah yang secara formal telah berlaku sejak Januari 2001, meskipun masih banyak yang belum siap. Dan Propinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah yang siap untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut. Berbicara mengenai otonomi daerah sesungguhnya mengacu kepada UU no. 22/99. Undang-undang ini telah mengatur mengenai kewenangan daerah yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang-bidang tertentu, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan negara, keadilan, moneter/fiskal, agama dan kewenangan bidang lain. Untuk kewenangan bidang lain ini UU telah menetapkan kebijakan dan perencanaan nasional dan pengendalian

pembangunan daerah secara makro dalam perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dalam tata perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standar nasional.

Karena itu daerah masih berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab melestarikan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti pula bahwa dalam rangka otonomi daerah sumber daya nasional yang ada di daerah, akan menjadi sumber penghidupan, sumber pendapatan, sumber kelangsungan pemerintahan daerah bahkan sebagai sumber pengembangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kenyataan seperti itu, maka pengabdian masyarakat harus disoialisasikan kepada seluruh sivitas akademika UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, masyarakat dan pemda, serta diupayakan pengembangan pelaksanaannya secara terus menerus, melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain, terutama pihak-pihak sekolah yang potensial menjadi input calon mahasiswa UIN Bengkulu

Pengertian mengenai pengabdian masyarakat secara filosofis sesungguhnya dapat berkembang dan dikembangkan sesuai dengan persepsi dan tergantung pada dimensi ruang dan waktu. Namun secara sederhana pengabdian masyarakat bagi Perguruan Tinggi Islam dapat diartikan sebagai pengamalan ilmu pengetahuan agama Islam yang

dilakukan oleh PT Islam tersebut (termasuk UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat dalam upaya mensukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia.

Secara melembaga berarti bahwa pengabdian masyarakat itu dilakukan oleh, atas nama dan disetujui oleh pimpinan Perguruan Tinggi bersangkutan. Karena itu kegiatan kelompok ataupun perorangan yang tidak merupakan program yang direncanakan oleh Perguruan Tinggi, tidak termasuk pengabdian masyarakat ini. Dilakukan secara langsung berarti menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut untuk diterapkan, disebarluaskan ataupun didemonstrasikan langsung kepada masyarakat yang menjadi sasaran.

Dengan demikian pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh PT Islam, termasuk UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah pengabdian yang dilakukan oleh lembaga PT Islam tersebut secara terencana dan atas nama kelembagaan.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakkan oleh PT Islam bertujuan untuk mengembangkan dan mensukseskan pembangunan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalahnya sendiri. Karena itu pengabdian kepada masyarakat harus selalu diarahkan pada aktifitas yang dampak dan manfaatnya dapat secara langsung di rasakan oleh masyarakat itu sendiri. Secara umum tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan kontribusi atau

membantu meningkatkan berbagai kebutuhan masyarakat serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.²¹⁴

Secara khusus pengabdian masyarakat bertujuan untuk:

- a. Mempercepat upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dikalangan masyarakat yang dapat mendukung cita-cita dan aspirasi pembangunan
- b. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan
- c. mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis yang siap menempuh perubahan menuju perbaikan dan kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan agama, lebih-lebih di era otonomi daerah.
- d. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses modernisasi serta pemberlakuan otonomi daerah.
- e. Memberikan masukan bagi pengembangan kurikulum di PT Islam (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) agar lebih relevan dengan meningkatnya aktifitas pembangunan serta meningkatkan kepekaan sivitas akademika terhadap masalah-masalah yang berkembang di masyarakat, terutama dengan diberlakukannya otonomi daerah.

²¹⁴ Margono Slamet, *Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat*, (Yogyakarta: P3m IAIN Sunan Kalijaga, 1993), h. 36

- f. Memperkenalkan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu kepada masyarakat dan sekaligus sebagai “ arena promosi” bagi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu itu sendiri.

Sedangkan sasaran dan target yang ingin dicapai adalah :

- a. Terwujudnya kualitas keberagaman masyarakat yang cukup tinggi.
- b. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral agama
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas potensi yang ada pada mereka dan sekaligus mampu untuk mengembangkannya.
- d. Terwujudnya umpan balik yang dapat dimanfaatkan oleh PT Islam (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) dalam rangka penyempurnaan kurikulum.

Dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan dan pelaksanaan pengabdian masyarakat, perlu diterapkan asas pengabdian masyarakat sebagai pegangannya, sebagai berikut:

- a. Asas kelembagaan.

Asas ini memberikan landasan bahwa seluruh aktifitas pengabdian masyarakat harus dilaksanakan secara melembaga. Program dan aktifitas pengabdian masyarakat harus didasarkan atas tata nilai, serta pengorganisasian yang ditetapkan oleh PT (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) sebagai suatu sistem. Masing-masing unsur

dalam sistem harus berperan sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya (lembaga, "fakultas", jurusan, bidang studi, laboratorium, kelompok belajar, perorangan maupun pusat penelitian).

b. Asas Ilmu Amaliah dan Amal Ilmiah

Asas ini memberikan landasan bahwa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki tanggung jawab dan kepekaan terhadap masalah yang timbul dalam masyarakat, dan untuk selanjutnya mengupayakan pemecahannya dengan ilmu pengetahuan yang dikembangkan. Sebagai suatu masyarakat ilmiah, pengabdian yang dilaksanakan oleh PT Islam (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) harus menggunakan metode yang tepat semenjak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, juga dilandasi oleh keikhlasan. Dengan demikian amal yang dilakukan dalam pengabdian tersebut adalah merupakan amal yang dilandasi oleh pemikiran ilmiah dan rasional serta moral agama.

c. Asas kerjasama

Asas ini memberikan landasan bahwa setiap aktifitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PT Islam (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) adalah merupakan kerja bersama antara PT (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) dengan pihak-pihak lain. Hubungan kerjasama ini harus selalu dilandasi dan dijiwai

oleh semangat kekeluargaan, gotong royong atas dasar kemitraan yang saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan pembangunan. Hubungan tersebut meliputi : tukar-menukar informasi, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan.

d. Asas kesinambungan

Asas ini memberikan landasan bahwa untuk menjamin perkembangan masyarakat melalui pengabdian ini dituntut adanya kesinambungan, baik program maupun pelaksanaannya. Karena itu pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PT (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) haruslah merupakan usaha sadar dan terencana dengan menggunakan tahapan-tahapan yang logis sesuai dengan keadaan masyarakat dan kemajuan pembangunan.

e. Asas Edukatif dan Pengembangan

Asas ini memberikan landasan bahwa sesuai dengan fungsi dan peranan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai lembaga pendidikan dan ilmiah, maka program dan aktifitas pengabdian kepada masyarakat harus bersifat edukatif dan pengembangan masyarakat. Artinya bahwa setiap kegiatan pengabdian ini harus diarahkan untuk menolong masyarakat agar mereka mampu menolong dirinya sendiri.

Masyarakat yang menjadi sasaran pengabdian ini pada dasarnya adalah masyarakat di luar lingkungan kampus. yang merupakan mitra kerja PT (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) untuk menerapkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi. Meskipun demikian masyarakat dalam lingkungan kampus pun dapat juga menjadi sasaran pengabdian ini.

Masyarakat sasaran tersebut bisa berupa:

1. Lembaga Pendidikan
2. Komunitas
3. Kelompok dan
4. Perorangan

Keseluruhannya tersebut meliputi pemerintah ataupun swasta, masyarakat industri atau agraris, dan masyarakat perkotaan maupun perdesaan.

Pada dasarnya bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Islam, termasuk UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu meliputi :

- a. Kuliah Kerja Nyata
- b. Desa Binaan (mitra pembangunan)
- c. Kampus Lingkungan (model pengabdian kepada masyarakat lingkaran kampus)
- d. Kerjasama Kemitraan

- e. Pelatihan, dan
- f. Penerbitan jurnal

Bentuk-bentuk kegiatan tersebut masih sangat mungkin untuk dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakat, terutama dengan diberlakukannya otonomi daerah.

Penjabaran dari kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kegiatan ini dapat berupa

- a. Kuliah Kerja Nyata Tradisional /Konvensional
- b. Kuliah Kerja Nyata Terpadu
- c. Kuliah Kerja Nyata berbasis Masjid
- d. Kuliah Kerja Nyata Kewirausahaan
- e. Kuliah Kerja Nyata Serumpun Melayu
- f. Kuliah Kerja Nyata Wawasan Internasional.

- b. Desa Binaan (mitra pembangunan) dapat berupa:

- 1) Pemberdayaan institusi, yang meliputi agama, social, dan budaya)
- 2) Pemberdayaan Ekonomi, yang meliputi Koperasi, BMT, dan lain-lain
- 3) Kesehatan Lingkungan
- 4) Kepemudaan / Kewanitaan
- 5) Perpustakaan (Desa / masjid)
- 6) Pelatihan Kader Pembangunan Desa.

c. Kampus Lingkungan.

Pengabdian dilingkungan kampus, disamping dimaksudkan untuk alternatif penyelenggaraan pengabdian yang tidak terpengaruh oleh suhu politik diluar kampus juga untuk memberikan peluang bagi dikembangkannya kampus sebagai lingkungan yang lebih baik dan kondusif untuk mendukung fungsinya. Sedangkan kegiatannya dapat berupa : Kuliah kerja Nyata di Kampus, bakti sosial dan lainnya.

d. Kerjasama kemitraan, ini bisa dilakukan dengan :

- 1) Pemerintah
- 2) Non Pemerintah
- 3) PTN / PTS lainnya

e. Pelatihan, ini dapat meliputi :

- 1) Kewirausahaan
- 2) Tenaga Inti Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Tenaga Penggerak
- 4) Masyarakat Desa.

f. Penerbitan jurnal, ini bisa berupa :

- 1) Hasil-hasil Pengabdian masyarakat
- 2) Pemikiran-pemikiran pengembangan masyarakat
- 3) Informasi dari lembaga-lembaga terkait dan lainnya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. *Community Development*, yaitu pendekatan yang berorientasi kepada upaya-upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan dan melibatkan mereka secara langsung dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat sebagai upaya meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan demi kepentingan mereka sendiri.
- b. *Pesuasif*, yaitu pendekatan yang bersifat seruan dan ajakan dengan hikmah dan bijaksana tanpa dilandasi unsur paksaan dalam bentuk apapun, agar masyarakat termotivasi untuk berusaha meningkatkan kualitas mereka, baik dalam hal keberagamaan, ekonomi maupun pembangunan secara umum
- c. *Edukatif*, yaitu pendekatan yang dalam program maupun pelaksanaan pengabdian mengandung unsur pendidikan yang dapat mendinamisasikan masyarakat menuju kemajuan yang dicita-citakan.
- d. *Partisipatif*, yaitu pendekatan yang berorientasi kepada upaya peningkatan peran serta masyarakat secara langsung dalam berbagai proses dan pelaksanaan pengabdian.

- e. *Normatif*, yaitu pendekatan yang didasarkan kepada norma, nilai, hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.²¹⁵

Pengabdian kepada masyarakat bukanlah sesuatu yang istimewa jika dikaitkan dengan keberadaan manusia, pengabdian itu bagi manusia merupakan suatu keniscayaan, jika dikaitkan dengan kehidupan manusia atau dalam hubungannya dengan masyarakatnya. Kalau dilihat dari fungsi pengabdian kepada masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan ini sangatlah mulia dan membutuhkan tidak hanya pikiran tapi lebih dari itu, memerlukan tenaga dan keterampilan. Pengabdian masyarakat pada masa depan harus ditangani dengan profesional dan dengan perencanaan yang matang dengan rumusan program aksi yang jelas dan menyentuh kebutuhan masyarakat dan memotivasi halayak untuk hidup mandiri dan muncul kesadaran mereka untuk saling peduli. Untuk itu konsep ke depan tidak lagi dalam lingkup sektoral tetapi harus dalam kerangka hidup global dimana dunia harus sudah digarap oleh UIN Bengkulu melalui pengabdianannya.

Tokoh pendidikan Bengkulu, H.M. Syamlan, Lc., menyampaikan harapan tentang UIN fatmawati Sukarno Bengkulu yang disampaikan dalam Kegiatan FGD Penelitian antara lain:

²¹⁵ Sudin Sudin, Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Perguruan Tinggi Agama Islam, *Aplikasikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vo. V, No. 2 Desember 2004: 161-172

- a. Di kota-kota besar ada problem besar sosial. Bengkulu merupakan propinsi aman dan berpotensi peyelamat akhlak Indonesia. Potensi ini harus diambil alih oleh UIN Bengkulu.
- b. UIN Bengkulu harus bertransformasi menjadi pilihan pertama calon mahasiswa.
- c. Bagaimana UIN Bengkulu menjadi alternative utama Universitas yang bermutu. Secara kualitas mutu UIN Bengkulu harus setara minimal UIN Malang.
- d. Sebagai kota ataupun propinsi Bengkulu harus menjadi tujuan pendidikan. Untuk itu UIN Bengkulu harus ikut terlibat menjadi tujuan tersebut.
- e. Menjadikan wahyu menjadi kurikulum utama dan meningkatkan identitas ‘Islam” di UIN Bengkulu. Alumni yang disiapkan harus memiliki kasapasitas keilmuan Islam yang Kaffah.
- f. Kapasitas UIN haruslah Internasional. Kapasitas internasional berkaitan dengan mental
- g. Kampus harus menyatukan iman, ilmu, dan amal
- h. Harus meningkatkan kualitas Dosen yang bereputasi nasional ataupun internasional.

C. Pembahasan dan Konsiderasi Teoritik

- a. Keberadaan dan eksistensi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sudah diketahui oleh sebagian besar sekolah maupun madrasah di Propinsi Bengkulu. Namun, profil lembaga masih belum banyak diketahui

secara spesifik. Sehingga diperlukan sosialisai dan kerjasama yang terprogram dengan sekolah-sekolah maupun madrasah.

- b. Kerjasama dalam bentuk KKN maupun PPL di sekolah maupun madrasah adalah program yang sangat dibutuhkan untuk mengenalkan kualitas mahasiswa sehingga siswa dari sekolah maupun madrasah tertarik untuk melanjutkan pendidikannya di UIN fatmwati Sukarno Bengkulu
- c. Pengembangan dan penambahan Program Studi Umum untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin melanjutkan studi di Prodi-prodi tersebut
- d. Mempertahankan dan meningkatkan identitas keislaman yang kuat dengan mempertahankan kurikulum berbasis keagamaan sebagai core identity UIN Fatmwati Sukarno Bengkulu.
- e. Meningkatkan kualitas kelembagaan, sarana prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan. Sehingga mutu UIN Bengkulu mampu bersaing dengan Universitas-universitas lain di Indonesia.



BAB VII
KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA
DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
NEGERI (PTKIN) DI INDONESIA

A. Sekilas Tentang Sejarah Perkembangan PTKIN

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) merupakan [perguruan tinggi](#) keagamaan Islam yang berstatus milik pemerintah yang pengelolaannya berada di bawah naungan [Kementerian Agama](#) RI. Secara teknis dan akademik, pembinaan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dilaksanakan oleh [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia](#) (Kemdikbud), sedangkan secara operasional fungsional dilaksanakan oleh pihak Kementerian Agama. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri terdiri atas 3 jenis: [Universitas Islam Negeri](#) (UIN) [Institut Agama Islam Negeri](#) (IAIN) [Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri](#) (STAIN).

Berdasarkan sejarah, pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia dirintis sejak zaman pemerintahan colonial [Hindia Belanda](#). Setidaknya sejak tahun 1930-an, Responsifitas kebutuhan pendidikan bagi masyarakat muslim untuk penguatan kehidupan beragama (Islam) di Indonesia bagian dari ide-ide pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Dengan kata lain umat Islam Indonesia saat itu berkeinginan kuat mendirikan perguruan tinggi keagamaan Islam, meski pada saat itu ada kebijakan kolonial Belanda, bahwa mahasiswa lembaga

pendidikan tinggi Belanda adalah bangsa Indonesia yang berasal dari masyarakat elite.²¹⁶

Pada masa revolusi kemerdekaan, perguruan tinggi Islam akhirnya terwujud dalam bentuk [Sekolah Tinggi Islam](#) (STI) berdiri di [Jakarta](#) (tanggal [8 Juli 1945](#)) di bawah pimpinan Prof. Abdul Kahar Muzakkir. Pada akhirnya STI ikut Pemerintah Pusat Republik Indonesia yang pindah ibukota ke Yogyakarta [10 April 1946](#). Rapat pengurus STI pada [10 Maret 1948](#) memutuskan akan didirikannya [Universitas Islam Indonesia](#) (UII) dengan empat fakultas: Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan.

Ada beberapa fakta gagasan dalam sejarah pendirian pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia, yaitu di Jakarta, Solo, dan Surabaya. Di Jakarta dinamakan sekolah tinggi Islam yang menjadi sekolah lanjutan bagi siswa dari Sekolah Menengah Muhammadiyah (AMS). Di kota Solo disebut sebagai sekolah tinggi untuk muballigh, dan di Surabaya didirikan sekolah tinggi Islam yang akan menerima santri alumni dari pondok pesantren. Di Padang Sumatera Barat berdiri perguruan tinggi Perguruan Tinggi Islam²¹⁷.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950 Pemerintah mendirikan [Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri](#) (PTAIN), sebagai pemekaran dari Fakultas Agama UII (Yogyakarta) pada tanggal [26 September 1951](#) dengan jurusan Da'wah (kelak Ushuluddin), jurusan Qodlo (kelak menjadi Syari'ah) dan Pendidikan (kelak menjadi Tarbiyah). Selanjutnya di Jakarta juga berdiri

²¹⁶ Haidar Putra Daulay. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2007), h. 119

²¹⁷ Dalam kongres II Majelis Islam `Ala Indonesia (MIAI) yang berlangsung tanggal 2-7 Mei 1939

[Akademi Dinas Ilmu Agama](#) (ADIA) pada [14 Agustus 1957](#) berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957.

1. Institut Agama Islam Negeri

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), maka perubahan juga terjadi pada PTAIN di Yogyakarta dan ADIA di Jakarta juga berubah nama menjadi IAIN "Al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah" dengan pusat di Yogyakarta. IAIN ini diresmikan pada [24 Agustus 1960](#) oleh Menteri Agama K. H. Wahib Wahab di Yogyakarta. Sejak tanggal [1 Juli 1965](#) "IAIN Al-Jami'ah" di Yogyakarta diganti menjadi nama "IAIN Sunan Kalijaga". Sunan Kalijaga adalah nama salah seorang Sunan/Ulama Islam dan tokoh terkenal penyebar agama Islam di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, berdirilah cabang-cabang IAIN yang terpisah dari pusat; Hal ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963. Hingga akhir abad ke-20, telah ada 14 IAIN, di mana pendirian IAIN terakhir di [Sumatra Utara](#) pada tahun 1973 oleh Menteri Agama waktu itu, Prof. Dr. H. A. Mukti Ali.

2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Seperti telah diketahui, dalam perkembangannya telah berdiri cabang-cabang IAIN untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang lebih luas terhadap masyarakat. Untuk mengatasi masalah manajerial IAIN, dilakukan rasionalisasi organisasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 pada tahun [1997](#) sebanyak 40 fakultas cabang IAIN dilepas dari IAIN induknya

menjadi 36 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang berdiri sendiri, di luar 14 IAIN yang ada., Menteri Agama saat itu adalah H. Tarmidzi Taher.

3. Universitas Islam Negeri

Dengan berkembangnya IAIN di luar studi keislaman, status "institut" pun dituntut mengalami perkembangan menjadi "universitas", sehingga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Berdasarkan data yang didapat dari Kabag Akademik Subdit Kerjasama dan Akademik Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI²¹⁸, saat ini beberapa UIN yang sudah ada adalah:

1. [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta](#) (IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan IAIN pertama yang berubah menjadi UIN).
2. Kemudian disusul oleh [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta](#),
3. [UIN Maulana Malik Ibrahim Malang](#),
4. [UIN Syarif Qasim Riau](#),
5. [UIN Alauddin Makassar](#),
6. [UIN Sunan Gunung Djati Bandung](#),
7. [UIN Sunan Ampel Surabaya](#),
8. [UIN Arraniry Banda Aceh](#),
9. [UIN Walisongo Semarang](#),
10. [UIN Raden Fatah Palembang](#),
11. [UIN Medan Sumatra Utara](#),
12. [UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu](#),
13. [UIN K.H. Achmad Siddiq Jember](#),
14. [UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto](#),
15. [UIN Raden Mas Said Surakarta](#),
16. [UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung](#),
17. [UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda](#)
18. UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
19. UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan
20. UIN Mahmud Yunus Batusangkar
21. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
22. UIN Sjekh Nurjati Cirebon
23. UIN Salatiga.

²¹⁸ Wawancara dengan Nurul Islam (Nuris) Kepala Bagian Akademik Kabag Akademik Subdit Kerjasama dan Akademik Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, pada Jumat tanggal 18 Juni 2022, di Jakarta.

B. Peningkatan Bentuk Kelembagaan PTKI

Status kelembagaan PTKI berjalan berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya dari Institut Agama Islam Negeri yang terletak sebagai cabang, menjadi alih bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Kemudian STAIN meningkat beralih bentuk menjadi IAIN, dan IAIN meningkat menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Saat ini Kementerian Agama terus berusaha meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan tinggi keagamaan Islam (PTKI) salah satunya dengan melakukan perubahan bentuk kelembagaan. Perkembangan globalisasi dan teknologi informasi saat ini telah meningkatkan mobilitas ilmu pengetahuan dan gagasan secara global pula. Oleh karena itu perubahan bentuk dari STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) maupun IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) merupakan sebuah keniscayaan.

Dalam rangka itu, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terus melakukan kajian secara mendalam melalui berbagai forum, baik sarasehan, maupun FGD tentang hal itu.²¹⁹ Dalam rangka alih status kelembagaan tersebut, maka penguatan bangunan epistemologi keilmuan dan integrasi ilmu-ilmu Islam dan Sains menjadi keharusan. Selain itu

²¹⁹ FGD perubahan bentuk IAIN menjadi UIN yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dengan thema Penguatan Bangunan Epistemologi Keilmuan dan Integrasi Ilmu Islam dan Sains, dilaksanakan di Jakarta, 22-23 September 2019. di Jakarta. FGD dipimpin oleh kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama M. Adib Abdushomad. dihadiri oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Prof. Dr. Arskal Salim GP, M.Ag, Prof. Dr. H.R. Agus Sartono, M.B.A. Deputi IV Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemeko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Para Rektor dan Wakil Rektor dari 11 IAIN yang akan berubah menjadi UIN

perubahan bentuk IAIN menjadi UIN sangat dibutuhkan dan menjadi sangat penting di tengah perkembangan jaman yang terus berkembang.

Dalam rangka peningkatan kelembagaan dari STAIN menjadi IAIN, terutama dari IAIN menjadi UIN harus diiringi oleh penguatan bangunan epistemologi keilmuan dan integrasi ilmu Islam dan Sains. Karena itu lembaga yang akan melakukan usulan perubahan bentuk dari IAIN menjadi UIN harus mampu menyelenggarakan integrasi keilmuan Islam dan Sains serta memiliki distingsi (khasanah keilmuan yang menjadi pembeda antara PTKI dengan PTKI lainnya yang sudah ada.²²⁰

Dalam perform penaskahan dan gagasan integrasi keilmuan Islam dan Sains di dalam kontek peradaban Islam dan kebudayaan keindonesiaan, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA²²¹ menegaskan bahwa perubahan bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam merupakan tanggung jawab keumatan dan kebangsaan. Dalam kontek pendekatan dan penyebaran ajaran Islam Wasatiah maka perubahan bentuk menjadi UIN mutlak adanya dilakukan. Hal ini untuk menangkal ajaran impor Islam dari luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam Wasatiah yang berkembang di Indonesia. Integrasi keilmuan Islam dan Sains harus menjadi visi UIN sebagai mandat yang lebih luas (*wider mandate*) guna menghasilkan umat yang kompeten, sehingga tidak ada lagi dikotomi ilmu Islam dan ilmu umum.

²²⁰Dirketur PTKI Kementerian Agama, Prof Arskal Salim. Sambutan pembukaan acara FGD perubahan bentuk IAIN menjadi UIN tanggal 22 September 2019 di Jakarta.

²²¹Prof. Dr. Azyumardi Azra adalah Guru Besar Bidang Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 23 September 2019. Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA. Juga pernah mendapat gelar Commander of the Order of British Empire.

Perkembangan PTKI di era revolusi industri 4.0 saat ini akan menghadapi perubahan lingkungan yang sarat dengan kompetisi revolusi industri. Menghadapi era tersebut perguruan tinggi tidak bisa lagi menggunakan paradigma keilmuan lama, strategi lama dan cara pengelolaan PTKI yang biasa-biasa saja. Perlu perubahan paradigma, strategi dan manajemen modern dengan pendekatan era teknologis agar perguruan tinggi mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial yang berkembang di era revolusi industri 4.0. Ketidakmampuan perguruan tinggi beradaptasi dengan lingkungan peradaban sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat akan menjadikan lembaga tersebut menjadi tidak berkompeten.

Menjadi PTKI yang kompeten harus menjadi PTKI yang maju dengan mengidentifikasi persyaratan beberapa hal berikut:

1. PTKI yang maju wajib menyusun bisnis plan (rencana pengembangan) yang jelas untuk mencapai target baik akreditasi institusi maupun akreditasi program studi.
2. Komitmen pimpinan. Misalnya sejak menjadi calon rektor harus menandatangani kontrak kinerja terkait pencapaian target selama masa jabatan.
3. Pemerintah dalam hal ini Diktis Kemenag harus menyiapkan target capaian kinerja PTKI yang sudah ditetapkan sesuai dengan Renstra Diktis, terutama terhadap PTKI yang beralih status menjadi lebih tinggi.
4. Harus berinovasi dengan berusaha menyelenggarakan Prodi Vokasi yang terintegrasi secara keilmuan keislaman.

5. Harus mampu merancang program kerjasama dengan universitas luar negeri yang berkelanjutan, misalnya melakukan pertukaran dosen, mahasiswa, kolaborasi penelitian dan publikasi, dan pengiriman dosen ke luar negeri untuk studi lanjut yang lebih tinggi.²²²

C. *Roadmap* Pengembangan dan Mempertegas Distingsi PTKI

Dalam peningkatan PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) di Indonesia, baik dari STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) maupun dari IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) terus dikembangkan menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional, regional (ASEAN), maupun internasional. Proyeksi pembangunan jangka pendek dan jangka panjang peningkatan PTKIN di Indonesia dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sangat jelas dan rinci. Tahapan-tahapan ini bahkan lebih jauh dapat menjadi semacam acuan bagi peningkatan semua PTKI di Indonesia untuk mengembangkannya di wilayah

²²² Prof Dr Agus Hartono Deputi IV Bidang Koordinasi Pendidikan Agama dan kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 September 2019 di Jakarta dalam acara FGD perubahan bentuk IAIN menjadi UIN yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama. Pada kesempatan tersebut Agus Hartono mendukung perubahan bentuk kelembagaan IAIN menjadi UIN yang akan diusulkan. Deputi IV Bidang Koordinasi Pendidikan, agama dan kebudayaan itu Agama Agus Sartono mendukung perubahan bentuk kelembagaan IAIN menjadi UIN yang akan diusulkan. Persiapan secara kelembagaan perlu disiapkan dari sekarang sehingga proses menuju UIN lebih mudah.

masing-masing. Untuk hal tersebut dijalankan sesuai dengan Peta-Jalan (*roadmap*) yang ada.²²³

Berdasarkan sumber yang sama, *Roadmap* pengembangan PTKI yang dirancang oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) terdapat empat (4) tahapan.

1. Tahap pertama tahun 2015-2019. Adalah tahap peningkatan dan penguatan tata kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Pada tahap pertama ini strategi peningkatan PTKI difokuskan pada konsolidasi dan pemenuhan kapasitas kelembagaan dan keunggulan sumber daya dan institusi. Tujuan akhir tata kelola serta mewujudkan **tata kelola PTKI yang baik dan akuntabel**.
2. Tahap kedua tahun (2020-2024). Adalah peningkatan kualitas kelembagaan PTKI menuju **keunggulan nasional**. Tahap ini difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dan semua aspek di PTKI yang makin sempurna dan unggul secara nasional.
3. Tahap ketiga tahun (2025-2029). PTKI berdaya saing regional pada tingkat ASEAN. Pada tahap ini difokuskan pada upaya mengembangkan keunggulan PTKI.
4. *Tahap keempat* (2030-2034), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam **berdaya saing internasional**. Tahap ini fokus terhadap konsistensi dalam peningkatan PTKI yang unggul dan diakui secara global (*internationally*)

²²³ Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kementerian Agama, Roadmap PTKI sudah ditetapkan dalam pertemuan forum rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada bulan Maret 2016. (Sumber: website.diktis.kemenag).

recognized). Proses internasionalisasi PTKI untuk diakui secara global (*internationally recognized*).

Salah satu isu penting dalam upaya peningkatan PTKI dari IAIN menjadi UIN adalah mempertegas distingsi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dari perguruan tinggi lainnya. Peningkatan kelembagaan sebagai upaya peningkatan keilmuan dan kapasitas kelembagaan dalam bentuk penguatan bangunan keilmuan. Dalam rangka penguatan bangunan Epistemologi Keilmuan dan Integrasi Ilmu Islam dan Sains harus memiliki rancangan tentang distingsi (khasanah keilmuan) sebagai kajian utama yang menjadi ciri khusus yang tidak menjadi kajian utama dan sebagai pembeda dengan PTKI lainnya yang sudah ada.

Dalam rangka tersebut, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendidikan Islam²²⁴ menegaskan pentingnya merumuskan distingsi ini dalam sebuah kebijakan supaya bisa ditindaklanjuti PTKI. Meski dari aspek anggaran pengelolaan masih rendah, namun distingsi PTKI harus ada dan harus diwujudkan, terutama kepada PTKI yang akan atau sedang usul untuk alih status dari IAIN menjadi UIN.²²⁵ Untuk mewujudkan dan menegaskan distingsi keilmuan, harus meneguhkan khittah PTKI yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

²²⁴Sekjen Kementerian Agama, Prof. Nizar Ali MA, menyatakan hal tersebut dalam Rapat Kerja di Ciloto, 2 - 4 November 2020. (Sumber. Website.Diktiskemenag)

²²⁵ Berikut 11 IAIN yang akan melakukan perubahan transformasi kelembagaan menjadi UIN: IAIN Jember, IAIN Tulungagung, IAIN Surakarta, IAIN Bengkulu, IAIN Palu, IAIN Ambon, IAIN Padangsidempuan, IAIN Palangkaraya, IAIN Purwokerto, IAIN Sultan Amai Gorontalo, IAIN Samarinda.

Dinamika dan transformasi kelembagaan serta upaya-upaya pembaharuan di lingkungan PTKI jangan sampai menggerus atau menghilangkan khittah tersebut.

Peneguhan distingsi UIN bukan hanya sebagai visi misi, tetapi bagaimana distingsi tersebut menjadi bahan pembelajaran dalam kurikulum yang pada akhirnya juga dapat dipahami dan dilihat dari profil lulusannya. Sekurangnya terdapat dua tipologi besar profil alumni. Pertama, UIN diharapkan melahirkan ahli di bidang kajian keislaman-murni (*tafaqqohu fiddin*). Kedua, PTKI diharapkan melahirkan lulusan yang memiliki penguasaan bidang sosial humaniora/sosial sains yang juga ahli di bidang keislaman.

Ada banyak pendapat dan *best-practices* untuk meneguhkan distingsi PTKI,²²⁶ misalnya Fakultas Kedokteran UIN Maulana Malik Ibrahim dengan konsentrasi di bidang Kedokteran Perhajian, yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Fakultas Kedokteran UIN Malang tidak hanya semata mempelajari aspek disiplin kedokteran, tetapi seluk beluk perhajian dari aspek fiqhiyah dan persoalan kesehatan yang akan dialami jemaah haji juga digeluti secara serius.

Mencermati hal tersebut maka Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN) Bengkulu, Distingsi khas keilmuan yang saat ini sedang digagas, misalnya UIN Bengkulu memiliki khas kajian-kajian studi tentang wanita (An-Nisa) dari berbagai aspek. Konsep besar keilmuan ini sedang dijadikan sebagai gagasan besar bagi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

²²⁶Prof Nizar Ali, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga mantan Direktur Diktis dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.

D. Penguatan Profil Lulusan PTKI

Sebagaimana ditegaskan sebelumnya bahwa distingsi PTKI adalah sebagai keharusan. Distingsi sebuah PTKI selanjutnya menjadi bahan kurikulum yang dapat dipahami dari profil lulusannya. Sekurang-kurangnya terdapat dua tipologi besar profil alumni PTKI. *Tafaqqohu fiddin* merupakan profil utama yang harus dimiliki lulusan selain memiliki penguasaan bidang sains dan keislaman.

Indikator tipologi profil lulusan yang *Tafaqqohu fiddin* adalah:

1. Lulusan harus mampu memberikan solusi atas problem-problem keislaman dan memiliki kecakapan untuk mentransformasikan pengetahuan keislaman kepada masyarakat luas.²²⁷ dengan tipologi ini lulusan harus bisa diperankan oleh fakultas Ushuluddin, Syari'ah, Tarbiyah, Adab, dan Dakwah, baik pada IAIN maupun UIN.
2. Lulusan harus menguasai bidang sosial humaniora/sosial sains. Dengan profil seperti ini dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keislaman yang harus didekati dengan pendekatan sosial humaniora dan/atau sosial sains. Tipologi alumni ini juga diharapkan dapat mendorong kontribusi umat Islam dalam mengisi ruang-ruang pembangunan secara umum, sekaligus berkontribusi secara epistemologi keilmuan untuk menghindari konflik relasi ilmu dan Islam. Melahirkan profil alumni seperti ini bisa diperankan oleh

²²⁷ Mengutip pernyataan Dirjen Pendis Kementerian Agama, Prof Dr Muhammad Ali Ramdhani, ST, MA. (Sumber www.diktiskemenag)

fakultas-fakultas rumpun Sosial Humaniora dan Sosial Sains pada PTKI yang berbentuk UIN.

Profil lulusan PTKI tipologi kedua tersebut linier dengan kompetensi lembaga pendidikan Madrasah Aliyah sebagai feeder input PTKI. Madrasah Aliyah sesungguhnya adalah SMA Plus. Mata pelajaran yang diajarkan di SMA, juga diajarkan di Madrasah Aliyah. Bahkan, terdapat 5 (lima) mata pelajaran agama Islam yang diajarkan di Madrasah Aliyah, tetapi tidak diajarkan di SMA. Hal yang sama juga dilakukan pada sejumlah program-program studi sosial humaniora dan sosial sains pada UIN, di samping mengajarkan mata-mata kuliah pada prodi-prodi di PTU, juga dibekali dengan sejumlah mata kuliah keislaman yang tidak diajarkan di PTU. Oleh karenanya, tipologi lulusan PTKI ini merupakan lulusan PTU Plus.

Kedua profil lulusan PTKI tersebut menjadi kekuatan tersendiri bagi PTKI. Profil *Tafaqqih fiddin* dan penguasaan bidang sosial humaniora/sosial sains sekaligus bidang keislaman merupakan distingsi mendasar bagi PTKI. Oleh karenanya, komitmen untuk meneguhkan orientasi ini perlu dijadikan perhatian seluruh pihak, khususnya pimpinan PTKI yang bersangkutan.

Untuk meneguhkan komitmen tersebut, program untuk memastikan kompetensi minimal keislaman di kalangan mahasiswa PTKI harus dilakukan. Jangan sampai, lulusan PTKI malah justru tidak mengetahui terhadap persoalan-persoalan keislaman yang menjadi kewajiban yang bersifat publik (*fardlu kifayah*), terlebih kewajiban privasinya (*fardlu ain*). Hal ini bisa dilakukan dengan

beberapa strategi. Di antaranya adalah lulusan Madrasah Aliyah diberikan proporsi yang cukup untuk ditampung di lingkungan PTKI. Bahkan, sejumlah afirmasi untuk lulusan-lulusan Madrasah Aliyah yang berprestasi, terlebih yang juga lulusan pondok pesantren, harus dilakukan supaya ia dapat mengisi terutama tipologi lulusan *mutafaqqih fiddin*. Sebab, cenderung akan menjadi problem jika lulusan yang akan digodok sebagai *mutafaqqih fiddin* berasal dari luar Madrasah Aliyah atau pondok pesantren.²²⁸

E. Pengembangan Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah menjadi salah satu misi Kementerian Agama yang juga harus diwujudkan semua PTKI (STAIN, IAIN, dan UIN).²²⁹ Moderasi beragama telah didudukkan sebagai modal sosial dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024 dan menjadi

²²⁸ **Suwendi (Kepala Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Diktis) dalam www.diktiskemenag.**

²²⁹Salah satunya dengan keluarnya Surat Edaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama. Dalam edaran tersebut, setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri wajib mendirikan Rumah Moderasi Beragama.

program prioritas Kementerian Agama dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Hal ini kemudian diturunkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475 Tahun 2020.

Saat ini terdapat 29 PTKIN baik UIN, IAIN, maupun STAIN yang sudah mendirikan Rumah Moderasi Beragama.²³⁰ Hal ini menjadi bukti adanya gerakan secara terstruktur di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Mayoritas PTKIN masih menempatkan Rumah Moderasi Beragama sebagai Lembaga Non Struktural setingkat dengan pusat-pusat studi yang ada di kampus. Sementara jika dilihat dari tuntutan kinerjanya yang begitu besar, semestinya dapat ditempatkan sebagai unit yang lebih besar dan posisinya di tingkat universitas/institut di bawah koordinasi langsung dari Wakil Rektor atau Pembantu Ketua. Namun belakangan bagi PTKI yang telah suksesi, telah menempatkan Rumah Moderasi Beragama setingkat Pusat yang bernaung dalam Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

Peningkatan moderasi beragama di perguruan tinggi dilatarbelakangi dengan banyaknya fakta hasil studi tentang hal tersebut.²³¹ Dalam upaya

²³⁰Berdasarkan data yang dihimpun melalui WA Group Majelis WR & Puket I PTKN pada tanggal 20 Oktober 2020. Meskipun demikian sampai saat ini belum ada kesepakatan atau keseragaman pola peningkatan rumah moderasi yang ada di PTKIN baik terkait dengan struktur kelembagaannya, program kerjanya, maupun dukungan lain termasuk aspek finansial.

²³¹Banyak fakta terkait dengan masalah moderasi beragama di Indonesia. Salah satunya hasil riset yang telah dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan

pengembangan rumah moderasi beragama dapat dilakukan dengan beberapa skema.

Pertama, moderasi beragama menjadi mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi. Pola ini menempatkan moderasi beragama sebagai sebuah ilmu dan materi yang perlu diajarkan secara formal sebagai mata kuliah wajib baik institusional maupun fakultas. Pola ini bagus diterapkan untuk memberikan kepastian bahwa muatan moderasi beragama benar-benar sampai kepada mahasiswa dan terukur tingkat pemahaman dan capaian pembelajarannya. Namun demikian dengan pola ini, bisa berakibat pada minimnya tanggung jawab dari semua pihak di lingkungan kampus, karena menganggap bahwa moderasi beragama adalah mata kuliah sehingga pengampunya yang memegang tanggung jawab utamanya.

Kedua, moderasi beragama menjadi muatan baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang diintegrasikan atau diinternalisasikan pada banyak mata kuliah yang relevan. Dengan demikian moderasi beragama dapat menjadi

Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2019. Riset ini mengkaji tentang dinamika moderasi beragama yang dilakukan oleh negara dengan mengambil fokus 8 (delapan) daerah di Indonesia yang dianggap representatif. Temuan dari riset ini diantaranya adalah mendorong adanya sosialisasi program moderasi beragama; perlunya mengangkat nilai-nilai kearifan lokal dalam penguatan moderasi beragama; dan pelibatan tokoh-tokoh agama, suku, atau kelompok yang memiliki potensi konflik baik secara fisik, ideologi, maupun pemahaman umat beragama. Dalam berbagai media massa sering ditemukan fakta tentang kekerasan yang mengatasnamakan agama. Misalnya adanya pembubaran kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh komunitas atau pemeluk agama tertentu, pelarangan atau pengusiran seseorang dari masyarakat karena beda agama, dan berbagai kasus lainnya. Meskipun hal-hal itu dapat saja dianggap sebagai perilaku oknum, tetapi tentu saja akan berbahaya apabila dibiarkan dan bukan tidak mungkin akan menjadi permasalahan secara nasional.

salah satu chapter atau pokok pembahasan, atau menjadi isu yang dijadikan fokus kajian yang dikaitkan dengan pokok-pokok bahasan pada mata kuliah lain.²³²

Ketiga, moderasi beragama menjadi lembaga atau unit khusus yang dikembangkan dengan berbagai program yang diberikan kepada semua civitas akademika PT, baik kepada dosen, mahasiswa, maupun para tenaga kependidikan. Dengan demikian moderasi beragama bukan hanya menjadi tanggungjawab sebagian orang di kampus, tetapi menjadi tanggungjawab semua orang sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pola ini menjadikan Rumah Moderasi Beragama menjadi sentral peningkatan moderasi beragama, memberikan pendampingan, layanan aduan, dan juga peningkatan berbagai referensi dan bahan yang dibutuhkan. Pola ini lebih bersifat massif dan sistematis ketika rumah moderasi sudah masuk ke dalam struktur organisasi dan tata kerja (Ortaker)

²³²Penguatan moderasi beragama melalui kebijakan peningkatan kurikulum. Struktur kurikulum PTKI berbasis moderasi beragama dapat dibangun dengan pendekatan integrasi dan internalisasi. Dalam konteks peningkatan kurikulum berbasis KKNi dan SNPT, muatan moderasi beragama perlu dimasukkan dalam rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus sebagai penciri institusi. Dari rumusan tersebut kemudian diturunkan menjadi bahan kajian yang akan dimasukkan menjadi sub pokok bahasan ke dalam beberapa mata kuliah yang relevan sebagai pilar-pilar utamanya. Sedangkan pada mata kuliah lain, tidak harus masuk dalam pokok bahasan, tetapi dimasukkan pada internalisasi nilai-nilai moderasi beragama yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Nilai-nilai ini perlu dituliskan secara eksplisit dalam RPS supaya menjadi pengingat dan tidak terabaikan dalam proses perkuliahan. Dengan demikian secara sadar dan terencana, semua dosen pengampu mata kuliah perlu memberikan penguatan nilai-nilai moderasi beragama ini sesuai dengan konteks mata kuliah masing-masing. Contoh lain adalah ditambahkan pada pokok bahasan dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, salah satu pendekatan yang diterapkan adalah mengkaji berbagai contoh penerapan moderasi beragama dalam perjalanan sejarah Islam. Pada mata kuliah ilmu kalam, moderasi beragama dapat dijadikan salah satu muatan sikap dan perilaku yang ditanamkan dengan dikaitkan pemikiran-pemikiran para tokoh ilmu kalam, pemahaman yang benar terhadap tauhid, dan sebagainya. Pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dikaitkan dengan pemahaman sikap toleransi beragama dan penguatan wawasan kebangsaan yang tidak eksklusif. Hal yang sama dapat dilakukan pada mata kuliah lain baik mata kuliah ke-Islaman maupun mata kuliah lainnya.

perguruan tinggi. Lingkup kerja dari Rumah Moderasi Beragama tidak hanya untuk kalangan internal perguruan tinggi, tetapi juga memberikan layanan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan riset, pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan sebagainya.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan peningkatan moderasi beragama di PTKI, maka diperlukan adanya penguatan SDM yang memiliki wawasan moderasi beragama secara baik. Strategi penguatan SDM harus dilakukan untuk mendukung implementasi kurikulum. Di antara program yang dapat dikembangkan adalah pelatihan, TOT, workshop, riset, diskusi-diskusi, penerbitan/publikasi, dan sebagainya. Untuk itu dibutuhkan pula dukungan kebijakan terkait dengan afirmasi tema-tema riset, publikasi, penerbitan, dan kegiatan-kegiatan lain dalam bidang moderasi beragama. Dalam hal ini, dibutuhkan sinergitas yang baik antar unit kerja di lingkungan perguruan tinggi untuk saling mendukung dalam implementasi kebijakan.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum. Monitoring dan evaluasi ini tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga dapat dilakukan secara informal. Evaluasi formal dapat dilakukan melalui program ujian tengah semester dan akhir semester, atau melalui monitoring terstruktur yang dilakukan program studi maupun fakultas. Sedangkan evaluasi informal dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk mengawal implementasi moderasi beragama di kampus. Misalnya dilakukan oleh pengelola Rumah Moderasi Beragama maupun pimpinan perguruan tinggi.

Untuk melakukan monitoring dan evaluasi implementasi moderasi beragama dibutuhkan indikator-indikator keberhasilan yang jelas. Dalam hal ini, rumusan indikator capaian moderasi beragama di perguruan tinggi perlu dirumuskan secara bersama-sama dan menjadi salah satu item pengukuran yang minimal setiap tahun dievaluasi. Misalnya keberhasilan program dilihat dari jumlah atau frekuensi kegiatan bertemakan moderasi beragama, banyaknya mata kuliah yang memasukkan muatan moderasi beragama, banyaknya riset bertemakan moderasi beragama, dan sebagainya. Rumusan ini secara akumulatif kemudian menjadi salah satu item dalam perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh pimpinan program studi, fakultas, sampai dengan pimpinan PT.

Dari paparan di atas, maka sesungguhnya program moderasi beragama perlu dirumuskan secara terstruktur dan sistematis sampai masuk pada struktur kurikulum PTKI supaya dapat terwujud secara optimal. Kesadaran dari semua civitas akademik akan urgensi dari moderasi beragama ini perlu ditingkatkan dan didorong dengan adanya kebijakan dan regulasi mulai tingkat nasional sampai perguruan tinggi.

Selain hal itu, pendidikan moderasi beragama dapat dilakukan melalui Ma'had Al-Jami'ah yang ada di lingkungan PTKI sebagai bagian dari instrumen peningkatan wawasan keislaman bagi mahasiswa PTKI. Cara lain untuk memastikan kompetensi keislaman moderat (islam wasatiah) adalah memfungsikan Ma'had al-Jami'ah secara efektif. PTKI diharapkan memiliki asrama mahasiswa yang difungsikan untuk Ma'had Al-Jami'ah sebagai sarana

untuk mendesiminasi dan memperkuat wawasan dan pengetahuan keislaman yang baik. Jika tidak memiliki asrama, PTKI dapat berkolaborasi dengan pondok pesantren di sekitar kampus PTKI untuk membekali pengetahuan keislaman tersebut. Jika ternyata tidak ada asrama dan pesantren, maka PTKI dapat bersinergi dengan pengelola kontrakan di sekitar kampus yang didesain untuk peningkatan keislaman tersebut.

F. Percepatan Pengembangan Mutu PTKI

Kemenag saat ini tengah konsentrasi terhadap Program Percepatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menjadi Perguruan Tinggi Unggulan. Program ini diinisiasi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis).²³³ PTKI baik negeri maupun swasta harus bisa bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Prasyarat menjadi PTKI unggul di antaranya memiliki reputasi akademik, reputasi lulusan, rasio fakultas, prodi dan mahasiswanya, serta dibukanya program internasional. Mewujudkan hal tersebut perlu adanya percepatan program Mutu PTKI.

²³³ Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, pada Rapat Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Kelembagaan Islam (Diktis), Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Bandar Lampung, Kamis (3/6/2021).



Direktur Diktis, Direktorat Jenderal Pendis Kemenag, Prof. Dr. H. Suyitno, MA.

Beberapa program percepatan pengembangan mutu PTKI unggulan, setidaknya ada tujuh program (Septa Program Pengakselerasian & Percepatan) PTKI Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan.

Pertama, Redesain Kurikulum PTKI. Hal ini perlu dilaksanakan, karena kurikulum PTKI yang digunakan selama ini berbasis kompetensi. Saat ini harus melakukan sebuah redesign untuk melihat apakah profil lulusan PTKI sudah faktual atau hanya ideal. Salah satu langkah yang sedang dirumuskan untuk redesign kurikulum adalah dengan konsep kampus merdeka dan merdeka belajar. Yaitu, dengan memperbanyak waktu mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di luar kampus atau di luar prodi.

Kedua. Penguatan Rumah Moderasi Beragama (RMB). Rumah Moderasi Beragama lahir dari Kementrian Agama dan sudah saatnya dijadikan sebagai

lembaga tersendiri. Selanjutnya RMB juga harus ada di seluruh PTKI. Rumah Moderasi Beragama bisa diisi dengan bagian-bagian penting pendukungnya. Keberadaan Rumah Moderasi Beragama juga sebagai lembaga yang diintegrasikan dengan LP2M secara structural dengan PTKI.

Ketiga. Pembentukan dan penyelenggaraan Universitas Islam Terbuka (UIT). UIT merupakan konsep baru yang sedang dirumuskan ini berkaca pada Universitas Terbuka (UT) yang sudah. Konsep pembelajaran pada UIT menggunakan sistem daring yang sedang diterapkan pada pembelajaran PTKI di masa pandemi. Konsep ini, rintisannya akan diterapkan pada prodi PTKIN tertentu sebagai uji coba.

Keempat. Program *Double Degree* PTKI. Program ini bersifat opsional di PTKI tertentu, karena masih banyak persiapan yang harus dimatangkan. Program ini dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Eksternal dibagi dua, yaitu PTKI dengan Perguruan Tinggi Umum (PTU), dan PTKI dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri.

Kelima. Percepatan akreditasi dengan pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Saat ini akreditasi sudah berubah dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) khususnya akreditasi Program Studi (Prodi). Sedangkan LAM Keagamaan nantinya akan mengakreditasi semua Prodi Keagamaan yang saat ini sedang dibentuk oleh Kementerian Agama.

Keenam. Adalah Pola Modeling Pembinaan Kemahasiswaan dan penyusunan Roadmap peningkatan PTKI. Saat ini konsepnya sedang dibahas dan rumuskan dengan pihak Sub Direktorat yang menangani kemahasiswaan dan kelembagaan.

G. Tantangan PTKI di Era Revolusi Industri 4.0

Bahwa pendidikan Islam itu merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan Indonesia dan menjadi elemen penting dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Ini sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Posisi pendidikan Islam kemudian semakin diakui kontribusinya dengan terbitnya PP No 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. Dengan adanya PP No. 46 tahun 2019 ini, penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan Islam semakin kuat dalam menyelenggarakan kebijakan yang strategis terkait peningkatan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Merespon hal tersebut Kementerian Agama dalam Renstra 2020-2024 menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang agama dan pendidikan Islam dalam lima tahun ke depan dengan merujuk pada kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Hal Ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia dengan fondasi internalisasi nilai-nilai agama yang moderat, inklusif, toleran, rukun, tanpa kekerasan, serta menghargai keragaman dan perbedaan.

Kampus PTKI berbasis pondok pesantren, maka nilai-nilai kepesantrenan yang bercorak inklusif, toleran, dan menjunjung tinggi keragaman merupakan aspek penting. PTKI menjamin bahwa tatakelola perguruan tinggi yang diterapkan mampu menjamin terselenggaranya tatakelola yang baik (*good university governance*), yakni tatakelola perguruan tinggi yang mendukung terwujudnya proses pendidikan yang bermakna untuk mendukung produktivitas dosen dan mahasiswa, serta mendukung lahirnya keunggulan distingtif di tingkat nasional atau internasional.

Kementerian Agama memandang ada dua isu utama yang sangat strategis untuk dikerjasamakan dengan masyarakat. *Pertama*, Kementerian Agama menilai penting menjalin kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan capaian tahun 2020-2024, yaitu peningkatan daya saing tingkat nasional PTKI, terutama pada PTKIS. Karena peningkatan daya saing pada PTKIS akan berpengaruh sangat signifikan pada reputasi PTKI secara umum, sebab jumlah PTKIS jauh lebih banyak dibanding PTKIN.

Oleh karenanya, pelibatan masyarakat dalam program-program peningkatan pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud sangat relevan dan penting kaitannya untuk meningkatkan pemerataan mutu tata kelola PTKI. Di samping itu, diharapkan melalui pendekatan ini, *grand design* peningkatan pendidikan keagamaan Islam yang diterapkan oleh Direktorat PTKI dapat berjalan sinergis dengan program-program yang digagas oleh masyarakat.

Sebagaimana diketahui, dewasa ini, PTKI menghadapi tantangan cukup berat terkait merebaknya paham keagamaan yang eksklusif. Dalam beberapa kasus, sikap intoleran tersebut telah menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, kehidupan harmonis yang selama ini dipupuk dan dirawat oleh para pendahulu secara perlahan namun pasti terus tergerus diganti dengan sikap permusuhan dan saling curiga antar masyarakat. Sementara itu Nizar Ali mengungkapkan hal itu bahwa:

"Berbagai fenomena juga telah mengkonfirmasi bahwa dampak dari eksklusifitas dalam memahami ajaran agama ini juga telah merongrong nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara antar anak bangsa Indonesia. Seruan untuk mendirikan negara berdasarkan agama tertentu juga sudah menjadi pandangan umum, dan disuarakan oleh individu dari berbagai lintas latar belakang profesi. Hal ini sebagai bukti bahwa kelompok ini telah berhasil melakukan infiltrasi di berbagai bidang."²³⁴

Bahkan, lanjut Nizar Ali juga memaparkan, berbagai fakta mutakhir juga mengkonfirmasi, diantaranya semakin intensnya gerakan ekstremisme di Timur Tengah, semakin meningkatnya perilaku intoleransi di tengah-tengah masyarakat, serta semakin massifnya penyebaran paham radikalisme keagamaan melalui berbagai media.

Dunia sudah jauh berubah diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat. Berbagai penemuan dan kemajuan telah terjadi di sana sini yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kita kenal dengan Revolusi Industri 4.0. Penemuan-penemuan

²³⁴Adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

tersebut merupakan buah dari kolaborasi banyak ilmuwan dan para penemu di level dunia. Untuk itu Semangat kolaborasi menjadi kekuatan penting di era globalisasi. Beberapa perubahan fundamental tersebut diantaranya

Pertama, berubahnya pola hidup manusia (*The Changing Nature of Life*). Revolusi Industri 4.0 telah mendorong terjadinya perubahan secara massif dan ekstrim (disruptif) terhadap pola hidup sebagian banyak orang. Hampir tidak ada lagi aktivitas keseharian manusia yang tidak dibantu oleh teknologi. Perubahan perilaku hidup ini mendorong berubahnya ekspektasi masyarakat terhadap tatakelola lembaga pendidikan.

Kedua, adalah berubahnya ekosistem kerja (*The Changing Nature of Work*). Tidak hanya cara hidup, disrupsi pun berdampak pada ekosistem dunia kerja yang pada akhirnya mendorong hadirnya berbagai profesi baru dan menghilangkan profesi-profesi lama yang tidak lagi relevan. Ini terlihat dengan lahirnya berbagai aneka pekerjaan baru yang menggunakan basis teknologi. Kehadiran berbagai platform *marketplace* seperti Bukalapak, Shopee, OLX, bahkan Go-Jek dan Grab adalah contoh nyata dari perubahan di sektor ekonomi yang diakibatkan oleh Revolusi Industri 4.0.

Ketiga, adalah berubahnya ekosistem pendidikan (*The Changing Nature of Education*). Tanpa pandemi Covid-19 sekalipun, dunia pendidikan akan bergerak ke arah integrasi teknologi dalam proses pembelajaran/ pendidikan. Kehadiran Covid-19 hanya mempercepat ke arah digitalisasi dan otomisasi proses pendidikan. Teknologi tidak hanya menjadi *tools* atau media untuk

menyampaikan bahan ajar, tapi justru teknologi menjadi sumber belajar itu sendiri. Ini yang disebut dengan *internet of things* (IoT) dalam konteks dunia pendidikan. Teknologi telah mampu mengubah kehidupan bermasyarakat secara fundamental. Dengan demikian, peranan teknologi menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang adaptif dengan Revolusi Industri 4.0. Dengan peran pilar teknologi ini, perguruan tinggi akan menjelma sebagai *smart campus* yang dapat menjamin mahasiswa terkoneksi dengan lingkungan dimana mereka tumbuh dan berkembang.

H. Pengembangan Kerangka Riset di PTKI

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dalam kurun waktu dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang pesat, baik dari sisi akreditasi maupun publikasi riset dan jurnal internasional.²³⁵ Ada percepatan-percepatan yang dilakukan (PTKIN), ini patut disyukuri dan harus didorong supaya terus meningkatkan akreditasinya. Kualitas lulusan PTKIN yang dapat bekerja sangat baik, dan tidak kalah dari kualitas lulusan perguruan tinggi umum lain. Kendati

²³⁵ Dalam Rapat Kerja (Raker) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) yang dihadiri sebanyak 57 peserta yang terdiri dari para Rektor PTKIN dan 23 Kakanwil Kemenag, Tatang mengakui sebagian besar PTKIN sudah berhasil meningkatkan mutu penelitian, kualitas publikasi, dan percepatan akreditasi kampus. Sejauh ini, menurutnya kampus PTKI yang memiliki produktifitas riset yang baik diantaranya UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN Riau, UIN Yogyakarta, UIN Malang dan UIN Makassar

demikian lulusan pendidikan tinggi agama belum sepenuhnya ideal, bahkan pendapatan yang dicapai terkadang masih menempati posisi rendah dibandingkan bidang ilmu sains.

Hal terpenting yang harus dilakukan yakni tata kelola PTKI. Tata kelola yang baik dan penjaminan mutu menjadi sangat penting untuk dihubungkan dengan pemangku kepentingan eksternal. Evaluasi internal PTKI dilakukan untuk mengukur tingkat keterserapan dan kesejahteraan lulusan lalu kemudian didorong lulusannya tidak hanya terbatas pada dunia kerja keislaman saja, tetapi harus adaptif pada kebutuhan industri 4,0 dan era digital. Dari segi pendanaan Kemenag perlu meninjau kembali aspek skema kompetisi bagi PTKI serta pengadaan afirmasi bagi daerah-daerah yang minim akses. Skema ini semata-mata sebagai bentuk rasionalisasi peningkatan layanan pendidikan. Selain itu juga mendorong PTKI perlu melakukan koordinasi bersama untuk fokus mengembangkan kerangka besar risetnya, seperti riset keagamaan yang selama ini dilakukan. Kemudian mampu mengidentifikasi potensi-potensi kontribusi riset PTKI ini untuk bidang keilmuan umum dan terapan.

I. Implementasi Kurikulum MBKM

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang merupakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Melalui program MBKM ini, para mahasiswa diberi kesempatan untuk mendapatkan kompetensi tambahan di luar capaian

pembelajaran yang ditetapkan Prodi sebagai bekal untuk masuk di dunia kerja setelah lulus sarjana / sarjana terapan²³⁶.

Di samping itu, pengalaman yang diperoleh akan memperkuat kesiapan lulusan dalam beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja, kehidupan di masyarakat dan menumbuhkan kebiasaan belajar sepanjang hayat. Implementasi program MBKM, pembelajaran bauran, dan/atau pembelajaran daring menjadi salah satu strategi pembelajaran yang efektif untuk memfasilitasi mahasiswa pada saat mengikuti proses pembelajaran diluar Prodi dan diluar Perguruan Tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh program studi S1 mendesain ulang kurikulum yang ada di program studinya masing-masing menjadi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dalam implementasi kurikulum MBKM tersebut, mahasiswa diberikan kesempatan untuk berkuliah di luar program studinya dalam kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, dan aktivitasnya akan dilakukan semester ganjil (semester 5 & 7). Perkuliahan di luar program studi dalam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki bobot sekitar 20 SKS dan dilaksanakan dalam 1 semester / 2 semester, bobot tersebut tergantung dari kurikulum masing-masing program studi.

Pada semester genap (semester 6), mahasiswa akan diberikan program perkuliahan di luar Perguruan Tinggi. Universitas memilih 4 dari 8 bentuk kegiatan perkuliahan yang sudah ditentukan oleh mendikbud. 4 bentuk kegiatan perkuliahan tersebut adalah program magang / praktik kerja, asistensi mengajar di Satuan Pendidikan, kegiatan wirausaha, dan studi/proyek independen. Bentuk

²³⁶ Panduan Impelentasi Kurikulum MBKM <https://www.kemdikbud.go.id/>

perkuliahan yang sudah ditentukan akan dikembangkan nantinya di masa mendatang bagi para mahasiswa.

J. Branchmarking Model Pengembangan PTKI dan PTU

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Berdasarkan data yang diperoleh baik melalui wawancara²³⁷ maupun referensi yang ada, bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Yogyakarta) adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri pertama di Indonesia yang didirikan pada 26 September 1951. Nama UIN Sunan Kalijaga diambil dari salah satu tokoh dari Walisongo penyebar agama Islam di Jawa. UIN Yogyakarta berdiri di atas area seluas 86 Ha dengan jumlah mahasiswa kl 18.000 mahasiswa berada di Provinsi [Daerah Istimewa Yogyakarta](#), dan saat ini dipimpin oleh Rektor Prof. Dr.Phil. Al Makin., S.Ag., MA

a. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah “Unggul dan Terkemuka dalam Pemaduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban”.

Sedangkan Misinya adalah:

- 1) Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran.
- 2) Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.

²³⁷ Wawancara dengan Prof. Dr. Suwandi, M. Ag Wakil Rektor I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal Rabu 15 Juni 2022 di Yogyakarta.

- 3) Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani.
- 4) Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Sedangkan tujuan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah:

- 1) Menghasilkan sarjana yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional yang integratif-interkonektif.
- 2) Menghasilkan sarjana yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan.
- 3) Menghasilkan sarjana yang menghargai dan menjiwai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan.
- 4) Menjadikan Universitas sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian yang integratif-interkonektif.
- 5) Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.

b. Distingsi Keilmuan Integrasi Interkoneksi

Distingsi keilmuan UIN Sunan Kalijaga adalah Integrasi Interkoneksi yang didasari oleh Filsafat Islam sebagai metoda berpikir bagi paradigma integrative interkonektif. Paradigm integratif dan interkonektif adalah fundamental dalam merumuskan kajian-kajian keislaman, integrasi dan interkoneksi adalah

mengintegrasikan dan menginterkoneksikan materi kajian dari studi studi keislaman dalam kajian ilmu-ilmu umum atau sebaliknya, seperti mengintegrasikan materi kajian kajian Islam, terutama Alquran dan Alhadits diintegrasikan dan diinterkoneksikan dengan bidang kajian-kajian ilmu-ilmu umum.

Dalam pandangan Islam, sebenarnya tidak mengenal dualisme pendidikan dan dikhotomi keilmuan. Pendidikan harus dilakukan secara integratif, sehingga keragaman ilmu bisa saling menyapa dan menyatu dalam memecahkan persoalan kemanusiaan yang makin kompleks. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa masalah masalah kemanusiaan, seperti kesejahteraan, kemiskinan, kebahagiaan, keamanan dan perdamaian, tidaklah bisa dipecahkan dengan pendekatan tunggal keilmuan semata mata. Karena itu, pendekatan integratif dan interkoneksi adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan yang semakin global ini.

c. Rencana Induk Pengembangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2039)

Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta²³⁸ adalah dokumen perencanaan jangka panjang UIN Sunan Kalijaga dalam rangka mencapai cita-citanya sebagai institusi pendidikan selama kurung waktu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2039. RIP ini dibagi ke dalam lima tahap. Tahap I (2015-2019) adalah tahap persiapan dimana UIN

²³⁸ www.uinsukayogyakarta.edu.com

Sunan Kalijaga ini mempersiapkan dirinya untuk menjadi World Class University dalam bidang Islamic Studies (Kajian Keislaman). Tahap II (2020-2024) yang disebut dengan Tahap Pemantapan adalah tahapan pengembangan di mana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2024 harus sudah mendapat pengakuan internasional, yakni menjadi World Class University dalam bidang Islamic Studies. Pada Tahap III atau Tahap Perkembangan (2025-2029) UIN Sunan Kalijaga mempersiapkan diri menjadi Research University yang tidak hanya diakui sebagai World Class University dalam bidang Islamic Studies, tetapi juga dalam bidang Social Sciences (Ilmu-ilmu Sosial)/Humanities (Humaniora) dan Experiential/Natural Sciences (Ilmu-ilmu Kealaman).

UIN Sunan Kalijaga direncanakan menjadi Research University ini pada Tahap IV atau Tahap Pematangan (2030-2034). Pada Tahap V atau Tahap Kedewasaan (2035-2039) UIN Sunan Kalijaga akan menjadi Research and Entrepreneurship University. Dalam setiap tahapan tersebut di atas UIN Sunan Kalijaga memperhatikan perkembangan-perkembangan dalam bidang-bidang berikut ini: (1) tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu; (2) pengelolaan mahasiswa dan alumni; (3) sumber daya manusia; (4) kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik; (5) keuangan dan pembiayaan; (6) sarana dan prasarana; (7) sistem informasi; (8) penelitian; (9) pengabdian pada masyarakat; dan (10) kerjasama. RIP untuk sepuluh bidang tersebut di atas dirinci pada bagian-bagian berikut ini.

RIP UIN Sunan Kalijaga 2015-2039 VISI Unggul dan Terkemuka dalam Pemanduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban MISI 1.

Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran. 2. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani. 4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

TUJUAN 1. Menghasilkan sarjana yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional yang integratif-interkonektif. 2. Menghasilkan sarjana yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan. 3. Menghasilkan sarjana yang menghargai dan menjiwai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan. 4. Menjadikan Universitas sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian yang integratif-interkonektif. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.

TARGET Tahap I (2015-2019): Menuju universitas world class university dalam Islamic Studies Tahap II (2020-2024): Menjadi universitas world class university dalam Islamic Studies Tahap III (2025-2029): Menuju Research University dalam Islamic Studies, Social Sciences, dan Natural/Applied Sciences Tahap IV (2030-2034): Menjadi Research University dalam Islamic Studies, Social Sciences, dan Natural/Applied Sciences Tahap V (2035-2039): Menjadi Research and Entrepreneurship University.

2. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Berdasarkan data yang diperoleh, baik melalui wawancara²³⁹ maupun dokumen akademik pada Universitas Negeri Islam (UIN) Walisongo Semarang merupakan PTKI periode pertama peralihan dari IAIN Walisongo yang didirikan pada 6 April 1970 dan beralih status ke UIN (Universitas Islam Negeri) pada tahun 2002 bersamaan dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Universitas Negeri Islam (UIN) Walisongo Semarang beralamat di Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185 dan saat ini dipimpin oleh [Rektor](#) Prof. Dr. H. [Imam Taufiq](#), M.Ag. UIN Walisongo Semarang ini menawarkan studi berbasis Islam yang beragam. UIN Walisongo Semarang Universitas saat ini akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Berdasarkan data dokumen yang ada²⁴⁰, fakultas dan jurusan di UIN Semarang diantaranya :

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas: (misi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu dakwah dan komunikasi berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan yang unggul, interdisipliner, kompetitif dan berakhlak al-karimah. Prodi: Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Manajemen Dakwah Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, Manajemen haji dan Umrah.

²³⁹ Wawancara dengan kepala Lembaga Penjaminan Mutu UIN Walisongo Semarang **Dr. A.Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag.** Pada Selasa 14 Juni 2022 di Semarang.

²⁴⁰ Data Dokumen lpm UIN Walisongo Semarang <https://lpm.walisongo.ac.id/>

Fakultas Syariah dan Hukum (Misi melakukan kajian hukum Islam, terutama di bidang perdata Islam dan sekaligus membukumkannya ke dalam persoalan-persoalan hukum yang semakin berkembang di tengah masyarakat, dengan senantiasa memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga dapat melahirkan formulasi hukum Islam yang sosiologis dan kontekstual. Prodi: Hukum Keluarga Islam, Hukum Pidana Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Ilmu Falak, Ilmu Hukum,

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Fakultas ini memiliki misi menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bidang pendidikan berbasis kesatuan ilmu untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berakhlak mulia. Prodi: Pendidikan Agama Islam Pendidikan Bahasa Arab Manajemen Pendidikan Islam Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Guru Madrasan Ibtidaiyah Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Misi fakultas ini yakni menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu pokok keislaman berbasis kesatuan ilmu serta meningkatkan riset yang kontributif bagi pengembangan ilmu dan penyelesaian masalah sosial keagamaan. Prodi: Aqidah dan Filsafat Islam Ilmu Al-Quran dan Tafsir Studi Agama Agama Tasawuh dan Psikoterapi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas ini memiliki misi menyelenggarakan pendidikan ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Serta menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam teoritik dan aplikatif yang mampu

menjawab problematika masyarakat. Prodi: Perbankan Syariah Ekonomi Syariah/
Ekonomi Islam Akuntansi Syariah Manajemen

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Misi fakultas ini yakni menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu sosial dan politik berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan profesional dan berakhlak al-karimah. Serta meningkatkan kualitas penelitian dalam ilmu sosial dan politik untuk kepentingan keilmuan, keislaman dan kemasyarakatan. Prodi: Ilmu Politik Sosiologi

Fakultas Psikologi dan Kesehatan Fakultas ini memiliki misi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang psikologi dan kesehatan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berakhlak al-karimah. Kemudian juga meningkatkan kualitas penelitian dalam bidang psikologi dan kesehatan untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat. Prodi: Psikologi Gizi

Fakultas Sains dan Teknologi Misi fakultas ini yakni menyelenggarakan pendidikan sains dan teknologi berbasis kesatuan ilmu pengetahuan. Serta mengembangkan sains dan teknologi melalui kajian dan riset yang inovatif secara berkelanjutan. Prodi: Biologi Fisika Kimia Matematika Pendidikan Matematika Pendidikan Fisika Pendidikan Kimia Pendidikan Biologi Teknologi Informasi:

Pasca Sarjana Fakultas ini memiliki misi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran S2 dan S3 berbasis unity of sciences. Dan meningkatkan kualitas penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang humanis. Prodi: Ilmu Agama Islam (S2) Ilmu Falak (S2) Ilmu Al-Quran dan

Tafsir (S2) Ekonomi Syariah (S2) Pendidikan Agama Islam (S2) Manajemen Pendidikan Islam (S2) Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2) Studi Islam (S3).

Dalam mengembangkan paradigma kesatuan ilmunya (*Unity of Science*), UIN Walisongo memegang prinsip-prinsip paradigma²⁴¹ sebagai berikut :

1. Integrasi. Integrasi berarti menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan dua hal atau lebih menjadi satu. Prinsip meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan merupakan satu kesatuan yang bersumber dari Allah yang diperoleh melalui para nabi, eksplorasi akal, maupun eksplorasi alam.
2. Kolaborasi. Kolaborasi adalah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.^[13] Dalam hal ini kolaborasi berarti memadukan nilai universal Islam dengan ilmu pengetahuan modern guna peningkatan kualitas hidup dan peradaban manusia.
3. Dialektika. Prinsip ini meniscayakan dialog yang intens antara ilmu-ilmu yang berakar pada wahyu (*revealed sciences*), ilmu pengetahuan modern (*modern sciences*), dan kerifan lokal (*local wisdom*).
4. Prospektif. Prinsip ini meyakini bahwa *unity of science* akan menghasilkan ilmu-ilmu baru yang lebih humanis dan etis yang bermanfaat bagi pembangunan martabat dan kualitas bangsa serta kelestarian alam.
5. Pluralistik. Prinsip ini meyakini adanya pluralitas realitas dan metode dalam semua aktivitas keilmuan.

²⁴¹ Menuju Unity of Sciences, UIN Walisongo Susun TOT
<https://eprints.walisongo.ac.id/>

Paradigma integrasi “Kesatuan Ilmu” UIN Walisongo ini dapat digambarkan dengan model “Intan Berlian” yang sangat indah dan bernilai tinggi, memancarkan sinar, memiliki sumbu dan sisi yang saling berhubungan satu sama lain. Sumbu paling tengah menggambarkan Allah sebagai sumber nilai, doktrin, dan ilmu pengetahuan. Kemudian sisi-sisinya menggambarkan gugus ilmu yang kesemuanya akan dikembangkan oleh UIN Walisongo. Ada 5 gugus ilmu :

1. Ilmu agama dan Humaniora, yaitu ilmu-ilmu yang muncul saat manusia belajar tentang agama dan diri sendiri, seperti ilmu-ilmu keislaman seni, sejarah, bahasa, dan filsafat.
2. Ilmu-ilmu sosial, yaitu sains sosial yang muncul saat manusia belajar interaksi antar sesamanya, seperti sosiologi, ekonomi, geografi, politik, dan psikologi.
3. Ilmu-ilmu kealaman, yaitu saat manusia belajar fenomena alam, seperti kimia, fisika, antariksa, dan geologi.
4. Ilmu matematika dan sains komputer, yaitu ilmu yang muncul saat manusia mengkuantisasi gejala sosial dan alam, seperti komputer, logika, matematika, dan statistik.
5. Ilmu-ilmu profesi dan terapan, yaitu ilmu-ilmu yang muncul saat manusia menggunakan kombinasi dua atau lebih keilmuan diatas untuk memecakan problem yang dihadapinya, seperti pertanian, manajemen, arsitektur, bisnis, hukum, dan pendidikan.

Setelah tadi dijelaskan bahwa awal ilustrasi model kesatuan integrasi ilmu UIN Walisongo hanya berbentuk lingkaran-lingkaran yang saling berkaitan, kemudian sekarang muncul gagasan bertransformasi bentuk menjadi sebuah intan

berlian. Gambar intan berlian di bawah ini mengilustrasikan paradigma *unity of science* UIN Walisongo Semarang.

Alumni UIN Walisongo dibekali ilmu-ilmu yang menjadi fokus kajian mahasiswa yang kesemuanya disinari dan dibimbing oleh wahyu Allah. Ilmu-ilmu yang dipelajari harus memenuhi tiga syarat : (1). Ilmu itu mengantarkan pengkajinya semakin mengenal Tuhannya. (2). Ilmu itu bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia dan alam. (3). Ilmu itu mampu mendorong berkembangnya ilmu-ilmu baru yang berbasis pada kearifan lokal (*local wisdom*).

Paradigma *unity of science* ini mengandung gagasan untuk mendialogkan antara ilmu-ilmu rasional dan *religious science* dalam sebuah sistem yang padu dan harmonis. Agama dan Ilmu memiliki keterkaitan satu sama lain. Hubungan tersebut adalah konflik (bertentangan), independensi (masing-masing berdiri sendiri), dialog (berkomunikasi) dan integrasi (menyatu dan besinergi). Dalam konteks ini, dialog-integratif ini sesungguhnya yang ingin dikedepankan oleh *unity of science*.

Upaya mengimplementasikan *unity of science*, UIN Walisongo menerapkan tiga model strategi : Humanisasi ilmu-ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi *local wisdom*.

1. Strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman

Humanisasi artinya memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kebencian dari manusia. Strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman mencakup segala upaya untuk memadukan nilai universal Islam dengan ilmu pengetahuan modern guna peningkatan kualitas hidup dan peradaban manusia.

Humanisasi tidak lain membuat ilmu-ilmu agama itu menjadi relevan dengan tantangan zaman pada sekarang. Hal yang dimaksudkan disini adalah bahwa ilmu keislaman itu harus hadir untuk memberikan solusi terhadap segala persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Menganalisa penjelasan diatas, bahwa Islam akan mewarnai perilaku manusia. Namun kenyataannya terutama di negara kita, pemahaman atas Islam sekarang ini masih kurang sehingga Islam belum bisa mewarnai perilakunya. Jika demikian lantas apakah seseorang dianggap muslim hanya bila ia ke masjid, atau ketika berumroh maupun berhaji. Padahal bukan seperti itu. Kita juga harus melihat sisi lainnya, seperti bagaimana cara mencari uangnya? Bagaimana seorang muslim harus bekerja? Bagaimana melakukan segala kegiatannya? Ini kiranya juga menjadi perhatian Islam. Disini peran ilmu agama sangat penting guna menjadikan manusia menjadi lebih baik.

Dalam merealisasikan humanisasi ilmu-ilmu keislaman, UIN Walisongo tentu memiliki langkah-langkah, salah satunya yang mungkin bisa penulis paparkan adalah dengan menghumanisasikan nama-nama fakultas. Seperti halnya di UIN Walisongo ada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Tarbiyah ibarat ilmu langit, kemudian keguruan adalah ilmu bumi. Maka keduanya digabung. Selain itu juga ada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan fakultas-fakultas lainnya. Humanisasi juga dirasa akan selalu menguatkan Iman, Islam dan Ihsan. Apabila muncul sebuah pemikiran baru, maka perlu dilihat dulu apakah menguatkan atau mendangkalkan Iman, Islam dan Ihsan. Kalau ternyata

mendangkalkan ketiganya harus ditolak. Sebaliknya apabila menguatkan ketiganya maka bisa kita gunakan.

Dengan strategi pengembangan paradigma kesatuan ilmu pengetahuan melalui humanisasi ilmu-ilmu keislaman ini diharapkan ilmu-ilmu tersebut dapat membumi dan dekat dengan permasalahan yang sedang dialami manusia. Dengan demikian berarti humanisasi berarti relevansi dari ilmu-ilmu Islam untuk menangani masalah sekarang ini. Dengan ungkapan lain, humanisasi berarti revitalisasi ilmu-ilmu Islam dalam memberikan solusi untuk masalah hidup modern.

2. Spiritualisasi ilmu-ilmu modern

Berasal dari spiritualitas, yang berarti hidup yang didasarkan pada pengaruh dan bimbingan Allah. Disini strategi spiritualisasi bermaksud memberikan pijakan nilai-nilai ketuhanan (*ilahiyah*) dan etika terhadap ilmu-ilmu sekuler untuk memastikan bahwa pada dasarnya semua ilmu berorientasi pada peningkatan kualitas/keberlangsungan hidup manusia dan alam serta bukan penistaan atau perusakan keduanya. Kegagalan paradigma sains Barat, menurut Kuntowijoyo, adalah sifatnya yang sekuler. Paradigma sekuler perlu disuntik dengan etika humanisme. Semangat ilmu yang dikembangkan Barat adalah menghilangkan pesan-pesan spiritual. Hal ini menjadi akar masalah tumpulnya sains modern dalam penyelesaian masalah kemanusiaan dan peradaban.

Cara berpikir Barat yang sangat mementingkan skeptisisme, yaitu cara berpikir yang menekankan pentingnya keraguan akan segala segala sesuatu. Keraguan adalah pergerakan antara dua hal yang saling bertentangan tanpa ada

kecenderungan pada salah satunya. Cara berpikir ini menempatkan segala objek sebagai sesuatu yang layak diragukan kebenarannya. Dalam keadaan demikian, objek dibiarkan bergerak tanpa kepastian. Kepastian yang bersifat sementara dapat dicapai setelah diuji secara rasional dan empiris. Selanjutnya, kepastian sementara itu diragukan lagi.

Maka dengan melihat pernyataan diatas, bahwa ilmu-ilmu modern, khususnya ilmu-ilmu kealaman itu diajari untuk menjadi tidak bertuhan. Semua yang terjadi tidak perlu tangan Tuhan. Hukum-hukum alam bagi mereka mungkin sudah bisa menjelaskan bagaimana alam itu dilahirkan. Tentu pemahaman yang demikian sangat berbeda dengan pemahaman penciptaan yang ada di Ilmuan muslim. Ilmu-ilmu modern harus lebih dipahami lebih mendasar dan kembali pada hikmah suatu ilmu pengetahuan. Wahyu mengajarkan bahwa alam semesta yang seimbang ini adalah hasil ciptaan Yang Maha Pencipta. Wahyu semestinya menjadi sumber utama pengembangan ilmu-ilmu sains modern. Sumber wahyu itu kemudian didialogkan dengan realitas objektif.

3. Revitalisasi *local wisdom*

Revitalisasi adalah proses menumbuhkan kembali daya hidup, ruh, gairah, atau kekuatan. Revitalisasi bukan hanya bermakna isi ulang kekuatan, akan tetapi sebuah proses penambahan daya atau peningkatan kekuatan. Sedangkan *local wisdom* atau suatu kearifan lokal diartikan sebagai suatu kekayaan yang berupa pengetahuan maupun budaya pada masyarakat tertentu yang mengandung kebijakan dan pandangan hidup. Kearifan ini bukan hanya sekedar tradisi. Kearifan lokal merupakan hasil kemampuan seseorang yang menggunakan akal

pikirannya untuk menyikapi sebuah permasalahan yang sedang dihadapi suatu lokal atau tempat.

Sebagai contoh di Indonesia dikenal dengan budaya gotong royong. Ini merupakan *local wisdom*. Hal ini harus dipahami dari konteks mencari jalan agar masyarakat kurang mampu bisa membangun peradaban. Ini merupakan karya akal untuk menyikapi suatu situasi dan berkaitan dengan kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi suatu kondisi. Tidak ada jaminan bahwa kearifan lokal akan tetap kukuh menghadapi globalisasi yang menawarkan gaya hidup pragmatis dan konsumtif.

Secara faktual dapat kita saksikan bagaimana kearifan lokal yang sarat kebijakan dan filosofis hidup nyaris tidak terimplementasikan dalam praktik hidup yang makin pragmatis. Seperti kearifan lokal yang tergambar dalam *hemat pangkal kaya* yang juga semakin dilupakan masyarakat yang menganut falsafah hidup konsumerisme. Penguatan terhadap kearifan lokal ini menjadi sangat penting, dikarenakan tantangan arus modernisasi, liberalisasi dan globalisasi sudah tidak terbendung. Tantangan seperti ini bisa-bisa menjadikan suatu negara jatuh apabila tidak segera disiasati.

Kemudian dapat disimpulkan, bahwa revitalisasi *local wisdom* dalam strategi pengembangan kesatuan ilmu pengetahuan ini merupakan penguatan kembali ajaran-ajaran luhur bangsa. Strategi revitalisasi *local wisdom* sebagaimana kiranya yaitu adalah semua usaha untuk tetap setia pada ajaran luhur budaya lokal dan pengembangannya guna penguatan karakter bangsa. Disini penulis akan memberikan contoh mengenai *local wisdom* yang harus

dihidupkan kembali, misalnya gotong royong. Telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa rinsip gotong royong merupakan implementasi atas penalaran yang mempertimbangkan segala keterbatasan masyarakat lokal. Kemudian ada *molimo*, yaitu larangan untuk tidak melakukan *main, madon, mabuk, madat, maling* (judi, zina, mabuk, narkoba, dan mencuri).

Revitalisasi *local wisdom* dapat dilakukan dengan tiga cara : (1). pengakuan atas eksistensi *local wisdom*. (2). Pemanfaatan *local wisdom* dalam aktivitas ilmiah. (3). Pengembangan dan pelestarian *local wisdom* dalam aktivitas ilmiah.

3. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Berdasarkan data baik yang didapat melalui hasil wawancara²⁴² maupun dokumen online yang ada, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atau biasa disingkat UII, adalah salah satu perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia yang terletak di Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan salah satu kampus swasta yang berlokasi di Yogyakarta yang berdiri pada 8 Juli 1945, satu bulan sebelum proklamasi Republik Indonesia. Pengalaman

²⁴² Wawancara pada tanggal 15 Juni 2022 dengan Dr. Rina Mulyati, S.Psi., M.Si., Kepala Badan Penjaminan Mutu UII Yogyakarta di Yogyakarta.

panjang tersebut, menjadikan UII sebagai pionir pendidikan tinggi di Indonesia yang berlandaskan pada nilai kebangsaan dan keislaman.

Visi UII adalah terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai rahmatan lil 'alamin, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah islamiah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju.

UII dikenal sebagai kampus intelektual dengan akar yang kuat pada kebebasan akademik. Oleh karena itu, keberagaman pemikiran turut mendapatkan ruang apresiasi yang tinggi di kampus ini. Kualitas UII juga tidak perlu dipertanyakan lagi, karena telah terakreditasi Unggul dari BAN-PT, serta mendapatkan tiga bintang dari QS Asian University Rankings 2021. Selain itu, fasilitas berkelas dunia di tengah lingkungan yang asri sebagai Kampus Lestari siap menemani prosesmu dalam menjemput impian. Program kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah islamiyah juga terus aktif dilakukan sebagai perwujudan UII sebagai kampus mondial.

a. Sejarah dan Peran UII

Berdasarkan catatan sejarah yang ada²⁴³ Pasca Indonesia merdeka pada tahun 1945, sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) mulai muncul satu persatu dan sampai sekarang masih berkiprah di dunia pendidikan Tanah Air dan Universitas Islam Indonesia (UII) adalah kampus yang paling tua. Menurut

²⁴³ Data catatan sejarah UII <https://www.uii.ac.id/en/history/>

literatur sejarah, UII yang terletak di Yogyakarta Jawa Tengah ini merupakan kampus tertua di Indonesia. Namun keberadaannya tidak kalah performa dengan PTS yang baru bermunculan setelahnya, bahkan UII sebagai kampus paling tua di Indonesia mampu mengukir prestasi gemilang di dalam dan luar negeri.

Awalnya bernama Sekolah Tinggi Islam yang berdiri pada 8 Juli 1945, lalu kemudian beralih menjadi Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi permintaan masyarakat akan sebuah pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pengetahuan umum dengan ajaran-ajaran Islam.

Di awal-awal pertumbuhan perguruan tinggi, UII hanya memiliki empat fakultas, yaitu Fakultas kultas Pendidikan dan Fakultas Ekonomi yang mulai beroperasi pada Juni 1948. Kemudian setelah selang 7 bulan, perguruan tinggi swasta pertama ini terpaksa ditutup sementara karena adanya agresi militer Belanda pada tahun 1948.

Para mahasiswa dan dosen banyak yang bergabung dengan tentara Indonesia untuk mengusir Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Kemudian setelah selang 7 bulan, perguruan tinggi swasta pertama ini terpaksa ditutup sementara karena adanya agresi militer Belanda pada tahun 1948. Para mahasiswa dan dosen banyak yang bergabung dengan tentara Indonesia untuk mengusir Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali.

Pada awal 1950-an, tidak lama setelah perang mulai reda kembali, UII harus memindahkan aktivitas perkuliahan di beberapa tempat di kota Yogyakarta.

Bahkan sempat pula UII menggunakan Kraton Yogyakarta dan rumah-rumah dosen sebagai ruang kelas belajar mahasiswa karena kondisi perang.

b. Kampus Cabang UII

Setelah sekian lama muncul peraturan pemerintah tentang larangan bagi UII untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di luar kota Yogyakarta, dan UII mematuhi aturan larangan tersebut dengan menutup semua kampus cabang tanpa terkecuali.

UII mengalami perkembangan dalam pembangunan fisik mencakup kantor dan gedung fakultas, dimulai dengan kantor pusat yang berada di Jalan Cik Di Tiro pada awal tahun 1970. Pembangunan gedung ini kemudian diikuti dengan pengembangan tiga kampus lain yang terletak di sejumlah lokasi di kota Yogyakarta.

Selama periode ini, beberapa fakultas di UII juga mulai memperoleh status akreditasi dan juga memprakarsai kolaborasi dengan lembaga nasional maupun internasional, seperti Universitas Gajah Mada, King Abdul Aziz University di Arab Saudi dan The Asia Foundation.

Pada tahun 2011/2012 lalu UII telah memiliki delapan fakultas dengan berbagai jenjang pendidikan. Lima pada program D2, 22 pada Program sarjana, 3 pada Program Profesi, 8 pada Program Magister dan 4 pada Program Doktor.

Prestasi UII

Pada tahun 2013, UII mendapatkan akreditasi institusi A. Pada 2009, UII terpilih sebagai perguruan tinggi dengan nilai menjamin mutu internal terbaik di Indonesia versi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Pada 2012, Universitas swasta tertua ini juga memperoleh peringkat pertama Perguruan Tinggi Swasta di Kopertis Wilayah V dan peringkat ke-2 PTS secara nasional berdasarkan pemeringkatan 4 International College and Universities (4ICU) maupun Webometrics.

Tahun 2011, UII memperoleh dua bintang dari penilaian Quacquarelli Symonds (QS) Stars University Ratings. Pada tahun 2016, Universitas Islam Indonesia meraih tiga bintang dunia pada penilaian QS Stars 2016. Pada 2018, UII Yogyakarta menempati peringkat terbaik klasterisasi perguruan tinggi swasta (PTS) non-vokasi di Indonesia. Perjalanan sejarah panjang UII dalam mewujudkan pendidikan dan dengan pengalaman lebih dari 70 tahun, UII berkomitmen mencetak pemimpin masa depan melalui program pendidikan unggul yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Temukan kesempatan untuk mengembangkan potensi terbaik kamu dengan menjadi bagian dari Universitas Islam Indonesia.

c. Rektor UII dari awal berdiri sampai sekarang

Berikut ini daftar Rektor UII dan masa jabatannya yang turut membangun PTS tertua ini hingga membawa UII secara nasional menempati peringkat ke-29 dan peringkat ke-1 PTS secara nasional²⁴⁴.

- Tahun 1945-1960, Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir
 - Tahun 1960-1963, Prof. Mr. RHA. Kasmat Bahuwangun
 - Tahun 1963-1970, Prof. Dr. dr. M. Sardjito, M.D., M.P.H
 - Tahun 1970-1982, Presidium H.GBPH Prabuningrat
 - Tahun 1982-1989, Prof. Dr. Ace Partadiredja
 - Tahun 1989-1990, Prof. H. Zaini Dahlan, M.A
 - Tahun 1990-1994, Prof. Dr. H. Zanzawi Soejoeti, M.Sc.
 - Tahun 1994-2002, Prof. H. Zaini Dahlan, M.A
 - Tahun 2002-2006, Dr. Ir. Luthfi Hasan, M.S
 - Tahun 2006-2014, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec
 - Tahun 2014-2017, Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc
 - Tahun 2017-2018, Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D
 - Tahun 2018-2022, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
4. Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Berdasarkan data hasil wawancara²⁴⁵ Universitas Negeri Semarang di Provinsi Jawa Tengah sebelumnya adalah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

²⁴⁴ Rektor UII dari Masa ke Masa <https://www.uui.ac.id/profil/sejarah/rektor/>

(IKIP) Semarang yang didirikan pada tahun 1965. Pada tahun 1999 pemerintah (pada saat itu Kementerian Pendidikan Nasional) merubah bentuk kelembagaan IKIP di seluruh Indonesia menjadi Universitas Negeri dengan nama daerah masing-masing. Universitas Negeri Semarang (biasa disingkat UNNES) saat ini dipimpin Rektor Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 31.719 Program Sarjana dan sejumlah 7.000 mahasiswa Pascasarjana.

Visi Universitas Negeri Semarang adalah menjadi Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional. Berwawasan konservasi bermakna cara pandang dan sikap perilaku yang berorientasi pada prinsip konservasi (pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, pelestarian, dan pengembangan) sumber daya alam dan nilai-nilai sosial budaya.

"Universitas Negeri Semarang, kampus Negeri di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu LPTK Unggul dengan semangat konservasi. Visi kampus ini menjadikan Kampus yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional dengan arah menjadi kampus yang mendunia untuk Indonesia. UNNES memberikan pendidikan bela negara menjadi salah satu bekal wajib lulusan disamping membekali lulusan dengan kemampuan berbahasa asing dan keahlian tambahan menjadikan kampus UNNES kampus favorit di Indonesia"

Dari hasil data pemeringkatan tersebut, Universitas Negeri Semarang (UNNES) berhasil menduduki peringkat 8 di Indonesia dan 476 dunia berdasarkan subjek pendidikan.

a. Sejarah Singkat

²⁴⁵ Wawancara dengan Dra. Diah Vitri Widayanti, DEA. Pusat Penjaminan Mutu Eksternal (PPME) Badan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang, pada tanggal 14 Juni 2022.

Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Republik Indonesia untuk melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, olahraga, seni, dan budaya.

Sebelum menjadi universitas, lembaga pendidikan ini dikenal dengan nama IKIP Negeri Semarang yang berdiri pada tahun 1965 di Kota Semarang. Secara kronologis, perkembangan UNNES dapat diuraikan sebagai berikut:

Masa Kolonial Belanda: Cikal Bakal

Cikal bakal UNNES sudah ada sejak masa Pemerintah Kolonial Belanda. Pada saat itu Pemerintah Kolonial Belanda menyelenggarakan sekolah guru di atas SMA. Lembaga-lembaga pendidikan guru yang saat itu didirikan adalah Middelbaar Onderwijzer A Cursus (MO-A) dan Middelbaar Onderwijzer B Cursus (MO-B). Keduanya merupakan lembaga pendidikan yang didirikan untuk menyiapkan guru-guru SMTP dan SMTA.

Setelah Indonesia merdeka, kursus MO-A dan MO-B diselenggarakan di Semarang sampai dengan tahun 1950. Dengan Peraturan Pemerintah No. 41/1950, Kursus MO-A dijadikan Kursus B-I dan Kursus MO-B dijadikan Kursus B-II yang diselenggarakan sampai dengan tahun 1960.

Periode 1960-1963: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Sekolah Tinggi Olahraga (STO).²⁴⁶Tanggal 1 Januari 1961 dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.

²⁴⁶Sejarah singkat UNNES <https://unnes.ac.id/sejarah-singkat>

108487/S tanggal 27 Desember 1960, Kursus B-I dan Kursus B-II diintegrasikan ke dalam Universitas Diponegoro menjadi sebuah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Pada tahun 1963, Jurusan Pendidikan Jasmani yang semula bagian dari Kursus B-II dipisah menjadi Sekolah Tinggi Olahraga (STO) yang berdiri sendiri di bawah Departemen Olahraga. Perubahan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Olahraga No.23 Tahun 1963 tanggal 19 April 1963.

Periode 1963-1965: Institut keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta cabang Semarang. Sementara FKIP Undip menjalankan program-program dalam struktur Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Pengajaran (PD&K) didirikan pula lembaga pendidikan guru yang baru, yaitu Instiut Pendidikan Guru (IPG) dengan fungsi dan tujuan yang sama dengan FKIP.

Untuk menghindari dualisme dalam pendiidkan guru tingkat pendidikan tinggi, Presiden RI dengan keputusan No. 1/1963 tanggal 3 Januari 1963, menyatukan FKIP dan IPG menjadi IKIP yang setara dengan universitas di dalam lingkungan Departemen PTIP. Atas dasar Keputusan Presiden tersebut, Menteri PTIP mendiirkan IKIP melalui Keputusan Menteri PTIP No. 55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963.

Sebagai tindak lanjutnya diterbitkanlah Keputusan Bersama Menteri PTIP dan Menteri PD&K No. 32 tahun 1964, tanggal 4 Mei 1964 tentang penyatuan FKIP dan IPG di Jakarta, Bandung, Malang dan Yogyakarta ke dalam IKIP. Dengan adanya penggabungan FKIP dan IPG menjadi IKIP, sementara FKIP

Undip dan FKIP Undip Cabang Surakarta dinilai belum dapat berdiri sendiri, maka keluarlah Keputusan Menteri PTIP No. 35 tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964 yang menetapkan: FKIP Undip menjadi IKIP Yogyakarta cabang Semarang dan FKIP Undip cabang Surakarta menjadi IKIP Yogyakarta cabang Surakarta.

Periode 1965-1999: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang. IKIP Yogyakarta Cabang Semarang berkembang dengan pesat. Agar perkembangannya lebih terarah pada masa mendatang, Menteri PTIP menerbitkan Keputusan Menteri PTIP No. 40 tahun 1965 tanggal 8 Maret 1965, yang menetapkan IKIP Yogyakarta Cabang Semarang menjadi IKIP Semarang. Pada periode ini IKIP Semarang terdiri dari enam fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, dan Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta, dan Fakultas Keguruan Teknik.

Selanjutnya berdirinya IKIP Semarang itu diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 271 tahun 1965 tanggal 14 September 1965. Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 042/O/77 tanggal 22 Februari 1977 program pendidikan guru olahraga kembali lagi ke dalam induknya dalam wadah baru yang disebut Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan (FKIK).

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 52/1982, IKIP Semarang memiliki enam fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan.

Periode 1999-sekarang²⁴⁷: Universitas Negeri Semarang (UNNES) Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 1999 tentang perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi universitas, IKIP Semarang berganti nama menjadi Universitas Negeri Semarang yang disingkat UNNES. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 278/O/1999 tentang organisasi dan tata kerja Unnes dan No. 255/O/2000 tentang statuta Unnes, nama-nama fakultas di lingkungan UNNES adalah: Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Program Pascasarjana.

Berdasarkan surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1850/D/T/2006, tanggal 6 Juni 2006 dan Surat Keputusan Rektor Unnes nomor 59/O/2006 tanggal 8 Juni 2006, berdirilah Fakultas Ekonomi (Swadaya) yang diresmikan pada tanggal 29 Juni 2006 oleh Rektor UNNES.

Berdasarkan surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 3840/D/T/2007, tanggal 10 Oktober 2007 maka dibentuklah Fakultas Hukum Unnes yang diresmikan oleh Rektor UNNES pada tanggal 14 Desember 2007. Dengan berdirinya dua fakultas baru tersebut, maka saat ini UNNES mengelola delapan fakultas dan satu pascasarjana.

Daftar Program Studi²⁴⁸

Fakultas Ilmu Pendidikan

²⁴⁷ Sejarah Singkat UNNES <https://unnes.ac.id/sejarah-singkat>

²⁴⁸ <https://unnes.ac.id/>

- [Pendidikan Luar Sekolah \(S1\)](#)
- [Kurikulum & Teknologi Pendidikan \(S1\)](#)
- [Pendidikan Guru PAUD \(S1\)](#)
- [Psikologi \(S1\)](#)
- [Pendidikan Guru SD \(S1\)](#)
- [Bimbingan & Konseling \(S1\)](#)

Fakultas Teknik

- Teknik Mesin (S1)
- Teknik Sipil (S1)
- Teknik Elektro (S1)
- [Pendidikan Kesejahteraan Keluarga \(S1\)](#)
- [Teknik Kimia \(S1\)](#)

Fakultas Bahasa & Seni

Bahasa dan Sastra Indonesia

- [Pendidikan Bahasa Indonesia \(S1\)](#)
- [Sastra Indonesia \(S1\)](#)

Bahasa dan Sastra Inggris

- [Pendidikan Bahasa Inggris \(S1\)](#)
- [Sastra Inggris \(S1\)](#)

Bahasa dan Sastra Asing

- [Pendidikan Bahasa Prancis \(S1\)](#)
- [Sastra Prancis \(S1\)](#)
- [Pendidikan Bahasa Arab \(S1\)](#)
- [Pendidikan Bahasa Jepang \(S1\)](#)
- [Pendidikan Bahasa Mandarin \(S1\)](#)

Seni Rupa

- [Pendidikan Seni Rupa \(S1\)](#)
- [Seni Rupa \(S1\)](#)
- [Desain Komunikasi Visual \(D3\)](#)

Seni Drama, Tari dan Musik

- [Pendidikan Seni Musik \(S1\)](#)
- [Pendidikan Seni Tari \(S1\)](#)

Bahasa dan Sastra Jawa

- [Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa \(S1\)](#)
- [Sastra Jawa \(S1\)](#)

Fakultas Ilmu Keolahragaan

- [Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi \(S1\)](#)
- [Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar \(S1\)](#)
- [Pendidikan Kepelatihan Olahraga \(S1\)](#)
- [Ilmu Kesehatan Masyarakat \(S1\)](#)

- [Ilmu Gizi \(S1\)](#)

Fakultas Ilmu Sosial

- [Pendidikan Sejarah \(S1\)](#)
- [Pendidikan Geografi \(S1\)](#)
- [Ilmu Sejarah \(S1\)](#)
- [Geografi \(S1\)](#)
- [Survey dan Pemetaan Wilayah \(D3\)](#)
- [Pendidikan PKn \(S1\)](#)
- [Ilmu Politik \(S1\)](#)
- [Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial \(S1\)](#)
- [Pendidikan Sosiologi & Antropologi \(S1\)](#)

Fakultas Ekonomi

- [Ekonomi Pembangunan \(S1\)](#)
- [Akuntansi \(S1\)](#)
- [Pendidikan Ekonomi \(S1\)](#)
- [Manajemen \(S1\)](#)

Fakultas Matematika dan IPA

Jurusan Matematika

- [Pendidikan Matematika \(S1\)](#)
- [Matematika \(S1\)](#)
- [Statistik Terapan dan Komputasi \(D3\)](#)

Jurusan Fisika

- [Pendidikan Fisika \(S1\)](#)
- [Fisika \(S1\)](#)

Jurusan Kimia

- [Pendidikan Kimia \(S1\)](#)
- [Kimia \(S1\)](#)
- [Farmasi \(S1\)](#)

Jurusan Biologi

- [Pendidikan Biologi \(S1\)](#)
- [Biologi \(S1\)](#)

Jurusan IPA Terpadu

- [IPA Terpadu \(S1\)](#)

Jurusan Ilmu Komputer

- [Ilmu Komputer \(S1\)](#)

Fakultas Hukum

- [Ilmu Hukum \(S1\)](#)

Pascasarjana

Strata 2 (S2)

- Manajemen Pendidikan
- Administrasi Pendidikan
- Bimbingan dan Konseling
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan IPA (Konsentrasi Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi)
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Dasar (Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, PGSD)
- Pendidikan Seni
- Pengembangan Kurikulum (Kurikulum & Teknologi Pembelajaran)
- Penelitian & Evaluasi Pendidikan
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Kejuruan
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Ilmu Ekonomi
- Kesehatan Masyarakat

Strata 3 (S3)

- Manajemen Pendidikan
- Pendidikan Olahraga
- Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia
- Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris
- Bimbingan dan Konseling
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan IPA
- Pendidikan IPS
- Kesehatan Masyarakat

I. Konsentrasi Teoritik

Transformasi IAIN menjadi UIN merupakan langkah maju dalam pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi Keagamaan Islam yang akan membawa perubahan pada semua aspek mulai dari perubahan bentuk,

kurikulum, kegiatan ekstra kurikuler, manajemen, jaringan kerjasama yang akan membawa dampak terhadap mutu lulusan (high output quality). Bahkan pada beberapa sisi lain, UIN mempunyai spesifikasi dan distingsi keilmuan yang tidak dimiliki oleh universitas lain.

Dalam kajian historis transformasi IAIN menjadi UIN merupakan siklus perkembangan PTKIN yang berlangsung dinamis dipengaruhi oleh latar belakang agama, budaya, nilai, dan struktur sosial di masyarakat, dalam rangka menjadikan ilmu agama sebagai media kritis dan transformatif dalam menjawab perkembangan zaman. Data kajian historis menguatkan kesimpulan bahwa proses transformasi didasarkan pada kebutuhan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, kebutuhan pembangunan nasional dan pertumbuhan jumlah mahasiswa.

Pada awalnya proses transformasi IAIN menjadi UIN belum memiliki standar yang baku dan sarat dengan nuansa politis. Kebijakan transformasi lahir dari usulan PTKIN, bukan berdasarkan disain kebijakan yang ditetapkan oleh Dir. Diktis pada Ditjen Pendis Kementerian Agama. Penelitian ini menguatkan teori yang dikemukakan oleh Arwildayanto²⁴⁹ Kebijakan merupakan sebuah aturan resmi yang dibuat suatu organisasi yang harus dipatuhi oleh siapapun yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan kelangsungan hidup suatu lembaga. Kebijakan memiliki pola analisis. Analisis tersebut antara lain²⁵⁰: a). Pendekatan empiris yang berusaha mengatasi segala problematika yang ada; b). Evaluatif yaitu berusaha

²⁴⁹ Arwildayanto. 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan. CV CENDEKIA PRESS, Hlm.6

²⁵⁰ Arwildayanto. 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan. CV CENDEKIA PRESS, Hlm.6

menemukan makna atas objeknya; c). Pendekatan normatif di mana terdapat usaha untuk bertindak yang didasari oleh kebijakan.

Adapun menurut Bakry²⁵¹ menyatakan bahwa kebijakan merupakan keputusan yang dipakai untuk memajemen sisetem keuangan, SDM, dan SDA untuk kepentingan bersama. Jadi berdasarkan kedua pendapat ini kebijakan merupakan usaha sadar dari seorang pemimpin untuk membuat keputusan atau tindakan dengan tujuan untuk menyeimbangkan kestabilan suatu lembaga.

²⁵¹ Bakry, Noor Ms. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 2

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelola lembaga pendidikan tinggi sebaiknya melakukan upaya-upaya pengembangan kelembagaan secara terus menerus sehingga program-program yang ditawarkan senantiasa aktual, sejalan dengan dinamika perkembangan sains dan teknologi serta kebutuhan sumber daya manusia. Mereka dituntut untuk mampu mengembangkan program-program akademik yang relevan dan bermutu tinggi, agar dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia yang relevan dan bermutu, sesuai tuntutan, globalisasi. Tanpa melakukan langkah-langkah pengembangan secara signifikan, relevan, dan berkelanjutan, dapat dipastikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan tinggi akan tenggelam dan terhanyut oleh arus globalisasi, karena tidak akan memiliki kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*) yang cukup untuk dapat merespons berbagai peluang dan tantangan yang muncul dari proses globalisasi.
2. Program pengembangan kapasitas serta performa UIN ke depan, diarahkan pada dua hal yang diklaim sebagai *strategic and priority programs*, meliputi:1) peningkatan kualitas dosen dimana

dirancang dan mempersiapkan agar seluruh dosen tidak ada lagi yang S2 minimal bergelar Doktor dimana mendukung penuh terkait izin belajar dan tugas belajar, serta kedepannya menyiapkan program Doktor di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu; 2) pengembangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu melakukan pengembangan dengan penambahan program Studi baru di beberapa Fakultas dan akan menambah fakultas baru; 3) meningkatkan kualitas dan mutu perguruan tinggi memerhatikan aspek administrasi dan sarana prasarana perguruan tinggi dengan menambah sarana dan prasarana pendidikan; 4) peningkatan mutu dan kualitas dosen dengan melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan lainnya sesuai dengan keilmuan dosen tersebut. Hal tersebut tidak hanya dalam hal pendidikan saja, namun juga berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Dari sekian banyak capaian yang relatif menggembirakan, tetap masih menyisakan beberapa kelemahan dan tantangan yang sifatnya masih krusial berkenaan dengan proses transformasi institusional, terutama pada proyek integrasi dan interkoneksi keilmuan yang masih perlu pelaksanaan yang cepat dan tepat termasuk tantangan dari sisi mutu yang terkoneksi pada akreditasi institusi maupun akreditasi yang direngkuh setiap program studi, yang akan berimplikasi pada keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif lulusan.

B. Saran

1. Dalam pengembangan kapasitas serta performa UIN ke depan, untuk semua pimpinan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Civitas Akademika, Mahasiswa, Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk dapat bersinergi dalam pembangunan dan kemajuan UIN dimasa yang akan datang.
2. Pimpinan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk mengembangkan strategi kebijakan pengembangan kapasitas kelembagaan dengan memanfaatkan peluang sekaligus mengatasi kelemahan serta tantangan yang inheren dalam perjalanan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menggapai visi, misi dan tujuannya, maka ada beberapa kebijakan strategis yang telah dirumuskan dan telah mulai diimplementasikan, baik di bidang organisasi dan kembagaan; ketenagaan; sarana dan prasarana; pembiayaan; pendidikan; perpustakaan; penelitian; pengabdian masyarakat; kemahasiswaan dan alumni; serta kerjasama.

